



Katalog: 9199007
ISSN 1858-0963

LAPORAN
**PEREKONOMIAN
INDONESIA
2024**

Volume 42, 2024



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 9199007
ISSN 1858-0963

LAPORAN
PEREKONOMIAN
INDONESIA
2024

Volume 42, 2024



BADAN PUSAT STATISTIK

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2024

Volume 42, 2024

Katalog: 9199007

ISSN: 1858-0963

Nomor Publikasi: 07300.24017

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xx+194 halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penyunting:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Pembuat Kover:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Sumber Ilustrasi:

Badan Pusat Statistik, www.freepik.com, canva.com

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN
Laporan Perekonomian Indonesia 2024
Volume 42, 2024

Pengarah
Moh Edy Mahmud

Penanggung Jawab
Muchammad Romzi

Penyunting
Indah Budiati

Penulis Naskah dan Pengolah Data

Nurarifin
Valent Gigih Saputri
Alvina Clarissa
Aprilia Ira Pratiwi
Nia Setiyawati
Putri Larasaty
Tika Meilaningsih

Penata Letak
Putri Larasaty
Aprilia Ira Pratiwi
Nurarifin
Valent Gigih Saputri
Alvina Clarissa
Nia Setiyawati
Tika Meilaningsih

Pembuat Kover
Nurarifin

Kontributor Data

- Direktorat Neraca Produksi
- Direktorat Neraca Pengeluaran
 - Direktorat Statistik Harga
 - Direktorat Statistik Distribusi
- Direktorat Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

KATA PENGANTAR

L APORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2024 merupakan publikasi rutin tahunan Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini menyajikan gambaran komprehensif kondisi perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2023 dan awal tahun 2024 yang dicerminkan melalui indikator makro terpilih.

Statistik yang disajikan dalam publikasi Laporan Perkonomian Indonesia 2024 bersumber dari data sekunder yang diproduksi oleh BPS maupun Kementerian/Lembaga lainnya. Laporan ini mengulas dinamika kinerja perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seperti penerimaan dan pengeluaran negara, pertumbuhan ekonomi, moneter dan perbankan, inflasi, perdagangan luar negeri, investasi, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

Akhirnya, penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini. Semoga laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh kalangan. Saran membangun dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, September 2024

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti

DAFTAR ISI
Laporan Perekonominian Indonesia 2024
Volume 42, 2024

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xvii
Penjelasan Umum	xix
BAB 1. EKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL DI TENGAH RISIKO	
KETIDAKPASTIAN	1
Perlambatan Ekonomi Global dan Negara Maju, Negara	
Berkembang Tumbuh Stabil	3
Ekonomi ASEAN Turut Melambat.....	5
Ekonomi Nasional Tumbuh Stabil	6
Peluang dan Tantangan ke Depan di Tengah Risiko	
Ketidakpastian	7
BAB 2. PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL: MENUJU	
PERTUMBUHAN BERKUALITAS DENGAN PEMERATAAN	
PEMBANGUNAN	11
Industri Pengolahan Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi	
Indonesia.....	16
Kuatkan Ekonomi, Tingkatkan Investasi	17
Terkonsentrasi di Jawa, Terpesat di Papua	27
Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Daerah	31
BAB 3. APBN 2024: MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI DI	
TENGAH TANTANGAN EKONOMI GLOBAL	33
APBN 2024 Untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi	35
Kepatuhan Pajak Kunci Besarnya Pendapatan Negara	37
Belanja Negara Berkualitas Untuk Ketahanan Fiskal.....	40
Defisit Anggaran Menurun, Pembiayaan Utang Menurun	45
Pengelolaan Risiko Fiskal Untuk APBN yang Berjalan Optimal.	47
BAB 4. STABILITAS DAN DIGITALISASI: MONETER DALAM ERA BARU ..	49
Perkembangan Uang Beredar	52
Perkembangan Uang Primer dan Komponennya	54
Nilai Tukar Rupiah Berfluktuasi	56
Digitalisasi Sektor Keuangan	61
BAB 5. INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT: MENJAGA DAYA BELI	
MELALUI STABILITAS HARGA	67
Perbandingan Inflasi Indonesia dengan Negara-negara Global	
Dinamika Inflasi Indonesia: Inflasi Barang Bergejolak Tertinggi	70

Makanan, Minuman, dan Tembakau Sebagai Kontributor Utama.....	73
112 Wilayah Inflasi Sudah Sesuai Target	77
Perkembangan Inflasi Provinsi di Indonesia	78
BAB 6. PERDAGANGAN INDONESIA DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR	83
Surplus Neraca Perdagangan Berlanjut	86
Kinerja Ekspor Tertekan Perlambatan Ekonomi Global	87
Eksport Komoditas Unggulan Menurun	90
Penurunan Nilai Ekspor Hampir ke Seluruh Negara Tujuan	93
Kinerja Impor Indonesia Terkontraksi	94
BAB 7. INVESTASI INDONESIA: TREND TERKINI DAN PROSPEK KE DEPAN	101
Potensi dan Dukungan Pemerintah Indonesia Untuk Penguatan Investasi di Dalam Negeri	104
Sektor yang Menjanjikan Bagi Pemodal Dalam Negeri (PMDN) 108	108
Payung Hukum di Indonesia Untuk Menarik Penanaman Modal Asing	115
Sektor-Sektor Incaran Investor Asing	116
Wilayah Incaran Para Investor Asing	120
Perdagangan Pasar Modal Indonesia	127
Karakteristik Investor Pasar Modal di Indonesia	131
Investasi Syariah yang Semakin Diminati oleh Masyarakat Indonesia.....	133
BAB 8. PARIWISATA	137
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Meningkat	141
Penumpang Transportasi Udara Meningkat	144
Tren Okupansi Hotel Meningkat.....	145
Destinasi Super Prioritas dan Pergeseran Tren Sektor Pariwisata.....	150
BAB 9. KETENAGAKERJAAN	153
Angkatan Kerja di Indonesia.....	155
Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi	161
Rendahnya Pendidikan Penduduk yang Bekerja	164
Lapangan Usaha Penyerap Tenaga Kerja Terbesar	165
Upah Pekerja	167
Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia	172
Dominasi Pekerja Informal di Pasar Tenaga Kerja	176
Daftar Pustaka	179
Lampiran	187

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara–Negara Asia Tenggara (persen), 2022–2024 ¹	5
Tabel 1.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia (persen), 2024 dan 2025	8
Tabel 2.1 PDB Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusi PDB (persen) Menurut Lapangan Usaha, 2020–2023.....	13
Tabel 2.2 PDB Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (persen) Menurut Lapangan Usaha, 2020–2023	15
Tabel 2.3 PDB Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusi PDB (persen) Menurut Pengeluaran, 2020–2023.....	17
Tabel 2.4 PDB Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (persen) Menurut Pengeluaran, 2020–2023	19
Tabel 2.5 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Menurut Provinsi (persen), 2021–2023.....	30
Tabel 3.1 Postur APBN 2023 dan 2024 (triliun rupiah)	36
Tabel 3.2 Risiko Fiskal dan Mitigasinya Menurut Kategori Risiko, 2024	48
Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri (triliun rupiah), 2018–2022	47
Tabel 3.4 Realisasi Belanja Negara (triliun rupiah), 2018–2022	48
Tabel 3.5 Realisasi Defisit Anggaran dan Rincian Pembiayaan (triliun rupiah), 2022.....	52
Tabel 4.1 Perkembangan Uang Beredar (miliar rupiah), Januari 2022–Mei 2024	53
Tabel 4.2 Perkembangan Uang Primer (miliar rupiah), Januari 2022–Mei 2024.....	55
Tabel 4.3 Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, Januari 2022–Mei 2024	58
Tabel 4.4 Perkembangan Suku Bunga PUAB dan 7–Day RR Rate, Januari 2022–Mei 2024.....	60
Tabel 5.1 Inflasi dan Andil Inflasi (persen), 2022–2023 (2018=100) dan 2024 (2022=100)	72
Tabel 5.2 Laju dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, 2022–2023 (2018=100).....	74
Tabel 5.3 Laju Inflasi Indonesia Gabungan 150 Kota Menurut Kelompok Pengeluaran (m-to-m), 2022–2023 (2018=100) dan 2024 (2022=100).....	75
Tabel 5.4 Jumlah Wilayah Dengan Rata-rata Inflasi Year-on-Year (Y-o-Y) Menurut Kategori Inflasi, Januari–Juni 2024.....	77

Tabel 5.5	Jumlah Wilayah Dengan Rata-rata Inflasi <i>Month-to-Month</i> (M-to-M) Menurut Kategori Inflasi, Januari–Juni 2024.....	78
Tabel 5.6	Inflasi Provinsi <i>Year-on-Year</i> (2022=100), Januari–Juli 2024	78
Tabel 5.7	Inflasi Provinsi <i>Month-to-Month</i> (2022=100), Januari–Juli 2024	80
Tabel 6.1	Neraca Perdagangan Indonesia (juta US\$), 2021–Triwulan II 2024	86
Tabel 6.2	Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Indonesia (juta US\$), 2021–Triwulan II 2024.....	88
Tabel 6.3	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Komoditas Penting (juta US\$), 2021 – Triwulan II 2024	90
Tabel 6.4	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), 2021 – Triwulan II 2024	92
Tabel 6.5	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (juta US\$), 2021 – Triwulan II 2024.....	93
Tabel 6.6	Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (juta US\$), 2021 – Triwulan II 2024	95
Tabel 6.7	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), 2021 – Triwulan II 2024	97
Tabel 6.8	Nilai Impor Indonesia Menurut Negara Asal (juta US\$), 2021 – Triwulan II 2024	98
Tabel 7.1	Realisasi Investasi PMA (juta US\$) dan PMDN (miliar rupiah), 2018–2024 ¹	105
Tabel 7.2	Target dan Realisasi Nilai Investasi (triliun rupiah), 2018–2023	107
Tabel 7.3	Perkembangan Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor (miliar rupiah), 2021–2023.....	109
Tabel 7.4	Realisasi PMDN Menurut Sektor (miliar rupiah), Triwulan I–II 2024.....	111
Tabel 7.5	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2021–2023	114
Tabel 7.6	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Provinsi (miliar rupiah), Triwulan I –Triwulan II 2024	115
Tabel 7.7	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor (juta US\$), 2021–2023	118
Tabel 7.8	Realisasi PMA Menurut Sektor (juta US\$), Triwulan I-II 2024	120
Tabel 7.9	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2021–2023.....	122
Tabel 7.10	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Provinsi (miliar rupiah), Triwulan I –Triwulan II 2024	123

Tabel 7.11	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Negara Asal (juta US\$), 2021–2023	124
Tabel 7.12	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Negara Asal (juta US\$), Triwulan I –Triwulan II 2024.....	126
Tabel 7.13	Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia, 2017–April 2024.....	130
Tabel 8.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Pintu Masuk Utama (kunjungan), 2021–Juni 2024.....	142
Tabel 8.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan (kunjungan), 2021–2023	143
Tabel 8.3	Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang Menurut Provinsi, 2022–2023	146
Tabel 8.4	Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang Menurut Provinsi (persen), 2019–2023	147
Tabel 9.1	Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2020–2024.....	156
Tabel 9.2	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2020–2024	158
Tabel 9.3	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2020–2024	162
Tabel 9.4	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, 2020–2024 .	164
Tabel 9.5	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2020–2024	166
Tabel 9.6	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2020–2024	168
Tabel 9.7	Rata–Rata UMP (ribu rupiah) dan Pertumbuhan Rata–Rata UMP (persen), 2014–2024.....	169
Tabel 9.8	Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2020–2024.....	171
Tabel 9.9	Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Jenis Kelamin (persen), 2020–2024.....	172
Tabel 9.10	Produktivitas Menurut Provinsi (juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2020–2022	175
Tabel 9.11	Produktivitas Menurut Kategori Lapangan Usaha (juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2020–2022.....	176

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Global (persen), 2016–2025 ¹	3
Gambar 1.2	Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran (persen), 2014–2023	8
Gambar 2.1	Kontribusi Subkomponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (persen), 2023.....	21
Gambar 2.2	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (persen), 2020–2023.....	22
Gambar 2.3	Kontribusi Subkomponen Leisure dan Non Leisure pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (persen), 2020–2023.....	22
Gambar 2.4	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen), 2020–2023	23
Gambar 2.5	Kontribusi Subkomponen Bangunan dan Non Bangunan pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen), 2020–2023	24
Gambar 2.6	Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa (persen), 2020–2023.....	25
Gambar 2.7	Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (persen), 2020–2023.....	25
Gambar 2.8	Kontribusi Subkomponen Konsumsi Kolektif dan Konsumsi Individu pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (persen), 2020–2023.....	26
Gambar 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (persen), 2020–2023.....	27
Gambar 2.10	Kontribusi Ekonomi Menurut Wilayah (persen), 2023	29
Gambar 2.11	Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Daerah, 2023 ..	31
Gambar 3.1	Penerimaan Perpajakan Berdasarkan Sumber Pendapatan (triliun rupiah), 2020–2024.....	38
Gambar 3.2	Kontribusi Penerimaan Perpajakan Menurut Jenis Pajak (triliun rupiah), 2024	39
Gambar 3.3	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPH, 2019–2022	39
Gambar 3.4	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi (triliun rupiah), 2024	41
Gambar 3.5	Anggaran Pendidikan Menurut Komponen (triliun rupiah), 2020–2024	41
Gambar 3.6	Anggaran Kesehatan (triliun rupiah), 2020–2024.....	42
Gambar 3.7	Anggaran Belanja Tematik (triliun rupiah), 2024	43
Gambar 3.8	Anggaran Subsidi (triliun rupiah), 2020–2024	43
Gambar 3.9	Anggaran Transfer ke Daerah Menurut Komponen (triliun rupiah), 2024	44

Gambar 3.10	Defisit dan Pembiayaan Neto (triliun rupiah), 2021–2024	45
Gambar 3.11	Rasio Utang Terhadap PDB, 2021–2024	46
Gambar 4.1	Jumlah Uang Beredar (miliar rupiah), 2019–2024	52
Gambar 4.2	Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, Januari 2023–Mei 2024.....	57
Gambar 4.3	Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui BI-FAST (rupiah), Juni 2023–Juni 2024.....	62
Gambar 4.4	Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui Mesin EDC (rupiah), Januari 2020–April 2024	62
Gambar 4.5	Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui Internet Banking (rupiah), Januari 2020–April 2024	63
Gambar 4.6	Sebaran Merchant QRIS Regional per Juni 2024	64
Gambar 4.7	Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui QRIS (rupiah), Juni 2023–Juni 2024	64
Gambar 4.8	Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui Kartu Debit (rupiah), Januari 2020–April 2024	65
Gambar 4.9	Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui Kartu Kredit (rupiah), Januari 2020–April 2024	65
Gambar 4.10	Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui Uang Elektronik (rupiah), Januari 2020–April 2024	66
Gambar 5.1	Perbandingan Inflasi Beberapa Negara <i>year-on-year</i> (persen), 2016–2023.....	70
Gambar 5.2	Perkembangan Inflasi Umum, Inti, Harga yang Diatur Pemerintah, dan Barang Bergejolak di Indonesia (m-to-m), 2023 (2018=100) dan 2024 (2022=100).....	71
Gambar 6.1	Nilai Ekspor-Import dan Neraca Perdagangan Indonesia Bulanan (juta US\$), Januari 2022–Juni 2024	87
Gambar 6.2	Pertumbuhan Nilai Ekspor Indonesia (persen), 2019–2023	89
Gambar 6.3	Pertumbuhan Nilai Import Indonesia (persen), 2019–2023	94
Gambar 6.4	Perkembangan Nilai Import Migas dan Nonmigas (juta US\$), Januari 2022–Juni 2024	95
Gambar 6.5	Nilai Import Menurut Golongan Penggunaan Barang (juta US\$), 2023	96
Gambar 7.1	Persentase Investor Indonesia Berdasarkan Kelompok Umur, Juli 2024.....	132
Gambar 7.2	Persentase Investor Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin, Juli 2024.....	132
Gambar 7.3	Persentase Investor Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Juli 2024.....	133
Gambar 7.4	Jumlah Investor Syariah di Indonesia (jiwa), Triwulan I 2023–II 2024.....	135

Gambar 7.5	Jumlah Investor Syariah di 5 (Lima) Provinsi dengan Investor Syariah Tertinggi (Jiwa), Triwulan I-II 2024.....	135
Gambar 7.6	Nilai Investasi (rupiah) dan Konstituen (usaham) Syariah Indonesia, Triwulan I 2023–Triwulan II 2024	136
Gambar 8.1	<i>Tourism Direct Gross Domestic Product (TDGDP) dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian Nasional, 2018–2022</i>	139
Gambar 8.2	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata Indonesia (miliar US\$), 2015–2022	140
Gambar 8.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y–o–y), 2020–2024.....	140
Gambar 8.4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (ribu kunjungan), 2020–Juni 2024	141
Gambar 8.5	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dari Beberapa Kebangsaan (ribu kunjungan), 2023–Mei 2024	144
Gambar 8.6	Jumlah Keberangkatan Penumpang Penerbangan Internasional (ribu orang), 2022–Juni 2024	144
Gambar 8.7	Jumlah Keberangkatan Penumpang Penerbangan Domestik (ribu orang), 2022–Juni 2024	145
Gambar 8.8	Rata–Rata Lama Menginap Tamu pada Hotel Bintang Menurut Provinsi (hari), 2023	149
Gambar 8.9	Tren Pariwisata yang akan Terjadi pada Tahun 2023–2024 pada Wisatawan Mancanegara (persen), 2023	151
Gambar 9.1	Perbandingan Pekerja Sektor Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, 2019–2023	178

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dala Negeri (PMDN) Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2021–2023	187
Lampiran 2	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Provinsi (miliar rupiah), Triwulan I –Triwulan II 2024	189
Lampiran 3	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2021–2023	191
Lampiran 4	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Provinsi (miliar rupiah), Triwulan I –Triwulan II 2024.....	193

PENJELASAN UMUM

Simbol yang digunakan dalam publikasi ini:

Data tidak tersedia	:	...
Tidak ada atau nol	:	-
Data dapat diabaikan	:	~0
Tanda desimal	:	,
Data tidak dapat ditampilkan	:	NA
Angka estimasi	:	e
Angka diperbaiki	:	r
Angka sementara	:	*
Angka sangat sementara	:	**
Angka sangat sangat sementara	:	***

Ekonomi Global dan Nasional di Tengah Risiko Ketidakpastian

1



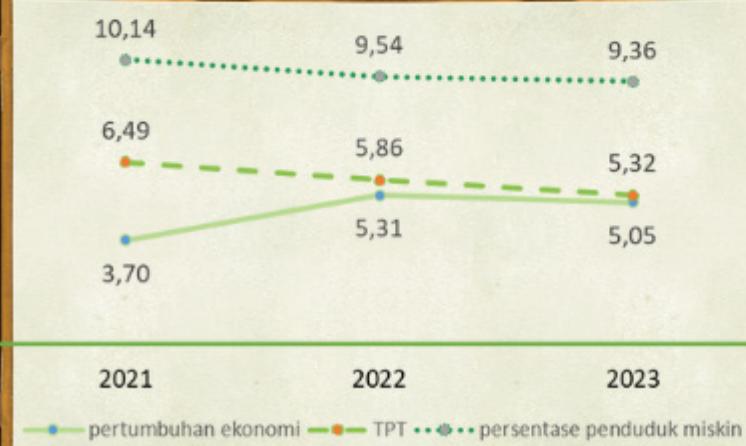
Ekonomi global melambat pada 2023 dan diproyeksikan stagnan pada 2024

3,5 3,2 3,2 %
2022 2023 2024¹

¹ angka proyeksi

Sumber data: IMF

Pertumbuhan ekonomi nasional sedikit melambat, meski pengangguran dan kemiskinan turun



Sumber data:
Badan Pusat Statistik

Ekonomi Indonesia merupakan yang terbesar di ASEAN. Pada 2023, PDB Indonesia memberi andil sepertiga dari total ekonomi ASEAN atau 1,4 persen dari ekonomi global (proyeksi IMF Oktober 2023)

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian global dan nasional. Ekonomi global terus melambat sejak pemulihan pasca pandemi Covid-19. Inflasi yang masih tinggi dan penurunan produktivitas berkontribusi atas perlambatan ekonomi yang terjadi. Hingga semester pertama 2024 ini, negara-negara dunia masih menghadapi ketidakpastian. Tensi geopolitik yang semakin naik ditambah suku bunga kebijakan negara maju yang masih tinggi menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara berkembang. Selain itu, fragmentasi geoekonomi dan perubahan iklim menjadi risiko perekonomian ke depan. Dengan berbagai tantangan yang ada, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan stagnan di level 3,2 persen hingga 2025 nanti di tengah inflasi yang diproyeksikan melambat (IMF 2024).

Indonesia sebagai negara berkembang ikut terdampak kondisi perekonomian global. Ekonomi dan inflasi nasional pada 2023 turut melambat di tengah tekanan dunia. Pada triwulan I dan II 2024 ini, perekonomian tumbuh solid namun dengan tren yang menurun. Sehingga, secara keseluruhan ekonomi diproyeksikan stagnan di level lima persen. Kebijakan dan upaya terintegrasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berdaya saing sebagai fondasi menghadapi risiko dan tantangan di tahun ini.

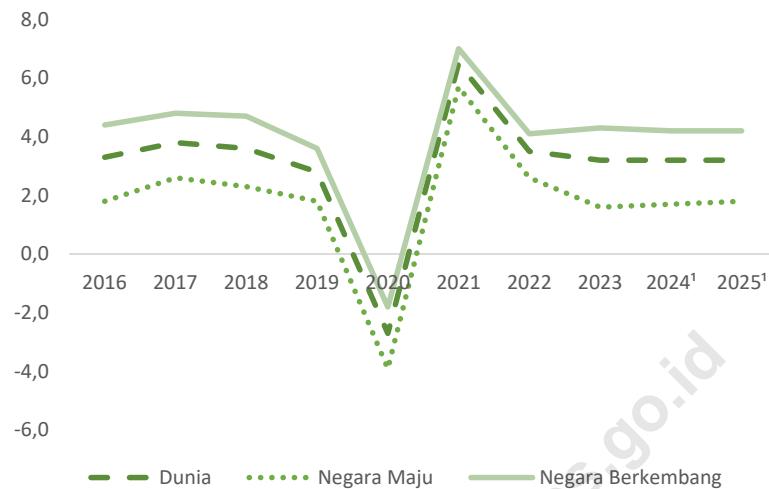
Perlambatan Ekonomi Global dan Negara Maju, Negara Berkembang Tumbuh Stabil

Harga komoditas global yang meningkat menyebabkan inflasi berada pada level tinggi sehingga diberlakukan kebijakan moneter yang ketat untuk menekan laju inflasi. Kebijakan moneter yang diambil salah satunya dengan mempertahankan tingkat suku bunga tinggi sehingga membatasi jumlah uang beredar di pasaran dan dialihkan dalam bentuk simpanan. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, artinya permintaan semakin terbatas dan ekonomi global secara keseluruhan melambat (IMF 2024).

Ekonomi negara maju yang melambat pada 2023 memberi pengaruh dominan pada ekonomi global secara keseluruhan. Negara maju lebih terdampak dengan adanya pengetatan kebijakan moneter. Hal ini ditunjukkan dari capaian pertumbuhan ekonomi negara maju yang melambat pada 2023 dibanding tahun sebelumnya. Di tengah perlambatan ekonomi global dan negara maju, ekonomi di negara berkembang tumbuh stabil pada 2023. Pertumbuhan ditopang pembentukan modal tetap dan tenaga kerja yang tumbuh lebih tinggi (IMF 2024).

Perlambatan ekonomi yang terjadi secara global mencerminkan hambatan-hambatan ekonomi akibat produktivitas yang tidak merata antar sektor sehingga perlu realokasi modal dan tenaga kerja. Kebijakan yang tepat perlu diarahkan untuk mendorong pasar perdagangan yang terbuka,

akses keuangan, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Hal ini untuk mengatasi hambatan kelembagaan dan keuangan sehingga meningkatkan produktivitas (IMF 2024).



Catatan: ¹Angka proyeksi

Sumber: International Monetary Fund, Word Economic Outlook April 2024

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global (persen), 2016–2025

Perekonomian global terus menunjukkan pemulihan dengan tetap tumbuh positif meskipun melambat. Inflasi juga sudah berada dalam level moderat. Aktivitas manufaktur dunia yang tercermin dari *Purchasing Manager's Index* (PMI) Manufaktur global berada dalam level ekspansif sejak awal 2024. Namun, beragam risiko dan ketidakpastian masih perlu diwaspadai. Sepanjang awal 2024, gejolak perekonomian global tampak meningkat. Eskalasi ketegangan geopolitik mengganggu rantai pasok komoditas. Fragmentasi ekonomi menyebabkan negara produsen cenderung melakukan proteksi dan membatasi ekspor sehingga arus perdagangan internasional terhambat. Pembatasan ekonomi yang terjadi berpotensi meningkatkan harga komoditas global yang memicu inflasi. Inflasi yang tinggi menyebabkan suku bunga ditahan pada level yang masih tinggi. Di samping itu, ketahanan pangan terancam seiring perubahan iklim akibat El Nino. Dengan risiko dan ketidakpastian ini, IMF memproyeksikan perekonomian global stagnan di level 3,2 persen hingga 2025 mendatang (Badan Kebijakan Fiskal 2024).

Ekonomi global diproyeksikan tumbuh stagnan seiring inflasi yang semakin melandai. Inflasi melambat karena harga energi dan barang yang melandai. Ekonomi negara maju diproyeksikan menguat dengan didukung perekonomian Amerika Serikat dan Eropa yang semakin pulih dan tangguh. Sementara negara berkembang diperkirakan sedikit melambat akibat ekonomi tumbuh moderat di Tiongkok, India, dan negara-negara berkembang Eropa. Krisis properti yang terjadi di Tiongkok berimbas pada perekonomian domestik dan keuangan global. Hal ini karena sebagian ekonomi Tiongkok diperoleh

dari sektor properti. Sebagai salah satu pasar ekspor impor internasional, pembatasan ekspor yang diberlakukan Tiongkok dapat mendorong inflasi barang (IMF 2024).

Ekonomi ASEAN Turut Melambat

Ekonomi global yang melambat pada 2023 dibanding tahun sebelumnya juga dialami negara-negara di ASEAN. Sembilan dari 11 negara ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pada 2023 dibanding 2022. Perlambatan ekonomi di Tiongkok yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia berpengaruh terhadap ekonomi regional, termasuk Asia Tenggara. Ekspor-impor yang dibatasi menyebabkan ekonomi negara-negara ASEAN ikut terdampak dan melambat.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Tenggara (persen), 2022–2024

Negara	2022 (1)	2023 (2)	2024 ¹ (3)
Asia Tenggara	5,7	4,1	4,6
- Brunei Darussalam	-1,6	1,4	3,7
- Kamboja	5,2	5,0	5,8
- Indonesia	5,3	5,0	5,0
- Laos	2,5	3,7	4,0
- Malaysia	8,7	3,7	4,5
- Myanmar	2,4	0,8	1,2
- Filipina	7,6	5,6	6,0
- Singapura	3,8	1,1	2,4
- Thailand	2,5	1,9	2,6
- Timor Leste	4,0	1,9	3,4
- Vietnam	8,0	5,0	6,0

Catatan: ¹Angka proyeksi

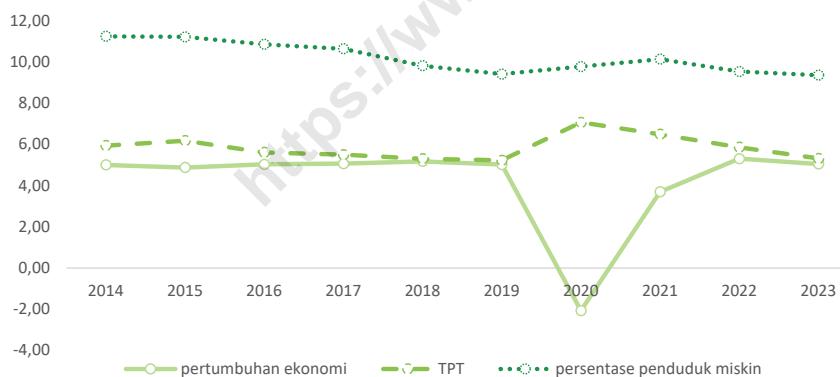
Sumber: *Asian Development Bank, Asian Development Outlook April 2024*

Di tengah stagnasi ekonomi global pada 2024, ekonomi Asia Tenggara diproyeksikan meningkat. Hal ini didukung permintaan domestik yang menguat dan pemulihan sektor pariwisata. Pariwisata mendukung pertumbuhan sektor jasa. Industri juga semakin menguat seiring pelonggaran kebijakan moneter dan pemulihan ekspor (ADB 2024).

Ekonomi Nasional Tumbuh Stabil

Ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah dinamika perekonomian global dengan tumbuh di level lima persen. Meskipun melambat, pertumbuhan yang tercipta diiringi penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran pada Agustus 2023 turun 0,54 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Pada Februari 2024, tingkat pengangguran bahkan sudah di bawah lima persen. Proporsi pekerja formal juga menunjukkan tren yang terus naik. Hal ini menunjukkan pertumbuhan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dengan peningkatan akses ke pekerjaan formal. Pekerjaan formal umumnya memberikan pendapatan dan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi pekerjanya dibanding informal.

Pertumbuhan ekonomi yang memberi dampak dengan penurunan pengangguran dan kemiskinan disebutkan dalam *Trickle Down Effect*. Teori *Trickle Down Effect* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan ketika diiringi penciptaan lapangan kerja (Arestis et al., 2007). Saat terjadi tetesan ke bawah atau aliran pendapatan dari penduduk berpendapatan tinggi ke penduduk berpendapatan rendah maka tercipta peluang kerja dan peluang ekonomi. Hal ini diharapkan mampu menciptakan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengangkat penduduk berpendapatan rendah dari jerat kemiskinan.



Catatan: Persentase penduduk miskin kondisi Maret, Tingkat pengangguran kondisi Agustus
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran (persen), 2014–2023

Ekonomi nasional pada 2023 tumbuh ditopang permintaan domestik yang masih kuat dari konsumsi dan investasi. Konsumsi LNPRT tumbuh hampir sepuluh persen pada 2023 dibanding 2022 dengan adanya peningkatan aktivitas terkait pemilu. Investasi tumbuh positif didorong percepatan penyelesaian proyek infrastruktur dan konstruksi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan

pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ekspor jasa juga meningkat seiring pariwisata yang kembali bangkit (ADB 2024).

Dari sisi lapangan usaha, ekonomi nasional utamanya ditopang sektor Industri, Perdagangan, dan Pertanian. Ketiga sektor ini berkontribusi sekitar 45 persen terhadap total PDB. Saat sebagian besar lapangan usaha pertumbuhannya melambat, Pertambangan dan Konstruksi mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini karena pemerintah sedang gencar melakukan percepatan pembangunan IKN dan hilirisasi industri (ADB 2024). Sektor Transportasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada 2023 seiring kenaikan jumlah wisatawan. Bahkan jumlah penumpang lalu lintas penerbangan internasional naik hingga dua kali lipat dibanding tahun 2022.

Peluang dan Tantangan ke Depan Di Tengah Risiko Ketidakpastian

Dinamika perekonomian global perlu dihadapi dengan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan, serta suportif dalam mendukung program pembangunan. Pada triwulan I dan II 2024, ekonomi nasional masih mampu tumbuh solid di level lima persen. Permintaan domestik yang kuat mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Dari sisi pengeluaran, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah pada triwulan I 2024 (yoY) tumbuh hingga dua digit. Konsumsi LNPRT melonjak didorong peningkatan aktivitas terkait pemilu. Belanja pemerintah mengalami kenaikan akibat belanja pegawai dengan adanya kenaikan gaji ASN dan pemberian THR, serta belanja terkait pemilu. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan utamanya ditopang pertambangan dan akomodasi. Sektor pertambangan tumbuh seiring produksi dan ekspor bijih logam terutama tembaga yang meningkat. Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum tumbuh seiring kenaikan jumlah wisatawan. Secara regional, ekonomi nasional mampu tumbuh dengan baik berkat dorongan pertumbuhan positif dari seluruh provinsi.

Sektor keuangan domestik masih dalam bayang-bayang gejolak pasar keuangan global. Pasar saham mengalami tekanan, tercermin dari IHSG yang melemah hingga triwulan II 2024. Hal ini sebagai dampak ketidakpastian ekonomi dan arah kebijakan moneter negara maju. Pemerintah juga menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang melemah. PMI Manufaktur Indonesia berhasil mempertahankan capaiannya dengan berada di level ekspansif selama 34 bulan berturut-turut hingga Juni 2024. Ini menandakan kepercayaan investor yang masih tangguh terhadap sektor industri pengolahan di Indonesia. Industri pengolahan merupakan kontributor utama perekonomian nasional, sehingga pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor ini khususnya untuk komoditas berbasis ekspor (Badan Kebijakan Fiskal 2024).

Investasi mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I dan II 2024, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini mengindikasikan

kepercayaan investor terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia masih cukup tinggi. Hilirisasi yang semakin meningkat dan stabilitas yang terjaga menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia (Badan Kebijakan Fiskal 2024).

Neraca perdagangan luar negeri masih mencatatkan surplus. Tren surplus hingga Juni 2024 sudah bertahan selama 50 bulan berturut-turut. Namun menjelang akhir triwulan II 2024, trennya mulai melambat. Pariwisata tumbuh kuat seiring mobilitas penduduk yang semakin meningkat. Jumlah kunjungan wisatawan naik signifikan, disertai kenaikan sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, juga transportasi.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di kisaran lima persen pada 2024. Bank Indonesia dan IMF memproyeksikan ada sedikit peningkatan pertumbuhan pada 2025, sementara proyeksi ADB tetap stagnan. Konsumsi swasta, pembangunan infrastruktur, dan investasi yang tetap kuat menjadi penopang pertumbuhan tetap konsisten.

Tabel 1.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia (persen), 2024–2025

Indikator	2024		2025
	(1)	(2)	(3)
Pertumbuhan Ekonomi	BI	4,7-5,5	4,8-5,6
	IMF	5,0	5,1
Inflasi	ADB	5,0	5,0
	IMF	2,6	2,6
	ADB	2,8	2,8

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2023
International Monetary Fund, World Economic Outlook April 2024
Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2024

Dalam periode 2025-2027, pemerintah melalui PMK No. 31 tahun 2024 menetapkan sasaran inflasi berada dalam rentang 2,5 persen dengan deviasi 1 persen. Inflasi dijaga agar tetap stabil dan rendah dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi (Badan Kebijakan Fiskal 2024). Laju inflasi masih terkendali, namun berbagai langkah dan upaya perlu dilakukan sebagai mitigasi risiko gejolak harga ke depan seperti menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan distribusi berjalan lancar. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian dari berbagai gejolak sosial ekonomi di tingkat nasional maupun global juga perlu dioptimalkan.

Indonesia bersiap menghadapi tantangan eksternal dan internal yang akan menekan perekonomian tahun ini. Beberapa diantaranya yaitu penyelenggaraan pemilu 2024 yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan politik sehingga memengaruhi keputusan investasi dan konsumsi masyarakat,

harga pangan dan energi global yang naik memicu inflasi meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat, defisit anggaran pemerintah, dan pelemahan nilai tukar rupiah. Langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain dengan bantuan sosial dan subsidi untuk masyarakat miskin, menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah tetap stabil, serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yaitu revitalisasi mesin konvensional, pelatihan vokasi, pembangunan infrastruktur, Proyek Strategis Nasional (PSN), Mass Rapid Transit (MRT), kereta cepat, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Ibu Kota Nusantara (IKN), dan penguatan ketahanan pangan (Kemenko Perekonomian 2024).

Pasokan tenaga kerja sebagai subyek pembangunan perlu dimaksimalkan. Sayangnya, rata-rata pertumbuhan produktivitas tenaga kerja lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dari tiga aspek, yakni pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial ekonomi. Pertama, meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi seluruh anak, seperti melalui bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, perlu penyesuaian keterampilan dan pendidikan mengikuti perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja agar nantinya mereka yang terjun dalam angkatan kerja mampu terserap. Kedua, meningkatkan akses kesehatan sehingga tercapai kesejahteraan fisik. Fisik yang sehat dan kuat dibutuhkan tenaga kerja untuk mencapai output yang maksimal. Keberadaan akses dan jaminan kesehatan penting sebagai upaya perlindungan pekerja selama menjalankan pekerjaannya. Ketiga, program perlindungan sosial yang tepat guna dan sasaran bagi seluruh masyarakat miskin. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan data masyarakat miskin secara berkala (ADB 2024).

PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL:

Menuju Pertumbuhan Berkualitas dengan Pemerataan Pembangunan

2



Pertumbuhan ekonomi Indonesia **melambat** pada tahun 2023.

Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif.

Kontribusi Ekonomi Menurut Pulau (Persen)



Perekonomian Indonesia terpusat di **Pulau Jawa** dan **Pulau Sumatera**.

Perbandingan antara **PDRB perkapita** tertinggi dan terendah hampir mencapai 20 kali lipatnya.

Ketimpangan ekonomi harus menjadi perhatian serius agar dominasi ekonomi oleh Pulau Jawa dan Sumatera dapat diduplikasi ke wilayah lain sehingga kue pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia

Perekonomian Indonesia menunjukkan performa yang cukup baik di tengah ketidakpastian global. Rapor positif tersebut tidak lepas dari peran beberapa lapangan usaha yang selama ini menjadi andalan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebenarnya struktur perekonomian Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dari nilai tambah perekonomian Indonesia tahun 2023 yang mencapai 20.892,4 triliun rupiah, hampir dua pertiganya disumbang lima lapangan usaha meliputi Industri Pengolahan (18,67 persen); Perdagangan (12,94 persen); Pertanian (12,53 persen); Pertambangan (10,52 persen); dan Konstruksi (9,92 persen). Kekuatan aktivitas produksi menjadi penopang ekonomi nasional. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa *Prompt Manufacturing Index (PMI)* berada pada zona ekspansi, yaitu mencapai 51,20 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 50,06 persen (Bank Indonesia, 2024).

Pada tahun 2023, sebagian besar lapangan usaha perekonomian mengalami peningkatan kontribusi. Utamanya, lapangan usaha yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia meningkat cukup tinggi, kecuali Pertambangan yang menurun (Tabel 2.1). Hal ini menjadi sinyal positif untuk perkembangan kesejahteraan perekonomian Indonesia yang mencatatkan PDB perkapita sebesar 75 juta rupiah, atau meningkat sebesar 4 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2024). Nilai perkapita yang setara dengan US\$ 4.919,7 tersebut mampu menempatkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (Metreau dan Young, Kathryn Elizabeth Eapen 2024). Ini capaian yang cukup baik mengingat mayoritas negara-negara ASEAN tergolong ke dalam negara berpendapatan menengah bawah, kecuali Singapura.

Tabel 2.1 PDB Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusi PDB (persen) Menurut Lapangan Usaha, 2020–2023

Lapangan Usaha	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.115.494,5 (13,7)	2.254.541,3 (13,28)	2.428.900,5 (12,4)	2.617.670 (12,53)
B. Pertambangan dan Penggalian	993.541,9 (6,43)	1.523.650,1 (8,97)	2.393.390,9 (12,22)	2.198.018,1 (10,52)
C. Industri Pengolahan	3.068.041,7 (19,87)	3.266.905,5 (19,24)	3.591.774,7 (18,34)	3.900.061,7 (18,67)
D. Pengadaan Listrik dan Gas	179.741,6 (1,16)	19.0047,2 (1,12)	204.673,7 (1,04)	218.250,9 (1,04)
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.305,4 (0,07)	12.026,4 (0,07)	12.536,9 (0,06)	13.285,3 (0,06)
F. Konstruksi	1.652.659,6 (10,7)	1.771.726,7 (10,44)	1.912.978,7 (9,77)	2.072.384,8 (9,92)

Lanjutan Tabel 2.1

Lapangan Usaha	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.993.988,7 (12,91)	2.199.934,9 (12,96)	2.516.696,7 (12,85)	2.702.445,6 (12,94)
H. Transportasi dan Pergudangan	689.552,4 (4,47)	719.610,3 (4,24)	983.519,5 (5,02)	1.231.241,9 (5,89)
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	394.055 (2,55)	412.233,8 (2,43)	471.938,7 (2,41)	526.263,5 (2,52)
J. Informasi dan Komunikasi	695.963,3 (4,51)	748.802,9 (4,41)	812.737,3 (4,15)	883.637 (4,23)
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	696.072,9 (4,51)	736.187,2 (4,34)	809.370,7 (4,13)	869.167,8 (4,16)
L. Real Estate	453.780,9 (2,94)	468.221,7 (2,76)	488.311,2 (2,49)	505.457,4 (2,42)
M,N. Jasa Perusahaan	294.255,5 (1,91)	301.085,2 (1,77)	341.427,3 (1,74)	38.3091,9 (1,83)
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	585.960,1 (3,79)	586.757 (3,46)	604.938,5 (3,09)	616.444,4 (2,95)
P. Jasa Pendidikan	551.227,1 (3,57)	557.666,7 (3,28)	566.535,9 (2,89)	583.612,4 (2,79)
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	201.480,4 (1,30)	227.235,1 (1,34)	236.171,6 (1,21)	251.998,5 (1,21)
R,S,T,U. Jasa lainnya	302.588,1 (1,96)	312.189 (1,84)	354.181,2 (1,81)	405.191,5 (1,94)
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	14.879.709,1 (96,35)	16.288.821 (95,95)	18.730.084 (95,62)	19.978.222,7 (95,62)
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	563.644,1 (3,65)	687.930,4 (4,05)	85.8005,9 (4,38)	914.154 (4,38)
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	15.443.353,2 (100)	16.976.751,4 (100)	19.588.089,9 (100)	20.892.376,7 (100)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Performa positif perekonomian nasional juga ditunjukkan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05 persen. Meskipun sedikit lebih lambat daripada tahun 2022 yang mencapai 5,31 persen, tetapi seluruh lapangan usaha masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan terbesar diantaranya Transportasi dan Pergudangan (13,96 persen); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,01 persen); Jasa Lainnya (10,52 persen); dan Jasa Perusahaan (8,24 persen). Hal ini didorong oleh peningkatan mobilitas

masyarakat; adanya penyelenggaraan *event* internasional, seperti Piala Dunia U-17 tahun, pertemuan KTT ASEAN, penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, dan persiapan pemilihan umum (Badan Pusat Statistik 2024).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 didorong oleh melambatnya pertumbuhan beberapa lapangan usaha dominan. Lapangan usaha dengan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian namun mengalami perlambatan pertumbuhan diantaranya Pertanian; Industri Pengolahan; dan Perdagangan. Meskipun melambat, hal ini masih menjadi rapor positif mengingat pertumbuhan terjadi justru di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas ekspor unggulan yang terjadi.

Tabel 2.2 PDB Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (persen) Menurut Lapangan Usaha, 2020–2023

Lapangan Usaha	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.378.398,9	1.404.190,9	1.435.853,2	1.454.586,9
	(1,77)	(1,87)	(2,25)	(1,30)
B. Pertambangan dan Penggalian	790.475,2	822.099,5	858.146,6	910.679,4
	(-1,95)	(4,00)	(4,38)	(6,12)
C. Industri Pengolahan	2.209.920,3	2.284.821,7	2.396.603	2.507.799,8
	(-2,93)	(3,39)	(4,89)	(4,64)
D. Pengadaan Listrik dan Gas	108.826,4	114.861,1	122.451,9	128.460,5
	(-2,34)	(5,55)	(6,61)	(4,91)
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.449,3	9.919,3	10.240,1	10.741,4
	(4,94)	(4,97)	(3,23)	(4,90)
F. Konstruksi	1.072.334,8	1.102.517,7	1.124.725,2	1.179.989,3
	(-3,26)	(2,81)	(2,01)	(4,91)
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.385.651,2	1.449.831,4	1.529.951,8	1.604.114
	(-3,79)	(4,63)	(5,53)	(4,85)
H. Transportasi dan Pergudangan	393.418,9	406.169,3	486.873,8	554.854,9
	(-15,05)	(3,24)	(19,87)	(13,96)
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	299.122,4	310.737,6	347.854,6	382.674,5
	(-10,26)	(3,88)	(11,94)	(10,01)
J. Informasi dan Komunikasi	652.062,9	696.506,1	750.319	807.304,6
	(10,61)	(6,82)	(7,73)	(7,59)
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	457.486,5	464.637,7	473.623,8	496.236,8
	(3,25)	(1,56)	(1,93)	(4,77)
L. Real Estate	324.259,4	333.282,9	339.014,9	343.864,8
	(2,32)	(2,78)	(1,72)	(1,43)
M,N. Jasa Perusahaan	195.671,1	197.106,7	214.399	232.076,1
	(-5,44)	(0,73)	(8,77)	(8,24)

Lanjutan Tabel 2.2

Lapangan Usaha	2020 (1)	2021 (2)	2022* (3)	2023** (4)
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	365.446	364.246,6	373.404	378.989,1
	(-0,03)	(-0,33)	(2,51)	(1,50)
P. Jasa Pendidikan	350.272,8	350.660	352.673,5	358.952,1
	(2,61)	(0,11)	(0,57)	(1,78)
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142.227,3	157.085,5	161.397,8	168.926,2
	(11,56)	(10,45)	(2,75)	(4,66)
R,S,T,U. Jasa lainnya	196.608,9	200.773,2	219.778,4	242.891,7
	(-4,10)	(2,12)	(9,47)	(10,52)
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	10.331.632,3	10.669.447,2	11.197.310,6	11.763.142,1
	(-1,59)	(3,27)	(4,95)	(5,05)
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	391.367	450.612,5	512.937,3	538.251,5
	(-13,13)	(15,14)	(13,83)	(4,94)
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	10.722.999,3	11.120.059,7	11.710.247,9	12.301.393,6
	(-2,07)	(3,70)	(5,31)	(5,05)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Industri Pengolahan Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Peran penting Industri Pengolahan pada perekonomian Indonesia juga tercermin dari sumber pertumbuhan yang terjadi. Pada tahun 2023, lapangan usaha tersebut menjadi sumber pertumbuhan tertinggi di antara lapangan usaha lainnya, yaitu mencetak sedikitnya 0,95 persen. Tumbuhnya Industri Pengolahan disebabkan oleh terjadinya dan semakin kuatnya permintaan dalam dan luar negeri (Badan Pusat Statistik 2024). Misalnya, industri logam dasar yang menghadapi peningkatan permintaan dari luar negeri. Peningkatan industri logam juga berdampak pada Industri barang logam yang produksinya mengalami peningkatan. Selain itu, industri alat angkutan mengalami peningkatan karena menghadapi peningkatan permintaan sepeda motor domestik. Terakhir, industri kertas dan barang dari kertas mengalami pertumbuhan karena didorong oleh kenaikan permintaan percetakan dalam rangka menyambut pemilu 2024. Dengan kontribusi yang tercatat sebagai yang paling tinggi pada struktur ekonomi Indonesia, diiringi dengan tingginya laju pertumbuhan menjadikan Industri Pengolahan sebagai mesin pertumbuhan.

Selain Industri Pengolahan yang menorehkan pertumbuhan yang tinggi, terdapat beberapa lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan. Misalnya, Perdagangan membubuhkan sedikitnya 0,63 persen pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan permintaan sepeda motor di dalam negeri serta peningkatan aktivitas perdagangan barang lainnya. Transportasi dan Pergudangan menciptakan 0,58 persen yang didorong signifikan oleh peningkatan jumlah penumpang angkutan udara baik untuk rute domestik

maupun internasional serta peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh dan pembukaan rute baru LRT Jabodetabek serta kereta api cepat Jakarta-Bandung (Badan Pusat Statistik 2024). Informasi dan Komunikasi yang menyumbang 0,49 persen didorong oleh meningkatnya penetrasi internet akibat peningkatan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS). Lapangan usaha lainnya mencatat 2,4 persen pertumbuhan.

Kuatkan Konsumsi, Tingkatkan Investasi

Dari sisi pengeluaran, sebagian besar penyusun PDB Indonesia adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika diakumulasi, keduanya menyumbang sekitar 82,51 persen perekonomian nasional. Meskipun besaran persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahun, Konsumsi Rumah Tangga selalu menyumbang lebih dari separuh perekonomian nasional dengan kontribusi pada tahun 2023 sebesar 53,18 persen. Nilai persentase tersebut meningkat sebesar 1,3 persen poin jika dibandingkan dengan persentase pada tahun 2022 yang hanya tercatat sebesar 51,88 persen.

Tabel 2.3 PDB Harga Berlaku (miliar rupiah) dan Distribusi PDB (persen) Menurut Pengeluaran, 2020–2023

PDB Penggunaan	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	8.899.917,58	9.236.049,11	10.161.733,46	11.109.565,97
	(57,63)	(54,4)	(51,88)	(53,18)
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	3.669.993,47	3.803.853,38	4.173.985,32	4.542.099,25
	(23,76)	(22,41)	(21,31)	(21,74)
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	316.446,6	319.886,33	339.007,72	358.339,99
	(2,05)	(1,88)	(1,73)	(1,72)
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	1.186.899,96	1.223.129,69	1.296.545,46	1.375.977,68
	(7,69)	(7,20)	(6,62)	(6,59)
d. Kesehatan dan Pendidikan	652.831,63	677.159,59	708.942,03	755.651,11
	(4,23)	(3,99)	(3,62)	(3,62)
e. Transportasi dan Komunikasi	1.796.642,85	1.861.337,41	2.165.475,62	2.469.012,38
	(11,63)	(10,96)	(11,06)	(11,82)
f. Restoran dan Hotel	853.216,32	909.182,31	1.006.403,67	1.104.034,37
	(5,52)	(5,36)	(5,14)	(5,28)
g. Lainnya	423.886,75	441.500,39	471.373,63	504.451,18
	(2,74)	(2,60)	(2,41)	(2,41)
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	201.451,56	207.916,21	228.999,01	260.731,39
	(1,30)	(1,22)	(1,17)	(1,25)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.491.171,66	1.569.830,29	1.505.007,91	1.555.519,77
	(9,66)	(9,25)	(7,68)	(7,45)

Lanjutan Tabel 2.3

PDB Penggunaan	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Konsumsi Kolektif	897.223,32	902.552,44	903.734,74	962.625,31
	(5,81)	(5,32)	(4,61)	(4,61)
b. Konsumsi Individu	593.948,34	667.277,85	601.273,17	592.894,46
	(3,85)	(3,93)	(3,07)	(2,84)
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4.897.049,69	5.227.853,94	5.697.279,18	6.127.704,05
	(31,71)	(30,79)	(29,09)	(29,33)
a. Bangunan	3.719.738,79	3.933.012,08	4.209.054,53	4.522.517
	(24,09)	(23,17)	(21,49)	(21,65)
b. Mesin dan Perlengkapan	477.468,14	535.062,48	660.827,07	692.426,99
	(3,09)	(3,15)	(3,37)	(3,31)
c. Kendaraan	223.484,72	258.006,92	297.345,02	352.847,12
	(1,45)	(1,52)	(1,52)	(1,69)
d. Peralatan Lainnya	75.728,97	84.536,96	85.676,41	85.001,87
	(0,49)	(0,50)	(0,44)	(0,41)
e. CBR	282.565,06	292.469,93	307.720,41	324.103,28
	(1,83)	(1,72)	(1,57)	(1,55)
f. Produk Kekayaan Intelektual	118.064,01	124.765,59	136.655,74	150.807,8
	(0,76)	(0,73)	(0,70)	(0,72)
5. Perubahan Inventori	97.857,67	111.142,96	129.369,69	248.602,18
	(0,63)	(0,65)	(0,66)	(1,19)
6. Ekspor Barang dan Jasa	2.676.513,53	3.635.835,41	4.799.815,44	4.543.377,78
	(17,33)	(21,42)	(24,50)	(21,75)
a. Barang	2.464.004,44	3.440.204,33	4.458.855,25	4.040.329,94
	(15,96)	(20,26)	(22,76)	(19,34)
a.1. Barang Non-migas	2.335.820,77	3.249.263,02	4.196.760,22	3.776.379,06
	(15,13)	(19,14)	(21,43)	(18,08)
a.2. Barang migas	128.183,67	190.941,32	262.095,03	263.950,89
	(0,83)	(1,12)	(1,34)	(1,26)
b. Jasa	212.509,09	195.631,07	340.960,2	503.047,84
	(1,38)	(1,15)	(1,74)	(2,41)
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2.415.495,97	3.189.626,45	4.106.085,66	4.088.446,95
	(15,64)	(18,79)	(20,96)	(19,57)
a. Barang	2.056.090,61	2.781.637,45	3.459.520,32	3.303.817
	(13,31)	(16,38)	(17,66)	(15,81)
a.1. Barang Non-migas	1.850.263,66	2.419.448,7	2.870.427,9	2.768.526,58
	(11,98)	(14,25)	(14,65)	(13,25)
a.2. Barang migas	205.826,94	362.188,75	589.092,43	535.290,42
	(1,33)	(2,13)	(3,01)	(2,56)
b. Jasa	359.405,36	407.989	646.565,34	784.629,96
	(2,33)	(2,40)	(3,30)	(3,76)

Lanjutan Tabel 2.3

PDB Penggunaan	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Diskrepansi Statistik	-405.112,52	177.749,93	1.171.970,88	1.135.322,5
	(-2,62)	(1,05)	(5,98)	(5,43)
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	15.443.353,2	16.976.751,4	19.588.089,9	20.892.376,7
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain peningkatan dari sisi kontribusi, PKRT juga mengalami pertumbuhan positif yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,82 persen (Tabel 2.4). Angka pertumbuhan ini tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,94 persen. PKRT menjadi komponen yang sangat diperhitungkan karena menjadi kekuatan perekonomian Indonesia mengingat kontribusinya yang sangat tinggi dengan pertumbuhannya yang cukup impresif.

Tabel 2.4 PDB Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) dan Pertumbuhan PDB (persen) Menurut Pengeluaran, 2020–2023

PDB Penggunaan	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5.780.223,44	5.896.661,85	6.187.943,9	6.486.253,87
	(-2,63)	(2,01)	(4,94)	(4,82)
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	2.190.250,95	2.222.126,49	2.298.902,16	2.378.092,3
	(0,51)	(1,46)	(3,46)	(3,44)
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	221.190,8	221.042,12	230.575,09	240.891,54
	(-4,21)	(-0,07)	(4,31)	(4,47)
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	814.540,29	832.371,64	855.635,1	888.144,19
	(2,28)	(2,19)	(2,79)	(3,80)
d. Kesehatan dan Pendidikan	430.533,98	437.835,19	448.391,77	466.265,12
	(3,09)	(1,70)	(2,41)	(3,99)
e. Transportasi dan Komunikasi	1.333.608,96	1.368.171,38	1.496.542,92	1.610.203,24
	(-9,57)	(2,59)	(9,38)	(7,59)
f. Restoran dan Hotel	516.212,06	536.203,53	571.448,69	607.899,69
	(-8,14)	(3,87)	(6,57)	(6,38)
g. Lainnya	273.886,4	278.911,5	286.448,17	294.757,78
	(-0,65)	(1,83)	(2,70)	(2,90)
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	130.306,47	132.411,92	139.903,63	153.656,62
	(-4,21)	(1,62)	(5,66)	(9,83)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	874.145,57	911.319,71	870.558,23	896.196,41
	(2,12)	(4,25)	(-4,47)	(2,95)

Lanjutan Tabel 2.4

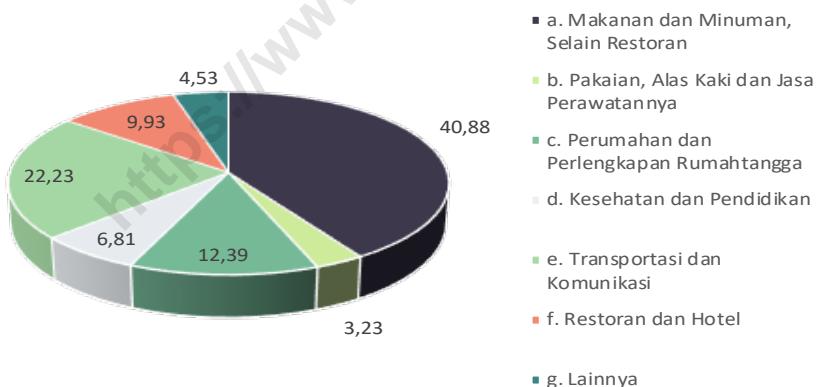
PDB Penggunaan	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Konsumsi Kolektif	527.045,91	522.786,59	520.872,57	553.065,92
	(-0,84)	(-0,81)	(-0,37)	(6,18)
b. Konsumsi Individu	347.099,65	388.533,12	349.685,67	343.130,49
	(6,98)	(11,94)	(-10,00)	(-1,87)
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3.419.181,61	3.549.218,8	3.686.573,75	3.848.715,98
	(-4,96)	(3,80)	(3,87)	(4,40)
a. Bangunan	2.585.622,97	2.645.502,22	2.669.608,59	2.777.458,4
	(-3,78)	(2,32)	(0,91)	(4,04)
b. Mesin dan Perlengkapan	342.342,23	382.273,44	468.068,04	482.504,35
	(-11,54)	(11,66)	(22,44)	(3,08)
c. Kendaraan	168.223,66	187.893,93	207.182,85	239.647,31
	(-13,07)	(11,69)	(10,27)	(15,67)
d. Peralatan Lainnya	51.979,25	56.790,14	56.630,2	54.432,81
	(-10,56)	(9,26)	(-0,28)	(-3,88)
e. CBR	195.075,9	197.336,28	201.522,65	205.644,47
	(2,81)	(1,16)	(2,12)	(2,05)
f. Produk Kekayaan Intelektual	75.937,6	79.422,79	83.561,41	89.028,64
	(-7,36)	(4,59)	(5,21)	(6,54)
5. Perubahan Inventori	51.334,13	62.709,09	70.749,22	127.672,38
	(-)	(-)	(-)	(-)
6. Ekspor Barang dan Jasa	2.083.941,85	2.458.849,06	2.858.016,46	2.895.835,1
	(-8,42)	(17,99)	(16,23)	(1,32)
a. Barang	1.956.816,47	2.347.224,78	2.683.401,11	2.653.448,17
	(-3,46)	(19,95)	(14,32)	(-1,12)
a.1. Barang Non-migas	1.768.806,92	2.127.473,21	2.471.996,56	2.424.132,94
	(-3,32)	(20,28)	(16,19)	(-1,94)
a.b. Barang migas	188.009,55	219.751,57	211.404,55	229.315,22
	(-4,72)	(16,88)	(-3,80)	(8,47)
b. Jasa	127.125,38	111.624,28	174.615,35	242.386,93
	(-48,87)	(-12,19)	(56,43)	(38,81)
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.686.003,79	2.105.117,06	2.420.793,78	2.380.948,89
	(-17,6)	(24,86)	(15,00)	(-1,65)
a. Barang	1.498.606,17	1.897.577,9	2.133.092,24	2.059.805,02
	(-14,68)	(26,62)	(12,41)	(-3,44)
a.1. Barang Non-migas	1.271.236,3	1.627.636,87	1.813.699,78	1.732.115,74
	(-14,43)	(28,04)	(11,43)	(-4,50)
a.b. Barang migas	227.369,87	269.941,03	319.392,46	327.689,28
	(-16,07)	(18,72)	(18,32)	(2,60)
b. Jasa	187.397,62	207.539,16	287.701,54	321.143,87
	(-35,33)	(10,75)	(38,63)	(11,62)

Lanjutan Tabel 2.4

PDB Penggunaan	2020 (1)	2021 (2)	2022* (3)	2023** (4)
Diskrepansi Statistik	69.870,03	214.006,34	317.296,48	274.012,13
	(-)	(-)	(-)	(-)
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	10.722.999,3	11.120.059,7	11.710.247,9	12.301.393,6
	(-2,07)	(3,70)	(5,31)	(5,05)

Sumber: Badan Pusat Statistik

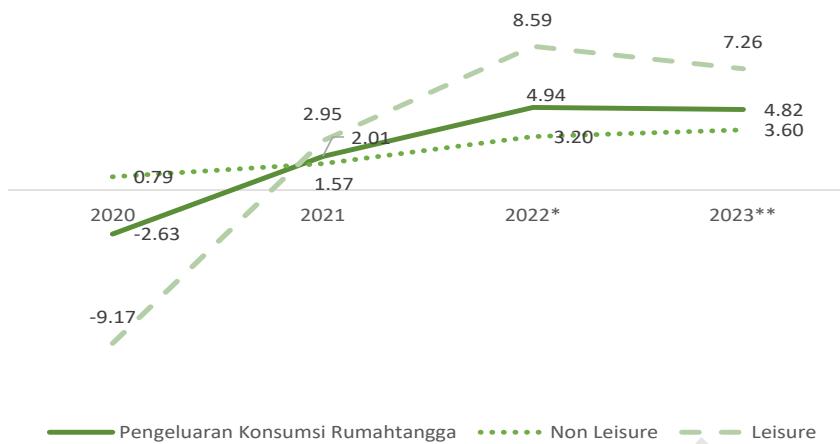
Komponen PKRT terbagi menjadi tujuh subkomponen penyusun. Makanan dan Minuman selain Restoran menjadi subkomponen yang paling penting dalam penyusunan PKRT di Indonesia. Subkomponen ini menyumbang lebih dari 40 persen terhadap total PKRT (Gambar 2.1). Selanjutnya, Transportasi dan Komunikasi menjadi yang terbesar kedua dengan sumbangsih sebesar 22,23 persen dari total PKRT. Kemudian disusul oleh Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang menorehkan kontribusi sebesar 12,39 persen dari keseluruhan PKRT. Ketiga subkomponen tersebut mengalami pertumbuhan positif pada 2023, namun hanya subkomponen Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang mengalami akselerasi pertumbuhan dari 2,79 persen pada 2022 menjadi 3,8 persen pada tahun 2023 (Tabel 2.4).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.1 Kontribusi Subkomponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (persen), 2023

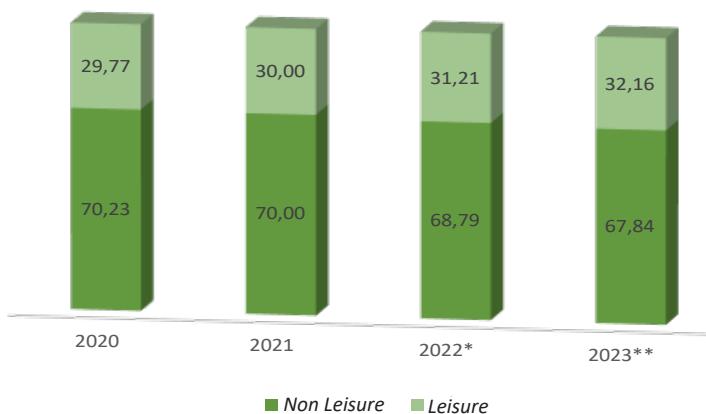
Jika dikelompokkan berdasarkan sifatnya, PKRT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk kegiatan yang bersifat *Leisure* dan *Non Leisure*. Kelompok *Leisure* mencakup transportasi dan komunikasi; serta restoran dan hotel, sementara Kelompok *Non-Leisure* meliputi makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; kesehatan dan pendidikan; serta lainnya. Secara umum ditunjukkan pada Gambar 2.2 bahwa kedua kelompok pengeluaran tersebut mengalami perbaikan seiring waktu sejalan dengan pemulihan komponen PKRT setelah terdampak pandemi.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.2 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (persen), 2020–2023

Setelah terdampak pandemi Covid-19 pada 2020 yang menyebabkan pertumbuhannya mengalami kemerosotan, kedua kelompok pengeluaran berangsur mengalami peningkatan. Kelompok *leisure* mengalami kontraksi yang sangat dalam pada 2020 yaitu hingga 9,17 persen, sementara kelompok *non-leisure* masih tumbuh positif meskipun sangat rendah yaitu sebesar 0,79 persen. Jika diamati lebih mendalam ke masing-masing tahun, terlihat bahwa pemulihan pertumbuhan kelompok *leisure* jauh lebih cepat daripada kelompok *non-leisure*. Hal ini terlihat dari Gambar 2.2 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan kelompok *leisure* sangat meningkat drastis pasca pandemi Covid-19.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.3 Kontribusi Subkomponen *Leisure* dan *Non-Leisure* pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (persen), 2020–2023

Selain pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang tercatat tumbuh lebih cepat daripada subkomponen non-*leisure*, kontribusi subkomponen *leisure* berangsur meningkat seiring waktu. Tabel 2.3 menunjukkan bahwa kontribusi subkomponen *leisure* hanya sebesar 29,77 persen, namun kemudian terus meningkat hingga mencapai sebesar 32,16 persen pada tahun 2023. Meskipun subkomponen non-*leisure* masih mendominasi hampir dua pertiga total PKRT, terlihat bahwa telah terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat Indonesia. Penduduk Indonesia sudah mulai memikirkan pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi *leisure*. Dengan ini, pemerintah dapat menangkap sinyal untuk dapat menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dan regulasi terkait ekonomi *leisure*.

Sementara itu, PMTB tercatat sebagai komponen paling penting kedua setelah PKRT. Kontribusi PMTB terhadap total PDB pada tahun 2023 adalah sebesar 29,33 persen, atau meningkat sebesar 0,24 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan sinyal semakin pentingnya peran PMTB dalam perekonomian domestik. Terlebih, terjadi akselerasi peningkatan pertumbuhan komponen PMTB dari 3,87 persen pada 2022 menjadi 4,4 persen pada 2023. Ini menjadi pertumbuhan tertinggi setelah pandemi Covid-19 yang menerpa perekonomian Indonesia dan global pada tahun 2020 dimana PMTB terkontraksi hingga 4,96 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.4 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen), 2020–2023

Jika ditinjau lebih dalam menurut subkomponen penyusunnya, PMTB dapat dibagi menjadi subkomponen Bangunan dan Non Bangunan. Sama-sama terdampak pandemi Covid-19 pada 2020, subkomponen Non Bangunan mengalami kontraksi sebesar 8,44 persen dan lebih dalam jika dibandingkan dengan subkomponen Bangunan yang terkontraksi sebesar 3,78 persen. Namun, proses pemulihan pasca terjadinya pandemi Covid-19 pada 2020 lebih cepat dialami oleh subkomponen Non Bangunan karena tumbuh hingga

di atas lima persen, bahkan mencapai 12,53 persen pada 2022. Sebaliknya, subkomponen Bangunan mengalami pertumbuhan yang stagnan antara 3,80 persen hingga 4,04 persen (Gambar 2.4).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.5 Kontribusi Subkomponen Bangunan dan Non Bangunan pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen), 2020–2023

Ditinjau dari kontribusi subkomponen penyusunnya, terdapat pola yang berbeda antara subkomponen Bangunan dan Nonbangunan. Jika subkomponen Bangunan mengalami penurunan, subkomponen Non Bangunan justru mengalami peningkatan kontribusi terhadap total PMTB. Pada tahun 2020, subkomponen Non Bangunan hanya berkontribusi sebesar 24,04 persen, namun pada tahun 2023 kontribusinya meningkat menjadi sebesar 26,20 persen terhadap total PMTB. Sebaliknya, kontribusi subkomponen Bangunan yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 75,96 persen, mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 tercatat sebesar 73,80 persen (Gambar 2.5).

Komponen ekspor dan impor juga tercatat penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Komponen ekspor berkontribusi sebesar 21,75 persen, sementara komponen impor tercatat sebesar 19,57 persen. Ini berarti bahwa terjadi surplus perdagangan internasional di Indonesia yang membuat ekspor neto menjadi positif karena kontribusi ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi impor. Surplus tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan barang dan jasa domestik oleh masyarakat global. Hal ini tercermin dari nilai komponen ekspor yang tumbuh sebesar 1,32 persen. Selain itu, surplus tersebut juga disebabkan oleh menurunnya impor sebesar 1,65 persen dibandingkan tahun 2022.



Gambar 2.6 Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa (persen), 2020–2023

Baik ekspor maupun impor sama-sama mengalami kontraksi yang cukup tajam pada saat terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020. Namun, setelah itu, pertumbuhan kedua komponen tersebut tercatat cukup tinggi pada fase pemulihan ekonomi dari gejolak ekonomi yang diakibatkan pandemi. Meskipun tercatat masih cukup tinggi, tetapi pertumbuhannya pada 2022 dan 2023 sedikit mengalami perlambatan.



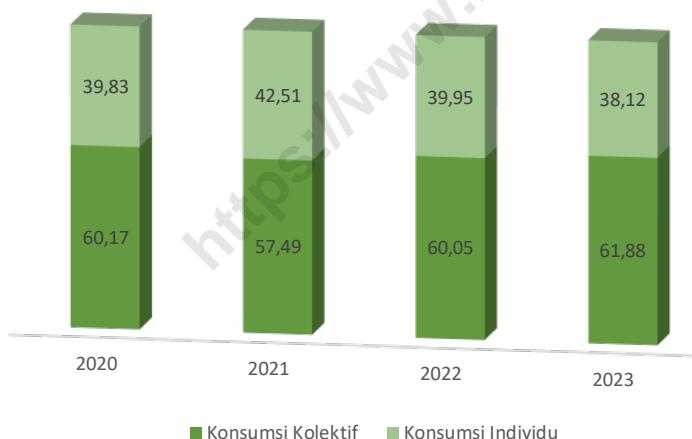
Gambar 2.7 Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (persen), 2020–2023

Komponen penyusun PDB yang juga tidak kalah pentingnya adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP). Komponen PKP berkontribusi sebesar 7,45 persen dengan pertumbuhan yang positif pada tahun 2023. Komponen PKP mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,95 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terkontraksi hingga 4,47 persen. Jika dirunut ke belakang, kontribusi komponen PKP mengalami

penurunan seiring waktu. Misalnya, kontribusi komponen ini pada tahun 2020 tercatat sebesar 9,66 persen, tahun 2021 sebesar 9,25 persen, tahun 2022 sebesar 7,68 persen. Artinya, terdapat penurunan sebesar 2,21 persen poin dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) terbagi menjadi dua, yaitu konsumsi kolektif dan konsumsi individu. Setelah terkontraksi dalam pada tahun 2022, kedua subkomponen PKP mengalami perbaikan pada 2023. Subkomponen Konsumsi Kolektif tumbuh tinggi mencapai 6,18 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, subkomponen individu terkontraksi sebesar 1,87 persen, lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang terkontraksi hingga sepuluh persen.

Jika dilihat dari sisi kontribusinya, sebagian besar PKP adalah Konsumsi Kolektif. Proporsi subkomponen Konsumsi Kolektif mengalami fluktuasi dari tahun 2020 yang sebesar 60,17 persen, kemudian menurun menjadi 57,49 persen pada 2021, lalu meningkat kembali menjadi 60,05 dan 61,88 pada tahun 2022 dan 2023. Sebaliknya, subkomponen Konsumsi Individu cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.8 Kontribusi Subkomponen Konsumsi Kolektif dan Konsumsi Individu pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (persen), 2020–2023

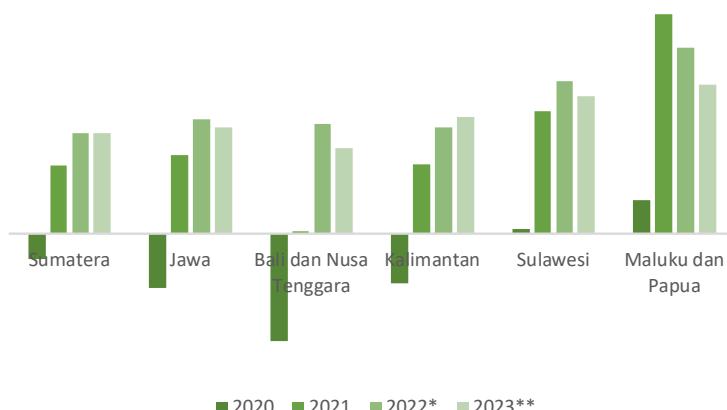
Komponen penyusun PDB selanjutnya adalah Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK LNPRT). Kontribusi komponen ini sangat kecil yaitu hanya sebesar 1,25 persen dari total PDB. Meskipun demikian, terjadi sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,17 persen. Peningkatan ini didorong oleh akselerasi pertumbuhan PK LNPRT pada tahun 2023 sebesar 9,83 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022. Selain tercatat sebagai pertumbuhan yang paling tinggi pasca pandemi Covid-19,

kontribusi PK LNPRT juga berhasil naik sebesar 4,17 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,66 persen.

Terkonsentrasi di Jawa, Terpesat di Papua

Setelah melalui badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang meluluhlantakkan aktivitas perekonomian hampir di seluruh wilayah Indonesia, pemulihan serta pertumbuhan ekonomi kembali tercipta. Sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Sumatera hingga Papua, besaran pertumbuhan ekonomi menurut pulau di Indonesia cukup beragam. Hal yang diharapkan adalah pemerataan pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Nyatanya, sudah menjadi rahasia umum jika ketimpangan pembangunan di Indonesia tidak dapat terhindarkan. Aktivitas dan geliat ekonomi cenderung terpusat di pulau-pulau yang selama ini lebih maju daripada pulau atau kawasan lainnya.

Gambar 2.9 menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi menurut pulau di Indonesia. Secara umum, terlihat bahwa seluruh pulau mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat paling tinggi terjadi di wilayah Maluku dan Papua serta wilayah Sulawesi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah lainnya relatif setara. Kedua wilayah tersebut, wilayah Sulawesi serta wilayah Maluku dan Papua juga menjadi istimewa dari sisi ketangguhan ekonomi karena termasuk kawasan yang tetap tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19 yang membuat pertumbuhan ekonomi di wilayah lain di Indonesia terkontraksi dalam.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (persen), 2020–2023

Wilayah Sumatera mengalami kontraksi yang paling rendah diantara wilayah lain di Indonesia yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

Pasca pandemi, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,18 persen pada tahun 2021 dan 4,69 persen pada tahun 2022 dan 2023. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera tidak terjadi akselerasi dan perlambatan pada 2023. Besaran pertumbuhan ekonomi juga sejajar dengan wilayah pulau lainnya di Indonesia seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, dan Kalimantan.

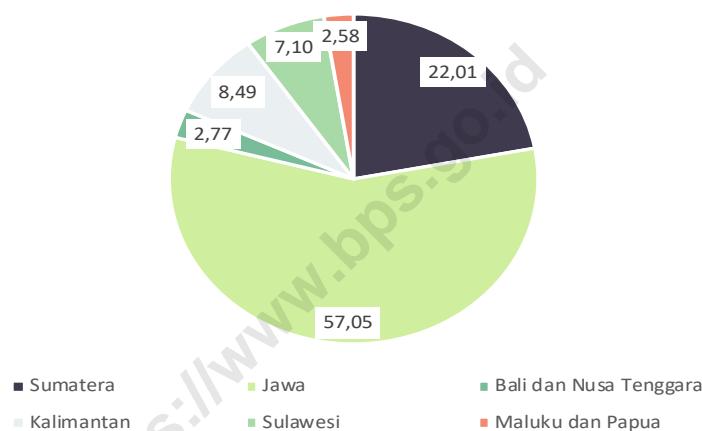
Wilayah Pulau Jawa memang menjadi pusat dan konsentrasi ekonomi. Perekonomian di Pulau Jawa menjadi salah satu yang sangat terpukul karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Setelahnya, terjadi pemulihan kegiatan ekonomi dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diantara wilayah pulau-pulau yang sebelumnya terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,31 persen pada 2022 menjadi 4,96 persen pada 2023, atau menurun sekitar 0,35 persen poin.

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara menjadi kelompok pulau yang ekonominya terdampak paling serius karena pandemi Covid-19. Hal ini akibat adanya pembatasan mobilitas manusia yang sangat merugikan wilayah ini yang notabene menjadikan pariwisata sebagai andalan dalam aktivitas ekonominya. Perekonomian wilayah Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi paling dalam di Indonesia hingga sebesar 5,02 persen. Bahkan, pemulihan ekonomi dari gejolak pandemi pun bertahap atau tidak serta merta. Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tercatat hanya sebesar 0,08 persen dan menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Setelah itu, pada 2022 pertumbuhan ekonomi sudah melesat hingga 5,08 persen walaupun pada 2023 terjadi sedikit perlambatan dengan hanya tumbuh sebesar 4,00 persen.

Wilayah Kalimantan adalah satu-satunya wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat setiap tahun pasca pemulihan pandemi Covid-19. Seperti halnya wilayah Jawa, Sumatera dan Bali, wilayah Kalimantan juga mengalami kemerosotan pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid-19 terjadi. Namun, Kalimantan mampu berbenah dan bangkit dengan kuat sehingga laju pertumbuhan selalu positif dengan akselerasi setiap tahunnya. Tahun pertama pemulihan, Kalimantan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,24 persen. Selanjutnya pada 2022 pertumbuhan ekonomi Kalimantan menjadi 4,94 persen. Pertumbuhan ini terus berlanjut hingga pada 2023 persentasenya menjadi 5,43 persen, atau meningkat sebesar 0,49 persen poin jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, wilayah Sulawesi mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua diantara wilayah lainnya di Indonesia. Perekonomian di wilayah ini juga terbukti tangguh meskipun diterjang pandemi Covid-19. Pada 2020, Sulawesi masih mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu sebesar 0,23 persen. Persentase pertumbuhannya Sulawesi semakin tinggi selama masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Namun, pada 2023 pertumbuhannya mengalami sedikit perlambatan, dari 7,07 persen pada 2022 menjadi 6,37 persen pada 2023.

Seperti Wilayah Sulawesi yang masih mencatatkan pertumbuhan positif di tengah pandemi Covid-19, Wilayah Papua menjadi wilayah dengan pertumbuhan tertinggi di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi pada 2020. Bahkan tahun pertama pemulihan wilayah ini mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi dua digit yaitu sebesar 10,22 persen. Angka ini sangat tinggi mengingat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah lain hanya maksimal sebesar 5,67 persen. Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Papua selama beberapa tahun terakhir selalu menjadi yang paling tinggi, meskipun mengalami perlambatan. Fakta ini menjadi argumentasi tingginya potensi ekonomi di wilayah Papua yang jika dimaksimalkan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk sekitar.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.10 Kontribusi Ekonomi Menurut Wilayah (persen), 2023

Perekonomian Indonesia terpusat di Pulau Jawa terbukti dari kontribusi Wilayah Jawa yang menyumbang lebih dari separuh perekonomian nasional. Ekonomi Pulau Jawa tercatat memberikan kontribusi sebesar 57,05 persen. Sementara itu, Wilayah Sumatera menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 22,01 persen, dan sisanya sebesar 20,94 persen disumbang oleh wilayah lain di Indonesia. Pemerataan pembangunan ekonomi seyogyanya menjadi perhatian pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di Jawa dan Sumatera. Ini menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan penduduk Indonesia. Ketimpangan ekonomi harus menjadi perhatian serius agar dominasi ekonomi oleh Pulau Jawa dan Sumatera dapat diduplikasi ke wilayah lain sehingga kue pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Tabel 2.5 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Menurut Provinsi (persen), 2021–2023

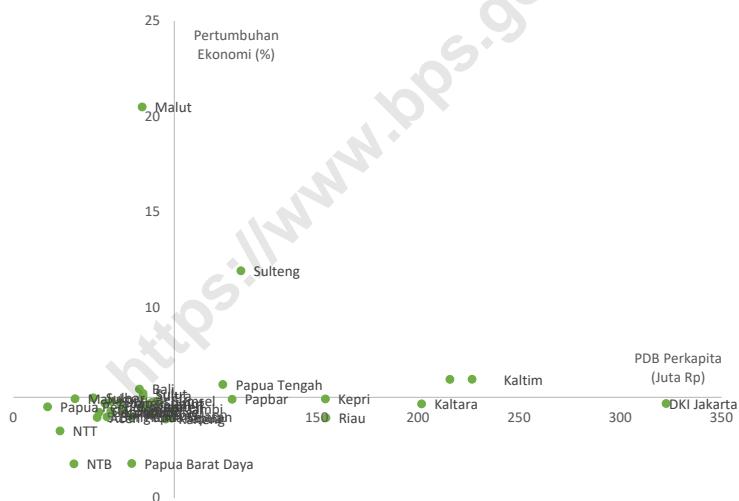
Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi			Kontribusi Ekonomi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2,81	4,21	4,23	1,09	1,10	1,11
Sumatera Utara	2,61	4,73	5,01	5,07	4,99	5,12
Sumatera Barat	3,29	4,36	4,62	1,49	1,49	1,52
Riau	3,36	4,55	4,21	4,95	5,18	5,00
Jambi	3,70	5,12	4,66	1,37	1,45	1,43
Sumatera Selatan	3,58	5,23	5,08	2,91	3,08	3,06
Bengkulu	3,27	4,31	4,26	0,47	0,47	0,47
Lampung	2,77	4,28	4,55	2,19	2,16	2,19
Kep. Bangka Belitung	5,05	4,40	4,38	0,51	0,50	0,50
Kep. Riau	3,43	5,09	5,20	1,63	1,61	1,62
DKI Jakarta	3,55	5,25	4,96	17,18	16,65	16,77
Jawa Barat	3,74	5,45	5,00	13,01	12,65	12,79
Jawa Tengah	3,33	5,31	4,98	8,38	8,15	8,26
DI Yogyakarta	5,58	5,15	5,07	0,88	0,87	0,88
Jawa Timur	3,56	5,34	4,95	14,48	14,27	14,38
Banten	4,49	5,03	4,81	3,93	3,90	3,96
Bali	-2,46	4,84	5,71	1,30	1,28	1,34
Nusa Tenggara Barat	2,30	6,95	1,80	0,83	0,82	0,81
Nusa Tenggara Timur	2,52	3,05	3,52	0,65	0,62	0,63
Kalimantan Barat	4,80	5,07	4,46	1,36	1,34	1,34
Kalimantan Tengah	3,59	6,45	4,14	1,00	1,04	1,02
Kalimantan Selatan	3,48	5,11	4,84	1,17	1,31	1,31
Kalimantan Timur	2,55	4,48	6,22	4,11	4,81	4,11
Kalimantan Utara	3,99	5,32	4,94	0,66	0,72	0,72
Sulawesi Utara	4,16	5,42	5,48	0,84	0,82	0,84
Sulawesi Tengah	11,68	15,22	11,91	1,46	1,69	1,69
Sulawesi Selatan	4,64	5,10	4,51	3,21	3,16	3,18
Sulawesi Tenggara	4,10	5,53	5,35	0,82	0,83	0,86
Gorontalo	2,40	4,04	4,50	0,26	0,25	0,25
Sulawesi Barat	2,57	2,31	5,25	0,30	0,28	0,29
Maluku	3,63	5,31	5,21	0,29	0,28	0,28
Maluku Utara	16,79	22,94	20,49	0,31	0,37	0,41
Papua Barat	-0,51	2,01	5,18	0,50	0,48	0,30
Papua Barat Daya	—	—	1,82	—	—	0,18
Papua	15,16	8,97	4,20	1,39	1,37	0,40
Papua Selatan	—	—	4,27	—	—	0,15
Papua Tengah	—	—	5,95	—	—	0,73
Papua Pegunungan	—	—	4,78	—	—	0,12

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat digambarkan melalui analisis Tipologi Klassen (Ryansyah, Hasibuan, and Daulay 2023; Widiani, Setiawan, and Didi 2024). Analisis ini menggabungkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dengan PDRB perkapita daerah. Provinsi-provinsi di Indonesia dipetakan kedalam empat kuadran berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita masing-masing.

Dari Tipologi Klassen tersebut, daerah-daerah dapat diklasifikasikan menurut capaian pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapitanya. Titik potong yang digunakan pada analisis tipologi ini adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB perkapita 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Dari perhitungan, rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2023 mencapai 5,28 persen, sementara rata-rata PDRB perkapita adalah sebesar 79,57 juta rupiah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.11 Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Daerah, 2023

Gambar 2.11 menunjukkan hasil dari klasifikasi daerah menurut capaian kinerja perekonomiannya. Terdapat tiga daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di atas rata-rata, yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Papua Tengah. Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata namun PDRB perkapita yang masih di bawah rata-rata. Selanjutnya, terdapat 6 daerah dengan nilai PDRB perkapita di atas rata-rata namun pertumbuhan ekonomi yang di bawah rata-rata, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Terakhir, terdapat 25 daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di bawah rata-rata. Sehingga, secara umum, sebagian besar daerah di Indonesia justru berada di bawah rata-rata 38 provinsi.

Ini menunjukkan bahwa nilai ekstrem dari segelintir daerah mengerek rata-rata menjadi tinggi sehingga banyak daerah yang menempati posisi di bawah rata-rata. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pemerintah menaruh perhatian pada ketimpangan pembangunan di Indonesia. Analisis Tipologi Klassen tersebut menggambarkan ketimpangan yang ada di Indonesia masih cukup tinggi. Hal yang memperkuat adanya potensi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia salah satunya dapat dibuktikan dengan perbandingan PDRB perkapita terendah dan tertinggi. PDRB perkapita paling rendah adalah sebesar 16,87 juta rupiah, sementara PDRB perkapita tertinggi mencapai 322,62 juta rupiah. Dengan kata lain, perbandingan antara PDRB perkapita tertinggi dan terendah hampir mencapai 20 kali lipatnya. Ketimpangan capaian pembangunan tersebut perlu diperhatikan agar dapat ditekan dan akhirnya seluruh daerah di Indonesia menikmati kue pertumbuhan ekonomi dengan sama rata.

APBN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi di Tengah Tantangan Ekonomi Global

3

82% Pendapatan Negara 2024 berasal dari Perpajakan. Penerimaan pajak kian meningkat karena penerapan kebijakan UU HPP dan PMK Pemotongan PPh21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

TAX



Penerimaan Perpajakan
2.309,9 triliun rupiah

Belanja Pemerintah Pusat
2.467,5 triliun rupiah

Transfer Ke Daerah
857,6 triliun rupiah

Belanja Negara 2024 Berkualitas (*Spending Better*) Untuk Pembangunan IKN dan Infrastruktur Prioritas, Pelaksanaan Pemilu 2024, Kenaikan Gaji ASN & Pensiun, serta Subsidi Energi dan Nonenergi.

Keseimbangan Primer 2023 Surplus, Pembiayaan Utang Menurun. Maka, defisit anggaran 2024 kembali ke aturan maksimal 3 persen terhadap PDB.

Defisit Anggaran APBN2024 thd PDB (%)
2,29 Persen

Pemerintah berupaya melakukan pencegahan dan antisipasi risiko fiskal sejak 2008. APBN 2024 menambahkan risiko fiskal daerah untuk harmonisasi dan sinergi kebijakan pusat-daerah.



*APBN diandalkan dalam
menghadapi, memulihkan, dan
melindungi negara dari berbagai
gejolak sosial ekonomi baik di
tingkat nasional maupun global.*

Peningkatan tarif pengangkutan, penurunan stok minyak mentah di AS, dan serangan Ukraina pada kilang-kilang Rusia berpengaruh pada pasokan BBM di wilayah Asia dan Eropa yang berpotensi menimbulkan pengetatan di pasar minyak. Belum lagi peningkatan permintaan pada beberapa komoditas pasca pandemi dan buruknya iklim berpengaruh pada harga komoditas terutama pangan dan energi. Kondisi ini mengakibatkan disrupsi rantai pasokan yang menyebabkan peningkatan harga komoditas secara global. Inflasi global akhirnya terjadi dan mendorong berbagai negara untuk menerapkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi.

Meski berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, kebijakan menaikkan suku bunga diambil oleh sebagian besar negara-negara maju. Langkah negara maju tersebut berdampak pada negara *emerging markets* termasuk Indonesia berupa aliran modal keluar (*Capital Outflow*) dan penguatan mata uang dollar AS terhadap rupiah. Walau rupiah melemah, perekonomian Indonesia terpantau masih tetap kuat dan stabilitas ekonomi masih tetap terjaga. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat di atas 5 persen (y-to-y) pasca krisis pandemi silam. Pada triwulan II 2024 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,44 persen (y-on-y) (BPS 2024).

Kuat dan stabilnya perekonomian nasional tidak hanya disebabkan oleh penerapan kebijakan moneter tetapi juga oleh kebijakan fiskal. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam memengaruhi perekonomian terutama dalam upaya mencapai target pembangunan nasional. Mengusung tema yang serupa tahun lalu, tema kebijakan fiskal APBN 2024 adalah "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" (Kemenkeu 2024b).

Ada dua strategi yang diusulkan pada APBN 2024 (Kemenkeu 2024b). Pertama, strategi jangka pendek yang fokus pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Kedua, strategi jangka menengah dan panjang yang fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, mengakselerasi pembangunan infrastruktur, dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

APBN 2024 Untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi

Peran strategis APBN sebagai instrumen fiskal secara terang-terangan diterapkan sejak tahun 2020 hingga saat ini. APBN selalu diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak sosial ekonomi baik nasional maupun global, seperti pandemi serta kenaikan harga pangan dan energi. APBN juga berperan dalam memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat melalui belanja negara yang berkualitas (*spending better*) dan subsidi yang efektif untuk

perlindungan sosial (Kemenkeu 2024c). Kinerja positif APBN pasca pandemi juga tercermin dari kondisi perekonomian nasional yang mampu tumbuh diatas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut dan pemulihan ekonomi yang merata terjadi di semua wilayah Indonesia.

APBN selama periode 2020-2023 telah diprioritaskan untuk penanganan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Maka, pada APBN 2024 akan berfokus untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui pengoptimalan fungsi distribusi dan stabilitas APBN, pengoptimalan fungsi alokasi APBN, serta melanjutkan reformasi fiskal secara holistik.

Tabel 3.1 Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (triliun rupiah), 2023 dan 2024

Uraian	APBN2023 (Perpres No.75/2023)	Realisasi APBN2023 (LKPP 2023)	APBN2024
			(1)
A. Pendapatan Negara	2.637,25	2.783,93	2.802,29
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.634,15	2.766,75	2.801,86
1. Penerimaan Perpajakan	2.118,35	2.154,21	2.309,86
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	515,80	612,54	492,00
II. Hibah	3,10	17,18	0,43
B. Belanja Negara	3.117,18	3.121,22	3.325,12
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.302,46	2.239,79	2.467,53
II. Transfer Ke Daerah	814,72	881,43	857,59
C. Keseimbangan Primer	-38,53	102,59	-25,51
D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B)	-479,93	-337,29	-522,83
%Defisit Anggaran terhadap PDB	-2,27	-1,61	2,29
E. Pembiayaan Anggaran	479,93	356,66	522,83
I. Pembiayaan Utang	421,21	403,95	648,09
II. Pembiayaan Investasi	-175,95	-89,90	-176,22
III. Pemberian Pinjaman	5,28	4,47	-0,25
IV. Kewajiban Penjaminan	-0,33	-0,33	-0,82
V. Pembiayaan Lainnya	229,71	38,47	52,03

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara, Perpres No.75 Tahun 2023, UU No.19 Tahun 2023, dan Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023

Tabel 3.1 memperlihatkan postur APBN 2024 yang optimis dapat mendongkrak pendapatan negara lebih tinggi 6 persen dari tahun sebelumnya. Optimisme ini didukung dari realisasi pendapatan negara terhadap anggaran lebih dari 105 persen pada APBN 2023. Disamping itu, penerimaan perpajakan masih menjadi kontribusi utama dalam penerimaan negara dan dialokasi

sebesar 2.309,86 triliun rupiah di tahun 2024. Pertumbuhan anggaran pendapatan negara di tahun 2024 berpotensi dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, risiko fluktuasi harga komoditas terutama komoditas energi, kinerja BUMN, dan *core tax administration system*.

Belanja negara dialokasikan sebesar 3.325,12 triliun rupiah di tahun 2024 atau tumbuh 6,5 persen dari realisasi APBN 2023. Kebijakan anggaran belanja negara masih melanjutkan reformasi fiskal sesuai amanat UU No.2 tahun 2020 dalam menghadapi disrupsi perekonomian global. Belanja pemerintah pusat dianggarkan tumbuh untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi, penguatan *spending better*, mendorong subsidi tepat sasaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

Selanjutnya, defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman (*prudent*) dan masih berada dalam level selera risiko (*risk appetite*). APBN 2024 masih mendukung konsolidasi fiskal APBN 2023 untuk menjaga kesinambungan fiskal, dimana defisit anggaran kembali ke aturan maksimal 3 persen terhadap PDB, maka *outlook* defisit anggaran APBN 2024 diperkirakan sebesar 2,29 persen terhadap PDB (Kemenkeu 2024). Mengingat adanya risiko pembiayaan di pasar uang akibat ketidakpastian perekonomian global. Maka, APBN 2024 melakukan strategi dan mitigasi risiko pada pembiayaan utang. Mitigasi risiko dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam mencapai target pembangunan 2024.

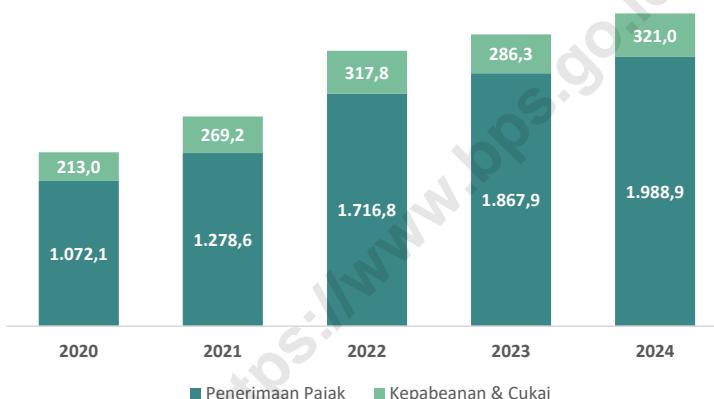
Kepatuhan Pajak Kunci Besarnya Pendapatan Negara

Kontribusi terbesar pendapatan negara berasal dari Penerimaan Perpajakan. Kemudian disusul dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Penerimaan perpajakan berasal dari pungutan wajib orang pribadi atau badan kepada negara. PNBP berasal dari kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pengelolaan aset negara lainnya yang tidak berasal dari pajak. Kontribusi pendapatan PNBP terbesar diperoleh dari sumber daya alam seperti batu bara dan migas. Pada APBN 2024 pendapatan sumber daya alam diperkirakan sebesar 207,7 triliun rupiah atau 42 persen dari porsi PNBP (Kemenkeu 2024). Sementara itu, penerimaan hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk uang, barang, jasa, surat berharga, dan/atau devisa yang dirupiahkan, yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hibah umumnya digunakan untuk mendukung penanggulangan bencana alam, dan bantuan kemanusiaan.

Penerimaan Perpajakan berkontribusi sebesar 82,4 persen dari pendapatan negara 2024 (Lihat Tabel 3.1). Tren juga menunjukkan penerimaan perpajakan meningkat lima tahun terakhir. Penerimaan perpajakan mengalami

peningkatan yang signifikan sejak 2020 (lihat Gambar 3.1). Hal ini sejalan dengan keberhasilan pemerintah melakukan penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Gambar 3.1 memperlihatkan penerimaan perpajakan berdasarkan sumbernya. Penerimaan pajak yang ditargetkan pada APBN 2024 sebesar 1.988,9 triliun rupiah, serta yang berasal dari kepabeanan dan cukai ditargetkan sebesar 321 triliun rupiah. Kedua sumber penerimaan perpajakan tersebut tumbuh masing-masing sekitar 6 persen dan 12 persen dari realisasi APBN 2023. Penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No.7 Tahun 2021), kebijakan tarif cukai hasil tembakau, aktivitas perdagangan internasional, fluktuasi harga komoditas, dan *core tax administration system*.

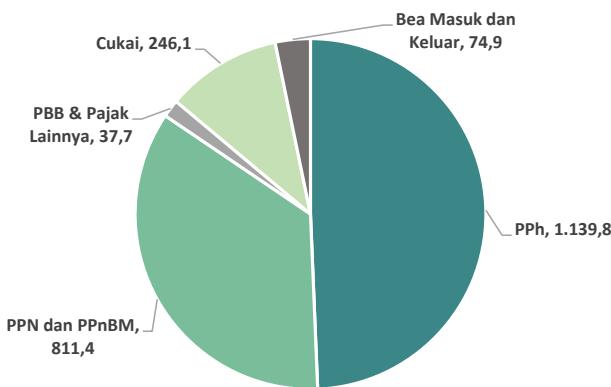


Catatan: Tahun 2020–2023 merupakan nilai realisasi. Sementara tahun 2024 merupakan nilai APBN.

Sumber: Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Informasi APBN 2024

Gambar 3.1 Penerimaan Perpajakan Berdasarkan Sumber Pendapatan (triliun rupiah), 2020–2024

Jika dilihat berdasarkan jenis pajaknya, sumber terbesar penerimaan perpajakan tahun 2024 ternyata berasal dari Pajak Penghasilan (Lihat Gambar 3.2). Pajak penghasilan (PPh) ditargetkan 1.139,8 triliun rupiah pada APBN 2024 atau berkontribusi 49 persen dari penerimaan perpajakan. Penerimaan PPh tersebut didukung dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. PMK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2023. PMK tersebut mengatur penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui implementasi tarif efektif rata-rata (TER) yang efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Berlakunya penghitungan pajak penghasilan yang baru tersebut tentu mengundang pro dan kontra. Terlebih karena penghasilan individu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, utilisasi tenaga kerja, dan inflasi.



Sumber: Kementerian Keuangan, Informasi APBN 2024

Gambar 3.2 Kontribusi Penerimaan Perpajakan Menurut Jenis Pajak (triliun rupiah), 2024

Disamping PPh, kontribusi penerimaan perpajakan disusul dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPN dan PPnBM ditargetkan diterima negara sebesar 811,4 triliun rupiah. PPN dan PPnBM dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi domestik dan perluasan basis pajak. PPN dan PPnBM umumnya dikenakan satu kali kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Tahunan DJP

Gambar 3.3 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2019–2022

Besarnya kontribusi perpajakan terutama pajak penghasilan terhadap pendapatan negara membuat kepatuhan pajak (*tax compliance*) menjadi penting. Kepatuhan yang tinggi dapat mengoptimalkan pendapatan negara dan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Gambar 3.3 memperlihatkan gambaran kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh). Kepatuhan wajib pajak meningkat setiap

tahun sejak pandemi covid-19. Bahkan, pada tahun 2023 diberitakan rasio kepatuhan mencapai 88 persen (Siswanto 2024). Secara deskriptif, capaian ini mendukung kinerja positif penerimaan pajak yang meningkat setiap tahun seperti tercermin pada Gambar 3.1.

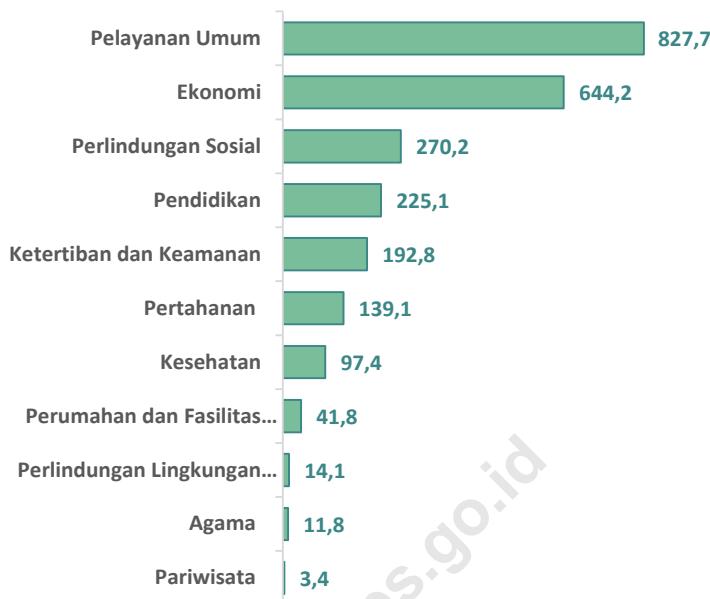
Penerbitan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada tahun 2021 turut mendorong kinerja positif perpajakan. UU HPP merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang memenuhi kebutuhan terhadap peningkatan kemampuan fiskal untuk mendongkrak pembangunan jangka panjang. Namun, tingginya tingkat kepatuhan memerlukan lebih dari sekadar payung hukum diperlukan kebijakan yang efektif dan implementasi yang cermat untuk mengatasi tantangan dan memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Belanja Negara Berkualitas Untuk Ketahanan Fiskal

Belanja negara APBN 2024 diperuntukkan untuk mendukung penuh peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas; serta pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum untuk pemilihan presiden, legislatif dan kepala daerah di tahun 2024. Hal ini didukung dengan anggaran belanja pemerintah pusat yang mengambil porsi terbesar di anggaran belanja negara. Pada APBN 2024 anggaran pemerintah pusat tumbuh 10 persen dari realisasi 2023 (Lihat Tabel 3.1). Sesuai fokus peruntukannya, pertumbuhan tersebut digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), penyediaan anggaran subsidi, kenaikan gaji pokok PNS dan pensiunan, pelaksanaan pemilu 2024, hingga penuntasan proyek strategis nasional.

Lebih rinci, belanja negara menurut fungsi menunjukkan anggaran terbesar diperuntukkan untuk pelayanan umum sebesar 827,7 triliun rupiah (Lihat Gambar 3.4). Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, realisasi pemenuhan Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral, Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta pembayaran bunga utang. Lalu, anggaran terbesar disusul oleh fungsi ekonomi dan perlindungan sosial yang secara umum diperuntukkan untuk belanja Kementerian/Lembaga dalam penyaluran subsidi (energi dan non-energi) dan program-program perlindungan sosial.

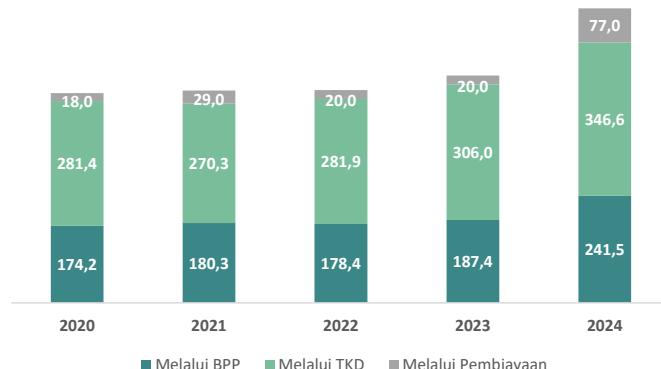
Melihat porsi anggaran yang besar untuk subsidi, pendanaan proyek strategis nasional, dan penguatan stabilitas politik, hukum, dan keamanan, maka belanja Kementerian/Lembaga terbesar dialokasikan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Sosial (Kemenkeu 2024).



Sumber: Kementerian Keuangan, Informasi APBN 2024

Gambar 3.4 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi (triliun rupiah), 2024

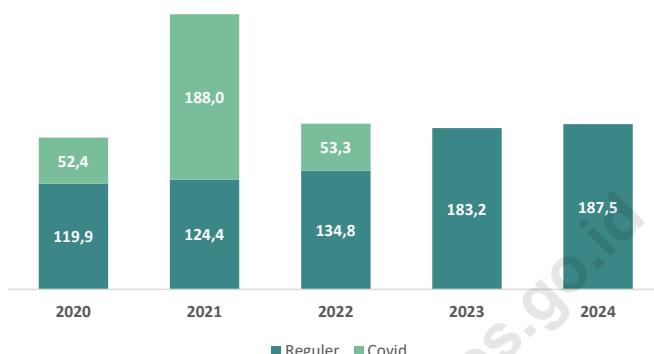
Kemendikbudristek menjadi salah satu K/L dengan anggaran besar karena belanja negara secara *mandatory* dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak 2009. Alokasi anggaran pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun (Lihat Gambar 3.5). APBN 2024 mengalokasikan total 665,1 triliun untuk peningkatan akses pendidikan hingga wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), peningkatan kompetensi tenaga pendidik, peningkatan investasi, dan penguatan pendidikan vokasi, serta ketersediaan PAUD berkualitas melalui Dana Desa.



Catatan: Tahun 2020-2023 merupakan nilai realisasi. Sementara tahun 2024 merupakan nilai APBN.
Sumber: Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Informasi APBN 2024

Gambar 3.5 Anggaran Pendidikan Menurut Komponen (triliun rupiah), 2020–2024

Komponen anggaran pendidikan yang berasal dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) diperuntukkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Komponen yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) mengambil porsi terbesar digunakan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan. Komponen anggaran pendidikan dari pembiayaan diperuntukkan untuk pemberian beasiswa dan riset.



Catatan: Tahun 2020–2023 merupakan nilai realisasi. Sementara tahun 2024 merupakan nilai APBN.
Sumber: Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Informasi APBN 2024

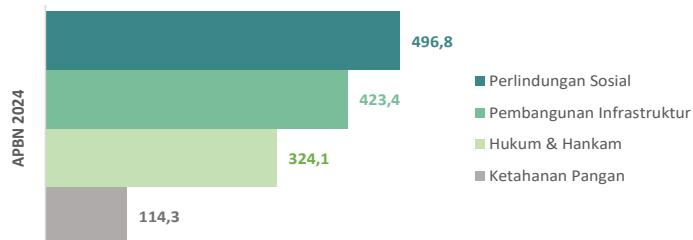
Gambar 3.6 Anggaran Kesehatan (triliun rupiah), 2020–2024

Sama halnya dengan Kemendikbudristek, Kemenkes menjadi K/L dengan alokasi terbesar karena termasuk dalam program prioritas pembangunan. Terdapat perubahan alokasi anggaran kesehatan pada tahun 2023. Selain tidak ada lagi anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19, Pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5% dari APBN seperti tercantum pada UU Nomor 39 tahun 2009. Kewajiban pengalokasian anggaran kesehatan tersebut diubah menjadi berdasarkan rencana induk bidang kesehatan, atau sesuai dengan prinsip *money follow program* (UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Anggaran kesehatan pada APBN 2024 dialokasikan sebesar 187,5 triliun rupiah untuk percepatan penurunan *stunting* dan peningkatan pelayanan kesehatan (Lihat Gambar 3.6).

Selain pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga memprioritaskan bidang yang berkaitan dengan target pembangunan dalam upaya mempercepat transformasi ekonomi. Gambar 3.7 memperlihatkan belanja negara APBN 2024 untuk perlindungan sosial; Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; infrastruktur; dan ketahanan pangan.

Pemerintah mengalokasikan sebesar 496,8 triliun rupiah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari risiko siklus hidup, keadaan disabilitas, bencana, dan guncangan sosial ekonomi. 423,4 triliun rupiah untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur proyek-proyek strategis dan prioritas yang mendukung transformasi ekonomi. 324,1 triliun rupiah untuk hukum dan hankam dalam rangka pengamanan pemilu dan

IKN. Serta, 114,3 triliun rupiah untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan.



Sumber: Kementerian Keuangan, Informasi APBN 2024

Gambar 3.7 Anggaran Belanja Tematik (triliun rupiah), 2024

Tidak hanya itu, pemerintah juga menganggarkan belanja negara untuk subsidi baik energi maupun nonenergi. Belanja Negara memerlukan peran penting dalam meredam tekanan inflasi yang lebih tinggi (*shock absorber*) di tengah gejolak harga energi dan dalam penyaluran bantuan pada kelompok rentan. Subsidi energi direalisasikan dalam bentuk subsidi BBM, LPG 3 kg, dan subsidi listrik. Sementara subsidi nonenergi direalisasikan dalam bentuk subsidi pupuk, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bantuan uang muka perumahan.

Secara umum anggaran subsidi digunakan untuk menjaga stabilisasi harga, daya beli masyarakat, dan mendukung UMKM. Oleh karena itu, APBN 2024 menganggarkan 286 triliun rupiah untuk subsidi yang terdiri dari subsidi energi 189,1 triliun dan subsidi nonenergi 96,9 triliun (lihat Gambar 3.8). Anggaran tersebut tumbuh 6 persen dari realisasi 2023. Namun, pemerintah mematok porsi yang lebih besar untuk subsidi energi mengingat permainan harga energi di pasar global akibat kondisi geopolitik Timur-Tengah dan ketidakpastian perekonomian global.



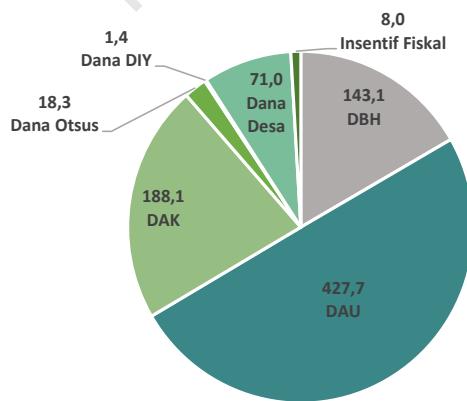
Catatan: Tahun 2020-2023 merupakan nilai realisasi. Sementara tahun 2024 merupakan nilai APBN.
Sumber: Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Informasi APBN 2024

Gambar 3.8 Anggaran Subsidi (triliun rupiah), 2020–2024

Lebih lanjut, belanja negara juga ditransfer ke daerah untuk sinergi, harmonisasi, dan mendukung kegiatan-kegiatan khusus daerah sesuai prioritas nasional. Pada APBN 2024 transfer ke daerah mengalami kontraksi 2,7 persen dari realisasi 2023 (Lihat Tabel 3.1). Realisasi APBN 2023 untuk transfer ke daerah lebih tinggi dari yang dianggarkan dikarenakan kebijakan Hibah ke Daerah pada tahun 2023. Kebijakan tersebut mencerminkan desain baru sebagai bagian dari transfer ke daerah yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus pengalokasian transfer ke daerah. Akibatnya, program pengelolaan hibah pada tahun 2023 hanya terdiri atas hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dan pengelolaan hibah lainnya.

Selain itu, realisasi Transfer ke Daerah juga dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan daerah, ketepatan waktu dan kelengkapan persyaratan penyaluran transfer oleh pemerintah daerah, peningkatan alokasi dana bagi hasil dan pembayaran kurang bayar dana bagi hasil s.d. tahun 2022. Transfer ke Daerah dipergunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal.

Transfer ke daerah dialokasikan sebesar 857,6 triliun rupiah (lihat Tabel 3.1) yang terdiri dari beberapa komponen seperti Gambar 3.9. Kontribusi belanja transfer ke daerah terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan untuk penggajian formasi PPPK, dukungan pendanaan kelurahan, dan dukungan pendanaan layanan publik bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Kemudian disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan digunakan untuk mendukung pelayanan, fasilitas, dan infrastruktur publik, serta mendukung program pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, *stunting*, hingga pengendalian inflasi.



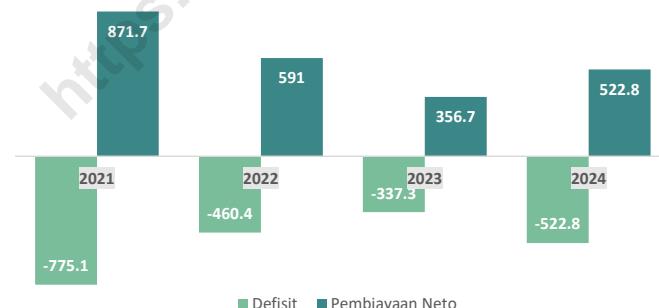
Sumber: Kementerian Sekretariat Negara, UU No.19 Tahun 2023

Gambar 3.9 Anggaran Transfer ke Daerah Menurut Komponen (triliun rupiah), 2024

Melihat penting dan strategisnya anggaran belanja negara dalam mendukung kesejahteraan rakyat dan menjaga pertumbuhan ekonomi, tidak heran belanja negara berperan sebagai *shock absorber* saat terjadi krisis pandemi dan pemulihan ekonomi. Hingga pasca pandemi pun, pemerintah masih melanjutkan reformasi fiskal melalui penguatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*). Pemerintah mendorong pengelolaan Belanja Negara agar dapat dilakukan lebih efisien dan produktif untuk mencapai target pembangunan. Belanja negara berkualitas jika didukung dengan peningkatan pendapatan negara, maka keseimbangan keuangan dan ketahanan fiskal dapat terwujud. Akan tetapi, pemerintah juga perlu mewaspada risiko dari ketahanan fiskal mengingat adanya gejolak ketidakpastian ekonomi global yang sedang dan akan terjadi.

Defisit Anggaran Menurun, Pembiayaan Utang Menurun

Sejak pandemi hingga tahun 2023, pemerintah telah menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan Belanja Negara untuk mendorong perekonomian sambil menjaga defisit anggaran tetap dalam batas yang aman. Indonesia menerapkan kebijakan anggaran defisit untuk mendukung program prioritas nasional sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan dan berupaya mengombinasikannya secara efisien dengan tetap memperhatikan risiko.



Catatan: Tahun 2020–2023 merupakan nilai realisasi. Sementara tahun 2024 merupakan nilai APBN.
Sumber: Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Informasi APBN 2024

Gambar 3.10 Defisit dan Pembiayaan Neto (triliun rupiah), 2021–2024

Gambar 3.10 memperlihatkan realisasi dan APBN 2024 untuk defisit anggaran dan pembiayaannya. Sejalan dengan perkembangan kinerja positif pendapatan dan belanja negara, tren memperlihatkan penurunan defisit anggaran. Realisasi defisit dan pembiayaan neto selama 2021–2023 menunjukkan sumber pembiayaan melebihi atau mampu menutupi defisit anggaran. Meski demikian, APBN 2024 mempertimbangkan risiko pembiayaan dan risiko ekonomi yang mungkin terjadi di tahun 2024.

Sumber terbesar pembiayaan untuk menutup defisit berasal dari pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dan Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri. Dalam pengelolaannya, utang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan efisiensi biaya untuk meningkatkan kepercayaan pasar. Disamping itu, semakin menyempitnya defisit anggaran, rasio utang terhadap PDB juga memperlihatkan penurunan, meski masih hampir menyentuh angka 40 persen (lihat Gambar 3.11). Akan tetapi, rasio utang Indonesia relatif moderat dibandingkan negara lain, dan tetap terkendali di bawah batas 60 persen PDB (Kemenkeu 2024a).



Catatan: Tahun 2024 menggunakan penghitungan realisasi s.d bulan Juni 2024.

Sumber: Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan APBN Kita Juli 2024

Gambar 3.11 Rasio Utang Terhadap PDB, 2021–2024

Sejalan dengan defisit anggaran yang semakin menurun, keseimbangan primer pada realisasi APBN tahun 2023 mencatat nilai positif (surplus) sebesar 102,59 triliun (Lihat Tabel 3.1). Keseimbangan Primer APBN selalu berada pada nilai negatif selama 12 tahun terakhir. Surplus keseimbangan primer adalah kondisi dimana Pendapatan Negara lebih besar daripada Belanja Negara di luar pembayaran bunga utang. Keseimbangan Primer Positif menunjukkan kemampuan pemerintah untuk membayar seluruh atau sebagian pokok dan bunga utang menggunakan Pendapatan Negara. Sementara Keseimbangan Primer negatif menggambarkan pemerintah harus mencari pembiayaan untuk membayar seluruh atau sebagian pokok dan bunga utang dari tahun-tahun sebelumnya.

Meski realisasi pembiayaan APBN 2023 berkinerja positif, APBN 2024 harus menghadapi tantangan pembiayaan dan pasar keuangan untuk dapat meningkatkan/mempertahankan kinerja pembiayaan dari tahun sebelumnya. Normalisasi kebijakan moneter the Fed akan berpotensi menimbulkan pengetatan likuiditas global, dan potensi masih berlanjutnya *capital outflow*. Hal tersebut berisiko meningkatkan imbal hasil SBN sebagai dampak dari peningkatan suku bunga UST dan inflasi global yang tinggi. Selain itu, Pemulihan ekonomi domestik diperkirakan akan mendorong penyaluran kredit, sehingga peran perbankan dalam pembiayaan utang akan terbatas.

Oleh karena itu, pemerintah membangun strategi dan mitigasi risiko pembiayaan utang 2024. Selain mengedepankan prinsip kehati-hatian dan efisiensi biaya, strategi pembiayaan utang 2024 akan lebih inovatif. Strategi dan mitigasi risikonya meliputi: (1) memprioritaskan penerbitan utang dengan tenor menengah-Panjang dan tingkat bunga tetap; (2) memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain, antara lain *idle cash* dari Badan Layanan Umum (BLU) dan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL); (3) mengembangkan pembiayaan kreatif, dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*) dan mendorong pengembangan sumber, skema dan instrumen pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs) (Kemenkeu 2024b).

Pengelolaan Risiko Fiskal Untuk APBN yang Berjalan Optimal

Pelaksanaan APBN 2024 dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan domestik. Pada triwulan II 2024 saja, sudah terjadi arus modal keluar (*capital outflow*) akibat kebijakan kenaikan suku bunga oleh bank sentral *The Fed*. Hal ini mengganggu stabilitas nilai tukar, kondisi pasar modal, serta stabilitas pasar keuangan di Indonesia. Pada April 2024, nilai tukar rupiah bahkan menembus angka 16.000. Beruntung, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga pada level 6,25 persen (Bank Indonesia, 2024). Jika BI merespons dengan menaikkan suku bunga, hal itu dapat meningkatkan biaya modal (*cost of capital*) di pasar keuangan domestik.

Selain itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, konflik Rusia-Ukraina, dan perang dagang yang berlanjut antara AS dan Tiongkok berdampak pada fluktuasi harga komoditas global, lonjakan inflasi global, serta fragmentasi geopolitik yang dapat mengganggu kerja sama dan kemitraan strategis. Dampak terbesar dirasakan pada harga komoditas energi, yang mempengaruhi anggaran subsidi energi dalam APBN dan akhirnya memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pada Agustus 2024, harga BBM di Indonesia naik akibat tren kenaikan harga minyak mentah, penurunan produksi domestik, dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Dua tantangan ekonomi global ini tentu menghambat pelaksanaan APBN, sehingga pemerintah perlu melakukan upaya pencegahan dan antisipasi. Sejak tahun 2008, pemerintah telah melakukan pengelolaan risiko fiskal. Pada periode 2022 hingga 2024, risiko fiskal diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi risiko fiskal yang umum digunakan di berbagai negara. Risiko fiskal dibagi menjadi empat kategori: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi makro; (2) risiko implementasi program dan kebijakan; (3) risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pada tahun 2024, risiko fiskal daerah ditambahkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan risiko fiskal diungkapkan di Nota Keuangan APBN sejak tahun 2008 pada Bab 6 Risiko Fiskal oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Kemenkeu 2023c). Pengelolaan risiko fiskal secara umum memuat sumber-sumber risiko fiskal dan upaya mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Adapun, risiko dan mitigasi fiskal APBN 2024 terangkum pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Risiko Fiskal dan Mitigasinya Menurut Kategori Risiko, 2024

Risiko	Mitigasi
(1)	(2)
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro	
Perubahan pada asumsi dasar ekonomi makro dibandingkan dengan realisasi kondisi ekonomi, baik berupa kenaikan maupun penurunan, akan berpengaruh terhadap kondisi fiskal.	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi secara berkala. Analisis sensitivitas APBN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Alokasi dana cadangan sebagai bantalan (<i>cushion</i>).
2. Risiko Implementasi Program dan Kebijakan	
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kebijakan Mandatory Spending Pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi Program Pembiayaan Perumahan MBR Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara, Pembiayaan Utang 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan alokasi mandatory spending agar memberikan outcome yang optimal Penguatan kerja sama dan kolaborasi, sinergitas dengan BUMN untuk percepatan eksplorasi. Peningkatan pembiayaan non-APBN, melibatkan pihak swasta untuk berpartisipasi. Efektivitas implementasi UU HPP Menjaga defisit sesuai dengan kaidah fiskal. Memprioritaskan sumber pembiayaan <i>domestic</i> dan <i>creative financing</i>.
3. Risiko Kewajiban Kontingen Pemerintah Pusat	
<ul style="list-style-type: none"> Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah, BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur, Jaminan Sosial, Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Tuntutan Hukum kepada Pemerintah, Lembaga Keuangan Tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan secara berkala <i>Transfer risk</i> (antara lain dana cadangan) <i>Risk sharing</i> dengan PT PII (Persero) sebagai <i>ring fencing</i> terhadap APBN
4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik	
Risiko berkaitan aset dan kewajiban negara secara agregat yang meliputi entitas Pemerintah Pusat, Pemda-provinsi dan kabupaten/kota, Bank Indonesia, dan BUMN	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Penguatan koordinasi Implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Mendorong creative financing/blended financing
5. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Risiko Fiskal Daerah)	
Risiko ineffisiensi belanja daerah dan potensi lemahnya tata kelola belanja di daerah	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah Kebijakan penyaluran transfer berbasis kinerja Penguatan kelembagaan

Sumber: Kementerian Keuangan, Nota Keuangan APBN 2024 dan Informasi APBN 2024

Stabilitas dan Digitalisasi: Moneter dalam Era Baru

4



Uang beredar mengalami peningkatan pada tahun 2023, jumlahnya mencapai **2.675,33 Triliun Rupiah**. Peredaran tertinggi terjadi pada Bulan **Desember** dengan peredaran uang kartal mencapai 975,92 Triliun Rupiah dan peredaran uang giral mencapai 1.699,41 Triliun Rupiah.

Rata-Rata Nilai Transaksi per Volume Transaksi pada Sistem Pembayaran Non Tunai Tahun 2023



Kartu Debit

Rp 1.025.937



Kartu Kredit

Rp 1.030.061



Mesin EDC

Rp 538.110



QR Code (QRIS)*

Rp 105.704

*periode Juni 2023-Juni 2024



Internet Banking

Rp 14.149.878



Uang Elektronik

Rp 92.744

Sumber data:

Badan Pusat Statistik, Publikasi Indikator Ekonomi
Bank Indonesia, Publikasi Statistik Sistem Keuangan Indonesia

*Digitalisasi sektor keuangan
berkembang pesat diiringi
dengan keragaman pilihan
sistem pembayaran*

Ekonomi Indonesia terus menunjukkan pemulihan yang stabil meski masih menghadapi tantangan global di tahun 2023. Pada tahun 2023, ekonomi moneter Indonesia mengalami sejumlah dinamika penting yang mempengaruhi stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang lambat, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan permintaan domestik dan kinerja ekspor yang solid, khususnya dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit. Selain itu, kebijakan yang diterapkan pemerintah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga, mengelola nilai tukar, dan mendorong inklusi keuangan.

Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang kunci dalam menjaga stabilitas moneter melalui penentuan kebijakan suku bunga dan pengendalian inflasi. Sepanjang tahun 2023, BI menetapkan suku bunga kebijakan (*BI 7-Day Reverse Repo Rate*) di level yang moderat dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Inflasi tetap terkendali di kisaran 3 ± 1 persen. Kondisi ini mencerminkan pengendalian harga yang efektif, terutama pada sektor pangan dan energi.

Nilai tukar rupiah yang mengalami fluktuasi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan moneter negara maju dan dinamika perdagangan internasional. Namun, BI selaku bank sentral berhasil menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan intervensi pasar dan kebijakan makroprudensial yang tepat waktu. Upaya yang dilakukan tersebut berupaya untuk memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan aliran modal masuk ke dalam negeri.

Pada sisi inklusi keuangan, pemerintah mendorong pengimplementasian kegiatan inklusi keuangan melalui berbagai inisiatif. Cakupan implementasi tersebut termasuk pengembangan sistem pembayaran digital dan perluasan akses keuangan dengan segmentasi masyarakat yang lebih luas. Langkah ini meliputi beberapa kebijakan seperti QRIS dan dukungan terhadap UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Memasuki semester pertama tahun 2024, kondisi ekonomi moneter Indonesia tetap positif meski ketidakpastian global masih berlanjut. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan terhadap mata uang negara berkembang lainnya, didukung oleh aliran masuk modal dan kebijakan suku bunga yang masih kompetitif. Pemerintah juga melanjutkan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial, termasuk memperpanjang kebijakan kartu kredit dan tarif SKNBI hingga akhir tahun 2023, serta menyesuaikan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS.

Perkembangan Uang Beredar

Uang beredar merupakan kewajiban sistem moneter pada bank sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat/BPR terhadap sektor swasta domestik. Uang beredar dibagi menjadi dua, yaitu uang beredar dalam arti sempit (M_1) dan uang beredar dalam arti luas (M_2). Uang beredar dalam arti sempit meliputi uang kartal dan uang giral. Uang beredar dalam arti luas atau yang sering disebut sebagai likuiditas perekonomian meliputi M_1 , uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Uang beredar M_2 terdiri dari uang kuasi, simpanan giro dalam rupiah dan uang kartal di luar bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Semua komponen uang beredar M_2 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Gambar 4.1). Dilihat berdasarkan kontribusinya, uang kuasi menjadi komponen terbesar pada uang beredar M_2 dengan kontribusi sebesar 70 persen. Selanjutnya, kontribusi terbesar kedua ada pada simpanan giro dalam rupiah sebesar 30 persen dan sisanya berupa surat berharga selain saham sebesar kurang dari 1 persen.



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Edisi Mei 2024

Gambar 4.1 Jumlah Uang Beredar (miliar rupiah), 2019–2024

Perkembangan uang beredar M_2 di awal tahun 2023 bulan Januari menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,4 persen ($y-on-y$) dibanding bulan yang sama tahun 2022. Siklus setiap tahunnya menunjukkan peredaran uang M_2 di awal tahun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tetapi, kondisi ini mengalami peningkatan hingga pada akhir tahun kondisi M_2 yang beredar mencapai puncaknya atau menjadi yang tertinggi pada tahun tersebut (Tabel 4.1).

Salah satu komponen penyumbang uang beredar M_2 adalah uang beredar M_1 yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Sebagai penyumbang komponen terbesar, fluktuasi uang beredar M_1 sejalan dengan fluktuasi uang beredar M_2 . Perkembangan uang beredar M_1 setiap bulan di tahun

2023 menunjukkan tren yang meningkat setiap bulannya. Uang beredar M1 mengalami kenaikan yang cukup tinggi di bulan April dan September 2023 karena faktor hari raya Idul Fitri dan perkembangan kredit produktif di masyarakat.

Tabel 4.1 Perkembangan Uang Beredar (miliar rupiah), Januari 2022–April 2024

Akhir Periode	M2					
	M1			Uang Kuasi	Surat Berharga Selain Saham	Jumlah
	Uang Kartal	Uang Giral	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2022						
Januari	765.015	1.384.536	2.149.552	5.474.170	23.068	7.646.789
Februari	795.951	1.399.667	2.195.618	5.470.961	23.556	7.690.135
Maret	792.518	1.462.073	2.254.591	5.529.751	26.608	7.810.949
April	896.318	1.430.891	2.327.208	5.556.189	28.087	7.911.484
Mei	820.155	1.482.756	2.302.911	5.524.848	26.427	7.854.187
Juni	815.316	1.524.134	2.339.450	5.526.503	24.795	7.890.747
Juli	822.043	1.474.003	2.296.045	5.530.342	19.164	7.845.552
Agustus	805.459	1.473.704	2.279.163	5.598.840	19.624	7.897.628
September	807.818	1.513.065	2.320.883	5.620.749	21.062	7.962.693
Okttober	808.649	1.730.418	2.539.067	5.657.949	26.038	8.223.055
November	840.492	1.627.459	2.467.951	5.805.021	24.378	8.297.350
Desember	897.799	1.710.998	2.608.797	5.894.662	24.563	8.528.022
2023						
Januari	830.373	1.591.801	2.422.174	5.822.056	27.608	8.271.838
Februari	813.834	1.589.760	2.403.594	5.871.477	25.577	8.300.648
Maret	832.817	1.575.602	2.408.419	5.861.271	23.594	8.293.283
April	895.719	1.577.150	2.472.869	5.856.023	23.457	8.352.350
Mei	859.517	1.563.801	2.423.318	5.890.062	22.791	8.336.171
Juni	879.721	1.586.288	2.466.009	5.883.280	23.701	8.372.990
Juli	853.336	1.584.723	2.438.059	5.884.767	26.667	8.349.492
Agustus	851.723	1.559.128	2.410.851	5.926.011	27.878	8.364.739
September	865.392	1.616.837	2.482.229	5.933.580	25.427	8.441.236
Okttober	863.102	1.634.608	2.497.710	5.981.917	26.917	8.506.544
November	893.165	1.617.603	2.510.768	6.036.313	27.836	8.574.917
Desember	975.928	1.699.406	2.675.333	6.122.585	28.613	8.826.531

Lanjutan Tabel 4.1

Akhir Periode	M2					
	M1			Uang Kuasi	Surat Berharga Selain Saham	Jumlah
	Uang Kartal	Uang Giral	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2024						
Januari	915.931	1.648.803	2.564.734	6.128.684	28.532	8.721.950
Februari	911.689	1.644.796	2.556.485	6.152.725	30.364	8.739.574
Maret	953.824	1.685.601	2.639.425	6.221.533	30.467	8.891.425
April	943.209	1.680.039	2.623.248	6.273.172	31.539	8.927.959

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Edisi Mei 2024

Uang kuasi merupakan simpanan pada bank umum dan BPR yang dapat memenuhi fungsi-fungsi uang, baik sebagai satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, maupun alat pembayaran yang dimiliki oleh sektor swasta domestik. Uang kuasi sebagai komponen utama dari M2, pergerakannya disepanjang tahun 2023 (secara *y-on-y*) terus mengalami pertumbuhan. Laju pertumbuhan uang kuasi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 7,32 persen (*y-on-y*) dan terendah terjadi pada bulan Desember sebesar 3,86 persen (*y-on-y*).

Selanjutnya yaitu komponen surat berharga selain saham. Komponen yang tercakup didalamnya meliputi obligasi, sertifikat deposito, surat berharga komersial, reksa dana dan instrumen keuangan lain yang bersifat derivatif. Sepanjang tahun 2023, komponen surat berharga selain saham mengalami kondisi yang fluktuatif dengan tren yang melandai di tengah tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan yang terjadi di bulan Agustus sebesar 42 persen menjadi pertumbuhan tertinggi secara *y-on-y*. Sedangkan siklus pertumbuhan terendah ada pada bulan Maret hingga Mei. Kondisi ini tidak lepas dari pengaruh ekonomi makro domestik yang terjadi di dalam negeri, sentimen pasar serta faktor spesifik emiten.

Perkembangan Uang Primer dan Komponennya

Uang primer merupakan kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/ BPR) terhadap sektor swasta domestik, tidak termasuk di dalamnya sektor pemerintah pusat dan penduduk. Kewajiban yang menjadi komponen uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Peredaran uang primer di Indonesia pada tahun 2023 secara umum cukup berfluktuatif (Tabel 4.2). Peredaran uang primer di bulan Januari 2023 tercatat sebesar Rp1.544,96 triliun. Kenaikan peredaran uang primer yang cukup tinggi terjadi di bulan April, November dan Desember dengan masing-masing laju pertumbuhannya (*m-to-m*) sebesar 7,21 persen, 2,75 persen dan 10,88 persen. Kondisi ini sejalan dengan fluktuasi uang beredar M2 yang dipengaruhi oleh adanya libur hari raya idul fitri pada bulan April dan Natal di bulan Desember. Selain itu, peningkatan fluktuasi uang beredar juga disebabkan karena penyaluran kredit produktif/investasi dan kegiatan ekonomi menjelang pemilu di awal tahun 2024.

Uang kartal adalah salah satu komponen uang primer yang beredar di masyarakat, dan lebih dikenal oleh masyarakat sebagai uang kertas dan uang logam yang digunakan sebagai alat pembayaran. Sepanjang tahun 2023, uang kartal (di luar bank umum dan BPR) yang diedarkan cenderung berfluktuatif. Pertumbuhan uang kartal tersebut mengalami puncak pada bulan Desember yaitu sebesar 8,70 persen (*y-on-y*). Apabila dilihat pada pertumbuhan secara bulanan (*m-to-m*), pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada bulan Desember dengan nilai sebesar 9,27 persen.

Komponen uang primer lainnya adalah kas bank umum dan BPR. Sepanjang tahun 2023, peredaran kas bank umum dan BPR cukup berfluktuatif dimana puncak peredaran terjadi pada bulan April yaitu sebesar Rp 135,3 triliun. Sepanjang tahun 2023 laju pertumbuhan peredaran kas umum dan BPR merupakan laju pertumbuhan terbesar terjadi di bulan Maret tercatat sebesar 17,51 persen (*y-on-y*). Selanjutnya pada bulan Januari terjadi perlambatan laju pertumbuhan sebesar 17,1 persen (*y-on-y*).

Komponen selanjutnya adalah saldo giro bank umum pada BI. Saldo giro bank umum pada BI merupakan penempatan bank umum dalam bentuk giro rupiah pada BI yang digunakan dalam rangka pemenuhan giro wajib minimum (GWM). Pada tahun 2023, saldo giro bank tercatat pada posisi Rp 524 triliun sampai Rp 612 triliun. Pertumbuhan tertinggi saldo giro bank terjadi di bulan Januari dengan laju pertumbuhan sebesar 93,48 persen (*y-on-y*).

Tabel 4.2 Perkembangan Uang Primer (miliar rupiah), Januari 2022–Mei 2024

Akhir Periode	Uang Kartal yang Diedarkan		Giro Bank	Giro Perusahaan dan Perorangan	Jumlah		
	Uang Kartal	Kas Bank					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
2022							
Januari	765.015	120.139	316.364	4.240	1.205.758		
Februari	795.951	85.547	308.956	2.235	1.192.689		
Maret	792.518	98.690	382.994	9.726	1.283.929		

Lanjutan Tabel 4.2

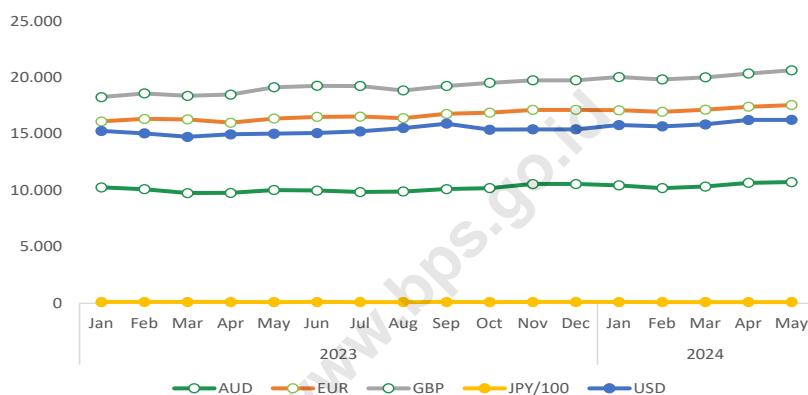
Akhir Periode	Uang Kartal yang Diedarkan		Giro Bank	Giro Perusahaan dan Perorangan	Jumlah			
	Uang Kartal	Kas Bank						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
April	896.318	145.005	408.934	885	1.451.141			
Mei	820.155	109.656	360.600	2.533	1.292.944			
Juni	815.316	97.169	423.875	768	1.337.129			
Juli	822.043	91.235	513.087	3.308	1.429.673			
Agustus	805.459	97.198	564.038	490	1.467.186			
September	807.818	97.964	537.082	752	1.443.615			
Okttober	808.649	97.208	695.530	1.791	1.603.177			
November	840.492	94.711	543.746	767	1.479.716			
Desember	897.799	128.684	687.245	1.890	1.715.619			
2023								
Januari	830.373	99.673	612.113	2.805	1.544.964			
Februari	813.834	91.534	575.398	918	1.481.684			
Maret	832.817	115.975	556.470	793	1.506.054			
April	895.719	135.305	579.021	4.631	1.614.676			
Mei	859.517	112.460	562.922	2.940	1.537.839			
Juni	879.721	112.429	555.967	2.109	1.550.225			
Juli	853.336	97.790	555.454	2.370	1.508.950			
Agustus	851.723	92.976	555.258	1.090	1.501.047			
September	865.392	96.237	557.466	2.829	1.521.924			
Okttober	863.102	94.592	524.593	1.301	1.483.588			
November	893.165	95.243	534.442	1.520	1.524.369			
Desember	975.928	125.829	585.270	3.253	1.690.279			
2024								
Januari	915.931	99.746	499.048	5.536	1.520.262			
Februari	911.689	101.376	484.228	1.879	1.499.171			
Maret	953.824	119.566	442.728	3.756	1.519.874			
April	943.209	115.024	494.988	5.990	1.559.211			
Mei	934.335	103.955	473.790	10.647	1.522.728			

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Edisi Mei 2024

Nilai Tukar Rupiah Berfluktuasi

Perkembangan kurs rupiah terhadap beberapa mata uang dunia mengalami fluktuasi selama tahun 2023. Kondisi tersebut dipengaruhi

oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Rupiah menunjukkan volatilitas yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Rupiah cenderung melemah di awal tahun 2023 sebagai akibat dari kekhawatiran pasar atas kondisi ekonomi global dan efek ketatnya kebijakan moneter dari The Fed. Tetapi, rupiah mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan saat memasuki akhir tahun 2023 seiring dengan penguatan ekonomi, stabilisasi harga komoditas dan pemulihan ekonomi domestik. Hal ini sayangnya tidak berlangsung lama. Pada awal tahun 2024, kondisi ekonomi global kembali menekan rupiah sebagai imbas dari ketegangan geopolitik dan perubahan kebijakan moneter AS yang lebih agresif.



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Edisi Mei 2024

Gambar 4.2 Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, Januari 2023–Mei 2024

Selain terhadap dolar Amerika Serikat, rupiah juga mengalami fluktuasi terhadap dolar Australia sebagai dampak dari dinamika ekonomi yang terjadi antara Indonesia dengan Australia (Tabel 4.2). Dinamika ekonomi yang tercakup seperti menguatnya ekspor komoditas dari Australia serta perubahan kebijakan suku bunga yang ditetapkan bank sentral Australia turut mempengaruhi pergerakan rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia cenderung stabil dengan sedikit tekanan pada kuartal ketiga selama tahun 2023 sebagai imbas dari kenaikan harga komoditas dari Australia.

Sementara itu, posisi nilai tukar rupiah terhadap euro, poundsterling dan yen Jepang menunjukkan tren yang beragam. Selama tahun 2023, rupiah relatif stabil terhadap euro meski krisis energi di Eropa menyebabkan beberapa tekanan di pertengahan tahun. Sedangkan terhadap poundsterling, sepanjang tahun 2023 rupiah mengalami pelemahan. Berbeda halnya dengan posisi nilai tukar rupiah terhadap euro dan poundsterling, volatilitas yang besar terjadi pada posisi nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan moneter Jepang yang tidak konvensional dan fluktuasi pasar global yang mempengaruhi aliran modal.

Tabel 4.3 Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, Januari 2022–Mei 2024

Akhir Periode	Jenis Valuta				
	Dollar Australia (AUD)	Euro Uni Eropa (EUR)	Poundsterling Inggris Raya (GBP)	Yen Jepang (JPY)	Dollar Amerika (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2022					
Januari	765.015	120.139	316.364	4.240	1.205.758
Februari	795.951	85.547	308.956	2.235	1.192.689
Maret	792.518	98.690	382.994	9.726	1.283.929
April	896.318	145.005	408.934	885	1.451.141
Mei	820.155	109.656	360.600	2.533	1.292.944
Juni	815.316	97.169	423.875	768	1.337.129
Juli	822.043	91.235	513.087	3.308	1.429.673
Agustus	805.459	97.198	564.038	490	1.467.186
September	807.818	97.964	537.082	752	1.443.615
Oktober	808.649	97.208	695.530	1.791	1.603.177
November	840.492	94.711	543.746	767	1.479.716
Desember	897.799	128.684	687.245	1.890	1.715.619
2023					
Januari	830.373	99.673	612.113	2.805	1.544.964
Februari	813.834	91.534	575.398	918	1.481.684
Maret	832.817	115.975	556.470	793	1.506.054
April	895.719	135.305	579.021	4.631	1.614.676
Mei	859.517	112.460	562.922	2.940	1.537.839
Juni	879.721	112.429	555.967	2.109	1.550.225
Juli	853.336	97.790	555.454	2.370	1.508.950
Agustus	851.723	92.976	555.258	1.090	1.501.047
September	865.392	96.237	557.466	2.829	1.521.924
Oktober	863.102	94.592	524.593	1.301	1.483.588
November	893.165	95.243	534.442	1.520	1.524.369
Desember	975.928	125.829	585.270	3.253	1.690.279
2024					
Januari	915.931	99.746	499.048	5.536	1.520.262
Februari	911.689	101.376	484.228	1.879	1.499.171
Maret	953.824	119.566	442.728	3.756	1.519.874

Lanjutan Tabel 4.3

Akhir Periode	Jenis Valuta				
	Dollar Australia (AUD)	Euro Uni Europa (EUR)	Poundsterling Inggris Raya (GBP)	Yen Jepang (JPY)	Dollar Amerika (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
April	943.209	115.024	494.988	5.990	1.559.211
Mei	934.335	103.955	473.790	10.647	1.522.728

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Edisi Mei 2024

Suku Bunga PUAB (Pasar Uang Antar Bank) merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi likuiditas di pasar keuangan domestik. Sepanjang tahun 2023, suku bunga PUAB mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada awal tahun, suku bunga PUAB berada pada level yang relatif rendah, didorong oleh likuiditas yang melimpah di pasar. Hal ini sejalan dengan kebijakan moneter longgar yang diterapkan Bank Indonesia pada akhir tahun 2022 untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Namun, memasuki pertengahan tahun, suku bunga PUAB mulai mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan permintaan likuiditas di pasar uang. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh keputusan BI untuk menyesuaikan stance kebijakan moneternya guna mengantisipasi tekanan inflasi yang mulai meningkat. BI melakukan operasi pasar terbuka (OPT) secara lebih aktif untuk mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas suku bunga PUAB.

Suku bunga atau BI rate adalah suatu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Sejak Agustus 2016, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru untuk menggantikan BI rate yaitu *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* (BI7DRR). Suku bunga kebijakan baru atau *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* digunakan karena dinilai dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor riil. Sepanjang tahun 2023, BI secara bertahap menyesuaikan BI7DRRR untuk merespons perubahan kondisi makroekonomi dan tekanan inflasi.

Pada awal tahun 2023, BI7DRRR dipertahankan pada level 5,25 persen yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2022. Keputusan ini diambil untuk memberikan dukungan terhadap pemulihan ekonomi yang masih berlangsung, sambil tetap menjaga stabilitas harga. Namun, seiring berjalannya waktu, inflasi domestik mulai menunjukkan tren peningkatan, didorong oleh kenaikan harga pangan dan energi serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Dalam rangka merespons tekanan inflasi ini, BI mulai menaikkan BI7DRRR secara bertahap pada kuartal kedua hingga kuartal ketiga tahun 2023. Kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar dan mengendalikan ekspektasi inflasi agar tetap sesuai dengan target inflasi yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, BI7DRRR mencapai level 6,00

persen, mencerminkan *stance* kebijakan moneter yang lebih ketat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi.

Tabel 4.4 Perkembangan Suku Bunga PUAB dan 7-Day RR Rate, Januari 2022–Mei 2024

Akhir Periode	Pasar Uang Antar Bank Rupiah Pagi		Pasar Uang Antar Bank Rupiah Sore		BI 7-day RR-Rate
	1 Hari	Keseluruhan	1 Hari	Keseluruhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2022					
Januari	2,79	2,80	2,78	2,78	3,50
Februari	2,79	2,89	2,79	2,82	3,50
Maret	2,79	2,92	2,79	3,43	3,50
April	3,50	3,51	3,49	3,50	3,50
Mei	2,79	2,87	2,79	2,81	3,50
Juni	2,80	2,94	2,79	3,07	3,50
Juli	2,80	2,91	2,80	3,08	3,50
Agustus	3,14	3,65	3,12	3,34	3,75
September	3,84	4,03	3,84	3,91	4,25
Okttober	4,26	4,43	4,24	4,26	4,75
November	4,81	5,07	4,81	5,01	5,25
Desember	5,03	5,16	5,01	5,26	5,50
2023					
Januari	5,34	5,52	5,41	5,42	5,75
Februari	5,62	5,73	5,62	5,65	5,75
Maret	5,67	5,75	5,55	5,59	5,75
April	5,69	5,81	5,72	5,79	5,75
Mei	5,65	5,85	5,60	5,74	5,75
Juni	5,88	5,95	5,93	5,97	5,75
Juli	5,67	5,74	5,70	5,78	5,75
Agustus	5,57	5,76	5,57	5,64	5,75
September	5,61	5,72	5,64	5,80	5,75
Okttober	5,85	6,02	5,85	5,90	6,00
November	5,93	6,11	5,92	6,08	6,00
Desember	5,92	6,09	5,85	6,01	6,00
2024					
Januari	5,82	5,96	5,80	5,90	6,00

Lanjutan Tabel 4.4

Akhir Periode	Pasar Uang Antar Bank Rupiah Pagi		Pasar Uang Antar Bank Rupiah Sore		BI 7-day RR-Rate
	1 Hari	Keseluruhan	1 Hari	Keseluruhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Februari	5,90	6,06	5,70	5,85	6,00
Maret	5,91	6,05	5,90	6,05	6,00
April	6,11	6,33	6,07	6,19	6,25
Mei	6,12	6,35	6,10	6,18	6,25

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Edisi Mei 2024

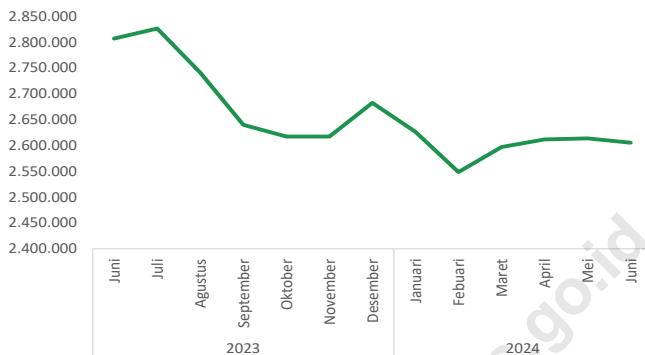
Digitalisasi Sektor Keuangan

Digitalisasi mengubah cara kerja di banyak sektor ekonomi, termasuk di dalamnya sektor keuangan. Dari yang semula berjalan secara konvensional, sektor keuangan terus bergerak cepat beradaptasi dengan kemajuan digital untuk menjawab perkembangan zaman. Salah satu bentuk digitalisasi di sektor keuangan ada pada sistem pembayaran. Menurut Bank Indonesia, sistem pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga yang berwenang serta cara kerja yang digunakan dalam memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban yang muncul karena kegiatan ekonomi.

Perubahan sistem pembayaran mengikuti evolusi pembayaran dengan berdasarkan unsur penggerak yang mencakup inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat serta kebijakan otoritas bank sentral. Secara garis besar, sistem pembayaran terbagi menjadi sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kertas dan uang logam, sedangkan sistem pembayaran non tunai menggunakan instrumen yang beragam mulai dari alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, giro, nota debit maupun uang elektronik. Bank Indonesia selaku bank sentral menyediakan infrastruktur untuk transaksi pembayaran non tunai. Cakupan pembayaran non tunai dibagi menjadi dua jenis, yaitu transaksi nilai besar dan transaksi nilai kecil (transaksi ritel). Transaksi nilai besar yang mempunyai nilai transaksi \geq Rp 1 miliar menggunakan infrastruktur Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Jenis transaksi ini banyak digunakan untuk transaksi antar bank atau transaksi lembaga keuangan. Sementara itu, transaksi nilai kecil yang mempunyai nilai transaksi kurang dari Rp 1 miliar menggunakan infrastruktur Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Jenis transaksi ini banyak digunakan untuk transaksi antar individu dan frekuensinya cukup tinggi.

Baik BI-RTGS, BI-SSSS maupun SKNBI mempunyai keterbatasan jam operasional dan akses kanal digital (*mobile* dan *internet banking*). Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan infrastruktur

pembayaran ritel untuk skala nasional yang aman, lengkap, efisien dan bersifat real time yang diberi nama BI-FAST. Bank Indonesia mulai menerapkan infrastruktur BI-FAST secara bertahap mulai Desember 2021 dengan prioritas awal pada transfer kredit antar individu. Selanjutnya, BI-FAST akan dikembangkan untuk transfer debit, *bulk* kredit dan permintaan pembayaran dengan penggabungan transaksi berbasis instrument, QRIS dan lintas negara.



Sumber: Bank Indonesia, Data Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Pinjaman & Transaksi Pemerintah (diolah)

Gambar 4.3 Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui BI-FAST (rupiah), Juni 2023–Juni 2024

Selama Juni 2023 hingga Juni 2024, rata-rata nilai transaksi BI-FAST berada di kisaran angka 2,65 juta rupiah setiap kali transaksi (Gambar 4.3). Transaksi tertinggi terjadi di bulan Juli 2023 dengan rata-rata nilai transaksi sebesar 2,83 juta rupiah per transaksi. Kondisi tersebut berlangsung dengan kecenderungan menurun hingga bulan Desember 2023 terjadi lagi kenaikan rata-rata nilai transaksi karena momen hari raya Natal dan libur tahun baru. Setelahnya, rata-rata nilai transaksi sedikit menurun hingga Februari 2024. momen bulan Ramadhan di bulan Maret dan hari raya Idul Fitri yang terjadi di bulan April menjadi momentum kenaikan kembali pada transaksi BI-FAST.

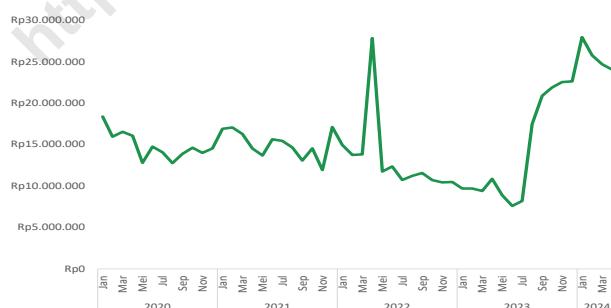


Sumber: Bank Indonesia, Statistik Sistem Keuangan Indonesia Edisi Mei 2024

Gambar 4.4 Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui Mesin EDC (rupiah), Januari 2020–April 2024

Dalam mendukung sistem pembayaran menggunakan kartu, terdapat infrastruktur berupa mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang dapat langsung terhubung ke rekening bank pengguna untuk selanjutnya dilakukan penghitungan transaksi pembayaran secara *real time*. Mesin EDC banyak terdapat pada penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi kartu kredit, kartu debit dan atau uang elektronik serta bekerjasama dengan bank-bank tertentu. Penggunaan mesin EDC sebagai sistem pembayaran menggunakan kartu masih digemari masyarakat. Hal ini terbukti dari semakin tingginya nilai transaksi per volume transaksi yang terjadi pada transaksi jual beli yang menggunakan sistem mesin EDC (Gambar 4.4). Selama tahun 2023, rata-rata nilai transaksi dengan menggunakan sistem mesin EDC berada di kisaran 500 hingga 600 ribu rupiah per transaksi.

Selain pembayaran menggunakan kartu dengan mesin EDC, terdapat juga kanal pembayaran untuk memfasilitasi transaksi non tunai tanpa menggunakan kartu. Kanal pembayaran ini dikembangkan dan dimiliki oleh bank secara mandiri untuk kepentingan nasabahnya dengan menggunakan berbagai teknologi seperti *short message service* (SMS), mobile, website, *subscriber identity module tool kit*, dan atau *unstructured supplementary service data*. Kanal yang paling terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat sekarang adalah layanan yang berbasis internet (*internet banking*). Selama tahun 2023, nilai transaksi pada setiap volume transaksi yang menggunakan *internet banking* mengalami lonjakan yang cukup tajam di bulan Agustus 2023 (Gambar 4.5). Kondisi ini terus meningkat hingga Januari 2024. Kondisi ini disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, penyaluran bantuan pemerintah berupa insentif dana, dan momen kenaikan suku bunga.

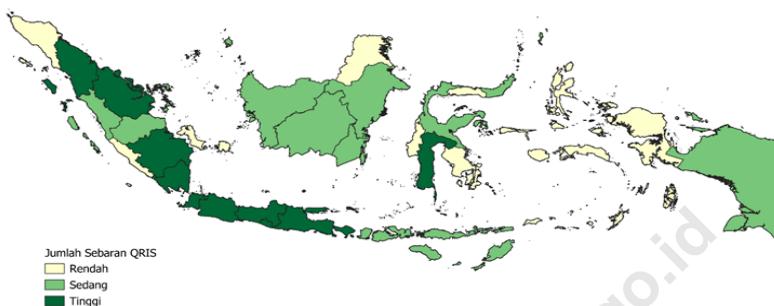


Sumber: Bank Indonesia, Statistik Sistem Keuangan Indonesia Edisi Mei 2024

Gambar 4.5 Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui Internet Banking (rupiah), Januari 2020–April 2024

Kanal transaksi non tunai lain yang sedang popular adalah pembayaran dengan menggunakan kode cepat (*quick code*). Bank Indonesia beserta penyelenggara jasa sistem pembayaran mengembangkan sistem *quick response code Indonesian standard* (QRIS) untuk mengakomodasi transaksi dengan QR code menjadi lebih mudah, cepat dan aman. Hingga Juni 2024,

penjual barang atau jasa (*merchant*) yang menggunakan QRIS sudah tersebar di seluruh Indonesia. Konsentrasi *merchant* yang menggunakan QRIS paling banyak ada di wilayah dengan kondisi perputaran ekonomi yang cepat dan banyak seperti di Pulau Jawa, beberapa provinsi di Pulau Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kepulauan Riau), Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 4.6).



Sumber: Bank Indonesia, Data Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang, Pengelolaan Pinjaman & Transaksi Pemerintah (diolah)

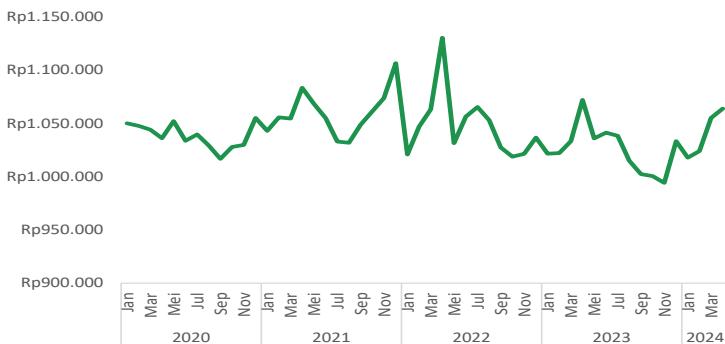
Gambar 4.6 Sebaran *Merchant* QRIS Regional per Juni 2024



Sumber: Bank Indonesia, Data Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang, Pengelolaan Pinjaman & Transaksi Pemerintah (diolah)

Gambar 4.7 Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui QRIS (rupiah), Juni 2023–Juni 2024

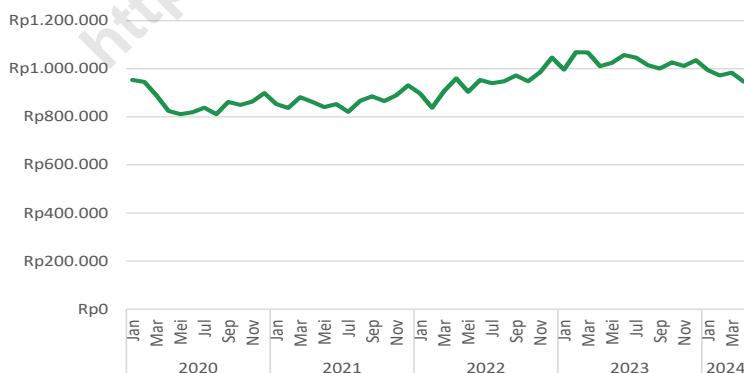
Pembayaran melalui QRIS terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan penggunaanya mengalami kenaikan sebesar 6 kali lipat dengan transaksi lebih dari 10 kali lipat dari pertama kali QRIS diluncurkan (Laporan Perekonomian Indonesia BPSS 2023). Namun, nilai transaksi yang dikeluarkan pada setiap transaksi QRIS masih bernilai kecil dengan nilai berkisar antara 98 ribu hingga 111 ribu rupiah per transaksi. Sepanjang tahun 2023, nilai transaksi melalui QRIS cukup berfluktuatif dari bulan ke bulan. Transaksi QRIS banyak terjadi di bulan Desember bertepatan dengan liburan tahun baru dan hari raya Natal. Transaksi QRIS juga terlihat meningkat saat bulan Maret hingga April bersamaan dengan bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri (Gambar 4.7).



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Sistem Keuangan Indonesia Edisi Mei 2024

Gambar 4.8 Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui Kartu Debit (rupiah), Januari 2020–April 2024

Pengembangan infrastruktur sektor keuangan tidak lepas dari pengembangan instrumen pembayaran untuk melengkapi keterpaduan digitalisasi. Salah satu instrumen pembayaran yang sudah lama dikembangkan adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Terdapat tiga jenis kartu alat pembayaran, yaitu kartu ATM dan ATM + debit serta kartu kredit. Pada pembayaran dengan menggunakan kartu debit, nilai transaksi per volume transaksi cenderung berfluktuasi sepanjang tahun 2023. Nilai transaksi terendah ada di bulan November dengan nilai rata-rata transaksi sebesar 994 ribu rupiah, sedangkan nilai transaksi tertinggi ada di bulan April dengan nilai rata-rata transaksi sebesar 1,072 juta rupiah (Gambar 4.8).

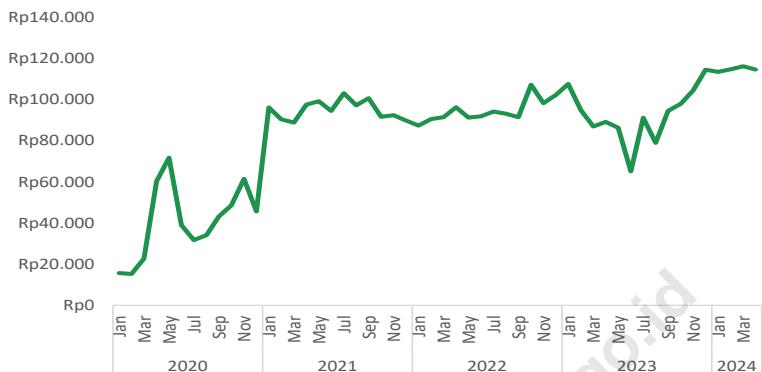


Sumber: Bank Indonesia, Statistik Sistem Keuangan Indonesia Edisi Mei 2024

Gambar 4.9 Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui Kartu Kredit (rupiah), Januari 2020–April 2024

Berbeda halnya dengan transaksi pada kartu debit, nilai transaksi per volume pada kartu kredit mengalami kenaikan. Kondisi ini dipicu dari banyaknya promo diskon dari *marketplace* bagi pembayaran yang menggunakan kartu kredit hingga program cicilan nol persen bagi pengguna kartu kredit.

Selama tahun 2023, nilai transaksi dengan menggunakan kartu kredit cenderung stabil. Nilai transaksi tertinggi ada di bulan Juni dengan nilai rata-rata transaksi sebesar 1,056 juta rupiah, sedangkan nilai transaksi terendah ada di bulan September dengan nilai rata-rata transaksi sebesar 1 juta rupiah (Gambar 4.9).



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Sistem Keuangan Indonesia Edisi Mei 2024

Gambar 4.10 Nilai Transaksi Per Volume Transaksi pada Transaksi Melalui Uang Elektronik (rupiah), Januari 2020–April 2024

Instrumen alat pembayaran lain selain kartu ATM dan ATM + debit serta kartu kredit adalah uang elektronik. Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang dibayarkan terlebih dahulu kepada penerbit untuk selanjutnya dikelola oleh penerbit uang elektronik tersebut dan nilai uang disimpan secara elektronik pada media seperti *server* atau *chip*. Secara umum, nilai transaksi dengan menggunakan uang elektronik terus mengalami peningkatan, terutama saat pandemi selesai (Gambar 4.10). Selama tahun 2023, nilai transaksi dengan menggunakan uang elektronik cukup stabil. Nilai transaksi tertinggi ada di bulan Desember dengan nilai rata-rata transaksi sebesar 115 ribu rupiah, sedangkan nilai transaksi terendah ada di bulan Juni dengan nilai rata-rata transaksi sebesar 65 ribu rupiah.

Pembangunan digitalisasi sektor keuangan yang semakin baik telah mendorong masyarakat semakin dekat dengan transformasi digital. Akses yang semakin mudah perlu didukung dengan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk di dalamnya keamanan siber. Ketika ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan telah tercipta, ekonomi Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing akan semakin cepat terwujud.

INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT:

Menjaga Daya Beli Melalui Stabilitas Harga

5



2,61%
(y-on-y)

Inflasi umum 2023 relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi umum disumbang oleh rendahnya inflasi harga yang diatur pemerintah (*administered price*).

INFLASI INTI

1,80 %
(y-on-y)
andil: 1,15 %

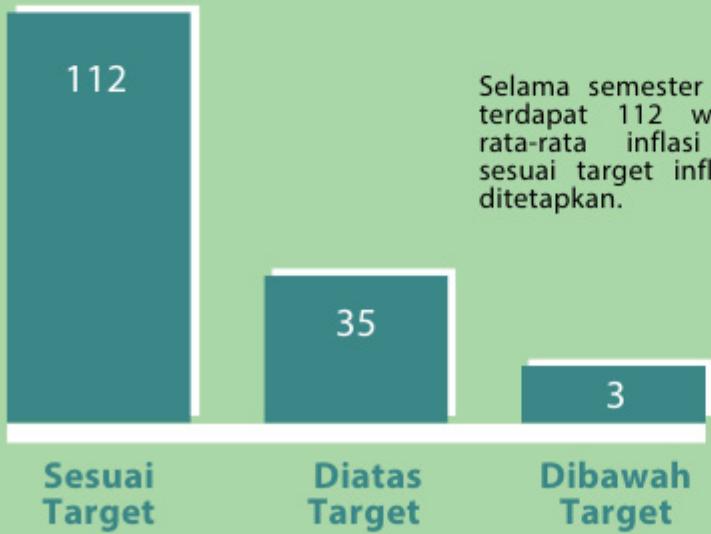
INFLASI HARGA YANG DIATUR PEMERINTAH

1,72 %
(y-on-y)
andil: 0,32 %

INFLASI BARANG BERGEJOLAK

6,73 %
(y-on-y)
andil: 1,14 %

Jumlah Wilayah Menurut Target Inflasi



Selama semester pertama 2024, terdapat 112 wilayah dengan rata-rata inflasi (*year-on-year*) sesuai target inflasi yang telah ditetapkan.

*Pemerintah harus segera
mengambil langkah agar
tingginya inflasi yang terjadi tidak
mengarah pada hyperinflation
yang dapat menjadi musibah bagi
perekonomian*

Selain pesatnya pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan terjaganya tingkat inflasi agar tetap berada pada rentang target menjadi prioritas utama pembangunan perekonomian nasional (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2020). Inflasi dijaga tidak terlampaui tinggi karena dapat menggerus daya beli masyarakat, terlebih masyarakat miskin (Murjani 2019). Murjani (2019) menemukan bahwa setiap kenaikan inflasi tahunan sebesar satu persen dapat meningkatkan kemiskinan sebesar 0,95 persen. Pun begitu, inflasi juga dijaga untuk tidak terlalu rendah karena bisa menjadi sinyal negatif bagi turunnya produktivitas ekonomi dan menyebabkan modal asing mengalir keluar dari Indonesia (Manurung dan Yuniasih 2022).

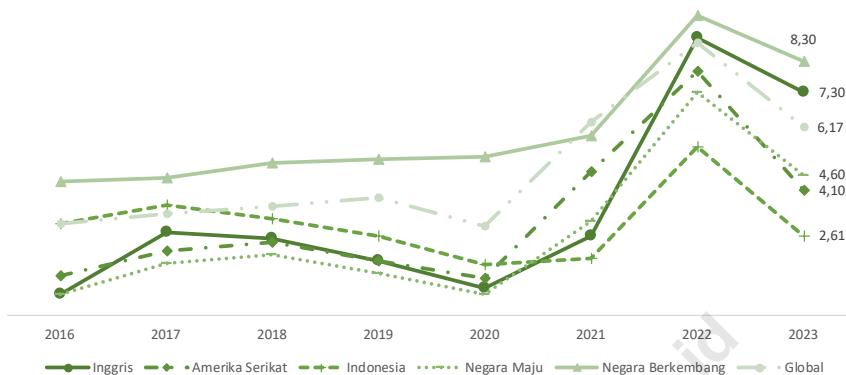
Berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021, inflasi pada tahun 2024 dijaga pada ambang 2,5 persen dengan deviasi sebesar satu persen (Kementerian Keuangan RI 2021). Pengendalian inflasi melibatkan banyak stakeholder karena tidak hanya memerlukan instrumen kebijakan moneter yang diampu Bank Indonesia, tetapi juga melalui jaminan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi oleh pemerintah.

Inflasi dihitung melalui perubahan pada Indeks Harga Konsumen (IHK). Tahun dasar yang digunakan pada penghitungan IHK dimutakhirkan secara berkala. Pada tahun 2020, penghitungan IHK menggunakan tahun 2018 sebagai tahun dasar dengan mencakup 90 kota inflasi pada 11 kelompok komoditas berdasarkan COICOP 2018. Empat tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 2024, IHK dihitung dengan tahun dasar 2022 dan melengkapi 150 kabupaten/kota. Perbedaan utama antara IHK tahun dasar 2018 dan 2022 terletak pada kerangka acuan yang digunakan, pembaruan keranjang konsumsi, peningkatan metodologi, dan respons terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang signifikan. Pemutakhiran ini bertujuan agar menjaga relevansi dan akurasi metodologi penghitungan IHK demi memotret kondisi stabilitas harga sesungguhnya di Indonesia dengan mempertimbangkan pola konsumsi dan dinamika ekonomi terkini.

Perbandingan Inflasi Indonesia dengan Negara-negara Global

Inflasi Indonesia secara umum terjaga dan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia (Gambar 5.1). Kondisi tujuh tahun terakhir, inflasi negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat pada mulanya stabil dan rendah, namun angkanya cenderung meningkat pasca pandemi Covid-19, yaitu saat pemulihan ekonomi dimana puncaknya terjadi pada tahun 2022. Pada tahun itu, hampir seluruh negara di dunia mengalami lonjakan inflasi yang cukup tajam, walaupun tahun 2023 cenderung lebih rendah daripada inflasi tahun sebelumnya. Meskipun termasuk negara berkembang, inflasi Indonesia jauh lebih rendah daripada kebanyakan negara berkembang. Secara agregat, inflasi negara berkembang pada 2023 mencapai 8,3 persen. Angka ini merupakan paling tinggi jika dibandingkan dengan kelompok negara maju

dan negara global pada umumnya. Sementara inflasi Indonesia tercatat paling rendah (2,61 persen) bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara maju dan secara global.



Catatan: Inflasi Indonesia 2015–2019 menggunakan IHK 82 kota (2012=100) dan inflasi 2020–2022 menggunakan IHK 90 kota (2018=100)

Sumber: *International Monetary Fund, World Economic Outlook Database*, April 2024.

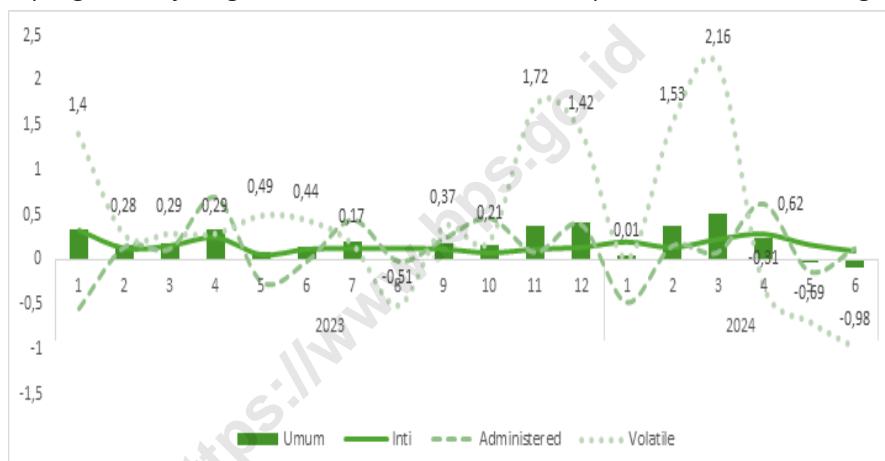
Gambar 5.1 Perbandingan Inflasi Beberapa Negara Year-on-Year (persen), 2016–2023

Dinamika Inflasi Indonesia: Inflasi Barang Bergejolak Tertinggi

Inflasi menurut karakteristik perubahan harganya dapat dibedakan menjadi inflasi inti (*core inflation*) dan inflasi non-inti (*non-core inflation*). Inflasi inti mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa yang tidak dipengaruhi oleh faktor musiman atau harga yang diatur pemerintah, dan biasanya memberikan gambaran tentang tekanan inflasi yang lebih mendalam dalam perekonomian. Sementara itu, inflasi non inti cenderung dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat tentatif dan cenderung lebih bergejolak (*volatile*). Inflasi non inti tersebut dibagi lagi menjadi dua yaitu inflasi harga yang diatur pemerintah (*administered*) dan inflasi barang bergejolak (*volatile*). Adapun contoh inflasi harga yang diatur pemerintah (*administered*) seperti harga BBM bersubsidi, tarif dasar listrik dan lainnya. Sementara contoh inflasi barang bergejolak (*volatile*) adalah seperti harga beras, cabai dan komoditas yang umumnya dipengaruhi oleh faktor musim, rantai pasok dalam distribusi dan bencana alam.

Sepanjang tahun 2023, inflasi umum di Indonesia mengalami fluktuasi namun secara yoy masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yakni sebesar 2,61 persen (Gambar 5.1). Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor musiman, kebijakan, dan kondisi eksternal. Dilihat secara m-to-m, inflasi pada bulan Januari sebesar 0,34 persen kemudian mengalami penurunan sebesar 0,16 persen pada bulan Februari. Penurunan ini disebabkan oleh stabilisasi

harga pangan setelah periode tahun baru musim liburan. Kemudian pada bulan Maret 2023 inflasi kembali naik tipis menjadi 0,18 persen, hal ini berkaitan dengan dimulainya bulan Ramadan dimana permintaan barang konsumsi mulai meningkat. Masih dalam nuansa Ramadan-Idul Fitri pada bulan April 2023, inflasi kembali naik menjadi 0,33 persen, namun perlahan inflasi mulai relatif stabil di bulan Juni dimana terjadi penurunan harga bahan bakar pada bulan ini. Bulan Juli memasuki tahun ajaran baru sehingga menyebabkan kenaikan harga pada sektor pendidikan sehingga menyebabkan inflasi dibulan Juli naik menjadi 0,21 persen. Bulan Agustus-September inflasi terkendali di 0,17 persen dan 0,14 persen. Musim panen di beberapa daerah berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menuju akhir tahun, inflasi mengalami kenaikan, mencapai 0,41 persen di bulan Desember. Lonjakan harga bahan pangan menjelang liburan akhir tahun dan dampak El Nino mendorong



kenaikan inflasi di akhir tahun (Tabel 5.1).

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Gambar 5.2 Perkembangan Inflasi Umum, Inti, Harga yang Diatur Pemerintah, dan Barang Bergejolak di Indonesia (M-to-M), 2023 (2018=100) dan 2024 (2022=100)

Inflasi inti (*core inflation*) di Indonesia selama tahun 2023 mengalami fluktuasi yang mencerminkan perubahan permintaan domestik dan kondisi ekonomi. Pada bulan Januari, Inflasi Inti sebesar 0,33 persen, kemudian mengalami penurunan di bulan Februari menjadi 0,13 persen. Hal ini disebabkan karena permintaan di sektor barang dan jasa pasca musim libur akhir tahun menurun. Memasuki bulan Ramadan, inflasi inti masih cenderung stabil yakni sebesar 0,16 persen di bulan Maret dan sedikit meningkat pada bulan Juni sebesar 0,25 persen saat memasuki Idul Fitri. Kenaikan harga pada sektor makanan dan jasa menjadi pendorong utamanya. Inflasi inti kembali turun pada bulan Mei 2023 hingga Desember 2023. Secara keseluruhan, inflasi inti pada tahun 2023 tetap dalam kendali, dengan sedikit fluktuasi yang mencerminkan dinamika permintaan musiman dan kebijakan moneter.

Komponen harga yang diatur pemerintah (*administered*) mengalami fluktuasi signifikan terutama karena perubahan tarif listrik dan BBM. Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya produksi dan transportasi, yang kemudian mendorong kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan April 2023 yakni sebesar 0,69 persen. Kenaikan inflasi harga yang diatur pemerintah pada April 2023 terutama dipicu oleh peningkatan tarif angkutan, baik udara maupun darat, dalam rangka persiapan mudik Lebaran, serta penyesuaian harga LPG. Lonjakan permintaan selama periode menjelang Lebaran dan kebijakan harga yang diterapkan pemerintah terhadap energi dan transportasi adalah faktor utama yang mendorong inflasi pada bulan tersebut

Tabel 5.1 Inflasi dan Andil Inflasi (persen), 2022–2023 (2018=100) dan 2024 (2022=100)

Tahun/Bulan	Umum		Inti		Harga yang diatur pemerintah		Barang Bergejolak	
	Inflasi	Inflasi	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2022	5,51	3,36	2,20	13,34	2,36	5,61	0,95	
2023	2,61	1,8	1,15	1,72	0,32	6,73	1,14	
Januari	0,34	0,33	0,21	-0,55	-0,11	1,40	0,24	
Februari	0,16	0,13	0,08	0,14	0,03	0,28	0,05	
Maret	0,18	0,16	0,10	0,12	0,03	0,29	0,05	
April	0,33	0,25	0,16	0,69	0,13	0,29	0,04	
Mei	0,09	0,06	0,04	-0,25	-0,04	0,49	0,09	
Juni	0,14	0,12	0,08	-0,02	-0,01	0,44	0,07	
Juli	0,21	0,13	1,57	0,44	1,51	0,17	~0	
Agustus	-0,02	0,13	0,08	-0,02	-0,01	-0,51	-0,09	
September	0,19	0,12	0,08	0,23	0,04	0,37	0,07	
Oktober	0,17	0,08	0,05	0,46	0,09	0,21	0,03	
November	0,38	0,12	0,08	0,08	0,01	1,72	0,29	
Desember	0,41	0,14	0,09	0,39	0,07	1,42	0,25	
2024								
Januari	0,04	0,2	0,13	-0,48	-0,09	0,01	~0	
Februari	0,37	0,14	0,09	0,15	0,03	1,53	0,25	
Maret	0,52	0,23	0,15	0,08	0,01	2,16	0,36	
April	0,25	0,29	0,18	0,62	0,12	-0,31	-0,05	
Mei	-0,03	0,17	0,11	-0,13	-0,02	-0,69	-0,12	
Juni	-0,08	0,1	0,06	0,12	0,02	-0,98	-0,16	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada bulan Juli 2023, inflasi harga yang diatur pemerintah (*administered*) mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya yang deflasi. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian tarif listrik, kenaikan tarif angkutan umum selama liburan sekolah, serta kenaikan harga BBM nonsubsidi akibat meningkatnya harga minyak dunia. Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan inflasi

yang lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kenaikan inflasi juga terjadi dibulan Oktober 2023 yakni sebesar 0,46 persen. Penyesuaian harga LPG 3 kg pada awal Oktober menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi pada kelompok harga yang diatur pemerintah (*administered*).

Inflasi komponen harga bergejolak (*volatile*) cenderung sangat sensitif terhadap perubahan pasokan dan permintaan, terutama yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti cuaca dan musim, sehingga menciptakan pola inflasi yang fluktuatif dari bulan ke bulan. Pada bulan Agustus 2023, terjadi deflasi pada komponen barang bergejolak yakni sebesar 0,51 persen. Pada Agustus 2023, sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah, bawang merah, dan beberapa jenis sayuran, mengalami peningkatan pasokan karena memasuki masa panen. Ketika pasokan meningkat, harga-harga komoditas tersebut cenderung turun, yang menyebabkan deflasi pada kategori harga bergejolak.

Inflasi umum pada awal tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 secara *month-to-month* (*m-t-m*). Namun lonjakan pada harga komponen barang bergejolak seperti cabai merah, cabai rawit dan lainnya pada bulan Februari 2024 menyebabkan inflasi di bulan Februari 2024 meningkat cukup besar. Pada bulan Ramadan (Maret), inflasi umum *month-to-month* (*mtm*) tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dibandingkan tahun 2023. Tingginya inflasi saat Ramadan di 2024 disebabkan oleh komponen barang bergejolak. Namun saat Idul Fitri, inflasi tahun 2024 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga pada komponen barang bergejolak signifikan menurunkan inflasi pada hari raya Idul Fitri 2024.

Makanan Minuman, dan Tembakau Sebagai Kontributor Utama

Tahun 2022 ditandai oleh tekanan inflasi yang cukup tinggi, terutama dipicu oleh beberapa faktor eksternal yang sangat berpengaruh. Krisis energi global, akibat konflik geopolitik seperti perang di Ukraina, menyebabkan lonjakan harga minyak dan gas dunia. Hal ini secara langsung berdampak pada biaya energi di dalam negeri, memicu kenaikan harga bahan bakar yang signifikan. Dampak ini tercermin pada inflasi yang lebih tinggi, terutama dalam komponen pengeluaran transportasi. Selain itu, gangguan pada rantai pasokan global akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan ketidakpastian ekonomi global juga menambah tekanan inflasi. Harga pangan mengalami kenaikan yang cukup tajam karena pasokan yang terbatas dan kenaikan biaya logistik, yang kemudian memengaruhi pengeluaran rumah tangga. Kenaikan harga ini sangat terasa pada bahan-bahan pokok seperti minyak goreng, gula, dan beras.

Memasuki tahun 2023, inflasi di Indonesia menunjukkan tren yang lebih terkendali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun masih ada tekanan dari kenaikan harga energi di awal tahun, pemerintah berhasil

meredam sebagian besar dampaknya melalui intervensi kebijakan, seperti subsidi yang lebih terarah dan penyesuaian tarif. Sementara itu, pasar global mulai menunjukkan stabilisasi, terutama pada harga komoditas energi dan pangan, yang memberikan sedikit ruang bagi perbaikan di sektor pengeluaran rumah tangga.

Tabel 5.2 Laju dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran (Y-o-Y) (persen), 2022 dan 2023 (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	2022		2023	
	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umum	5,51	5,51	2,61	2,61
Makanan, Minuman, dan Tembakau	5,83	1,51	6,18	1,60
Pakaian dan Alas Kaki	1,40	0,08	0,78	0,04
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	3,78	0,74	0,5	0,10
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	4,86	0,29	1,57	0,09
Kesehatan	2,87	0,08	1,94	0,05
Transportasi	15,26	1,84	1,27	0,17
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,36	-0,02	0,2	0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	3,04	0,06	1,69	0,04
Pendidikan	2,77	0,16	1,97	0,11
Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	4,49	0,40	2,07	0,18
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,91	0,37	3,55	0,22

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS), Badan Pusat Statistik

Harga pangan pada tahun 2023 menjadi salah satu penyumbang utama inflasi. Dapat dilihat pada Tabel 5.2, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada tahun 2023 sebesar 6,18 persen dan memiliki andil besar dalam pembentukan inflasi tahun 2023. Gangguan cuaca, seperti curah hujan yang tidak teratur dan bencana alam, mempengaruhi produksi pertanian, sehingga memicu kenaikan harga pada komoditas seperti beras, sayuran, dan daging. Selain itu, gangguan pada rantai pasokan global dan peningkatan biaya logistik turut menambah tekanan harga pada bahan pangan.

Selanjutnya inflasi kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memiliki andil sebesar 0,22 persen terhadap pembentukan inflasi, dengan nilai inflasi sebesar 3,55 persen. Pasca-pandemi Covid-19, ada peningkatan permintaan untuk produk dan layanan perawatan pribadi seiring dengan kembalinya aktivitas sosial yang lebih intensif. Orang-orang mulai lebih memperhatikan penampilan dan kesehatan pribadi mereka, yang mendorong permintaan untuk produk-produk perawatan dan jasa kebersihan. Inflasi dalam

kelompok ini, meskipun tidak setinggi kelompok pengeluaran seperti pangan, tetap signifikan terutama bagi konsumen yang rutin menggunakan produk dan layanan perawatan pribadi. Kenaikan harga berdampak pada pengeluaran rutin rumah tangga yang mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk perawatan diri.

Secara umum, inflasi pada tahun 2023 secara tahunan cenderung lebih moderat dan terkendali dibandingkan dengan 2022. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi global yang lebih stabil dan kebijakan ekonomi domestik yang lebih efektif. Langkah-langkah kebijakan yang lebih proaktif dari pemerintah berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pada pengeluaran konsumen.

Tabel 5.3 Laju Inflasi Indonesia Gabungan 150 Kota Menurut Kelompok Pengeluaran (M-to-M) (persen), 2022–2023 (2018=100) dan 2024 (2022=100)

Tahun/ Bulan	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2022	5,83	1,40	3,78	4,86	2,87	15,26
2023	6,18	0,78	0,50	1,57	1,94	1,27
Januari	1,16	0,10	0,35	0,24	0,40	-1,15
Februari	0,48	0,20	0,06	0,19	0,23	-0,22
Maret	0,35	0,17	-0,26	0,21	~0	0,54
April	0,34	0,61	0,07	0,23	0,26	0,84
Mei	0,48	-0,46	0,05	0,20	0,11	-0,56
Juni	0,39	0,08	0,10	0,08	0,23	-0,10
Juli	0,22	0,18	0,02	0,05	0,19	0,58
Agustus	-0,25	-0,27	-0,05	0,10	0,10	-0,02
September	0,35	0,06	0,02	0,10	0,03	0,29
Oktober	0,2	-0,04	0,08	0,10	0,11	0,55
November	1,23	-0,04	0,04	-0,03	0,21	0,07
Desember	1,07	0,18	0,01	0,10	0,04	0,45
2024						
Januari	0,18	0,02	0,14	0,04	0,49	-0,87
Februari	1,00	0,07	0,06	0,12	0,22	0,17
Maret	1,42	0,22	0,02	0,08	0,21	0,04
April	-0,03	0,46	0,01	0,16	0,07	0,93
Mei	-0,29	-0,04	0,08	0,05	0,04	-0,36
Juni	-0,49	0,02	0,04	0,21	0,05	0,11

Lanjutan Tabel 5.3

Tahun/ Bulan	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2022	-0,36	3,04	2,77	4,49	5,91	5,51
2023	0,2	1,69	1,97	2,07	3,55	2,61
Januari	0,01	0,25	0,12	0,33	0,84	0,34
Februari	-0,02	0,07	0,03	0,17	0,11	0,16
Maret	-0,03	0,11	~0	0,24	0,28	0,18
April	-0,02	0,05	~0	0,34	0,68	0,33
Mei	0,01	0,10	0,01	0,15	0,14	0,09
Juni	~0	0,12	0,01	0,22	-0,04	0,14
Juli	-0,02	0,17	0,66	0,15	-0,01	0,21
Agustus	-0,01	0,07	0,86	0,14	0,08	-0,02
September	0,25	0,01	0,21	0,10	0,19	0,19
Oktober	-0,02	0,08	0,07	0,10	0,23	0,17
November	-0,02	0,10	0,01	0,07	0,53	0,38
Desember	0,07	0,54	~0	0,03	0,46	0,41
2024						
Januari	-0,05	0,26	0,03	0,31	0,37	0,04
Februari	-0,03	0,09	0,02	0,17	0,21	0,37
Maret	-0,02	0,01	0,15	0,33	0,70	0,52
April	-0,02	0,07	0,02	0,31	1,33	0,25
Mei	-0,05	0,10	~0	0,26	0,87	-0,03
Juni	-0,02	0,09	0,01	0,09	0,27	-0,08

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat dari *m-to-m* nya, inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau semester 1 2024 lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya di tahun 2023. Bahkan pada bulan April 2024 bertepatan dengan Idul Fitri, kelompok ini mengalami deflasi sekitar 0,03 persen. Langkah-langkah proaktif untuk menstabilkan harga pangan menjelang Idul Fitri, seperti melalui operasi pasar murah atau subsidi untuk beberapa komoditas utama terlihat berhasil. Deflasi pada kelompok ini terus terjadi hingga akhir semester 1 2024.

Berikutnya, kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan jasa Keuangan pada semester 1 2024 juga terus mengalami deflasi. Terlihat pada Tabel 5.3, deflasi terjadi pada bulan Januari sebesar 0,05 persen, Februari sebesar 0,03 persen, Maret dan April sebesar 0,02, Mei sebesar 0,05 persen dan Juni sebesar 0,02 persen. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan harga perangkat teknologi, persaingan ketat di

sektor telekomunikasi, adopsi teknologi digital yang luas, inovasi dalam jasa keuangan, kondisi ekonomi yang menurunkan permintaan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung penurunan harga.

Kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; Kesehatan; Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran; Pendidikan; dan Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya selama semester 1 2024 tercatat selalu mengalami inflasi. Namun, persentasenya masih cukup rendah dan terkendali. Dari ketiga kelompok pengeluaran tersebut, inflasi tertinggi tercatat hanya sebesar 0,49 persen, yaitu inflasi pada kelompok pengeluaran kesehatan pada bulan Januari 2024.

112 Wilayah Inflasi Sudah Sesuai Target

Tabel 5.4 menunjukkan kondisi inflasi yang terjadi pada 150 wilayah inflasi di seluruh Indonesia. Inflasi di sebagian besar wilayah Indonesia terjaga karena sebanyak 124 wilayah di Indonesia memiliki rata-rata inflasi selama semester 1 2024 sesuai yang ditargetkan yaitu dua setengah persen dengan deviasi sebesar satu persen. Inflasi yang terjaga menjadi kunci keberhasilan pembangunan, namun bukan berarti persentasenya harus selalu rendah. Sementara itu, terdapat 9 wilayah di Indonesia yang rata-rata inflasinya selama semester 1 2024 berada di bawah target yang sudah ditetapkan. Pemerintah harus memberi perhatian agar rendahnya persentase inflasi tersebut bukan sebuah preseden buruk berupa rendahnya geliat ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Rata-rata inflasi terendah selama semester pertama 2024 adalah sebesar 0,82 persen ($y-o-y$).

Tabel 5.4 Jumlah Wilayah Dengan Rata-rata Inflasi Year-on-Year (Y-o-Y) Menurut Kategori Inflasi (persen), Januari–Juni 2024

Kategori Inflasi (1)	Jumlah (2)	Batas Bawah		Batas Atas (4)
		(3)	(4)	
Sesuai Target	112	1,70	3,48	
Dibawah Target	3	0,82	1,21	
Diatas Target	35	3,52	6,83	

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Hal yang tidak kalah penting adalah perhatian pada 35 wilayah kota dengan rata-rata inflasi selama semester pertama 2024 berada di atas target yang ditetapkan. Pemerintah harus segera mengambil langkah agar tingginya inflasi yang terjadi tidak mengarah pada *hyperinflation* yang dapat menjadi musibah bagi perekonomian daerah tersebut. Rata-rata inflasi selama semester pertama 2024 yang tercatat paling tinggi adalah sebesar 6,83 persen (YoY). Diharapkan dengan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat, inflasi wilayah-wilayah tersebut dapat sedikit diturunkan hingga mencapai rentang batas target yang ditetapkan.

Jika ditinjau dari *month-to-month*, terdapat sembilan dari 150 wilayah yang secara rata-rata mengalami deflasi selama semester pertama 2024. Deflasi terendah mencapai 0,41 persen sementara deflasi tertinggi sebesar 0,09 persen. Di sisi lain, terdapat 141 wilayah yang secara rata-rata mengalami inflasi selama semester pertama 2024. Meskipun sangat rendah, namun rata-rata inflasi paling rendah dari 141 wilayah tersebut mendekati nol dan inflasi bulanan tertinggi mencapai 0,8 persen. Inflasi bulanan tidak kalah pentingnya untuk senantiasa dijaga agar nilainya masih dalam batas yang ditargetkan. Wilayah dengan inflasi yang terlalu tinggi harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan gugus tugasnya agar inflasi tersebut tidak menggerus daya beli masyarakat, terlebih masyarakat kalangan bawah yang paling akan terdampak dari tingginya harga barang dan jasa.

Tabel 5.5 Jumlah Wilayah Dengan Rata-rata Inflasi Month-to-Month (M-to-M) Menurut Kategori Inflasi (persen), Januari–Juni 2024

Kategori Wilayah (1)	Jumlah (2)	Batas Atas	Batas Bawah
		(3)	(4)
Deflasi	9	-0,01	-0,41
Inflasi	141	0,8	~0

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Perkembangan Inflasi Provinsi di Indonesia

Nilai agregat inflasi provinsi mulai disajikan pada tahun 2024 dengan perubahan tahun dasar 2022=100. Hal ini mencerminkan adanya pembaruan dalam metodologi perhitungan inflasi untuk lebih akurat menggambarkan perubahan harga yang terjadi di setiap provinsi. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan pola konsumsi terbaru di Indonesia.

Tabel 5.6 Inflasi Provinsi Year-on-Year (2022=100) (persen), Januari–Juli 2024

Provinsi (1)	Januari (2)	Februari (3)	Maret (4)	April (5)	Mei (6)	Juni (7)	Juli (8)
Aceh	2,12	2,33	3,25	3,14	3,32	3,09	2,51
Sumatera Utara	2,16	2,50	3,67	3,96	4,26	3,35	2,06
Sumatera Barat	2,57	3,32	3,93	3,81	4,17	4,04	2,44
Riau	2,35	2,86	3,57	3,99	4,41	3,56	2,22
Jambi	2,99	3,19	3,84	3,93	3,55	3,34	2,14
Sumatera Selatan	3,35	3,15	3,24	3,12	2,98	2,48	1,87
Bengkulu	2,83	3,68	3,56	3,62	3,71	3,64	2,31
Lampung	3,28	3,28	3,45	3,29	3,09	2,84	2,55

Lanjutan Tabel 5.5

Provinsi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kepulauan Bangka Belitung	1,21	1,86	1,80	1,93	1,25	1,08	0,84
Kepulauan Riau	3,38	2,65	3,37	3,04	3,67	3,54	2,81
DKI Jakarta	1,83	2,12	2,18	2,11	2,08	2,23	1,97
Jawa Barat	3,02	3,09	3,48	3,07	2,78	2,38	2,25
Jawa Tengah	2,69	2,98	3,40	3,27	2,66	2,22	1,86
DI Yogyakarta	2,60	2,75	2,95	2,87	2,28	2,35	2,16
Jawa Timur	2,47	2,81	3,04	3,25	2,83	2,21	2,13
Banten	2,59	2,81	3,42	3,42	2,86	2,49	2,30
Bali	2,61	2,98	3,67	4,02	3,54	2,71	2,53
Nusa Tenggara Barat	2,87	3,00	3,63	3,31	2,77	2,12	1,91
Nusa Tenggara Timur	2,70	3,01	1,92	2,35	2,41	1,54	0,85
Kalimantan Barat	2,75	2,56	2,51	2,72	2,84	2,28	1,58
Kalimantan Tengah	3,40	2,46	2,72	2,99	2,72	2,22	1,28
Kalimantan Selatan	2,79	2,27	2,58	3,00	2,63	2,34	1,85
Kalimantan Timur	2,95	3,28	3,03	3,21	3,29	2,99	2,18
Kalimantan Utara	1,99	2,33	2,62	2,47	2,42	2,39	1,98
Sulawesi Utara	3,81	3,55	3,82	4,24	4,15	4,42	4,03
Sulawesi Tengah	2,97	3,37	3,38	3,40	3,10	2,82	2,45
Sulawesi Selatan	2,38	2,93	2,75	2,61	2,42	2,03	1,74
Sulawesi Tenggara	2,46	2,90	2,93	2,93	2,57	2,35	1,73
Gorontalo	4,40	3,73	4,13	4,65	4,91	3,93	3,07
Sulawesi Barat	2,25	2,22	2,76	2,02	1,25	2,32	2,08
Maluku	4,12	3,02	2,75	2,43	3,21	3,63	2,71
Maluku Utara	4,33	2,71	3,57	2,93	3,27	3,21	2,96
Papua Barat	3,05	3,61	4,78	3,59	4,56	3,73	2,83
Papua Barat Daya	1,49	1,81	1,42	2,45	1,87	1,28	1,77
Papua	1,52	2,02	1,98	1,78	2,18	1,47	0,91
Papua Selatan	4,51	4,61	3,70	3,04	4,19	2,04	1,20
Papua Tengah	4,76	3,72	4,10	4,37	5,39	4,39	4,16
Papua Pegunungan	3,93	2,87	2,37	2,71	3,57	5,65	5,09
Indonesia	2,57	2,75	3,05	3,00	2,84	2,51	2,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik (BRS)

Secara Year-on-Year (YoY), dari bulan Januari hingga Juli 2024 terjadi inflasi di seluruh provinsi di Indonesia. Pada bulan Juli 2024, inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,09 persen dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,84 persen. Dilihat perbandingan antar pulau, di Pulau Sumatera, periode Januari-Juli 2024 inflasi masih terlihat terkendali. Inflasi Provinsi Bangka Belitung cenderung lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sumatera dari Januari hingga Juli 2024.

Upaya Provinsi Bangka Belitung untuk menjaga stabilitas harga seperti gerakan operasi pasar guna menjaga ketersediaan stok pangan, distribusi pasokan komoditas lancar dan sebagainya dapat dikatakan berhasil.

Sama halnya dengan Pulau Sumatera, inflasi di Pulau Jawa juga cenderung stabil dan terkendali. Dilihat dari Januari hingga Juli, inflasi Provinsi Banten secara YoY lebih tinggi dibandingkan Provinsi lainnya di Pulau Jawa. Bahkan Provinsi Jakarta saja yang secara administratif letaknya berdampingan memiliki inflasi yang lebih rendah dibandingkan Jawa Barat. Padahal banyak penduduk yang bekerja di Jakarta namun tinggal di daerah penyangga Jakarta seperti Depok, Bogor, dan Bekasi. Perlu ada nya kajian lebih lanjut mengenai hal ini.

Beda hal dengan Pulau Jawa dan Sumatera, inflasi di luar Pulau Sumatera dan Jawa lebih fluktuatif dan cenderung lebih tinggi dilihat dari Januari hingga Juli 2024. Inflasi terendah dari Januari hingga Juli 2024 terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya. Inflasi di Sulawesi Utara lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di luar Pulau Jawa dan Bali dimana berada disekitar 3-4 persen.

Tabel 5.7 Inflasi Provinsi *Month-to-Month* (2022=100) (persen), Januari–Juli 2024

Provinsi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,42	0,71	0,48	0,05	0,15	0,03	-0,11
Sumatera Utara	0,40	0,41	0,72	-0,04	0,48	-0,33	-0,82
Sumatera Barat	-0,32	1,17	0,64	-0,30	0,51	0,14	-1,07
Riau	0,11	0,59	0,72	0,05	0,30	-0,22	-0,80
Jambi	0,83	0,13	0,54	0,18	0,19	-0,13	-0,82
Sumatera Selatan	-0,08	0,01	0,25	0,43	0,06	-0,03	-0,29
Bengkulu	0,15	0,79	0,22	0,13	0,30	-0,04	-0,70
Lampung	-0,19	0,39	0,36	-0,01	0,08	-0,11	-0,16
Kepulauan Bangka Belitung	0,13	0,39	0,04	0,54	-0,32	-0,31	-0,39
Kepulauan Riau	0,51	-0,22	0,46	0,06	0,37	0,28	-0,45
Dki Jakarta	-0,19	0,45	0,37	0,26	-0,10	0,12	-0,06
Jawa Barat	0,15	0,45	0,51	0,15	-0,12	-0,04	0,06
Jawa Tengah	-0,08	0,57	0,60	0,20	-0,22	-0,28	-0,13
DI Yogyakarta	-0,02	0,39	0,43	0,09	-0,08	-0,25	-0,03
Jawa Timur	-0,10	0,49	0,64	0,36	-0,21	-0,37	0,04
Banten	-0,04	0,52	0,98	0,41	-0,52	-0,08	-0,24
Bali	-0,09	0,61	0,93	0,32	-0,10	-0,55	0,10
Nusa Tenggara Barat	0,04	0,09	0,87	0,06	-0,41	-0,26	-0,35
Nusa Tenggara Timur	0,97	-0,16	-0,14	0,31	-0,24	-0,23	-0,32
Kalimantan Barat	0,37	0,08	0,33	0,69	0,16	-0,29	-0,45

Lanjutan Tabel 5.7

Provinsi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kalimantan Tengah	0,20	-0,46	0,66	0,73	0,22	-0,28	-0,68
Kalimantan Selatan	0,55	-0,01	0,62	0,71	-0,01	-0,32	-0,44
Kalimantan Timur	0,25	0,27	0,34	0,70	0,19	-0,05	-0,38
Kalimantan Utara	0,05	0,19	0,42	0,39	0,11	-0,08	-0,01
Sulawesi Utara	-0,41	-0,63	1,07	0,17	-0,07	0,47	-0,11
Sulawesi Tengah	0,08	0,45	0,55	0,05	0,07	0,18	-0,22
Sulawesi Selatan	0,36	0,30	0,38	0,15	-0,10	-0,26	-0,18
Sulawesi Tenggara	-0,03	0,19	0,62	0,47	0,10	-0,09	-0,16
Gorontalo	-0,91	-1,15	0,81	0,57	0,30	-0,14	-0,95
Sulawesi Barat	0,08	0,08	0,43	-0,27	-0,07	0,81	-0,45
Maluku	0,19	-1,19	-0,46	0,29	1,89	1,33	-0,82
Maluku Utara	-0,02	-0,42	0,48	0,44	0,59	0,16	-0,06
Papua Barat	0,63	0,13	0,5	0,17	1,35	-0,27	0,13
Papua Barat Daya	0,13	-0,11	0,37	0,73	0,09	0,29	0,25
Papua	0,01	-0,73	-0,19	1,20	0,61	0,35	-0,67
Papua Selatan	0,57	0,08	-0,17	0,33	2,00	-1,11	-0,92
Papua Tengah	0,43	-1,17	1,01	1,20	1,43	-0,17	0,12
Papua Pegunungan	1,01	-0,49	0,02	1,06	1,10	2,11	-0,44
Indonesia	0,04	0,37	0,52	0,25	-0,03	-0,08	-0,18

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik (BRS)

Secara m-t-m inflasi dan deflasi dirasakan oleh semua provinsi di Indonesia. Inflasi yang terjadi di setiap provinsi dan setiap bulannya juga cukup terkendali dibawah 2 persen. Fenomena menarik disini adalah terjadi deflasi di banyak Provinsi setelah hari raya Idul Fitri (Mei-Juli 2024). Semua provinsi di Pulau Sumatera mengalami inflasi di bulan Mei, namun deflasi di bulan Juni hingga Juli. Beda halnya di Pulau Jawa yang pada umumnya mengalami deflasi dari bulan Mei hingga Juli 2024. Pulau Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Papua yang berada di luar Jawa dan Sumatera juga merasakan inflasi dan deflasi sama halnya dengan provinsi yang ada di Jawa dan Sumatera. Provinsi Papua Barat hanya merasakan deflasi di bulan Juni 2024 dan Provinsi Papua Barat Daya juga merasakan inflasi di bulan Februari saja.

Perdagangan Indonesia



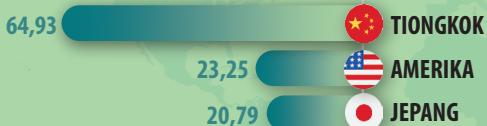
Neraca perdagangan Indonesia tahun 2023 masih konsisten **SURPLUS**, meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya

Kinerja ekspor dan impor mengalami penurunan di tahun 2023

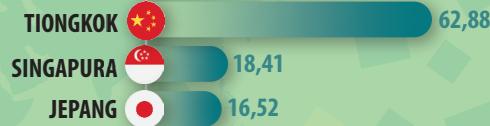


Negara mitra dagang utama Indonesia adalah Negara Tiongkok

Tiga Negara Tujuan Ekspor Utama 2023 (miliar US\$)



Tiga Negara Asal Impor Utama 2023 (miliar US\$)



Tren surplus neraca perdagangan Indonesia terus berlanjut meskipun dihadapkan dengan tantangan dan ketidakpastian ekonomi global.

Perdagangan luar negeri memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat memperluas pangsa pasar atas produksi dalam negeri, meningkatkan daya saing di pasar global, serta menambah penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, negara juga dapat mengimpor barang baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Secara umum, kinerja perdagangan di pasar global yang baik dapat mendukung stabilitas makroekonomi dalam negeri.

Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Neraca perdagangan Indonesia masih terus memberikan nilai surplus selama tahun 2021–2023. Akan tetapi, pertumbuhan neraca perdagangan cenderung melambat setelah tumbuh impresif dan mencapai puncaknya pada tahun 2022. Perlambatan neraca perdagangan Indonesia ini dipengaruhi oleh turunnya nilai ekspor maupun impor Indonesia.

Meskipun mengalami penurunan, surplus neraca perdagangan patut diapresiasi karena menunjukkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan dan risiko ketidakpastian global akibat konflik geopolitik. Penurunan nilai ekspor impor dipengaruhi oleh melandainya ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama dagang Indonesia, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang sebagai akibat dari perlambatan perekonomian global (CNBC Indonesia 19 Februari 2024). Selain itu, penurunan nilai ekspor dan impor juga seiring dengan pelemahan harga komoditas di pasar global.

Merespon adanya dinamika geopolitik global, pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2023. Satgas tersebut dibentuk pada 20 September 2023 dan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan Kemenko Perekonomian (27 September 2023), pembentukan Satgas bertujuan mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan ekspor, mengembangkan sumber daya dan industri ekspor, menetapkan strategi kerja sama dan promosi pengembangan pasar ekspor, menetapkan strategi pembiayaan ekspor dan layanan asuransi ekspor, melakukan simplifikasi, sinkronisasi, dan integrasi proses bisnis layanan, serta menetapkan strategi peningkatan ekspor usaha mikro kecil dan menengah.

Memasuki tahun 2024 ketegangan geopolitik diprediksi masih terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat namun tetap stabil (IMF 2024). Di tengah pemulihan ekonomi global tersebut kinerja perdagangan diperkirakan juga tumbuh positif. Sementara itu, di tingkat nasional, Indonesia perlu mewaspadai perlambatan ekonomi pada tingkat global karena dapat berpengaruh pada penurunan permintaan dari pasar global. Terlebih lagi, dengan adanya prediksi penurunan komoditas harga seperti minyak mentah dan gas alam yang menjadi komoditas andalan ekspor migas Indonesia.

Surplus Neraca Perdagangan Berlanjut

Selama tahun 2023, neraca perdagangan Indonesia menunjukkan performa positif dengan nilai surplus sebesar US\$36,89 miliar. Meskipun menunjukkan angka positif, surplus neraca di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US\$54,46 miliar. Penurunan surplus tersebut disebabkan oleh turunnya surplus neraca perdagangan nonmigas dari US\$78,87 miliar menjadi US\$56,80 miliar.

Tabel 6.1 Neraca Perdagangan Indonesia (juta US\$), 2021–Triwulan II 2024

Komoditas	2021	2022	2023	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas	-13.281,7	-24.418,1	-19.908,6	-5.104,7	-5.002,6
Non Migas	48.701,3	78.875,3	56.796,8	12.515,5	13.042,7
Jumlah	35.419,6	54.457,2	36.888,2	7.410,8	8.040,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

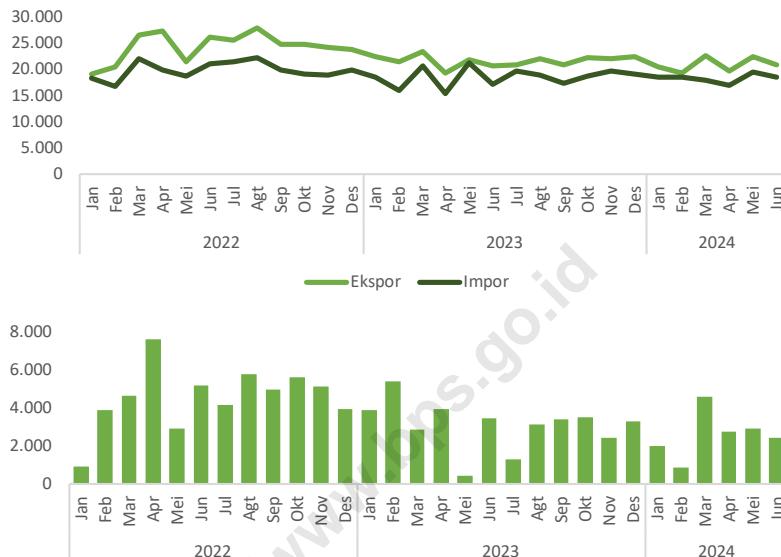
Di sisi lain, kinerja neraca perdagangan migas masih tercatat defisit, meskipun tidak sedalam defisit di tahun 2022. Neraca perdagangan migas di tahun 2023 tercatat defisit US\$19,91 miliar, sedangkan di tahun sebelumnya defisit US\$24,42 miliar. Harga komoditas unggulan pendulang ekspor yang mengalami penurunan ditambah perlambatan ekonomi global memicu penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor, membuat kinerja ekspor secara keseluruhan menurun.

Aktivitas ekonomi global di tahun 2024 yang diperkirakan masih akan menghadapi risiko dan ketidakpastian, tercermin pada ekonomi global yang diproyeksikan tumbuh lambat oleh berbagai lembaga internasional juga akan diikuti oleh moderasi harga komoditas. Hal tersebut secara langsung akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas perdagangan Indonesia di tahun 2024 (Badan Kebijakan Fiskal 2024). Kondisi tersebut tercermin dari capaian neraca perdagangan Indonesia pada semester I 2024, yang tercatat surplus US\$15,45 miliar. Meskipun mengalami surplus, neraca perdagangan di semester awal 2024 juga mengalami perlambatan hingga 22,45 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023.

Melihat lebih rinci secara bulanan pada Gambar 6.1, kinerja neraca perdagangan menunjukkan angka surplus di sepanjang bulan di tahun 2023. Surplus terendah tercatat pada bulan Mei 2023 sebesar US\$426,9 juta. Sedangkan surplus perdagangan tertinggi tercatat sebesar US\$5,40 miliar pada bulan Februari 2023. Neraca perdagangan bulanan di tahun 2023 secara umum terlihat lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Sementara itu, nilai ekspor dan impor bulanan menunjukkan tren yang fluktuatif pada semester I 2023. Nilai ekspor tertinggi tercatat pada bulan

Maret 2023 sebesar US\$23,42 miliar, dan ekspor terendah pada bulan April sebesar US\$19,28 miliar. Dinamika kinerja ekspor bulanan tersebut tidak terlepas dari pola musiman ekspor akibat momen libur lebaran yang jatuh pada bulan April 2023. Memasuki semester II 2023, kinerja ekspor Indonesia relatif stabil.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Gambar 6.1 Nilai Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia Bulanan (juta US\$), Januari 2022–Juni 2024

Hingga Juni 2024, tren surplus neraca perdagangan bulanan berlanjut selama 50 bulan berturut-turut (Kemenko Perekonomian 19 Juni 2024). Akan tetapi, nilai surplus secara umum menunjukkan tren menurun. Penurunan tren surplus neraca perdagangan tersebut menjadi sinyal yang perlu diwaspadai pemangku kebijakan untuk terus meningkatkan kinerja ekspor dan mengendalikan kebutuhan akan produk impor di Indonesia. Sejalan dengan tren surplus neraca perdagangan yang menurun, tren kinerja ekspor dan impor bulanan Indonesia juga secara umum menunjukkan perlambatan.

Kinerja Ekspor Tertekan Perlambatan Ekonomi Global

Secara total, nilai ekspor tahun 2023 tercatat sebesar US\$258,77 miliar (Tabel 6.2). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 11,35 persen dibanding tahun 2022 yang nilai eksportnya mencapai US\$291,90 miliar. Perlambatan nilai ekspor tersebut disumbang baik dari sektor migas maupun nonmigas. Akan tetapi, kinerja ekspor nonmigas mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan ekspor migas. Ekspor nonmigas mengalami penurunan

hingga 11,98 persen sedangkan ekspor migas hanya turun tipis sebesar 0,48 persen. Jika dilihat nilainya, ekspor nonmigas di sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar US\$242,85 miliar. Kinerja tersebut tidak dapat mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun 2023 sebesar US\$289,76 miliar (Kementerian Perdagangan 2 Januari 2023).

Tabel 6.2 Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Indonesia (juta US\$), 2021–Triwulan II 2024

Ekspor	2021	2022	2023	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas	12.247,4	15.998,2	15.921,9	3.899,7	4.000,3
Minyak Mentah	2.795,9	1.615,3	1.749,3	555,2	581,8
Hasil Minyak	2.000,5	4.671,0	5.399,5	1.424,4	979,4
Gas Alam	7.451,0	9.711,9	8.773,1	1.920,1	2.439,1
Non Migas	219.362,1	275.906,1	242.852,5	58.406,9	58.785,2
Sektor Pertanian	4.234,4	4.889,4	4.400,7	1.178,1	1.095,0
Sektor Industri	176.730,4	205.692,5	186.596,4	45.302,0	46.353,6
Sektor Tambang dan Lainnya	38.397,3	65.324,2	51.855,4	11.923,9	11.336,6
Jumlah	231.609,5	291.904,3	258.774,4	62.303,7	62.785,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

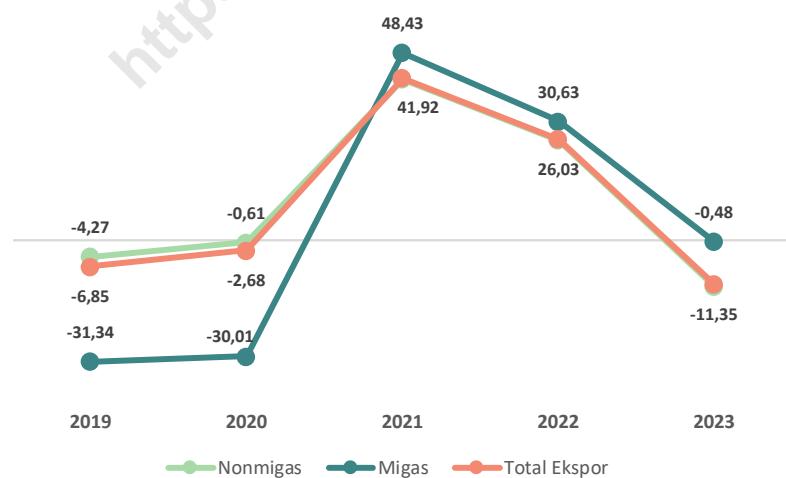
Pemerintah menargetkan kinerja ekspor nonmigas pada tahun 2024 tumbuh 2,5–4,5 persen. Dalam upaya pencapaian target tersebut, pemerintah menargetkan pasar baru di saat Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia masih dalam tahap pemulihan perekonomian. Pasar baru yang ditargetkan oleh Indonesia seperti negara India, Pakistan, Mesir, Malaysia, Thailand, dan Filipina dianggap potensial karena sudah mencatatkan surplus di tahun sebelumnya. Untuk memperluas target pasar ekspor, pemerintah berupaya untuk berpartisipasi aktif dalam beberapa pameran, memperluas akses pasar dengan membuka perjanjian dagang dengan negara-negara tujuan ekspor. Sementara itu, komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia tetap CPO dan batu bara, serta produk hilirisasi seperti nikel dan produk hasil hutan (Kemendag RI 4 Januari 2024).

Realisasi nilai ekspor nonmigas hingga semester I 2024 tercatat US\$117,19 miliar. Realisasi tersebut turun sekitar 3,00 persen dibandingkan semester I 2023 yang nilai eksportnya mencapai US\$120,80 miliar. Capaian tersebut menjadi indikasi bahwa target pertumbuhan ekspor nonmigas tahun 2024 akan sulit dicapai, tanpa peningkatan nilai ekspor yang impresif pada semester II 2024. Merespon kinerja ekspor di semester awal 2024, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong peningkatan kinerja dagang di semester berikutnya, antara lain memperkuat transformasi struktur ekspor ke arah peningkatan ekspor produk manufaktur. Di sisi lain, untuk meningkatkan ekspor pemerintah juga memberikan fokus utama pada penurunan tarif serta melakukan digitalisasi perdagangan (Ekonomi Bisnis 18 Juli 2024).

Penurunan ekspor nonmigas terjadi di semua sektor komoditas, dengan penurunan terdalam pada sektor industri. Nilai sektor industri pengolahan pada tahun 2023 tercatat hanya sebesar US\$186,60 miliar. Angka tersebut turun US\$19,10 miliar atau turun 9,28 persen dibandingkan tahun lalu. Padahal, sektor industri pengolahan berkontribusi hingga 72,11 persen terhadap total ekspor Indonesia. Penurunan pada nilai ekspor dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas unggulan di pasar global.

Di sisi lain, pertumbuhan positif nilai ekspor hanya terlihat pada ekspor minyak mentah dan hasil minyak. Nilai ekspor hasil minyak meningkat dari US\$4,67 miliar pada 2022 menjadi US\$5,40 miliar pada 2023 dan ekspor minyak mentah naik dari US\$1,62 miliar menjadi US\$1,75 miliar pada 2023. Meskipun demikian, peningkatan nilai ekspor kedua sektor komoditas tersebut tidak berpengaruh besar, karena kontribusi keduanya tidak mencapai 3 persen terhadap total ekspor Indonesia.

Memasuki tahun 2024, kinerja ekspor sektor industri sebagai tumpuan ekspor Indonesia tercatat sebesar US\$91,66 miliar pada semester I 2024. Nilai tersebut meningkat tipis 0,39 persen dibandingkan semester I tahun sebelumnya. Di tengah terus berjalannya upaya hilirisasi industri guna meningkatkan ekspor produk yang bernilai tambah, peningkatan ekspor sektor industri diharapkan terus memberikan pertumbuhan positif. Akan tetapi, nampaknya kondisi tersebut sulit untuk direalisasikan akibat pengaruh dari isu melambatnya permintaan global dan lesunya harga komoditas di pasar internasional (Kompas 17 Maret 2024).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Gambar 6.2 Pertumbuhan Nilai Ekspor Indonesia (persen), 2019–2023

Ekspor Komoditas Unggulan Menurun

Untuk melihat lebih jauh kinerja komoditas ekspor pada ekspor hasil industri, dapat dilihat berdasarkan komoditasnya. Komoditas ekspor unggulan dari ekspor industri adalah minyak kelapa sawit. Ekspor komoditas hasil industri minyak kelapa sawit tercatat senilai US\$25,07 miliar pada 2023. Angka tersebut berkontribusi sekitar 10,32 persen terhadap total nilai ekspor Indonesia. Meskipun demikian, terdapat penurunan ekspor komoditas tersebut hingga 19,00 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 6.3 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Komoditas Penting (juta US\$), 2021–Triwulan II 2024

Komoditas Ekspor	2021	2022	2023	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor Hasil Pertanian	4.234,4	4.889,4	4.400,7	1.178,1	1.095,0
Kopi	850,1	1.136,2	916,6	217,6	252,2
Buah-buahan Tahunan	748,3	767,7	333,4	175,2	75,4
Sarang Burung	517,0	590,6	633,2	153,4	129,5
Tanaman Obat, Aromatik, dan Rempah-Rempah	408,5	359,2	465,1	93,9	101,0
Rumput Laut dan Ganggang Lainnya	223,9	401,0	284,8	49,4	42,2
Hasil Pertanian Lainnya	1.486,6	1.634,7	1.767,6	488,6	494,7
Ekspor Hasil Industri	176.730,4	205.692,5	186.596,4	45.302,0	46.353,6
Minyak kelapa sawit	29.253,6	30.942,9	25.070,8	5.092,4	5.273,3
Hasil industri logam dasar	19.898,8	19.819,1	16.249,7	4.738,9	5.002,7
Kendaraan bermotor roda empat atau lebih	3.839,5	6.103,8	6.831,5	1.528,5	1.591,4
Pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	6.854,6	7.862,4	6.697,6	1.778,7	1.538,0
Kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	7.365,1	9.222,8	6.936,9	1.590,4	1.662,8
Hasil Industri Lainnya	109.518,8	131.741,5	124.809,9	30.573,1	31.285,4
Ekspor Hasil Tambang (Tidak Termasuk Migas)	37.908,1	64.935,9	51.504,8	11.829,4	11.240,8
Batu bara	26.533,1	46.764,9	34.592,1	7.567,8	7.602,4
Bijih Tembaga	5.386,2	9.244,0	8.326,5	2.365,9	1.819,6
Hasil Tambang Lainnya	5.988,8	8.927,0	8.586,2	1.895,7	1.818,8
Ekspor Hasil Sektor Lain	489,2	388,3	350,6	94,5	95,8

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Hasil industri minyak kelapa sawit umumnya diekspor dalam bentuk *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO). Ekspor kedua produk tersebut secara umum mengalami penurunan sejak 2019, meskipun sempat mengalami kenaikan tipis pada 2022. Tren penurunan ekspor CPO dan CPKO

disebabkan oleh peningkatan konsumsi domestik untuk kebutuhan biodiesel, pangan, dan *oleochemical*. Di sisi lain, produksi komoditas tersebut masih stagnan. Terlebih lagi, turunnya ekspor CPO dan CPKO pada 2023 merupakan imbas dari persaingan dengan komoditas biji-bijian dan *sunflower oil* dengan harga yang lebih murah dari Rusia melalui perjanjian perdagangan *Black Sea Initiative* pada 2022. Hal tersebut membuat China dan India sebagai tujuan ekspor justru kebanjiran stok komoditas tersebut (CNBC Indonesia 2 Februari 2024).

Sementara itu, ekspor batu bara yang menjadi komoditas unggulan pada ekspor hasil tambang juga mengalami penurunan hingga 9,92 persen. Nilai ekspor batu bara pada 2023 sebesar US\$34,59 miliar dan menyumbang sekitar 14,24 persen terhadap total ekspor Indonesia. Padahal, secara volume ekspor komoditas batu bara 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Volume ekspor batu bara sepanjang tahun 2023 mencapai 518 juta ton dari total produksi 775 juta ton. Sedangkan di tahun sebelumnya, volume ekspor batu bara tercatat sebesar 465 juta ton (Kementerian ESDM 15 Januari 2024).

Penurunan nilai ekspor batu bara disebabkan oleh anjloknya harga komoditas tersebut. Pada Desember 2023, harga komoditas batu bara tercatat sebesar 141,8 \$/mt turun drastis dibanding Desember 2022 sebesar 379,2 \$/mt. Penurunan tren nilai ekspor komoditas unggulan Indonesia tersebut diprediksi masih terus berlanjut pada 2024. Hingga semester I 2024, nilai ekspor batu bara sebesar US\$15,17 miliar. Nilai tersebut turun hingga 20,62 persen dibandingkan semester I tahun 2023.

Tidak jauh berbeda dari komoditas unggulan lainnya, komoditas unggulan hasil pertanian Indonesia yaitu kopi, juga mengalami penurunan nilai ekspor. Di tahun 2023, ekspor kopi mengalami penurunan hingga 19,32 persen dengan nilai ekspor US\$916,6 juta. Di tengah melonjaknya harga kopi di pasar global, produksi kopi di dalam negeri justru mengalami penurunan. Padahal di sisi lain, terjadi kenaikan permintaan domestik terhadap kopi seiring dengan peningkatan konsumsi kopi di dalam negeri. Volume ekspor kopi tahun 2023 hanya sekitar 276,33 ribu ton, turun dari 433,88 ribu ton pada tahun sebelumnya (CNBC Indonesia 25 Agustus 2024).

Nilai ekspor Indonesia menurut golongan barang *Standard International Trade Classification* (SITC) ditampilkan pada Tabel 6.4. Golongan barang Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb (SITC 3) kembali mendominasi ekspor Indonesia tahun 2023 dengan nilai ekspor hingga US\$59,49 miliar. Kinerja ekspor pada golongan barang SITC 3 mengalami penurunan hingga 16,20 persen pada 2023. Termasuk penyumbang ekspor terbesar pada SITC 3 di tahun 2023 antara lain SITC 321 (Batubara, ditumbuk atau tidak, tetapi tidak diaglomerasi) dan SITC 343 (Gas alam, cair atau tidak) yang sama-sama mengalami penurunan nilai ekspor.

Tabel 6.4 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), 2021–Triwulan II 2024

SITC	Golongan Barang	2021	2022	2023	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	Bahan Makanan dan Binatang Hidup	16.944	19.145	17.860	4.519	4.326
1	Minuman dan Tembakau	1.253	1.447	1.622	536	465
2	Bahan Mentah	20.503	29.763	27.294	6.777	6.851
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb	45.077	70.992	59.488	13.581	13.770
4	Minyak/Lemak Nabati dan Hewani	30.884	32.638	26.441	5.485	5.688
5	Bahan Kimia	18.706	22.186	17.426	4.279	4.404
6	Hasil Industri Menurut Bahan	43.799	50.961	47.348	11.601	12.409
7	Mesin dan Alat Pengangkutan	26.977	33.837	32.938	8.023	7.823
8	Hasil Industri Lainnya	25.846	29.778	27.481	7.287	6.766
9	Bahan dan Transaksi Khusus Lainnya	1.620	1.157	876	216	284
Jumlah		231.609	291.904	258.774	62.304	62.786

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Selain SITC 3, golongan barang yang mendominasi ekspor Indonesia adalah Hasil Industri Menurut Bahan (SITC 6) serta Mesin dan Alat Pengangkutan (SITC 7). Nilai ekspor golongan barang SITC 6 tercatat sebesar US\$47,35 miliar. Nilai tersebut menyumbang sekitar 18,30 persen. Sedangkan nilai ekspor SITC 7 tercatat sebesar US\$32,94 miliar, dengan kontribusi terhadap total ekspor hingga 12,73 persen. Penyumbang terbesar pada nilai ekspor golongan barang SITC 6 adalah hasil industri dari besi dan baja. Sedangkan, penyumbang terbesar untuk golongan barang SITC 7 adalah mobil dan kendaraan bermotor, mesin dan peralatan listrik, serta peralatan telekomunikasi dan komponennya.

Hampir seluruh golongan barang SITC mengalami penurunan nilai impor pada 2023, kecuali golongan barang Minuman dan Tembakau (SITC 1). Penurunan terdalam dialami oleh golongan barang Bahan Kimia (SITC 5), yang turun hingga 21,45 persen dibanding 2022. Penurunan ekspor bahan kimia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang berdampak pada penurunan permintaan bahan kimia di pasar global (FIKI 1 Agustus 2023).

Di sisi lain, peningkatan nilai ekspor pada golongan barang Minuman dan Tembakau (SITC 1) tercatat sebesar 12,09 persen dibanding tahun lalu. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh inovasi industri pengolahan tembakau yang mampu menembus pasar ekspor (Kemenko Perekonomian 12 Januari 2023). Meskipun demikian, naiknya nilai ekspor pada golongan barang tersebut tidak berpengaruh besar pada nilai ekspor keseluruhan, karena hanya bernilai US\$1,62 miliar atau sekitar 0,62 persen terhadap total ekspor.

Penurunan Nilai Ekspor Hampir ke Seluruh Negara Tujuan

Tabel 6.5 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (juta US\$), 2021–Triwulan II 2024

Negara Tujuan	2021	2022	2023	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ASEAN	48.021,6	61.111,0	52.732,5	12.405,4	12.913,0
	(20,73)	(20,94)	(20,38)	(19,91)	(20,57)
(Malaysia)	11.971,0	15.429,6	12.459,9	2.955,3	2.815,8
	(5,17)	(5,29)	(4,81)	(4,74)	(4,48)
(Thailand)	7.088,0	8.196,8	7.222,9	1.784,1	1.912,9
	(3,06)	(2,81)	(2,79)	(2,86)	(3,05)
(Singapura)	11.635,8	14.349,5	12.606,8	2.888,6	2.750,6
	(5,02)	(4,92)	(4,87)	(4,64)	(4,38)
2. Tiongkok	53.765,5	65.839,3	64.934,6	13.829,5	14.205,2
	(23,21)	(22,56)	(25,09)	(22,20)	(22,62)
3. Jepang	17.872,7	24.853,1	20.786,2	5.182,1	4.955,8
	(7,72)	(8,51)	(8,03)	(8,32)	(7,89)
4. Asia Lainnya	45.594,5	65.767,4	56.455,8	14.201,9	14.651,4
	(19,69)	(22,53)	(21,82)	(22,79)	(23,34)
5. Amerika Serikat	25.793,0	28.182,7	23.246,8	6.281,2	5.904,6
	(11,14)	(9,65)	(8,98)	(10,08)	(9,40)
6. Amerika Lainnya	6.076,6	7.103,3	7.261,4	1.914,2	1.972,8
	(2,62)	(2,43)	(2,81)	(3,07)	(3,14)
7. Australia dan Oceania Lainnya	4.285,0	4.616,9	4.288,7	1.446,5	1.398,0
	(1,85)	(1,58)	(1,66)	(2,32)	(2,23)
8. Afrika	7.065,5	7.509,5	6.883,2	1.464,2	1.356,5
	(3,05)	(2,57)	(2,66)	(2,35)	(2,16)
9. Uni Eropa	18.002,0	21.472,7	16.653,7	4.313,8	4.098,3
	(7,77)	(7,36)	(6,44)	(6,92)	(6,53)
(Belanda)	4.630,7	5.377,8	3.866,8	1.118,1	1.117,8
	(2,00)	(1,84)	(1,49)	(1,79)	(1,78)
(Jerman)	2.914,8	3.206,1	2.523,6	566,1	533,4
	(1,26)	(1,10)	(0,98)	(0,91)	(0,85)
10. Eropa Lainnya	5.133,1	5.448,5	5.531,6	1.264,8	1.330,0
	(2,22)	(1,87)	(2,14)	(2,03)	(2,12)
Jumlah	231.609,5	291.904,3	258.774,4	62.303,6	62.785,5
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

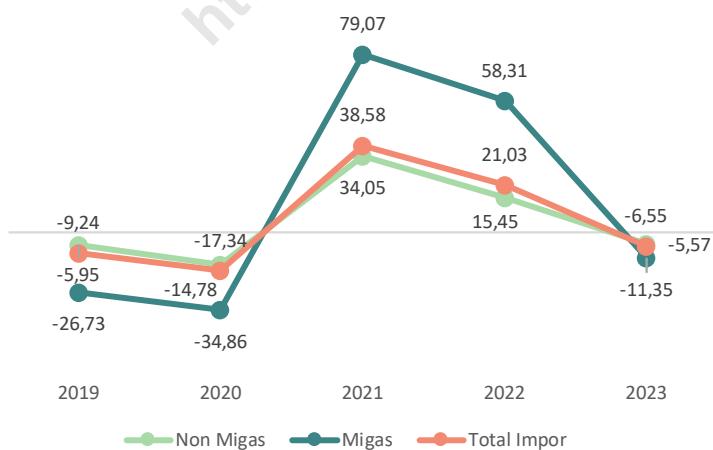
Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Tujuan ekspor Indonesia masih didominasi permintaan dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang yang berkontribusi hingga 42,11 persen terhadap total ekspor. Nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok pada 2023 mencapai US\$64,93 miliar. Nilai tersebut turun sekitar 1,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok antara lain besi dan baja, bahan bakar mineral, serta lemak dan minyak hewan/nabati. Memasuki semester I 2024, ekspor Indonesia ke Tiongkok tercatat senilai US\$28,03 miliar. Nilai tersebut menurun 10,18 persen apabila dibandingkan semester I 2023 yang tercatat sebesar US\$31,21 miliar.

Penurunan nilai ekspor yang cukup dalam terjadi ke negara tujuan ekspor Amerika Serikat dan Jepang. Pada 2023, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar US\$23,25 miliar, turun sekitar 17,51 persen dibanding tahun 2022. Penurunan nilai ekspor tersebut cukup berpengaruh pada penurunan nilai ekspor Indonesia secara total, mengingat pangsa pasar ekspor ke Amerika Serikat mencapai 8,98 persen terhadap total nilai ekspor.

Sementara itu, nilai ekspor Indonesia ke Jepang pada 2023 tercatat sebesar US\$20,79 miliar. Angka tersebut turun sekitar 16,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa produk utama ekspor ke Jepang antara lain batu bara, bijih tembaga, serta produk peralatan dan mesin elektronik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh resesi yang terjadi di negara Jepang yang berisiko pada perdagangan internasional kedua negara (Media Indonesia 16 Februari 2024).

Kinerja Impor Indonesia Terkontraksi



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Gambar 6.3 Pertumbuhan Nilai Impor Indonesia (persen), 2019–2023

Setelah mengalami peningkatan impor yang cukup tinggi di tahun 2021 dan 2022, kinerja impor pada 2023 mengalami kontraksi hingga 6,55 persen

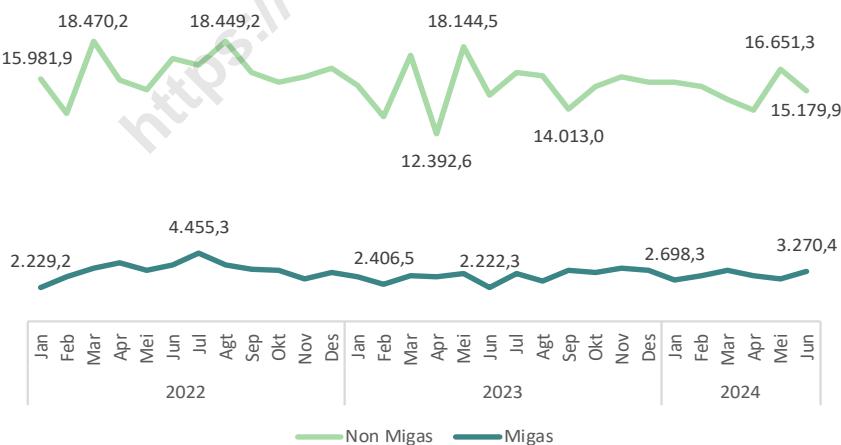
dengan total nilai impor sebesar US\$221,89 miliar (Tabel 6.6). Kontraksi tersebut disebabkan oleh penurunan impor migas maupun nonmigas. Meskipun nilai impor mengalami penurunan, akan tetapi volume impor masih menunjukkan peningkatan hingga 8,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa turunnya impor bukan diakibatkan oleh penurunan permintaan domestik, tetapi lebih dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas (Badan Kebijakan Fiskal 2024).

Tabel 6.6 Nilai Impor Migas dan Non Migas Indonesia (juta US\$), 2021–Triwulan II 2024

Impor	2021	2022	2023	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas	25.529,1	40.416,3	35.830,5	9.004,4	9.002,9
Non Migas	170.660,8	197.030,7	186.055,7	45.891,4	45.742,5
Jumlah	196.189,9	237.447,0	221.886,2	54.895,8	54.745,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Sekitar 83,85 persen dari pemenuhan kebutuhan terhadap produk impor Indonesia berupa produk nonmigas. Nilai impor nonmigas pada 2023 mencapai US\$186,06 miliar, turun sekitar 5,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, nilai impor migas tahun 2023 sebesar US\$35,83 miliar atau turun 11,35 persen dibanding tahun 2022.



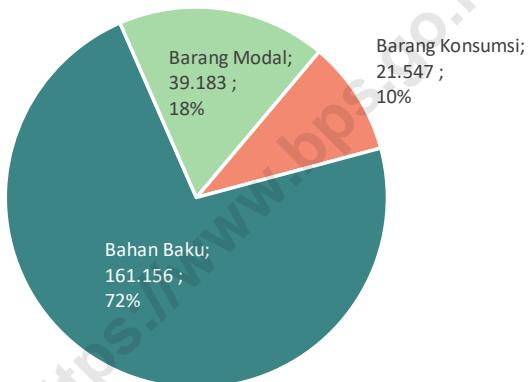
Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Gambar 6.4 Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Bulanan (juta US\$), Januari 2022–Juni 2024

Secara bulanan, kinerja impor terlihat mengalami tren menurun, dengan nilai yang fluktuatif pada semester awal 2023. Puncak kinerja impor nonmigas pada tahun 2023 terjadi pada bulan Mei 2023 dengan nilai impor US\$18,14 miliar. Nilai impor nonmigas tersebut tumbuh hingga 46,41 persen (*m-to-m*)

setelah mengalami titik terendah impor pada bulan April 2023 dengan nilai sebesar US\$12,39 miliar. Rendahnya nilai impor nonmigas pada bulan April tersebut dipengaruhi oleh momen lebaran. Sedangkan pertumbuhan impor nonmigas di bulan berikutnya didorong oleh meningkatnya kebutuhan sektor manufaktur di Indonesia, khususnya untuk bahan baku dan penolong.

Sementara itu, kinerja impor nonmigas dan migas pada semester I 2024 relatif lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga semester I 2024, total impor Indonesia mencapai US\$109,64 miliar. Nilai tersebut mengalami kenaikan tipis apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US\$108,73 miliar. Peningkatan tersebut disumbang oleh impor migas, sebesar US\$18,01 miliar dari US\$16,64 miliar pada 2023. Sementara itu, terjadi impor nonmigas mengalami penurunan dari US\$92,09 miliar menjadi US\$91,63 miliar di semester I 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Gambar 6.5 Nilai Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang (juta US\$), 2023

Sebagian besar, kebutuhan impor di Indonesia adalah berupa bahan baku dan penolong. Pada 2023, impor bahan baku Indonesia senilai US\$161,16 miliar. Angka tersebut berkontribusi hingga 72 persen terhadap total impor Indonesia. Meskipun masih mendominasi, nilai impor bahan baku mengalami penurunan sebesar 11,09 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan kebutuhan impor bahan baku tersebut menjadi indikasi pelemahan kinerja industri manufaktur akibat rendahnya permintaan domestik dan sejalan dengan menurunnya kinerja ekspor industri manufaktur (Kompas 19 September 2023).

Di sisi lain, nilai impor barang modal tahun 2023 mengalami kenaikan hingga 7,78 persen dengan nilai US\$39,18 miliar. Nilai tersebut berkontribusi sekitar 18 persen terhadap total impor Indonesia. Kenaikan impor barang modal tersebut dipengaruhi oleh hilirisasi industri yang mendongkrak kebutuhan akan penyediaan barang modal (Ekonomi Bisnis 22 Januari 2024).

Sementara itu, nilai impor barang konsumsi juga meningkat dari US\$19,83 miliar pada 2022 menjadi US\$21,55 miliar pada 2023.

Tabel 6.7 Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$), 2021–Triwulan II 2024

SITC	Golongan Barang	2021	2022	2023	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	Bahan Makanan dan Binatang Hidup	19.584,0	22.648,0	23.124,0	6.151,7	5.838,0
1	Minuman dan Tembakau	858,0	984,0	1.045,0	333,2	273,0
2	Bahan Mentah	11.286,0	12.034,0	10.402,0	2.589,4	2.911,0
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb	28.838,0	44.893,0	40.115,0	10.071,8	10.069,0
4	Minyak/Lemak Nabati dan Hewani	301,0	320,0	243,0	66,4	78,0
5	Bahan Kimia	32.625,0	33.423,0	27.071,0	7.092,8	7.024,0
6	Hasil Industri Menurut Bahan	32.674,0	37.481,0	33.155,0	7.845,2	7.851,0
7	Mesin dan Alat Pengangkutan	56.723,0	70.218,0	71.501,0	17.246,0	16.738,0
8	Hasil Industri Lainnya	10.342,0	11.922,0	12.626,0	2.980,7	3.090,0
9	Bahan dan Transaksi Khusus Lainnya	2.959,0	3.522,0	2.602,0	518,2	873,0
Jumlah		196.190,2	237.447,0	221.886,0	54.895,4	54.745,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Pertumbuhan nilai impor dilihat dari golongan barang SITC mengalami penurunan pada sebagian besar golongan barang. Penurunan terdalam dialami pada nilai impor Bahan dan Transaksi Khusus Lainnya (SITC 9) sebesar 26,12 persen, Minyak/Lemak Nabati dan Hewani (SITC 4) sebesar 24,06 persen, dan Bahan Kimia (SITC 5). Sedangkan dilihat dari dominasinya, golongan barang Mesin dan Alat Pengangkutan (SITC 7) berkontribusi hingga 32,22 persen terhadap total impor dengan nilai impor US\$71,50 miliar. Nilai tersebut meningkat tipis 1,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu golongan barang yang mengalami peningkatan impor di tahun 2023 adalah golongan barang Bahan Makanan dan Binatang Hidup (SITC 0). Salah satu komoditas yang mengalami lonjakan impor sangat drastis di SITC 0 adalah komoditas beras. Impor komoditas beras Indonesia tahun 2023 tercatat senilai US\$1,79 miliar dengan volume 3,06 juta ton. Nilai tersebut meningkat hingga tujuh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US\$0,20 miliar. Tajamnya lonjakan impor beras di tahun 2023 diakibatkan oleh penurunan produksi beras dalam negeri akibat perubahan iklim El Nino. Impor beras dilakukan guna memperkuat stok cadangan beras yang kemudian didistribusikan ke masyarakat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dalam bentuk operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan

penyaluran bantuan pangan ke lebih dari 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (Badan Pangan Nasional 16 Januari 2024).

Tabel 6.8 Nilai Impor Indonesia Menurut Negara Asal (juta US\$), 2021–Triwulan II 2024

Negara Tujuan	2021	2022	2023	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ASEAN	39.951,4	50.184,3	46.870,7	12.717,2	12.201,3
	(20,36)	(21,13)	(21,12)	(23,17)	(22,29)
(Malaysia)	9.451,0	12.475,6	10.760,6	2.687,6	2.223,4
	(4,82)	(5,25)	(4,85)	(4,90)	(4,06)
(Thailand)	9.146,5	10.989,0	10.253,2	2.720,6	2.187,5
	(4,66)	(4,63)	(4,62)	(4,96)	(4,00)
(Singapura)	15.451,7	19.409,5	18.409,6	5.100,1	5.707,7
	(7,88)	(8,17)	(8,30)	(9,29)	(10,43)
2. Tiongkok	56.227,2	67.723,7	62.880,9	16.636,4	16.299,7
	(28,66)	(28,52)	(28,34)	(30,31)	(29,77)
3. Jepang	14.644,3	17.176,7	16.516,9	3.339,1	3.209,8
	(7,46)	(7,23)	(7,44)	(6,08)	(5,86)
4. Asia Lainnya	33.015,1	40.493,5	34.244,7	8.213,5	7.317,5
	(16,83)	(17,05)	(15,43)	(14,96)	(13,37)
5. Amerika Serikat	11.249,2	11.614,0	11.277,5	2.673,2	3.105,4
	(5,73)	(4,89)	(5,08)	(4,87)	(5,67)
6. Amerika Lainnya	7.732,7	10.413,1	9.445,3	2.461,8	2.447,0
	(3,94)	(4,39)	(4,26)	(4,48)	(4,47)
7. Australia dan Oceania Lainnya	10.408,8	11.358,1	10.511,4	2.490,9	2.886,2
	(5,31)	(4,78)	(4,74)	(4,54)	(5,27)
8. Afrika	6.301,8	10.230,8	9.861,3	2.161,8	2.613,7
	(3,21)	(4,31)	(4,44)	(3,94)	(4,77)
9. Uni Eropa	11.095,9	11.666,9	14.121,4	2.793,8	3.130,7
	(5,66)	(4,91)	(6,36)	(5,09)	(5,72)
(Jerman)	3.187,6	3.821,8	4.647,3	785,6	904,1
	(1,62)	(1,61)	(2,09)	(1,43)	(1,65)
(Italia)	1.728,3	1.486,2	1.891,0	395,7	395,9
	(0,88)	(0,63)	(0,85)	(0,72)	(0,72)
(Perancis)	1.275,6	1.329,9	1.663,7	308,6	323,5
	(0,65)	(0,56)	(0,75)	(0,56)	(0,59)
10. Eropa Lainnya	5.563,6	6.586,0	6.156,1	1.408,1	1.534,1
	(2,84)	(2,77)	(2,77)	(2,57)	(2,80)
Jumlah	196.189,9	237.447,1	221.886,2	54.895,8	54.745,4
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Sebagian besar impor yang masuk ke Indonesia berasal dari Tiongkok, Singapura dan Jepang. Pangsa pasar impor dari ketiga negara tersebut ke Indonesia mencapai 44,08 persen pada 2023. Nilai impor dari Tiongkok pada 2023 tercatat sebesar US\$62,88 miliar. Nilai impor dari Tiongkok mengalami penurunan 7,15 persen dibanding tahun lalu. Penurunan nilai impor dari mitra dagang utama Indonesia tersebut tidak terlepas dari lesunya perekonomian di negara itu. Turunnya impor yang didominasi oleh barang bahan baku perlu diwaspadai, terutama apabila belum ada substitusi produk impor bahan baku industri. Jika hal ini terjadi, kegiatan sektor manufaktur di Indonesia akan terdampak ikut melambat hingga berpengaruh pada berkurangnya potensi pasar ekspor Indonesia (Kompas 2 Mei 2023).

Memasuki semester I 2024, impor dari Tiongkok mengalami peningkatan 8,49 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai impornya mencapai US\$32,94 miliar. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diproyeksi tumbuh positif pada 2024 (Antara 17 Juli 2024).

Sementara itu dilihat dari pertumbuhannya, nilai impor hampir dari seluruh negara mengalami pertumbuhan negatif di 2023. Penurunan terdalam berasal dari Malaysia hingga 13,75 persen. Di sisi lain, impor dari negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Italia, dan Perancis mengalami peningkatan hingga 21,04 persen. Meskipun demikian, peningkatan nilai impor dari negara-negara tersebut tidak berpengaruh besar terhadap total nilai impor karena kontribusinya hanya sekitar 6,36 persen.

Investasi Indonesia: Trend Terkini dan Prospek Kedepan

7

Penanaman Modal Dalam Negeri



Pada Triwulan II tahun 2024, PMDN Mengalami Peningkatan sebesar **7,09** persen dibandingkan triwulan yang sama

Penanaman Modal Asing



Pada Triwulan II tahun 2024, PMA Mengalami Peningkatan sebesar **6,03** persen dibandingkan triwulan yang sama



Karakteristik Investor Pada Juli 2024

Lebih Dari 50 %

Investor di Indonesia Memiliki Tingkat
Pendidikan SMA ke Bawah



53,53%



46,47%

&

Berjenis Kelamin Laki-laki



62,08%



37,92%

Investasi Syariah di Indonesia

Pada Triwulan II 2024



Nilai Investasi Syariah
Menurun

0,17 %

dibandingkan Triwulan Sebelumnya

Jumlah Investor
Meningkat
dibandingkan Triwulan Sebelumnya
3,88%



*Investasi Indonesia tetap
meningkat di tengah
ketidakpastian perekonomian
global*

Investasi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan kondisi ekonomi global dan domestik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan Asia Tenggara, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pasar yang besar. Berbagai sektor seperti infrastruktur, teknologi, dan manufaktur menjadi magnet bagi investor lokal maupun internasional.

Di tengah kondisi ketidakstabilan perekonomian global dan gejolak pandemi COVID-19, investasi Indonesia membuktikan keberhasilannya dengan mampu melampaui target investasi dari pemerintah dan terus menunjukkan kinerja yang positif. Keberhasilan ini berlanjut hingga triwulan II tahun 2024, tercermin dari sejumlah indikator seperti stabilitas pasar, aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, dan jumlah investor ritel yang terus meningkat.

Target investasi dari pemerintah tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp 1.650 triliun. Pencapaian target investasi 2024 dihadapi tantangan baik eksternal maupun internal. Secara eksternal, ketegangan geopolitik yang tinggi, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, pengetatan moneter, hingga kontraksi pertumbuhan ekonomi di negara maju menjadi hambatan bagi pertumbuhan *Foreign Direct Investment* (FDI). Akibatnya aliran FDI ke Asia Tenggara menurun, termasuk ke Indonesia. Sementara faktor internal yang menjadi tantangan investasi di tahun 2024 antara lain penyelenggaraan pemilu. Secara historis, pertumbuhan ekonomi pada tahun penyelenggaraan pemilu selalu melambat yang dipicu perlambatan komponen pendorong utama produk domestik bruto yaitu investasi (Dian 2024).

Investasi yang membaik pada dasarnya akan memperkuat pembangunan ekonomi. Teori Harrod-Domard menyimpulkan bahwa investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang (*long-term*). Pada satu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Di sisi lain, investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai *steady-state growth* atau pertumbuhan ekonomi yang mantap diperlukan kondisi di mana para pelaku usahanya memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan angka investasi di pasar modal, antara lain dengan memperbaiki regulasi dan kebijakan yang mendukung iklim investasi. Diantaranya adalah penyederhanaan proses perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mempercepat dan mempermudah investor untuk memulai bisnis di Indonesia. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan insentif pajak untuk investasi di sektor-sektor prioritas dan peningkatan perlindungan investor melalui penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik

manipulasi pasar dan *insider trading*. Selain itu, pemerintah juga aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program edukasi yang bertujuan untuk menarik lebih banyak investor ritel ke pasar modal. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun asing.

Potensi dan Dukungan Pemerintah Indonesia Untuk Penguan Investasi di Dalam Negeri

Potensi pasar yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta populasi yang terus bertumbuh, menjadikan Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021), menyatakan *Survei Borderless Business Studies* yang dilakukan oleh *Standard Chartered* menempatkan Indonesia sebagai negara keempat se-Asia Tenggara yang disukai perusahaan Amerika Serikat dan Eropa dalam hal peluang membangun atau memperluas sumber daya, penjualan, atau operasi perusahaan selama enam hingga dua belas bulan ke depan.

Sepanjang lima tahun terakhir meskipun dilanda dengan berbagai permasalahan perekonomian, pasar modal Indonesia tetap menunjukkan keberhasilannya. Disamping dengan penduduk yang cukup besar, perkembangan penduduk dengan kelas menengah juga mengalami perkembangan pesat. Ekonom LPEM UI Teuku Riefky mengatakan pada 2023, kelas menengah di Indonesia mencapai 52 juta orang dan mewakili 18,8 persen dari total populasi. Kelas menengah yang berkembang memiliki daya beli dan kapasitas tabungan yang lebih besar, sehingga mampu berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai instrumen investasi. Pertumbuhan kelas menengah meningkatkan permintaan terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk saham, obligasi, dan reksa dana, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan pasar modal dan sektor keuangan.

Potensi lain yang cukup menarik di mata investor adalah terkait investasi pada energi terbarukan dan potensi cadangan karbon. Indonesia tercatat memiliki potensi energi terbarukan (EBT) sebesar 3.600 gigawatt dan juga sedang membangun *Green Industrial Park* seluas 30 ribu hektare. Salah satu proyek yang sedang dijalankan terkait dengan energi terbarukan yaitu pembangkit listrik tenaga surya yang berada di Provinsi Banten. Proyek PLTS Banten diharapkan akan membantu meningkatkan bauran pembangkit EBT yang ditargetkan mencapai 23 persen pada tahun 2025. Proyek ini diproyeksikan akan menghasilkan tenaga listrik sebesar 78 GWh/tahun dengan target pengurangan emisi karbon mencapai 46,7 kilo Ton CO₂/Tahun. Saat ini nilai PLTS Provinsi Banten bernilai Rp 403,01 miliar.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5,7 persen dan tingkat inflasi 4 persen.

Stabilitas politik Indonesia yang terjaga baik menjadi perhatian pemerintah untuk menambah kepercayaan investor berinvestasi. Investor yang mampu memanfaatkan peluang ini akan mendapatkan keuntungan besar dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Realisasi nilai investasi penanaman modal Indonesia terbagi menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA dan PMDN memiliki peran krusial dalam memaksimalkan potensi investasi di Indonesia. Keduanya saling melengkapi dengan keunggulan masing-masing, dan interaksi antara keduanya dapat menciptakan ekosistem investasi yang dinamis dan berkelanjutan.

Tabel 7.1 Realisasi Investasi PMA (juta US\$) dan PMDN (miliar rupiah), 2018–2024¹

Tahun (1)	PMA (2)	PMDN (3)
	2018	328.604,9
2019	28.208,8	386.498,4
2020	28.666,3	413.535,5
2021	31.093,1	447.063,6
2022	45.605,0	552.769,0
2023	50.267,5	674.923,4
2024 ¹	14.488,1	211.088,2

Catatan: ¹2024 data hingga triwulan 2

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi (2021–2024)

Dilihat perkembangannya, sejak tahun 2019 Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama kurun waktu tersebut, investasi Indonesia masih didominasi dengan PMA. Pada tahun 2023 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 674,9 triliun atau 47,6 persen dari total investasi. PMDN tumbuh 22,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara berdasarkan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 744 triliun (kurs 14.805 rupiah per US\$) atau 52,4 persen dari total investasi tahun 2023. Nilai PMA tumbuh 13,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun angka PMA setiap tahunnya mendominasi investasi di Indonesia, namun pertumbuhannya mengalami perlambatan dibandingkan dengan PMDN. Pertumbuhan PMA dan PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2022. Meskipun tahun 2022 kondisi dunia masih dalam kondisi yang tidak menentu, dimana terjadi perang Rusia dan Ukraina, ternyata investasi Indonesia masih mampu tumbuh dengan signifikan. Hal ini dapat terjadi karena pada masa tersebut kondisi Indonesia sedang mengalami pemulihan pasca pandemi COVID-19. Mulai diberlakukannya kembali kegiatan perkantoran, perbaikan kondisi ekonomi dan pemulihan sektor pariwisata mendukung kegiatan investasi yang berjalan.

Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) berhasil merealisasikan capaian investasi pada Triwulan II 2024 dengan angka investasi mencapai Rp 428,4 triliun. Tahun 2024 triwulan II angka PMDN berada di posisi Rp 211,09 triliun, sedangkan PMA berada di posisi US\$ 14,49 miliar. Baik PMDN dan PMA pada triwulan II 2024, terjadi peningkatan sebesar 7,09 persen dan 6,03 persen dibandingkan triwulan sebelumnya pada tahun yang sama. Peningkatan ini memberikan sinyal positif bagi pemerintah dalam pencapaian target investasi 2024. Dalam kondisi ketidakstabilan politik global dan pemilihan Presiden 2024, investor masih memiliki kepercayaan penuh dalam berinvestasi di dalam negeri. Hal ini tidak terlepas dari usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah serta lembaga terkait lainnya

Peran pemerintah menjadi sangat vital dalam meningkatkan investasi. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga kepercayaan investor dengan memastikan stabilitas makroekonomi dan menerapkan kebijakan fiskal yang *prudent*. Diantaranya melalui reformasi regulasi dengan mengurangi birokrasi untuk mempermudah proses perizinan dan pemberian berbagai insentif, seperti keringanan pajak dan subsidi. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan langkah ini diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang lebih ramah dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kondisi keamanan di dalam negeri menjadi kunci dan modal dasar bagi masuknya investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Indonesia, agar dana investasi yang terkumpul dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pembangunan. Pada masa pemulihan COVID-19 tahun 2022, pemerintah menjalankan kebijakan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 dalam meregulasi investasi di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai destinasi investasi dengan memberikan kemudahan dan kepastian bagi investor. KEK didesain untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menarik bagi investor karena fasilitas dan insentif yang diberikan. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan arus investasi ke KEK, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan ini mengalami keberhasilan, terbukti sepanjang tahun 2022, investasi Indonesia melampaui target pemerintah (lihat tabel 7.2).

Pada tahun berikutnya, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di tengah kelesuan perekonomian dunia dan gejolak politik. Undang-undang ini tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil, transparan, dan kompetitif, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak investasi. Peraturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi besar untuk berkembang.

Kebijakan yang dilontarkan pemerintah terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan sinyal positif. Realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun. Capaian ini melebihi 1,35 persen dari target yang diberikan secara khusus oleh Presiden RI Joko Widodo yaitu sebesar Rp 1.400 triliun. Jika dilihat kembali pada Tabel 7.2 secara umum sejak tahun 2019 angka investasi yang terealisasi sudah mampu melampaui target investasi yang ditargetkan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia selalu menjadi destinasi investasi yang menarik bagi para investor meskipun dilanda berbagai permasalahan baik dari sisi perekonomian, politik maupun keamanan.

Tabel 7.2 Target dan Realisasi Nilai Investasi (triliun rupiah), 2018-2023

Tahun	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)
2018	765,0	721,3
2019	792,0	809,6
2020	817,2	826,3
2021	858,5	901,0
2022	1.200,0	1.207,2
2023	1.400,0	1.418,9

Sumber: BKPM, bkpm.go.id

Keberhasilan kinerja investasi yang diperoleh tahun 2023 membuat pemerintah semakin optimis dengan keadaan iklim investasi di Indonesia, karena didukung dengan kebijakan program pemerintah yang masih fokus pada transformasi ekonomi dan memetakan wilayah yang dapat menyerap nilai investasi. Pemerintah memasang target investasi lebih tinggi di tahun 2024 menjadi Rp 1.650 triliun (BKPM 2023). Meskipun pemerintah bersikap optimis dengan meningkatkan angka target sebesar 17,86 persen, namun kewaspadaan harus dilakukan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Indonesia dihadapkan dengan tahun politik, dimana kestabilan harus dijaga untuk menimbulkan iklim investasi yang kondusif. Selama periode ini, ketidakpastian mengenai arah kebijakan dan potensi pergeseran dalam kepemimpinan dapat membuat investor ragu untuk melakukan investasi jangka panjang, karena mereka khawatir tentang bagaimana perubahan politik dapat memengaruhi iklim bisnis dan regulasi. Oleh karena itu, menjaga stabilitas politik dan memberikan kepastian kebijakan sangat penting untuk memastikan arus investasi tetap lancar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain stabilitas politik, perbaikan infrastruktur merupakan langkah penting yang dilakukan dalam mendukung pembangunan. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama fondasi pembangunan yang akan terus ditingkatkan, utamanya untuk menyambungkan sentra-sentra ekonomi produktif, sehingga masalah distribusi tidak lagi menjadi kendala pertumbuhan ekonomi regional. Proyek-proyek seperti Pelabuhan Patimban, Bandara

Internasional Yogyakarta, dan proyek jalan tol Trans-Sumatera diharapkan memperkuat koneksi antar wilayah dan mengurangi biaya logistik, sehingga menarik minat investor domestik dan asing untuk berinvestasi dalam berbagai sektor. Peningkatan infrastruktur ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan efisien, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

Faktor keamanan dalam negeri, kebijakan, dan program yang digulirkan pemerintah diharapkan mampu menarik dan meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi. Kemudahan yang diperoleh para investor, keuntungan dan semakin berkembangnya modal juga membuat para investor meningkatkan nilai investasinya. Pada akhirnya investasi yang terkumpul dapat direalisasikan pada proyek-proyek tertentu yang dapat menunjang kegiatan pembangunan dan dapat membiayai proyek-proyek pembangunan strategis agar dapat tetap berjalan. Investasi yang berjalan dengan baik dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Sektor yang Menjanjikan Bagi Pemodal Dalam Negeri (PMDN)

Pada tahun 2021, investasi domestik banyak diserap di Sektor Industri dengan nilai investasi mencapai Rp 94,70 triliun (21,18 persen dari seluruh investor domestik). Sektor lain yang cukup tinggi menyerap investasi domestik adalah Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Pergudangan dengan nilai investasi mencapai Rp 85,50 triliun (19,12 persen). Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi menduduki ranking ketiga dengan nilai investasi Rp 61,24 triliun (13,70 persen).

Investasi Indonesia terus menunjukkan pergerakan positif. Pada tahun 2022 saat Indonesia mengalami pemulihan ekonomi pasca COVID-19, sektor yang paling diminati untuk investasi masih Sektor Industri yang mampu menyerap investasi domestik sebesar Rp 143,56 triliun atau sebesar 25,97 persen. Tidak hanya sektor dengan penyerapan tertinggi, sektor industri juga termasuk sektor ketiga terbesar yang mengalami peningkatan tertinggi di tahun 2022. Meskipun dilanda kondisi pandemi COVID-19, pada tahun 2022 sektor industri mampu meningkat sebesar 51,60 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingginya penyerapan sektor industri tidak terlepas dari berbagai program pemerintah dalam mendorong industri di Indonesia. Salah satu program yang dijalankan adalah substitusi impor 35 persen, program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan hilirisasi sumber daya alam. Akselerasi peningkatan investasi di sektor industri juga ditempuh melalui pemerataan pembangunan industri, yaitu dengan mengembangkan Kawasan industri di seluruh Indonesia. Sektor lainnya yang mengalami keberhasilan yang cukup berarti di tahun 2022 adalah sektor pertambangan dengan peningkatan sebesar 145,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Melonjaknya penyerapan sektor ini tidak terlepas dari kenaikan signifikan harga komoditas seperti batu bara, nikel, tembaga, dan emas di pasar global pada tahun 2022. Kenaikan ini juga didorong oleh meningkatnya permintaan

global, terutama dari negara-negara yang sedang memulihkan ekonomi mereka setelah pandemi COVID-19.

Tabel 7.3 Perkembangan Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor (miliar rupiah), 2021–2023

Sektor	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	29.374,6	38.878,5	42.912,0
	(6,57)	(7,03)	(6,36)
Kehutanan	6.862,7	8.603,1	23.032,5
	(1,54)	(1,56)	(3,41)
Perikanan	1.012,2	1.214,0	2.506,5
	(0,23)	(0,22)	(0,37)
Pertambangan	25.517,1	62.521,6	86.689,2
	(5,71)	(11,31)	(12,84)
Industri	94.698,4	143.564,5	171.657,3
	(21,18)	(25,97)	(25,43)
Listrik, Gas, dan Air	38.727,7	32.107,5	37.584,9
	(8,66)	(5,81)	(5,57)
Konstruksi	39.569,4	33.846,5	32.813,4
	(8,85)	(6,12)	(4,86)
Perdagangan dan Reparasi	22.432,4	31.051,3	48.557,8
	(5,02)	(5,62)	(7,19)
Hotel dan Restoran	17.819,3	21.579,1	23.362,9
	(3,99)	(3,90)	(3,46)
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	61.241,5	75.138,4	76.659,4
	(13,70)	(13,59)	(11,36)
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	85.497,8	66.167,8	77.099,2
	(19,12)	(11,97)	(11,42)
Jasa Lainnya	24.310,4	38.096,7	52.048,2
	(5,44)	(6,89)	(7,71)
Jumlah	447.063,6	552.769,0	674.923,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi (2021–2023)

Setelah pandemi COVID-19, pada tahun 2023 Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan badai perekonomian. Ketidakpastian politik dimana terjadi perang Ukraina-Rusia, fluktuasi harga komoditas, dan dampak pandemi yang masih terasa telah menciptakan lingkungan bisnis yang

kompleks dan menantang bagi pelaku pasar keuangan. Meskipun demikian pada tahun 2023, sektor industri masih menjadi primadona investor dengan menyerap 25,43 persen dari total PMDN atau sebesar Rp 171,66 triliun. Meskipun tetap berada di posisi pertama, nilai investasi sektor industri mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Berbeda halnya dengan sektor industri, sektor kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada tahun sebelumnya, investasi sektor kehutanan dan perikanan masing-masing hanya mampu meningkat sebesar 25,36 persen dan 19,94 persen dibanding tahun sebelumnya. Kedua sektor ini hanya mampu menyerap masing-masing sebesar 1,56 persen dan 0,22 persen dari total PMDN. Namun pada tahun 2023 sektor kehutanan mampu meningkat sebesar 167,72 persen menjadi Rp 23,02 triliun. Sedangkan sektor perikanan meningkat sebesar 106,47 persen menjadi Rp 2,51 triliun. Tingginya peningkatan kedua sektor ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menerapkan *green economy*. Pemerintah Indonesia terus menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, termasuk insentif untuk sertifikasi hutan dan pengelolaan yang ramah lingkungan. Kebijakan ini menarik investor dengan memberikan jaminan bagi pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Selain itu pemerintah Indonesia memberikan dukungan melalui kebijakan untuk meningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan dan memperbaiki infrastruktur sektor perikanan. Inisiatif ini termasuk bantuan teknis dan finansial untuk budidaya perikanan serta pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik.

Tahun 2024 merupakan tahun politik bagi negara Indonesia, pemerintah terus berusaha menstabilkan kondisi perekonomian guna mendapatkan kepercayaan penuh para investor. Fokus utama dari APBN 2024 adalah menghapuskan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penciptaan iklim investasi yang kondusif tercipta di tahun 2024 dimana terlihat pertumbuhan ekonomi mampu bertahan di sekitar 5 persen, meskipun pada triwulan II pertumbuhan ekonomi berjalan lebih lambat dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 5,08 persen atau lebih rendah 0,03 persen dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Upaya terus dilakukan pemerintah untuk mendorong iklim usaha yang kondusif. Salah satu langkah utama adalah penyederhanaan proses perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pengajuan izin berusaha bagi investor. Dengan sistem ini, diharapkan birokrasi yang kompleks dan waktu tunggu yang lama dalam perizinan dapat diminimalisir, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memulai dan mengembangkan investasi mereka. Selain itu untuk memastikan pencapaian target investasi, pemerintah juga mendukung dan mengawasi proses investasi dari hulu ke hilir. Dukungan yang diberikan mencakup pendanaan, penyelesaian konstruksi, dan mulai produksi komersial. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, pemerintah berharap dapat mencapai target investasi yang ditetapkan untuk tahun 2024, serta

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.

Tabel 7.4 Realisasi PMDN Menurut Sektor (miliar rupiah), Triwulan I dan Triwulan II 2024

No	Sektor	2024	
		Triwulan I	Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	11.054,9	7.961,0
2.	Kehutanan	11.243,8	16.347,1
3.	Perikanan	496,2	428,9
4.	Pertambangan	21.226,6	32.165,9
5.	Industri Makanan	18.835,6	14.141,5
6.	Industri Tekstil	1.713,6	1.777,2
7.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	140,3	466,6
8.	Industri Kayu	2.263,4	862,8
9.	Industri Kertas dan Percetakan	3.859,3	1.455,3
10.	Industri Kimia dan Farmasi	7.505,4	9.273,0
11.	Industri Karet dan Plastik	2.340,3	1.609,7
12.	Industri Mineral Non Logam	2.054,8	2.728,1
13.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	6.862,4	8.122,5
14.	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	1.004,8	1.436,6
15.	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	571,9	3.077,3
16.	Industri Lainnya	1.453,4	1.268,5
17.	Listrik, Gas, dan Air	13.871,3	9.986,4
18.	Konstruksi	5.296,8	7.511,7
19.	Perdagangan dan Reparasi	16.473,7	18.490,0
20.	Hotel dan Restoran	6.172,5	5.403,4
21.	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	30.218,4	29.648,0
22.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	15.192,9	21.438,7
23.	Jasa Lainnya	17.257,3	15.488,1
Jumlah		197.109,4	211.088,2

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi (2024)

Capaian realisasi nilai investasi dalam negeri pada triwulan I 2024 sebesar Rp 197,11 triliun atau meningkat sebesar 29,72 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Capaian ini hanya sepersembilan dari target investasi pemerintah. Kestabilan politik yang terwujud berkontribusi secara positif terhadap peningkatan minat dan kepercayaan dalam sektor penanaman modal. Investasi dalam negeri terus mengalami peningkatan hingga triwulan II tahun 2024, menjadi Rp 211,09 triliun.

Sektor yang mendominasi penanaman modal dalam negeri pada triwulan I 2024 adalah transportasi, dengan nilai sebesar Rp 30,22 triliun atau sebesar 15,3 persen dari total investasi dalam negeri. Melalui Permenhub No. 13 Tahun 2023, Kementerian Perhubungan berkomitmen mendukung upaya Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam mengurus perizinan guna meningkatkan iklim investasi. Kemudahan yang diberikan ini lambat laun memberikan efek yang cukup signifikan di tahun 2024 dengan menjadikannya sektor transportasi memiliki nilai tertinggi diantara sektor lainnya. Sektor kedua yang memiliki daya serap tertinggi adalah sektor industri makanan dengan nilai Rp 21,27 triliun atau 10,77 persen dari total investasi dalam negeri. Tingginya investasi ini tidak terlepas dari sifat konsumtif masyarakat Indonesia dan pentingnya bahan makanan bagi keberlangsungan hidup.

Sedangkan pada triwulan II tahun 2024, hampir setengah dari 23 sektor mengalami penurunan investasi dalam negeri. Sektor yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada triwulan ini adalah sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain (438,11 persen), Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki (232,65 persen) dan sektor pertambangan (51,54 persen). Keberhasilan sektor industri kendaraan bermotor tidak terlepas dari upaya pemerintah mendorong laju kinerja sektor industri otomotif di Indonesia, termasuk dari segi peningkatan pasar dan penjualan mobil di dalam negeri.

Tabel 7.5 memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia masih sangat terpusat di daerah Jawa. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah dalam pemerataan PMDN. Langkah utama yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah-wilayah kurang berkembang, yang menawarkan insentif fiskal dan *nonfiskal* untuk menarik investasi. Peningkatan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas energi, menjadi penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik investasi di daerah luar Jawa. Penyederhanaan proses perizinan melalui reformasi dan sistem *online* juga membantu mempercepat proses investasi.

PMDN masih terpusat di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai PMDN tertinggi karena posisinya sebagai pusat ekonomi dan bisnis negara. Sebagai ibu kota, Jakarta menawarkan infrastruktur yang sangat baik, akses ke pasar yang luas, serta konsentrasi tinggi dari perusahaan

besar dan industri. Ketersediaan fasilitas perkantoran modern, dukungan dari pemerintah daerah, serta keberadaan berbagai lembaga keuangan juga berkontribusi pada daya tarik Jakarta bagi investor domestik. Sebagaimana DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat memiliki infrastruktur cukup baik dan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia sehingga pangsa pasar di provinsi ini cukup menjanjikan.

Pada tahun 2021 penanaman modal domestik tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat dengan menyerap 13,41 persen dari total investasi dalam negeri atau sebesar Rp 59,95 triliun. Provinsi DKI Jakarta berada di peringkat kedua, dengan daya serap sebesar 12,24 persen dari total investasi dalam negeri atau sebesar Rp 54,71 triliun rupiah. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 pemerintah terus pemuliharaan terhadap kondisi iklim usaha agar lebih kondusif dengan melakukan salah satu langkah utama yaitu melakukan reformasi di bidang perizinan berusaha melalui penyederhanaan atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, serta percepatan Proyek Strategis Nasional.

Meskipun pandemi COVID-19 di daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta mengalami puncaknya di tahun 2021, hal ini tidak membuat para investor beralih dan tetap menjadikan kedua provinsi menjadi destinasi tujuan investasi. Keadaan 2022 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Provinsi DKI Jakarta berhasil melampaui investasi dalam negeri dari Provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp 89,22 triliun atau sebesar 16,14 persen dari total investasi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keberhasilan Daerah DKI Jakarta dalam mengendalikan angka COVID-19 sehingga para investor mendapatkan kepercayaannya kembali untuk meningkatkan nilai investasinya. Upaya lain yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta demi melakukan percepatan angka investasi adalah dengan mendirikan *Jakarta Investment Forum* (JIF). Forum ini pertama kali diadakan pada tahun 2021 dan diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai wadah untuk mempertemukan pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya guna membahas peluang investasi dan pembangunan di Jakarta. JIF bertujuan untuk menarik investasi domestik dan asing dengan menyoroti proyek-proyek strategis dan inovasi kebijakan yang mendukung kemudahan berinvestasi di ibu kota.

Upaya dan inovasi terus dilakukan pemerintah daerah demi kelancaran menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor. Hingga tahun 2023, DKI Jakarta masih menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan penyerapan modal domestik, meskipun demikian proporsinya mengalami penurunan sebesar 2,03 persen menjadi 14,11 persen. Sama halnya dengan Jawa Barat yang masih menempati posisi kedua pada tahun 2023 dengan penyerapan modal domestik sebesar 13,04 persen dari total PMDN.

Meskipun memiliki realisasi yang rendah, hanya Rp 3,96 triliun, namun Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan investasi tertinggi dibandingkan

provinsi lain pada tahun 2023 yaitu 255,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya (lihat Lampiran 1). Gorontalo merupakan salah satu daerah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, sehingga menjadi tempat untuk kegiatan berwirausaha di sektor kepariwisataan. Kondisi alam yang mendukung menjadikan Gorontalo sebagai destinasi investasi.

Selain Gorontalo, Provinsi Maluku juga mengalami peningkatan investasi dalam negeri di atas 200 persen. Meskipun investasi Maluku masih tergolong rendah, hanya sebesar Rp 1,90 triliun namun pada tahun 2023 maluku berhasil menarik kembali para investor setelah mengalami penurunan di tahun 2022. Provinsi Maluku membuat sebuah inovasi dengan pembuatan Klinik *Helpdesk Online Single Submission (SSO) -Risk Based Approach (RBA)* dan Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM), serta mobil pelayanan keliling untuk pembuatan Nomor induk Berusaha (NIB) dan konsultasi layanan LKPM.

Tabel 7.5 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2021–2023

Pulau/Provinsi	2021 (1)	2022 (2)	2023 (3)
Sumatera	106.924,6	129.136,8	149.392,7
Jawa	227.270,9	293.939,0	334.126,8
DKI Jakarta	54.708,2	89.223,6	95.202,1
Jawa Barat	59.948,5	80.808,3	88.012,9
Jawa Tengah	31.311,2	24.992,3	32.987,2
DI Yogyakarta	2.761,3	2.275,0	5.015,5
Jawa Timur	52.552,2	65.355,9	74.937,4
Banten	25.989,5	31.283,9	37.971,7
Bali dan Nusa Tenggara	19.188,3	20.492,9	41.124,2
Kalimantan	62.227,0	75.372,1	98.951,7
Sulawesi	24.301,5	26.351,5	37.644,8
Maluku dan Papua	7.151,4	7.476,8	13.683,3
Indonesia	447.063,6	552.769,0	674.923,4

Sumber:Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi (2021–2023)

Hingga triwulan II tahun 2024, posisi dengan nilai investasi tertinggi masih dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur dengan masing-masing bernilai Rp 34,05 triliun, Rp 25,61 triliun, dan Rp 24,06 triliun (Tabel 7.5). Berdasarkan hal ini terlihat bahwa investor dalam negeri masih mempercayai ketiga provinsi tersebut sebagai destinasi yang menguntungkan untuk berinvestasi. Pemerintah terus berkomitmen untuk terus memeratakan pembangunan di Indonesia dan mendorong investasi di daerah timur.

Usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan khususnya wilayah timur sebagai refleksi pemerataan ekonomi di Indonesia,

mulai memperlihatkan hasil. Pada triwulan II tahun 2024 pertumbuhan investasi di luar Jawa saat ini cukup stabil dan terus mengalami peningkatan secara signifikan, khususnya wilayah timur. Tiga provinsi dengan peningkatan tertinggi berada didaerah timur yaitu Nusa Tenggara Barat (140,17 persen), Gorontalo (105,16 persen) dan Papua Pegunungan (99,52 persen, lihat lampiran 2).

Tabel 7.6 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Provinsi (miliar rupiah), Triwulan I dan Triwulan II 2024

Pulau/Provinsi	2024	
	Triwulan I (2)	Triwulan II (3)
(1)		
Sumatera	48.875,9	49.788,3
Jawa	99.202,5	106.108,7
DKI Jakarta	35.280,8	34.053,8
Jawa Barat	23.569,0	25.612,9
Jawa Tengah	9.313,5	8.811,0
DI. Yogyakarta	753,3	822,2
Jawa Timur	20.069,0	24.062,9
Banten	10.216,9	12.745,9
Bali dan Nusa Tenggara	11.863,7	18.124,8
Kalimantan	26.868,9	26.383,8
Sulawesi	6.702,2	7.625,3
Maluku dan Papua	3.596,3	3.057,2
Indonesia	197.109,40	211.088,2

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi (2024)

Payung Hukum di Indonesia Untuk Menarik Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing pertama kali diijinkan masuk ke Indonesia pada tahun 1967, hal ini bertepatan dengan dikeluarkannya kebijakan Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan dan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Kebijakan ini menandai era baru dalam kebijakan ekonomi negara dan merupakan bagian dari reformasi besar yang bertujuan membuka pintu bagi investor internasional. Sejak saat itu, kerangka hukum investasi asing di Indonesia terus berkembang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan transparan.

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang membentuk payung hukum bagi investasi asing. Payung hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor asing, tetapi juga untuk memastikan bahwa investasi yang masuk dapat memberikan manfaat

maksimal bagi pembangunan nasional. Dasar hukum utama yang mengatur investasi asing di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai hak dan kewajiban investor, serta perlindungan terhadap investasi asing. Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diperbarui dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tujuan untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan serta mendorong kegiatan investasi, dan juga memberikan payung hukum dan perlindungan bagi investor.

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memainkan peran kunci dalam mengelola dan memfasilitasi investasi asing, termasuk pemberian izin dan insentif bagi investor. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai reformasi regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi. Seperti halnya, mencakup penyederhanaan prosedur perizinan, penghapusan hambatan birokrasi, serta pemberian insentif fiskal dan *nonfiskal*. Dengan adanya payung hukum yang kuat dan reformasi yang terus dilakukan, Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan investasi yang transparan, efisien, dan ramah bagi investor asing.

Saat ini dunia masih dalam masa ketidakpastian perekonomian, seperti halnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melemah, harga komoditas yang volatile, geopolitik (perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, dan fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi). Untuk menghadapi tantangan ini kebijakan dan keamanan dari sebuah negara menentukan daya tarik para investor asing untuk masuk. Indonesia terus melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi, terutama bagi investor asing. Dukungan lain dari pemerintah terkait penanaman modal tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha yang Terbuka untuk Penanaman Modal. Peraturan ini diterbitkan sebagai regulasi utama untuk mengatur sektor-sektor ekonomi yang terbuka bagi investasi asing dan domestik di Indonesia. Tujuan Perpres ini guna memperjelas aturan dan membuka peluang investasi baru. Selain itu, Perpres ini juga berfokus pada peningkatan kemudahan perizinan dan administrasi untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih ramah dan transparan.

Sektor - Sektor Incaran Investor Asing

Indonesia menargetkan untuk mendatangkan banyak investasi dari luar negeri guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tengah fenomena perlambatan ekonomi dunia dan gejolak tahun politik. Upaya pemberian jaminan dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing, tentu saja diharapkan dapat meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia. Tidak dapat diingkari bahwa Indonesia sangat membutuhkan kehadiran investor asing. Pada gilirannya,

dengan meningkatnya penanaman modal asing, maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia (Agung 2018).

Dalam bersaing dengan negara-negara lain, iklim usaha yang kondusif dengan keamanan cukup akan meningkatkan para investor asing untuk tetap masuk ke Indonesia. Berdasarkan *International Institute for Management Development* (IMD) melalui rilis *World Competitiveness Ranking* (WCR) 2024, Indonesia menempati peringkat 27 dari 67 negara, naik 7 peringkat dari tahun lalu dengan skor 71,52 (BKPM,2024). Peningkatan daya saing Indonesia di ranah dunia dinilai mampu meningkatkan kepercayaan investor asing.

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia merupakan bentuk minat dan harapan dari investor terhadap pertumbuhan serta pengembangan Indonesia di masa depan. Pandangan positif para investor tersebut terhadap Indonesia diwujudkan dengan berinvestasi pada sektor – sektor yang dianggap produktif dan hal ini tentunya akan meningkatkan putaran kegiatan ekonomi keseluruhan (JAMIL 2020). Masuknya investasi asing ke Indonesia memberikan berbagai manfaat. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Manfaat yang paling nyata dari masuknya investasi asing adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

Sektor Industri masih menjadi sektor primadona bagi para investor asing. Selama tahun 2021 sampai 2023, nilai investasi asing yang terserap di Sektor Industri mengalami peningkatan menjadi US\$ 28,69 miliar dengan kontribusi lebih dari 50 persen dari total investasi asing di Indonesia. Dengan adanya berbagai gejolak politik global yang masih terjadi, investor asing pada tahun 2023 tetap mempercayai Sektor Industri dalam berinvestasi di Indonesia. Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi menjadi kontributor terbesar kedua pada tahun 2023, setelah sebelumnya selama dua tahun berturut-turut dipegang oleh Sektor Pertambangan. Kepercayaan investor asing menanamkan modalnya pada Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi semakin kuat, ditandai dengan semakin meningkatnya realisasi investasi PMA. Kondisi ini memberikan harapan bagi Indonesia kedepannya, investasi asing dapat terus masuk ke Indonesia dan bisa menjadi modal pendamping dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Investor asing masih memiliki kepercayaan penuh terhadap Indonesia pada setiap sektor, bahkan nilainya terus bertambah. Dana Moneter Indonesia, menyebut Indonesia sebagai "*The bright spot in the dark*" ditengah ketidakpastian global. Di saat banyak negara menghadapi tantangan besar seperti resesi, perlambatan ekonomi, atau ketidakpastian politik, Indonesia berhasil mempertahankan kinerja ekonominya dengan baik. Hal inilah yang pada akhirnya tetap membuat para investor asing tetap memilih Indonesia sebagai destinasi investasinya.

Tabel 7.7 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor (juta US\$), 2021–2023

Sektor	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	950,7	1.789,4	1.945,6
	3,1	3,9	3,9
Kehutanan	41,4	98,8	96,0
	0,1	0,2	0,2
Perikanan	17,1	31,6	25,7
	0,1	0,1	0,1
Pertambangan	3.817,0	5.145,0	4.715,0
	12,3	11,3	9,4
Industri	15.803,7	24.679,3	28.689,9
	50,8	54,1	57,1
Listrik, Gas, dan Air	2.938,6	3.762,7	2.742,1
	9,5	8,3	5,5
Konstruksi	93,4	165,3	281,8
	0,3	0,4	0,6
Perdagangan dan Reparasi	463,8	736,7	943,8
	1,5	1,6	1,9
Hotel dan Restoran	432,2	498,0	811,1
	1,4	1,1	1,6
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	3.159,2	4.125,1	5.615,5
	10,2	9,1	11,2
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	2.186,4	3.014,6	2.574,5
	7,0	6,6	5,1
Jasa Lainnya	1.189,7	1.558,4	1.826,5
	3,8	3,4	3,6
Jumlah	31.093,1	45.605,0	50.267,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi (2021–2023)

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang terus berlanjut hingga tahun 2023 telah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia, mempengaruhi pasar modal dan pasar uang secara global. Bank sentral di berbagai negara merespon inflasi yang melonjak dengan menaikkan suku bunga acuan secara agresif, yang pada akhirnya meningkatkan risiko resesi global pada tahun 2023. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, Indonesia perlu menghadapi situasi tersebut dengan kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya, pada tahun 2023 terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan nilai investasi asing. Sektor Listrik, Gas dan Air merupakan sektor dengan penurunan investasi tertinggi yaitu sebesar 27,12 persen menjadi US\$ 2,74 miliar. Ketegangan geopolitik, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina, berdampak pada pasokan energi global, yang mengakibatkan harga gas melonjak dan mempengaruhi biaya produksi listrik. Sektor lainnya yang mengalami penurunan adalah Sektor Perikanan, Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran, Pertambangan dan kehutanan dengan penurunan masing-masing sebesar 18,67 persen, 14,60 persen, 8,36 persen dan 2,83 persen.

Menjelang akhir 2023, perekonomian dunia kembali dihadapkan pada risiko geopolitik yang meningkat. Di saat perang Rusia dengan Ukraina belum menemukan solusi, kini pecah perang Hamas (Palestina) dengan Israel yang mengguncang dunia. Kondisi ini ditambah dengan permasalahan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia yang menjadikan ketidakstabilan politik dalam negeri. Konflik regional atau ketegangan antara negara-negara dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi global dan regional.

Meskipun demikian, investasi asing di Indonesia terus berjalan lancar dengan minat tinggi dari investor asing yang aktif berpartisipasi di pasar saham Indonesia. Didorong oleh keamanan yang stabil serta kondisi ekonomi dan investasi yang terpercaya saat ini, sektor manufaktur khususnya masih menjadi pilihan utama, berperan penting dalam meningkatkan realisasi investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi asing yang terserap di Sektor Industri pada triwulan II 2024 mencapai US\$ 9,54 miliar atau sekitar 65,84 persen dari total investasi asing. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi primadona bagi para investor asing dengan daya serap sebesar 25,41 persen dari total investasi asing sektor industri. Tingginya investasi asing pada sektor ini tidak terlepas dari sumber daya logam yang dimiliki oleh Indonesia.

Pada triwulan II mengalami perkembangan cukup pesat sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan. Meskipun tidak terlalu tinggi nilai investasi PManya meningkat sebesar 82,91 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingginya investasi asing pada sektor ini didorong oleh ketertarikan para pengusaha terhadap prospek perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kementerian Investasi/BKPM Jumina Sinaga mengungkapkan, sebagian besar investasi subsektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan di Indonesia berasal dari Singapura dan Malaysia.

Tabel 7.8 Realisasi PMA Menurut Sektor (juta US\$), Triwulan I dan Triwulan II 2024

Sektor	2024	
	Triwulan I	Triwulan II
(1)	(2)	(3)
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	306,2	560,0
	2,2	4,1
Kehutanan	50,9	11,4
	0,4	0,1
Perikanan	49,4	3,2
	0,4	~0
Pertambangan	1.405,0	894,4
	10,3	6,6
Industri	7.503,8	8.644,4
	55,1	63,4
Listrik, Gas, dan Air	525,4	871,4
	3,9	6,4
Konstruksi	182,1	282,7
	1,3	2,1
Perdagangan dan Reparasi	334,7	493,5
	2,5	3,6
Hotel dan Restoran	367,5	137,0
	2,7	1,0
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	1.182,1	773,9
	8,7	5,7
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	946,4	805,8
	6,9	5,9
Jasa Lainnya	775,7	1.010,3
	5,7	7,4
Jumlah	13.629,1	14.488,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi (2024)

Wilayah Incaran Para Investor Asing

Pemerataan Investasi terus dilakukan pemerintah demi memeratakan pembangunan baik daerah barat maupun timur, namun realisasinya investor asing di Indonesia masih terpusat di daerah Jawa. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang lebih baik, aksesibilitas yang lebih tinggi, serta ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di kawasan ini. Jawa, khususnya Jakarta

dan Jawa Barat, menawarkan stabilitas ekonomi, jaringan transportasi yang solid, dan lingkungan bisnis yang mendukung, sehingga menjadi magnet bagi para investor asing. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia terus mendorong pemerataan investasi ke daerah-daerah lain di luar Jawa, dengan menawarkan berbagai insentif dan membangun infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut, guna menarik lebih banyak investasi ke seluruh penjuru negeri.

Pada tahun 2021 penanaman modal asing tidak jauh berbeda dengan domestik, dimana lebih banyak terserap di Provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar US\$ 52,22 triliun atau 16,78 persen dari total investasi asing. DKI Jakarta juga berada di posisi kedua dengan penyerapan modal asing di Indonesia dengan nilai sebesar US\$ 3,33 miliar atau sebesar 10,71 persen dari total investasi. Maluku Utara berada di posisi ketiga dengan penyerapan investasi asing sebesar US\$ 2,82 triliun atau 9,07 persen dari total investasi asing. Tingginya investasi di Maluku Utara didorong oleh aktivitas pada sektor pertambangan yang menarik bagi para investor asing. Kondisi ini menunjukkan potensi pengembangan investasi di kawasan Indonesia timur dalam jangka panjang.

Kondisi COVID-19 mulai memuncak pada tahun 2022 di Pulau Jawa. Kondisi ini menyebabkan keraguan pada investor asing untuk menanamkan modalnya pada daerah Jawa, khususnya DKI Jakarta dan Jawa Barat yang merupakan pusat pandemi COVID-19. Posisi Jawa Barat dan DKI Jakarta sebagai destinasi investor asing perlahan mulai tergeser. Pada tahun 2022, Sulawesi Tengah berhasil menjadi provinsi dengan nilai investasi asing tertinggi dengan penyerapan nilai investasi asing sebesar 16,41 persen dari total investasi asing atau sebesar US\$ 7,49 triliun. Kabupaten Morowali merupakan salah satu kawasan di Sulawesi Tengah sebagai daerah penghasil nikel di Indonesia dan memiliki kawasan industri berbasis nikel dan baja. Di kabupaten ini terdapat sentra hilirisasi nikel industri logam dasar termasuk pemurnian melalui smelter yang menyumbang lebih dari 80 persen realisasi investasi asing di Sulteng. Meningkatnya potensi nikel beriringan dengan peningkatan penggunaan mobil listrik di Indonesia, dimana nikel merupakan bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik.

Meskipun mengalami penurunan posisi, Jawa Barat dan DKI Jakarta masih masuk dalam lima provinsi dengan nilai investasi asing tertinggi. Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua dengan nilai penyerapan investasi asing sebesar US\$ 6,53 triliun atau sebesar 9,84 persen dari total investasi asing. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta menempati posisi keempat setelah Maluku Utara dengan penyerapan investasi asing sebesar US\$ 3,74 triliun.

Memasuki tahun 2023 Provinsi Jawa Barat berhasil menggeser posisi puncak Sulawesi Tengah, dengan nilai investasi sebesar US\$ 8,28 triliun. Kembalinya Provinsi Jawa Barat di posisi pertama dikarenakan mulai dapat terkendalinya COVID-19 dan perekonomian daerah mulai bangkit kembali.

Tingginya potensi yang ada di Jawa Barat dan SDM yang cukup besar masih menjadikan para investor asing memilih Jawa Barat sebagai destinasi investasi ketika perekonomian Indonesia berada di kondisi stabil.

Tabel 7.9 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2021–2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera	5.368,60	6.917,20	6.249,90
Jawa	14.075,20	19.299,20	23.916,00
DKI Jakarta	3.330,60	3.744,10	4.830,00
Jawa Barat	5.217,70	6.534,50	8.283,70
Jawa Tengah	1.465,90	2.362,00	1.563,70
Bali dan Nusa Tenggara	775,20	1.227,40	1.401,20
Kalimantan	1.621,80	3.198,60	4.120,80
Sulawesi	4.897,60	9.069,20	8.290,90
Sulawesi Tengah	2.718,10	7.486,00	7.244,10
Maluku dan Papua	4.354,80	5.893,20	6.288,90
Maluku Utara	2.819,90	4.487,50	4.998,20
Indonesia	31.093,10	45.605,00	50.267,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi (2021–2023)

Menjelang tahun 2024 investasi asing yang terserap Indonesia tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya dimana pada triwulan I, Provinsi Jawa Barat masih menduduki posisi pertama. Nilai Investasi Jawa Barat menyerap sebesar 20,1 persen dari total investasi asing, sedangkan di posisi kedua tetap diduduki oleh Sulawesi Tengah dengan penyerapan investasi sebesar 12,78 persen. Semakin tingginya investasi Jawa barat tidak terlepas dari kemajuan industri otomotif di Jawa Barat. Sektor industri pengolahan khususnya sektor otomotif masih akan mendominasi investasi yang masuk di Jawa barat.

Lebih dari setengah provinsi mengalami pelemahan investasi asing pada triwulan II tahun 2024. Provinsi Jawa Barat yang dinominasikan sebagai destinasi primadona bagi investor asing mengalami penurunan sebesar 7,37 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Sebaliknya, Provinsi DKI Jakarta justru mengalami peningkatan sebesar 21,15 persen.

Tantangan global semakin meningkat pada tahun 2024. Selain permasalahan pada perang Ukraina-Rusia, menjelang akhir 2023 terjadi perang antara Israel dan Palestina. Tidak hanya ketidakpastian geopolitik, dunia juga dihadapkan dengan adanya deflasi Negara Tiongkok sebagai negara yang memiliki keterikatan ekonomi kuat dengan Indonesia. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan mampu memberikan kebijakan dan strategi yang tepat agar iklim usaha tetap kondusif.

Selain tantangan, pemerintah juga harus mampu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang diberikan dari investasi asing. Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh investasi asing salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Untuk saat ini pemerintah sudah meregulasi terkait dampak negatif yang mungkin timbul dari investasi asing dengan menerapkan investasi hijau.

Tabel 7.10 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Provinsi (miliar rupiah), Triwulan I dan Triwulan II 2024

Provinsi	2024	
	Triwulan I (2)	Triwulan II (3)
	(1)	
Sumatera	1.652,70	1.467,80
Jawa	6.756,50	7.138,10
DKI Jakarta	1.540,15	1.865,90
Jawa Barat	2.738,89	2.537,10
Bali dan Nusa Tenggara	693,25	241,70
Kalimantan	958,98	1.091,20
Sulawesi	1.944,50	2.334,00
Sulawesi Tengah	1.742,12	2.114,80
Maluku dan Papua	1.623,17	2.215,20
Maluku Utara	1.025,38	1.792,90
Indonesia	13.629,1	14.488,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi (2024)

Aliran masuk investasi asing pada tahun 2022 didominasi oleh Negara Singapura dengan nilai investasi sebesar US\$ 13,28 miliar atau sebesar 29,12 persen dari total investasi asing yang masuk kedalam Indonesia. Tingginya aliran masuk ini dikarenakan Singapura memiliki hubungan *financial sector* dan hubungan *Foreign Direct Investment (FDI)* yang kuat di negara-negara kawasan Asia. Pada posisi kedua dan ketiga adalah negara Tiongkok dan Hongkong, dengan masing-masing senilai US\$ 8,22 miliar dan US\$ 5,51 miliar.

Negara-negara di Asia masih mendominasi investasi asing yang ada di Indonesia. Memasuki tahun 2022 investasi asing yang berasal dari India dan Tiongkok mengalami peningkatan di atas 100 persen. Meskipun pada masa tersebut Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19 namun tidak menyurutkan kepercayaan investor Tiongkok untuk tetap berinvestasi. Negara Tiongkok masih mempercayai prospek hilirisasi industri dan masih melihat potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Sementara itu, India merupakan salah satu mitra strategis Indonesia, yakni sebagai negara tujuan ekspor terbesar keempat dan sumber investasi asing terbesar peringkat ke-21. Selain itu, saat ini, kedua negara telah memiliki ASEAN-India *Free Trade Agreement (FTA)* sebagai perjanjian dagang regional (Kemendag 2023). Meski

demikian, nilai investasi asing di India pada tahun 2022 masih sangat rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya, yakni sebesar US\$ 0,13 miliar atau hanya 0,35 persen dari total aliran investasi masuk dari benua Asia.

Tabel 7.11 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Negara Asal (juta US\$), 2021–2023

Negara Asal	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Amerika	3.880,1	4.810,5	4.659,6
U.S.A.	2.537,2	3.026,2	3.283,1
Kanada	182,1	250,4	357,8
Amerika Lainnya	1.160,8	1.533,9	1.018,7
Eropa	3.453,0	2.901,9	3.029,4
Belgia	55,5	73,2	98,9
Denmark	14,2	12,7	30,6
Perancis	145,8	252,9	302,8
Italia	37,6	26,9	37,5
Belanda	1.761,6	1.220,2	1.258,3
Norwegia	20,3	4,7	18,5
Jerman	182,3	195,5	157,8
Inggris	322,9	628,3	386,7
Swiss	599,8	133,8	150,1
Eropa Lainnya	312,9	353,7	588,3
Asia	23.358,7	36.859,8	41.363,4
Jepang	2.263,2	3.562,8	4.639,5
Tiongkok	3.160,4	8.226,0	7.438,4
Korea Selatan	1.640,2	2.297,8	2.543,6
Hongkong	4.609,3	5.514,2	6.504,8
Taiwan	316,9	236,7	190,1
Singapura	9.390,1	13.281,1	15.355,2
India	49,6	127,6	275,4
Asia Lainnya	1.929,1	3.613,6	4.416,4
Australia	236,3	673,6	674,5
Australia	195,2	524,4	545,2
Selandia Baru	8,2	3,7	11,9
Australia Lainnya	32,9	145,5	117,4
Afrika	165,0	359,1	540,7

Lanjutan Tabel 7.11

Negara Asal	2021	2022	2023 ¹
(1)	(2)	(3)	(4)
Nigeria	0,7	0,4	0,4
Afrika Lainnya	164,3	358,7	540,2
Jumlah	31.093,1	45.605,0	50.267,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi (2021–2023)

Selama tahun 2022 beberapa negara mengalami penurunan investasi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Denmark (10,56 persen), Belanda (30,73 persen), Italia (28,46 persen), Norwegia (76,85 persen), Swiss (77,69 persen), Taiwan (25,31 persen), Selandia Baru (54,88 persen), dan Nigeria (42,86 persen). Menurunnya investasi yang bersumber dari negara-negara Eropa lebih dikarenakan oleh pecahnya perang Ukraina dan Rusia yang membuat investor Eropa menarik investasinya.

Kondisi penanaman modal asing mengalami perbaikan menjelang 2023, dimana hanya ada 6 negara yang mengalami penurunan investasi. Negara yang mengalami penurunan cukup berbeda dari tahun sebelumnya yaitu Jerman (19,28 persen), Inggris (38,45 persen), Tiongkok (9,57 persen), Taiwan (19,68 persen), dan Australia lainnya (19,31 persen). Menurunnya angka investasi asing yang bersumber dari Tiongkok dikarenakan adanya perlambatan ekonomi yang terjadi. Hingga tahun 2023, Indonesia masih mengandalkan negara Singapura dan Tiongkok sebagai investor asing tertinggi dengan masing-masing investasi bernilai sebesar US\$ 15,36 miliar dan US\$7,44 miliar.

Meskipun pada tahun 2024 Indonesia memasuki tahun politik, investasi terus tumbuh. Pemerintah terus mendorong aliran masuk investasi asing ke Indonesia. Berbagai hubungan bilateral dan kerjasama antara negara terus digencarkan pemerintah demi menarik para investor asing masuk. Dengan potensi yang besar dan stabilitas geopolitik dan ekonomi yang baik, investor asing masih menjadikan Indonesia destinasi investasi yang menarik.

Pada triwulan pertama 2024, investasi asing berada di angka US\$ 13,63 miliar. Dimana negara aliran masuk tertinggi ke Indonesia masih di dominasi oleh Singapura dengan nilai US\$ 4,24 miliar. Pada posisi kedua ada Negara Hongkong yang berhasil menggeser Tiongkok dengan nilai aliran masuk ke Indonesia sebesar US\$ 1,90 miliar. Negara Tiongkok berada diposisi ketiga dengan nilai US\$ 1,87 miliar.

Tabel 7.12 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Negara Asal (juta US\$), Triwulan I dan Triwulan II 2024

Negara Asal	2024	
	(1)	Triwulan I
		(2)
Amerika	1.637,9	1.079,4
U.S.A.	1.088,0	894,9
Kanada	95,5	102,7
Amerika Lainnya	454,4	81,8
Eropa	1.053,7	1.405,4
Belgia	17,8	100,3
Denmark	4,7	30,7
Perancis	113,9	66,2
Italia	15,4	21,7
Belanda	333,2	482,4
Norwegia	71,6	5,5
Jerman	146,5	52,8
Inggris	127,1	178,4
Swiss	33,8	21,8
Eropa Lainnya	189,7	445,6
Asia	10.623,9	11.748,8
Jepang	976,5	817,0
Tiongkok	1.874,8	2.043,2
Korea Selatan	509,3	1.258,9
Hongkong	1.897,7	1.914,4
Taiwan	38,1	59,7
Singapura	4.242,0	4.617,3
India	68,2	33,9
Asia Lainnya	1.017,3	1.004,4
Australia	261,1	151,4
Australia	172,3	112,6
Selandia Baru	4,5	3,0
Australia Lainnya	84,3	35,8
Afrika	52,6	102,4
Nigeria	~0	~0
Afrika Lainnya	52,6	102,4
Jumlah	13.629,1	14.488,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi (2024)

Kegiatan investasi di Indonesia masih terus berjalan, bahkan Indonesia masih menjadi incaran investor asing. Pemerintah terus berupaya agar target investasi di tahun 2023 dapat tercapai walaupun kondisi global mengancam. Kebijakan yang coba dilakukan adalah memperbaiki ekosistem investasi dengan mereformasi berbagai regulasi terkait perizinan. Hingga triwulan II tahun 2024 angka investasi asing terus menunjukkan sinyal positif untuk mencapai target investasi 2024.

Aliran masuk tertinggi pada triwulan II 2024 masih didominasi oleh Singapura dengan nilai US\$ 4,62 miliar atau meningkat 8,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada triwulan II tahun 2024, negara yang mengalami peningkatan diatas 100 persen adalah Denmark (558,70 persen), Belgia (464,54 persen) dan Korea Selatan (147,18 persen). Pada selang waktu 2024 pemerintah melakukan kerjasama yang cukup berarti dengan Negara Denmark. Salah satu nya adalah dilakukan kegiatan Forum Investasi Indonesia (IIF) Copenhagen 2024. Forum ini bertujuan mendorong investasi di berbagai sektor termasuk maritim, infrastruktur, transisi hijau, dan ekonomi sirkular di Indonesia.

Perdagangan Pasar Modal Indonesia

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah lembaga vital dalam perekonomian Indonesia yang memainkan peran sentral dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan pasar modal di Indonesia. Sebagai satu-satunya bursa efek yang beroperasi di Indonesia, BEI menyediakan platform bagi perusahaan untuk menggalang dana melalui penawaran umum saham dan obligasi, serta memberikan peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan publik.

Bursa Efek Indonesia (BEI) dibentuk pada tanggal 1 Desember 1912 dengan nama awal *De Javasche Vereeniging voor de Effectenhandel* di Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta, oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memfasilitasi perdagangan surat berharga dan saham di Hindia Belanda. Namun seiring berjalannya waktu BEI ditutup dan pada tahun 1977, dibentuk Bursa Efek Jakarta (BEJ). Bursa ini diresmikan pada tanggal 10 Agustus 1977 oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali pasar modal setelah sempat terhenti sejak masa penjajahan dan pasca-kemerdekaan. BEJ awalnya hanya memiliki satu emiten, yaitu PT Semen Cibinong, namun kemudian berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan efek di Indonesia sebelum akhirnya bergabung dengan Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007 untuk membentuk Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI dalam bentuk modernnya resmi terbentuk pada 30 November 2007, melalui penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Pasar modal juga berperan sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas yang padat di pasar modal, seperti tingginya volume penjualan dan

pembelian saham, mencerminkan kinerja bisnis yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sebaliknya, jika aktivitas di pasar modal menurun, hal itu bisa menjadi indikasi adanya masalah atau penurunan kinerja ekonomi. Keberadaan BEI tidak hanya mendorong likuiditas dan transparansi di pasar keuangan, tetapi juga menjadi barometer kesehatan ekonomi nasional. Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi, peran BEI menjadi semakin signifikan dalam menarik investasi asing dan memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi dunia.

Pada tahun 2021, pasar saham Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi global dan domestik. Setelah mengalami penurunan yang tajam pada awal pandemi COVID-19 di tahun 2020, pasar saham Indonesia mulai menunjukkan tandanya pemulihan pada tahun 2021. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang merupakan indikator utama kinerja pasar saham Indonesia, bergerak naik dengan cukup stabil sepanjang tahun, meskipun masih diwarnai oleh volatilitas akibat ketidakpastian pandemi.

Pemulihan ekonomi yang didorong oleh pelonggaran pembatasan sosial dan peningkatan aktivitas bisnis berkontribusi positif terhadap kinerja pasar saham. Sektor-sektor seperti teknologi, keuangan, dan bersifat konsumtif menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat, didorong oleh peningkatan permintaan dan adaptasi terhadap digitalisasi yang lebih cepat akibat pandemi. Namun, sektor energi dan pertambangan juga mendapatkan perhatian khusus, mengingat harga komoditas yang naik selama periode tersebut, memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini.

Pasar saham Indonesia pada tahun 2021 juga dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti ketegangan perdagangan internasional dan kebijakan moneter dari negara-negara maju, yang mempengaruhi sentimen investor. Selain itu, peningkatan kasus COVID-19, terutama dengan munculnya varian-varian baru, sempat menimbulkan kekhawatiran dan menyebabkan fluktuasi tajam pada beberapa periode. Pemerintah Indonesia merespon dengan berbagai kebijakan stimulus ekonomi dan langkah-langkah untuk mempercepat pemulihan kesehatan nasional seperti vaksinasi, yang pada gilirannya membantu menjaga stabilitas pasar.

Pada akhir tahun 2021, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia ditutup pada level 6.581, menunjukkan kenaikan sebesar 10,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, memasuki tahun 2022, ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina memengaruhi kondisi pasar modal global, menciptakan situasi yang kurang kondusif. Meskipun demikian, pasar modal Indonesia masih mampu menarik kembali modal asing, dengan perbaikan yang mulai terlihat di sektor riil dan sektor keuangan. Hal ini mendorong IHSG meningkat di akhir tahun 2022, mencapai level 6.851. Meskipun mengalami pertumbuhan, kenaikan tersebut hanya sebesar 4,10 persen atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2021.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kekokohan dan pasar modal dengan menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pertumbuhan sebesar 6,16 persen selama tahun 2023, diakhiri pada level 7.273. Capaian ini menempatkan IHSG sebagai salah satu pasar saham dengan kinerja terbaik di kawasan ASEAN, berada di peringkat kedua di antara bursa-bursa saham di wilayah tersebut. Pada dasarnya kestabilan ekonomi menjadi salah satu faktor penentu investor dalam menanamkan modalnya. Selain itu dukungan pemerintah seperti implementasi UUP2SK dan penciptaan produk baru di BEI turut berkontribusi positif terhadap iklim investasi di Indonesia.

Angka IHSG melambat pada awal tahun 2024, dikarenakan pasar saham terganggu dengan adanya rintangan geopolitik global dan ketidakstabilan politik dalam negeri. Keadaan stabilitas politik dalam negeri yang dapat mengubah berbagai kebijakan dan pemerintahan yang ada membuat pasar saham mengalami ketidakstabilan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) puncaknya pada Bulan Maret 2024 dilevel 7316.

Pada tahun 2022, meskipun perekonomian global menghadapi berbagai tantangan, Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil menjaga aktivitas pasar modal dan mencatatkan pencapaian yang signifikan. BEI menutup tahun dengan performa yang positif, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Aktivitas pasar modal menunjukkan hasil yang mengesankan dengan total perdagangan saham mencapai 5,89 triliun lembar dan nilai transaksi yang mencapai Rp 3.617,90 triliun. Capaian ini mencerminkan angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, menandakan ketahanan dan kinerja positif pasar modal Indonesia di tengah berbagai tantangan global.

Capaian Bursa efek mengalami penurunan pada tahun 2023 dimana tercatat jumlah saham yang diperdagangkan mencapai 4,73 triliun lembar dengan nilai transaksi mencapai Rp 2.568,33 triliun. Meskipun demikian pemerintah terus mendongkrak kinerja pasar saham di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, BEI telah meluncurkan sejumlah produk, layanan, dan kebijakan baru, di antaranya adalah normalisasi jam perdagangan pada 3 April 2023, normalisasi batas *Auto Rejection Bawah* (ARB) tahap 1 pada 5 Juni 2023, peluncuran Indeks Papan Akselerasi pada 31 Mei 2023, peluncuran Papan Pemantauan Khusus *Hybrid* pada 12 Juni 2023, dan peluncuran *New IDX Mobile* pada 13 Juli 2023. Selanjutnya, terdapat pula peluncuran *New PLTE*, *Mofids & Daily Watching* (DW) pada 31 Juli 2023, serta peluncuran kampanye “Aku Investor Saham” pada 10 Agustus 2023. Normalisasi jam perdagangan SPPA dan pelaporan melalui PLTE dilakukan pada 14 Agustus 2023, dan normalisasi batas *Auto Rejection Bawah* (ARB) tahap 2 pada 4 September 2023. BEI juga telah mendapatkan penilaian ESG *Risk Rating* oleh *Sustainalytics* dengan nilai sebesar 16,9 yang termasuk kategori “*Low Risk*” pada 12 September 2023. Sebagai upaya untuk menambah alternatif acuan investasi subsektor bank, BEI dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) meluncurkan Indeks IDX-PEFINDO Prime Bank pada 4 Oktober 2023 (IDX 2024).

Tahun 2024 dan ke depannya akan penuh dengan berbagai tantangan baru. Memperhatikan hal tersebut, BEI memiliki tiga fokus utama, yakni *Market Deepening; Investor Protection; dan Regional Synergy and Connectivity*. Fokus ini bertujuan untuk menumbuhkan sejumlah produk dan layanan yang kredibel bagi seluruh stakeholders dengan didukung pemanfaatan teknologi terkini, serta mampu melindungi kepentingan investor pasar modal. Pada dasarnya jumlah saham yang diperdagangkan pada pasar modal mengalami penurunan sejak awal tahun 2024 hingga April 2024. Berkebalikan dengan jumlah saham, nilainya mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga April 2024. Hal ini menunjukkan nilai saham yang diperdagangkan memiliki nilai yang cukup besar meskipun kuantitasnya tidak banyak.

OJK berharap peningkatan kinerja emiten bisa terus berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, pasar modal Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selama 7 tahun terakhir, sejak tahun 2017 jumlah emiten mengalami peningkatan sebanyak 325 emiten. Ini membuktikan semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dan diharapkan kebutuhan pendanaan industri menjadi terpenuhi dan semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan tata kelola yang baik. Hingga April 2024 angka emiten tercatat sudah berada di atas 1000 atau sebesar 1.062 perusahaan. Jika dibandingkan dengan awal tahun 2024 angka ini telah meningkat sebesar 0,57 persen.

Tabel 7.13 Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia, 2017–April 2024

Periode	Jumlah saham yang diperdagangkan (miliar lembar)	Nilai transaksi (miliar rupiah)	Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	Jumlah Emiten	Emisи saham (miliar lembar)	Nilai emisi (triliun rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	2.844,85	1.809.592	6.356	688	611.290	907
2018	2.536,28	2.040.086	6.195	745	4.651.479	959
2019	3.562,37	2.230.919	6.300	804	4.832.407	1.003
2020	2.752,47	2.228.798	5.979	849	6.291.282	1.026
2021	5.096,45	3.302.932	6.581	902	6.721.396	1.285
2022	5.885,86	3.617.896	6.851	967	7.061.658	1.396
2023	4.730,22	2.568.333	7.273	1.013	7.374.774	1.465
2024						
Januari	373,33	224.662	7.208	1.056	7.533.633	1.509
Februari	330,24	201.744	7.316	1.057	7.536.837	1.516
Maret	310,66	210.358	7.289	1.060	7.766.226	1.537
April	282,50	223.696	7.234	1.062	7.784.259	1.542

Sumber: Kolom 2–4 <https://www.idx.co.id/id/data-pasar/laporan-statistik/statistik>

Kolom 5–7 <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Pages/SEKI-JUNI-2024.aspx>

Karakteristik Investor Pasar Modal di Indonesia

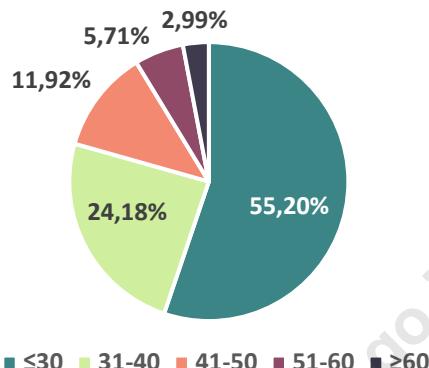
Investasi menawarkan berbagai manfaat signifikan bagi para investor, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu manfaat utama adalah potensi untuk meningkatkan kekayaan dan mencapai tujuan keuangan, seperti membeli rumah, membiayai pendidikan, atau mempersiapkan dana pensiun. Melalui investasi yang cerdas, investor dapat mengalahkan inflasi dan menjaga nilai uang mereka tetap tumbuh dari waktu ke waktu. Selain itu, investasi memungkinkan diversifikasi, yang dapat mengurangi risiko dengan menyebarkan aset di berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, dan properti. Dengan diversifikasi, investor dapat melindungi portofolio mereka dari fluktuasi pasar yang tidak terduga. Selain itu, investasi juga dapat memberikan sumber pendapatan pasif, misalnya melalui dividen dari saham atau bunga dari obligasi, yang bisa menambah stabilitas keuangan.

Dalam mendukung pertumbuhan minat investasi di Indonesia pemerintah mendorong literasi keuangan di masyarakat. Sebagai dukungan dalam mendorong minat investasi warganya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. UU ini mengedepankan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan yang dihadapi sektor keuangan, termasuk memperkuat pengawasan terhadap risiko sistemik, meningkatkan inklusi keuangan, dan memfasilitasi pengembangan inovasi teknologi keuangan. Selain membuat peraturan untuk melindungi pelaku investasi, pemerintah juga selalu berusaha memberikan edukasi kepada investor melalui berbagai kegiatan. Seperti contohnya kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (*Like It*) pada tahun 2023. Kegiatan *Like It* ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pentingnya berinvestasi.

Seiring dengan usaha pemerintah dalam memberikan literasi keuangan pada masyarakat, kemudahan masyarakat dalam melakukan investasi juga semakin besar. Perkembangan teknologi dan munculnya berbagai platform investasi digital telah membuat investasi menjadi lebih mudah diakses. Aplikasi investasi dan *trading online* memungkinkan masyarakat untuk memasuki pasar saham dan memperoleh informasi dengan mudah dan proses yang sederhana.

Dilihat karakteristiknya, investor yang berada di Indonesia didominasi oleh penduduk berusia dibawah 30 tahun di atas 50 persen. Meskipun demikian jumlahnya menurun dari bulan januari ke bulan juli 2024 sebesar 1,09 persen. Tingginya investor muda tersebut karena beberapa faktor seperti kemajuan teknologi yang membuat investasi lebih mudah diakses melalui platform digital dan aplikasi seluler. Generasi muda saat ini memiliki kesadaran finansial yang lebih tinggi, didorong oleh edukasi keuangan yang lebih luas dan paparan terhadap informasi investasi melalui media sosial. Selain itu, mereka tertarik untuk mencapai kemandirian finansial lebih cepat dan melihat investasi sebagai alat untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti kebebasan finansial atau pensiun dini. Dengan peluang dan akses yang semakin terbuka, investasi menjadi pilihan menarik bagi banyak anak muda.

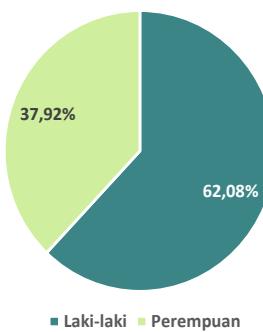
yang ingin mengelola keuangan mereka secara proaktif dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Kedepan, dengan tingginya para investor muda diharapkan akan meningkatkan daya saing dan transaksi di pasar modal. Selain itu investor muda ini diharapkan mampu menambahkan pendapatan negara melalui pajak.



Sumber: Data Statistik KSEI

Gambar 7.1 Persentase Investor Indonesia Berdasarkan Kelompok Umur, Juli 2024

Lebih dari 60 persen investor Indonesia merupakan laki-laki. Dominasi laki-laki terjadi karena laki-laki telah lebih lama terlibat dalam dunia keuangan dan investasi, serta memiliki akses pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik dibanding perempuan. Selain itu, norma-norma sosial dan stereotip gender yang mengaitkan laki-laki dengan risiko dan pengambilan keputusan finansial juga berkontribusi pada dominasi mereka di pasar modal. Meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan investor laki-laki, keikutsertaan perempuan dalam pasar modal mengalami peningkatan sejak Januari 2024.

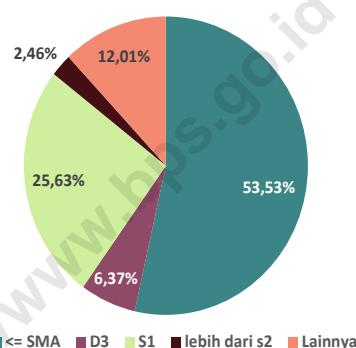


Sumber: Data Statistik KSEI

Gambar 7.2 Persentase Investor Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin, Juli 2024

Kemudahan akses digital yang ada membuat setiap kalangan masyarakat memiliki kesempatan untuk masuk kedalam pasar saham. Selain akses yang semakin mudah tingkat kesadaran investasi pada generasi muda semakin tinggi. Dibuktikan dengan rasio investor pelajar yang kian meningkat selama tahun 2024. Berdasarkan data KSEI, kepemilikan aset pelajar pada Juli 2024 berada diangka 25,46 persen. Angka ini menyatakan lebih dari seperempat kepemilikan (KSEI 2024),.

Jika dilihat pendidikannya, mayoritas investor berpendidikan SMA ke bawah, dengan persentase diatas 50 persen. Pada Juli 2024 angka Investor yang memiliki pendidikan SMA kebawah berada diangka 53,53 persen. Meskipun berada di atas angka 50 persen, namun sepanjang tahun 2024 angka ini semakin menurun. Selama 7 bulan terakhir angka ini menurun 0,56 persen.



Sumber: Data Statistik KSEI

Gambar 7.3 Persentase Investor Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Juli 2024

Investasi Syariah yang Semakin Diminati oleh Masyarakat Indonesia

Pasar Modal Syariah merupakan aktivitas yang melibatkan berbagai aspek dalam dunia keuangan, termasuk Penawaran Umum dan perdagangan Efek, yang meliputi transaksi jual beli saham dan instrumen keuangan lainnya. Semua aktivitas dalam Pasar Modal Syariah ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Pasar Modal Syariah menawarkan investor pada instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Investasi di saham syariah telah mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setiap transaksi dan aktivitas saham diawasi secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Selain itu, pembagian *dividen* atau keuntungan dilakukan dengan menerapkan prinsip bagi hasil

yang adil dan transparan, sehingga investor dapat merasa tenang karena investasinya dikelola dengan integritas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berbeda halnya dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah memiliki kriteria syariah dengan batasan maksimal hutang atau tanpa riba. Dalam praktiknya fatwa DSN-MUI merupakan salah satu rujukan dalam investasi syariah. Terdapat sekurangnya 17 fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan investasi syariah. Lima fatwa DSN-MUI berdasarkan BEI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah: (1)Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. (2) Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. (3) Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu. (4) Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek. (5) Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.

Regulasi yang mengatur berjalannya pasar saham syariah yang berada di Indonesia dibentuk oleh Pemerintah dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pendukungnya, serta oleh OJK dalam bentuk Peraturan dan Surat Edaran. Khusus regulasi OJK, saat ini terdapat 11 peraturan tentang pasar modal syariah. Peraturan terbaru yang dibentuk oleh OJK adalah SEOJK Nomor 3/POJK.04/2022. POJK ini mengatur tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Sejarahnya, pasar modal syariah di Indonesia dibentuk pertama kali pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya reksadana syariah. Selanjutnya pada tahun 2000 dikeluarkan saham syariah pertama yaitu *Jakarta Islamic Index* (JII). Pada tahun 2006 dikeluarkan peraturan OJK terkait pasar modal syariah, lalu setahun kemudi OJK mengeluarkan daftar efek syariah (DES). Dengan dikeluarkan DES oleh OJK maka BEI tidak melakukan seleksi saham syariah, melainkan menggunakan DES sebagai acuan untuk pemilihannya.

Saat ini, terdapat 5 (lima) indeks saham syariah di pasar modal Indonesia. Di Indonesia, pasar saham syariah berkembang pesat, didukung oleh kerangka regulasi yang kuat dan adanya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang memantau kinerja saham-saham yang sesuai dengan syariah. Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar sehingga menjadi salah satu pangsa pasar modal syariah terbesar di dunia. Kondisi dan prospek pasar modal syariah di Indonesia sangat menjanjikan bagi para investor.

Investasi saham syariah di Indonesia telah menjadi pilihan yang semakin populer di kalangan investor yang menginginkan instrumen

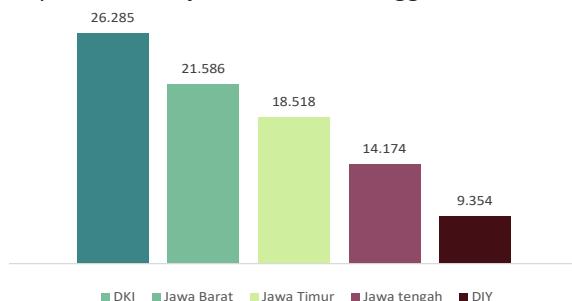
keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Angka investor syariah mengalami peningkatan setiap triwulannya. Pada triwulan II tahun 2024 angka investor syariah mengalami peningkatan sebesar 3,88 persen dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 149.369 investor. Jumlah investor ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan triwulan yang sama sebesar 18,89 persen. Peningkatan angka investor saham syariah ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan minat masyarakat terhadap investasi yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menerapkan prinsip islam dalam pengelolaan kekayaan.



Sumber: IDX Syariah

Gambar 7.4 Jumlah Investor Syariah di Indonesia (jiwa), Triwulan I 2023–II 2024

Investor syariah yang ada di Indonesia saat ini masih terpusat di pulau Jawa. Pada triwulan 2 tahun 2024, investor syariah di DKI Jakarta sebesar 18 persen dari total investor syariah di Indonesia. Angka ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar satu persen. Posisi kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan investor syariah sebesar 14 persen dari total investor syariah. Sedangkan di posisi selanjutnya adalah Jawa Timur (13 persen), Jawa Tengah (10 persen) dan DI Yogyakarta (6 persen). Posisi kelima provinsi ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2023 hingga triwulan II tahun 2024.



Sumber: IDX Syariah

Gambar 7.5 Jumlah Investor Syariah di 5 (Lima) Provinsi dengan Investor Syariah Tertinggi (Jiwa), Triwulan I-II 2024

Masih terkonsentrasi investor syariah di Pulau Jawa lebih dikarenakan Pulau Jawa masih menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Selain itu dengan infrastruktur yang lebih berkembang di Pulau Jawa menjadikannya menarik bagi para investor. Konsentrasi penduduk yang besar dan tingkat urbanisasi yang tinggi di Jawa juga berkontribusi pada dominasi investor syariah di kawasan ini.

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK dan tercatat di papan utama dan papan pengembangan BEI. Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal reviu DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi, selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstituen ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI (IDX 2024).



Sumber: IDX Syariah

Gambar 7.6 Nilai Investasi (rupiah) dan Konstituen (saham) Syariah Indonesia, Triwulan I 2023–Triwulan II 2024

Kinerja pasar saham syariah di Indonesia mengalami penurunan dalam waktu IV triwulan terakhir. Indeks saham syariah Indonesia ditutup dengan nilai 209.272, angka ini menurun sebesar 0,18 persen dibandingkan triwulan sebelumnya namun meningkat 5,24 persen dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan indeks syariah tidak terlepas dari performa saham (konstituen) yang tergabung di dalamnya. Jumlah konstituen beriringan dengan lesunya nilai saham yang diperdagangkan. Pada triwulan II tahun 2024 angka ini menurun sebesar 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 593 konstituen.

Pariwisata Indonesia Kembali Bergema

8



Sektor pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan. Kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2023 **meningkat hampir dua kali lipat** dibandingkan tahun sebelumnya. Wisatawan mancanegara terbanyak berasal dari **Malaysia**

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Menurut Kebangsaan (ribu kunjungan), 2023



1.901.242



1.431.177



1.414.447



787.924

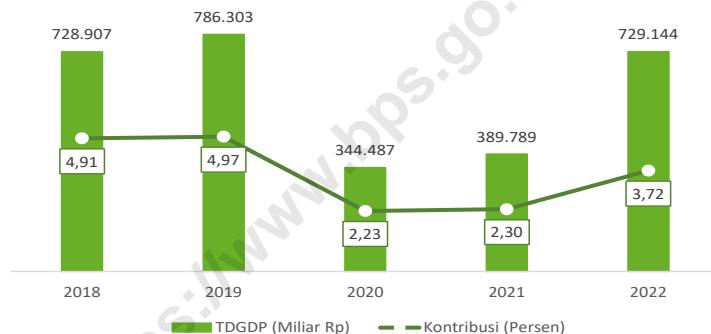


728.586



Sektor pariwisata turut berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan didukung tren wisata berkelanjutan

Pariwisata berperan penting dalam perekonomian nasional. Pengembangan pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar daerah wisata terutama pada sektor akomodasi dan makan minum, sektor jasa transportasi dan sektor industri pendukung lainnya. Indikator yang menunjukkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional dapat dilihat pada nilai produk domestik bruto langsung sektor pariwisata atau tourism direct gross domestic product (TDGDP). Pada tahun 2022, TDGDP Indonesia sebesar Rp 729,14 triliun (Gambar 8.1). Nilai TDGDP tersebut tersebut meningkat sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya Rp 389,79 triliun. Apabila dilihat perannya dalam perekonomian nasional, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 3,72 persen terhadap total PDB. Kondisi ini mengindikasikan adanya penguatan sektor pariwisata seiring dengan pemulihhan ekonomi setelah pandemi COVID-19, meskipun belum sekuat kondisi tahun 2019 sebelum pandemi.

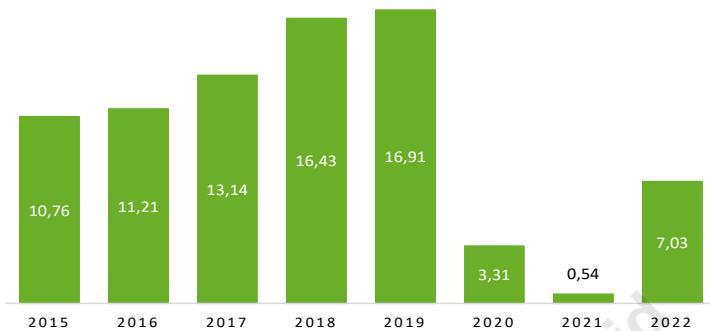


Sumber: Badan Pusat Statistik, *Tourism Satellite Account (TSA)* Indonesia 2018–2022

Gambar 8.1 *Tourism Direct Gross Domestic Product (TDGDP) dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian Nasional, 2018–2022*

Penguatan sektor pariwisata tercermin dari devisa yang masuk. Pada tahun 2020, jumlah devisa sektor pariwisata turun drastis dari sebesar US\$ 16,91 miliar pada tahun 2019 menjadi sekitar US\$ 3,31 miliar (Gambar 8.2) karena dampak pandemi. Kondisi penurunan devisa sektor pariwisata terus berlanjut hingga tahun 2021 dengan total devisa hanya sekitar US\$ 0,54 miliar. Perputaran ekonomi pada sektor pariwisata mulai terlihat di tahun 2022, ditunjukkan dengan terjadinya lonjakan yang tinggi pada penerimaan devisa sektor pariwisata. Salah satu faktor pendorongnya adalah dicabutnya pembatasan bepergian bagi masyarakat sehingga muncul istilah revenge travelers atau wisatawan yang melakukan wisata besar-besaran untuk membalas kondisi pembatasan bepergian saat pandemi. Selain itu, beberapa kegiatan internasional yang banyak diselenggarakan di Indonesia juga turut menyumbangkan devisa sektor pariwisata. Kegiatan - kegiatan internasional tersebut antara lain KTT ASEAN, *Bali Democracy Forum*, serta kegiatan olahraga mulai dari pertandingan balap motor MotoGP di Sirkuit Mandalika, pertandingan balap perahu motor Formula 1 *Powerboat Racing World*

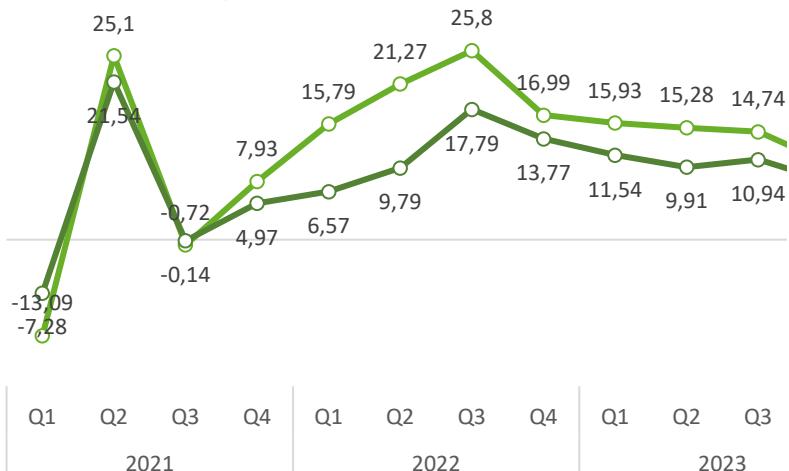
Championship di Danau Toba, pertandingan sepakbola Piala Dunia U-17, pertandingan bulutangkis Indonesia Open 2023 dan pertandingan balap mobil Formula E.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 8.2 Jumlah Devisa Sektor Pariwisata Indonesia (miliar US\$), 2015–2022

Meskipun pada tahun 2022 sektor pariwisata mengalami kenaikan nilai tambah dan kontribusi pada perekonomian nasional, namun sektor pariwisata tersebut masih perlu mengatur strategi untuk mencapai kondisi seperti saat sebelum pandemi. Laju pertumbuhan ekonomi triwulanan selama tahun 2023 (yoY) untuk sektor transportasi dan perdugungan serta penyediaan akomodasi dan makan minum masih menunjukkan adanya pertumbuhan, namun pertumbuhan yang terjadi melandai sepanjang tahun (Gambar 8.3). Kondisi tersebut wajar mengingat siklus ekonomi setelah mengalami guncangan (*shock*) akan berada pada titik keseimbangan yang baru.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 8.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Y-o-Y), 2021–2024

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Meningkat

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2023 hampir sebesar dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2023, puncak kunjungan wisatawan asing ada di bulan Desember dengan jumlah kunjungan sebesar 1,14 juta (Gambar 8.4). Selain itu, bulan Juni hingga bulan September menjadi bulan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi dengan rata-rata kunjungan sebesar 1,10 juta. Peningkatan kunjungan tersebut tidak lepas dari faktor liburan musim panas di negara-negara Eropa dan Amerika, kegiatan bertaraf internasional serta kondisi cuaca di Indonesia yang cenderung stabil pada bulan-bulan tersebut.



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) dan Hasil MPD

Gambar 8.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (ribu kunjungan), Januari 2021–Juni 2024

Berdasarkan pintu masuk utama, sebagian besar wisatawan datang ke Indonesia melalui bandara Ngurah Rai (Tabel 8.1). Selama tahun 2023, sebanyak 44,94 persen dari total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau 5,25 juta wisatawan mancanegara langsung mendarat di Bali. Selanjutnya, bandara Soekarno Hatta menjadi pintu masuk kedua terbanyak dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1,95 juta wisatawan di tahun pada tahun yang sama. Terakhir, Pulau Batam yang berbatasan laut dengan negara tetangga dan mempunyai beberapa pelabuhan dengan rute internasional menjadi opsi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Selama tahun 2023, terdapat 1,18 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia melalui pelabuhan di Batam.

Tabel 8.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Pintu Masuk Utama (kunjungan), 2021–Juni 2024

Tahun	Pintu Masuk				Jumlah
	Pintu Udara Soekarno Hatta	Pintu Udara Ngurah Rai (Bali)	Pintu Laut (Batam)	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021	119.063	43	2.582	1.435.842	1.557.530
2022	934.661	2.154.045	562.920	2.237.405	5.889.031
2023	1.953.005	5.248.113	1.185.685	3.291.022	11.677.825
Januari	115.101	329.909	93.781	259.678	798.469
Februari	124.803	317.005	73.090	234.538	749.436
Maret	140.859	366.956	97.040	264.389	869.244
April	99.289	410.281	88.776	267.465	865.811
Mei	158.550	439.454	76.577	279.133	953.714
Juni	161.114	478.127	133.616	289.934	1.062.791
Juli	204.000	541.272	94.373	281.544	1.121.189
Agustus	218.512	522.063	94.601	297.462	1.132.638
September	190.058	508.297	101.470	270.420	1.070.245
Okttober	181.627	458.845	79.646	258.401	978.519
November	186.695	397.522	103.497	243.513	931.227
Desember	172.397	478.382	149.218	344.545	1.144.542
2024					
Januari	157.979	414.937	77.836	276.994	927.746
Februari	187.641	454.398	111.758	308.352	1.062.149
Maret	160.917	463.804	104.191	312.949	1.041.861
April	157.409	502.870	78.674	328.005	1.066.958
Mei	201.574	544.492	99.404	300.029	1.145.499
Juni	213.200	518.579	124.815	312.394	1.168.988

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) dan Hasil MPD

Wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia didominasi oleh wisatawan berkebangsaan Malaysia, Australia, Singapura, Tiongkok dan Timor Leste (Tabel 8.2). Pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berasal dari Malaysia sebanyak 1,90 juta kunjungan, atau meningkat lebih dari 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, wisatawan yang berasal dari Australia dan Singapura masing-masing sebanyak 1,43 juta dan 1,41 juta kunjungan pada tahun yang sama. Yang menarik adalah wisatawan dari Tiongkok. Jumlah kunjungan wisatawan dari Tiongkok pada tahun 2023 berjumlah 787,92 ribu kunjungan, mengalami kenaikan hampir 5 kali lipat

dari tahun sebelumnya. Selain karena faktor pemulihan pasca COVID-19, hal ini juga dipengaruhi oleh kerjasama ekonomi yang semakin erat dan investasi antara Indonesia dengan Tiongkok.

Tabel 8.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan (kunjungan), 2021–2023

Negara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Malaysia	480.723	1.212.574	1.901.242
Australia	3.196	655.370	1.431.177
Singapura	18.704	736.797	1.414.447
Tiongkok	54.713	169.378	787.924
Timor Leste	819.488	703.780	728.586
India	6.670	281.814	606.439
Amerika Serikat	21.962	188.764	392.310
Korea Selatan	9.497	122.221	347.185
Inggris	5.177	170.881	335.209
Perancis	3.776	134.541	273.682
Jerman	3.429	128.634	263.534
Lainnya	130.195	1.384.277	3.196.090
Jumlah	1.557.530	5.889.031	11.677.825

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) dan Hasil MPD

Terdapat variasi pola kunjungan wisatawan mancanegara apabila dilihat berdasarkan perkembangan kunjungan per bulan di tahun 2023 (Gambar 8.5). Wisatawan yang berasal dari Malaysia banyak yang berkunjung ke Indonesia pada bulan Mei hingga Agustus dengan jumlah kunjungan berkisar antara 154,97 ribu kunjungan hingga 174,79 ribu kunjungan. Kondisi tersebut dipengaruhi karena adanya liburan sekolah dan libur hari raya. Berbeda dengan wisatawan dari Malaysia, wisatawan dari Singapura lebih banyak berkunjung ke Indonesia di Bulan Juni yang bertepatan dengan liburan sekolah. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Wisatawan Malaysia cenderung memiliki banyak kesamaan dari sisi sosial budaya dengan Indonesia dibandingkan dengan wisatawan Singapura yang sosial budayanya lebih heterogen. Selain itu, kondisi geografis Malaysia yang berbatasan darat langsung dengan Indonesia di Pulau Kalimantan menjadi faktor lain yang memudahkan wisatawan Malaysia berkunjung ke Indonesia.

Wisatawan di luar kawasan Asia Tenggara yang banyak berkunjung ke Indonesia adalah wisatawan dari Tiongkok dan Australia (Gambar 8.5). Pola wisatawan kedua negara tersebut cukup berbeda ketika dilihat berdasarkan bulan kunjungan ke Indonesia. Wisatawan dari Australia banyak berkunjung ke

Indonesia pada bulan Juni hingga bulan September dengan jumlah kunjungan wisatawan berkisar antara 129,06 ribu kunjungan hingga 143,06 ribu kunjungan. Kondisi tersebut bertepatan dengan libur sekolah dan libur musim dingin di Australia. Musim kemarau dan cuaca yang hangat di Indonesia menjadi daya tarik wisatawan pada bulan-bulan tersebut. Sedangkan wisatawan dari Tiongkok, perkembangannya cenderung mengalami peningkatan dari bulan ke bulan selama tahun 2023.



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) dan Hasil MPD

Gambar 8.5 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dari Beberapa Kebangsaan (ribu kunjungan), Januari 2023–Mei 2024

Penumpang Transportasi Udara Meningkat



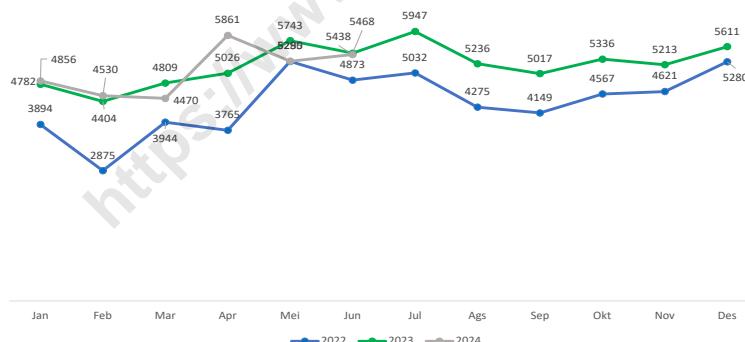
Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Indikator Ekonomi

Gambar 8.6 Jumlah Keberangkatan Penumpang Penerbangan Internasional (ribu orang), Januari 2022–Juni 2024

Peningkatan kunjungan wisatawan diikuti dengan peningkatan penumpang transportasi udara. Pada tahun 2023, penumpang transportasi

udara menunjukkan tren yang positif baik pada penumpang penerbangan internasional (Gambar 8.6) maupun penumpang penerbangan domestik (Gambar 8.7). Penumpang penerbangan internasional selama tahun 2023 tercatat sebanyak 15.641,70 ribu orang atau rata-rata sebesar 1.303,48 ribu orang per bulan. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan penumpang penerbangan internasional di tahun 2022. Apabila dilihat berdasarkan bulan, jumlah penumpang penerbangan internasional banyak terjadi di bulan Mei dan Agustus dengan peningkatan masing-masing sebesar 14,39 persen dan 13,22 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Penumpang pesawat domestik juga mengalami peningkatan (Gambar 8.7), meskipun peningkatan yang terjadi tidak sebesar penumpang pesawat internasional. Penumpang penerbangan domestik selama tahun 2023 tercatat sebanyak 62.591,50 ribu orang atau rata-rata sebesar 5.215,96 ribu orang per bulan. Jumlah tersebut meningkat sebesar 19 persen dibandingkan dengan penumpang penerbangan domestik di tahun sebelumnya. Peningkatan penumpang banyak terjadi di bulan Mei dan Juli dengan peningkatan masing-masing sebesar 14,27 persen dan 8,76 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor hari raya Idul Fitri dan liburan sekolah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Indikator Ekonomi

Gambar 8.7 Jumlah Keberangkatan Penumpang Penerbangan Domestik (ribu orang), Januari 2022–Juni 2024

Tren Okupansi Hotel Meningkat

Akomodasi atau penginapan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan ketika seseorang melakukan perjalanan wisata. Statistik perkembangan akomodasi menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat pertumbuhan pariwisata di suatu wilayah. Secara umum, jumlah akomodasi berbintang di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah akomodasi hotel bintang mencapai 4,13 ribu atau meningkat 0,6

persen dibanding tahun 2022 (Tabel 8.3). Sejalan dengan peningkatan jumlah akomodasi hotel bintang, jumlah kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang juga mengalami peningkatan di tahun 2023. Secara nasional, jumlah kamar tercatat sebanyak 382,16 ribu kamar dengan total tempat tidur yang tersedia sebanyak 578,20 ribu tempat tidur.

Tabel 8.3 Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia Pada Hotel Bintang Menurut Provinsi, 2022–2023

Provinsi	Akomodasi		Kamar		Tempat Tidur	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	42	43	2.109	2.128	3.394	3.497
Sumatera Utara	146	146	12.200	12.200	19.270	18.541
Sumatera Barat	92	92	5.575	5.575	5.227	8.944
Riau	100	100	8.881	8.881	12.714	12.809
Jambi	35	35	2.759	2.759	3.876	4.138
Sumatera Selatan	82	83	7.025	7.181	10.106	10.504
Bengkulu	17	17	1.049	1.049	1.624	1.438
Lampung	28	28	2.747	2.747	4.110	4.179
Kep. Bangka Belitung	53	55	4.283	4.445	5.174	5.404
Kepulauan Riau	118	119	12.754	12.836	18.674	18.241
DKI Jakarta	448	448	57.116	57.116	71.674	74.333
Jawa Barat	593	598	54.034	54.235	82.191	84.576
Jawa Tengah	352	359	28.874	29.523	51.632	54.786
DI. Yogyakarta	192	193	18.594	18.818	27.877	36.668
Jawa Timur	349	349	34.460	34.460	50.017	53.235
Banten	148	148	12.975	12.975	18.620	19.555
Bali	541	541	54.275	54.275	67.836	76.047
Nusa Tenggara Barat	95	96	6.619	6.626	9.079	9.766
Nusa Tenggara Timur	43	46	2.952	3.143	4.955	5.554
Kalimantan Barat	49	49	5.084	5.084	7.108	7.423
Kalimantan Tengah	27	28	2.078	2.228	2.867	3.347
Kalimantan Selatan	57	57	4.609	4.609	7.456	7.422
Kalimantan Timur	72	73	7.677	7.777	11.176	11.437
Kalimantan Utara	8	8	468	468	667	667
Sulawesi Utara	52	52	4.729	4.729	6.150	6.522
Sulawesi Tengah	14	14	1.109	1.109	1.661	1.733

Lanjutan Tabel 8.3

Provinsi	Akomodasi		Kamar		Tempat Tidur	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Selatan	194	195	14.555	14.570	19.775	21.436
Sulawesi Tenggara	27	27	1.879	1.879	2.908	2.837
Gorontalo	8	8	635	635	802	849
Sulawesi Barat	6	6	276	276	310	402
Maluku	26	26	1.554	1.554	1.884	2.082
Maluku Utara	13	13	720	720	1.088	1.050
Papua Barat	22	7	1.793	524	2.182	748
Papua Barat Daya	—	15	—	1.269	—	2.351
Papua	55	32	3.757	2.837	5.905	4.347
Papua Selatan	—	4	—	246	—	353
Papua Tengah	—	15	—	500	—	685
Papua Pegunungan	—	4	—	174	—	291
Indonesia	4.104	4.129	380.204	382.160	539.989	78.197

Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Statistik Indonesia

Hotel bintang di Indonesia masih banyak terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan hotel bintang terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat 598 hotel berbintang di Jawa Barat dengan total 54,23 ribu kamar dan 84,58 ribu tempat tidur. Selanjutnya, Bali menjadi provinsi dengan jumlah hotel berbintang terbanyak kedua dengan jumlah akomodasi sebanyak 541 hotel yang mencakup 54,27 ribu kamar dan 76,05 ribu tempat tidur. DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia mempunyai 448 hotel berbintang yang mencakup 57,12 ribu kamar dan 74,33 ribu tempat tidur.

Tabel 8.4 Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang Menurut Provinsi (persen), 2019–2023

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	43,18	27,38	29,85	32,52	30,44
Sumatera Utara	48,86	30,70	37,65	44,52	47,63
Sumatera Barat	56,00	35,34	42,13	48,48	49,48
Riau	48,69	32,38	39,57	41,62	37,81
Jambi	45,49	34,40	38,33	48,79	54,30
Sumatera Selatan	53,99	40,75	48,83	53,64	54,22
Bengkulu	64,06	39,40	38,61	40,24	44,92

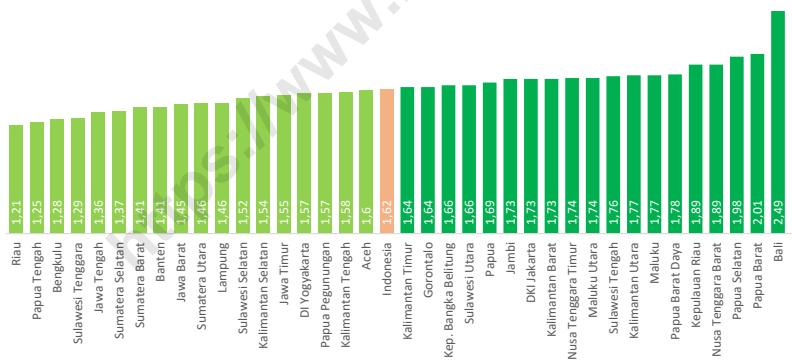
Lanjutan Tabel 8.4

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung	60,31	44,04	43,59	55,67	53,52
Kep. Bangka Belitung	36,07	23,32	23,11	33,70	32,69
Kepulauan Riau	52,31	27,05	25,54	40,92	47,57
DKI Jakarta	59,71	41,22	45,16	51,93	55,31
Jawa Barat	54,47	36,22	39,58	51,11	50,94
Jawa Tengah	47,46	29,31	31,98	45,00	47,82
DI. Yogyakarta	58,91	35,96	40,26	57,3	59,85
Jawa Timur	57,20	36,09	40,98	52,78	53,56
Banten	51,57	34,27	41,24	51,30	52,01
Bali	61,13	23,85	13,08	36,09	52,88
Nusa Tenggara Barat	42,23	27,94	33,36	31,90	38,33
Nusa Tenggara Timur	52,17	30,80	34,57	39,83	42,23
Kalimantan Barat	47,74	32,13	41,03	49,84	54,27
Kalimantan Tengah	56,71	38,77	43,55	51,99	51,65
Kalimantan Selatan	50,72	38,54	41,63	50,26	54,76
Kalimantan Timur	57,70	40,60	51,23	62,00	60,51
Kalimantan Utara	46,10	34,63	45,65	47,44	52,30
Sulawesi Utara	64,40	36,65	42,46	42,74	42,98
Sulawesi Tengah	50,13	36,94	40,36	49,88	52,50
Sulawesi Selatan	51,03	38,28	38,06	48,85	48,27
Sulawesi Tenggara	41,34	30,17	37,84	41,52	42,43
Gorontalo	49,74	32,25	43,84	43,50	42,40
Sulawesi Barat	49,91	31,50	25,94	29,34	36,60
Maluku	38,10	34,37	39,27	33,73	35,95
Maluku Utara	50,44	31,63	43,30	51,84	58,42
Papua Barat	51,16	38,24	46,28	48,12	35,65
Papua Barat Daya	—	—	—	—	53,56
Papua	50,34	31,01	45,38	37,40	40,29
Papua Selatan	—	—	—	—	47,77
Papua Tengah	—	—	—	—	27,82
Papua Pegunungan	—	—	—	—	18,67
Indonesia	54,81	33,79	36,26	47,35	51,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Statistik Indonesia

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau tingkat okupansi pada hotel berbintang mengalami peningkatan di tahun 2023 (Tabel 8.4). Tingginya tingkat okupansi mengindikasikan semakin tingginya minat pengunjung untuk menginap di akomodasi hotel suatu wilayah. Tingkat okupansi hotel secara keseluruhan sebesar 51,12 persen di tahun 2023, atau dengan kata lain setengah dari kamar hotel yang tersedia terisi oleh tamu yang menginap. Angka tersebut meningkat sebesar 3,77 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan okupansi hotel yang terjadi memang tidak setinggi peningkatan di tahun 2022, namun kondisinya hampir mendekati okupansi hotel di tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 terjadi.

Peningkatan okupansi pada hotel berbintang terjadi hampir di seluruh provinsi pada tahun 2023, kecuali pada 8 provinsi yaitu Aceh, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Papua Barat. Provinsi Bali menjadi provinsi dengan peningkatan okupansi tertinggi dibanding provinsi lainnya, yaitu mencapai 52,88 persen poin pada tahun 2023. Peningkatan okupansi di Provinsi Bali didorong oleh semakin banyaknya acara internasional yang digelar di Bali pada tahun 2023 yang menyebabkan meningkatnya permintaan di bidang pariwisata terutama pada sektor akomodasi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Indikator Ekonomi

Gambar 8.8 Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang Menurut Provinsi (hari), 2023

Secara rata-rata, lama menginap tamu pada hotel bintang di Indonesia tahun 2023 selama 1,62 hari (Gambar 8.8). Hal tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya tamu di hotel bintang di Indonesia menginap selama satu sampai dua hari. Rata-rata lama menginap tamu di Provinsi Bali paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya, yaitu 2,49 hari. Tingginya rata-rata lama menginap tamu di Provinsi Bali disumbang oleh tamu asing yang secara rata-rata menginap selama 2,88 hari. Sementara itu, rata-rata lama menginap tamu paling rendah terdapat di Provinsi Riau dengan rata-rata lama menginap selama 1,21 hari.

Secara umum, sektor pariwisata Indonesia tahun 2023 terus mengalami perbaikan. Selain kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang

meningkat hingga hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, peningkatan yang terjadi di transportasi udara dan akomodasi menjadi indikator perbaikan sektor pariwisata. Kebangkitan pariwisata Indonesia tidak terlepas dari peran Indonesia sebagai tuan rumah beberapa acara internasional di tahun 2023. Acara tersebut berhasil menarik pengunjung mancanegara baik yang berkepentingan dalam acara maupun tidak, untuk kembali mengunjungi Indonesia. Selain itu, pembangunan ibukota negara yang baru dan pengembangan destinasi wisata super prioritas menjadi pendorong datangnya wisatawan. Banyak pihak yang optimis bahwa sektor pariwisata akan dapat pulih seperti kondisi saat sebelum pandemi COVID-19 terjadi.

Destinasi Super Prioritas dan Pergeseran Tren Sektor Pariwisata

Selama ini Pulau Bali masih menjadi primadona pariwisata di Indonesia. Padahal, Indonesia mempunyai banyak destinasi wisata lain dengan keindahan alam dan budaya yang tidak kalah menarik dibanding Pulau Bali. Dari latar belakang tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011. Peraturan inilah yang menjadi dasar dalam pembangunan pariwisata yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi serta mewujudkan sektor pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.

Pada tahun 2015, pemerintah menetapkan pengembangan pariwisata yang lebih terfokus pada beberapa daerah tertentu di luar Pulau Bali yang disebut "10 Bali Baru". Destinasi wisata prioritas tersebut adalah Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung. Seiring berjalannya waktu, pemerintah memfokuskan ulang pembangunan wisata ke lima tempat yang kemudian dikenal sebagai 5 DSP (destinasi super prioritas) yaitu Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba dan Likupang.

Lima DSP tersebut merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di lima provinsi di bagian barat, tengah, hingga timur Indonesia. Masing-masing destinasi mempunyai potensi, keunikan dan daya tarik wisata yang besar. Namun, DSP tersebut masih perlu banyak pengembangan yang meliputi infrastruktur aksesibilitas, amenitas, jaringan telekomunikasi, pengembangan produk wisata, perbaikan ekosistem ekonomi kreatif, hingga persiapan sumber daya manusia (SDM) di setiap lokasi.

Pembangunan DSP masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2024. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan 5 DSP ini dapat memberikan peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 5,5 persen, meningkatkan devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar US\$, serta meningkatkan jumlah wisatawan

nusantara sebanyak 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara sebanyak 22,3 juta kunjungan.

Dalam *expert* survei yang dilakukan oleh Kemenparekraf, proyeksi tren pariwisata pada wisatawan mancanegara yang mengalami pergeseran dapat menjadi hal yang menarik untuk diulas (Gambar 8.8). Menurut pemerhati sektor pariwisata, wisatawan akan lebih memperhatikan wisata yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menawarkan pengalaman yang unik. Selain itu, perkembangan digitalisasi menjadi pendorong wisatawan untuk berwisata sambil menjalankan bisnisnya atau bekerja, serta dapat mengombinasikan wisatanya sesuai dengan biaya dan keinginan wisatawan.



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Publikasi *Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023–2024*

Gambar 8.9 Tren Pariwisata yang akan Terjadi pada Tahun 2023–2024 pada Wisatawan Mancanegara (persen), 2023

Tren pemilihan konsumsi yang berkesadaran semakin meningkat di kalangan wisatawan yang kini lebih memperhatikan isu krisis iklim, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan pribadi. Respon dari sektor pariwisata terlihat dalam pengembangan *green accommodation* yang memprioritaskan keberlanjutan melalui penghematan sumber daya dan penggunaan energi terbarukan, misalnya seperti NIHI Sumba dan Potato Head di Bali. Selain itu, kebutuhan untuk infrastruktur *micro mobility* juga meningkat, didukung oleh tren bersepeda selama pandemi. Banyaknya kendaraan listrik yang semakin marak di masyarakat, termasuk penggunaan kendaraan listrik di sektor pariwisata di Indonesia, dapat menjadi langkah untuk mengurangi emisi karbon dari kendaraan berbasis fosil.

Ketidakpastian selama pandemi telah mendorong lebih dari 75 persen wisatawan (survei Booking.com tahun 2023) untuk menginginkan perjalanan yang mengingatkan mereka pada masa yang lebih sederhana, sehingga

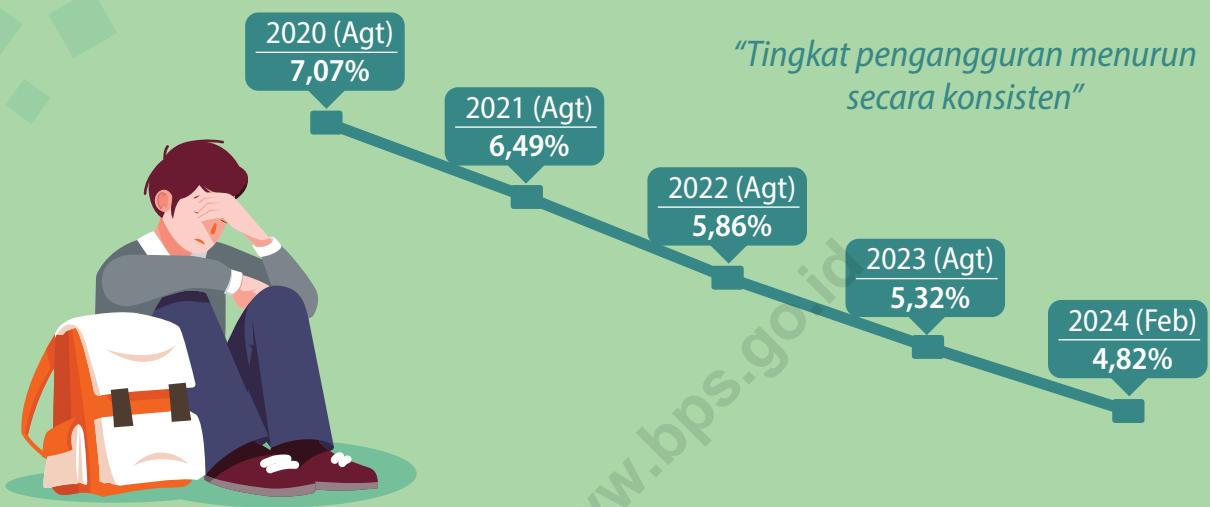
muncullah *tren nostalgic getaways*. Wisatawan kini lebih memilih tempat seperti taman dengan tema tertentu, lokasi syuting film ikonik, dan destinasi luar ruangan yang membangkitkan kenangan masa kecil serta romantisme pra-digital, termasuk di kalangan milenial dan Gen Z yang belum mengalami hal tersebut. Selain itu, *memory-led food trips*, seperti pengalaman kuliner di Kopi Klotok di Yogyakarta, memberikan nuansa familiar dan nyaman di tengah ketidakpastian. Perjalanan dengan kereta api menjadi pilihan ramah lingkungan yang menawarkan pengalaman wisata yang unik bagi milenial dan Gen Z, popularitasnya meningkat terlihat dari antusiasme penumpang pada kereta panoramic PT. KAI.

Setelah pandemi, tren *revenge travel* mulai beralih ke *transformative retreats*, yang berfokus pada *wellness tourism* dan *medical tourism* dengan aktivitas wisata yang menekankan pada kesejahteraan untuk mengurangi stres dari kehidupan sehari-hari (Global Wellness Institute 2023 pada Publikasi Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023-2024 2023). Di Bali, kawasan Sanur sedang dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan yang menyatukan layanan medis dan *wellness resort*. Beberapa *transformative retreats* yang sudah ada terlihat di program Sacred Nap dan Revivo Sleep Retreats pada beberapa resort di Bali yang menggabungkan pengalaman tidur dengan meditasi dan praktik kesehatan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan pengunjung (Dewan Nasional KEK, 2024).

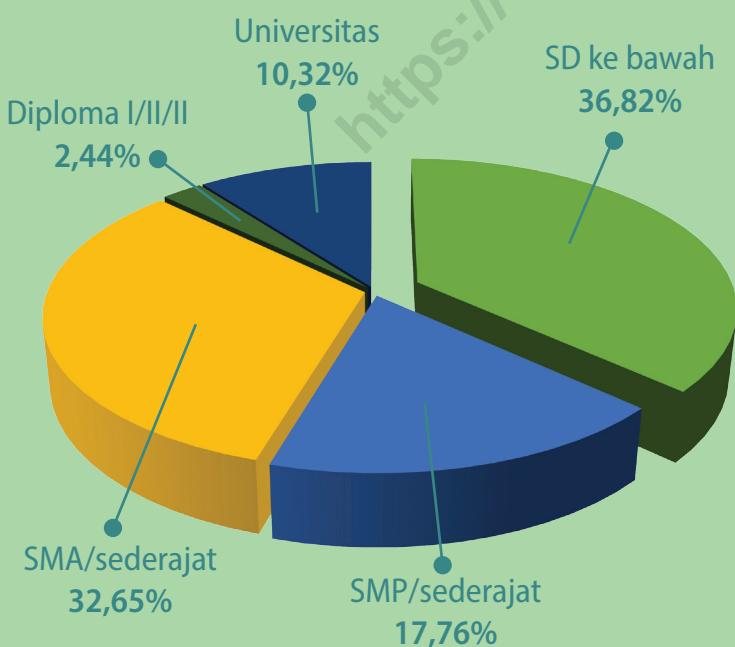
Kembali pulihnya perjalanan bisnis secara global di tahun 2023, bersamaan dengan meningkatnya kebebasan untuk bekerja jarak jauh. Momentum fleksibilitas ini dimanfaatkan bagi para pekerja untuk berwisata di sela-sela rutinitas pekerjaan mereka. *Remote working* kini banyak diadopsi oleh perusahaan di berbagai negara, seperti Tiongkok dan India. Konsep *bleisure*, yaitu penggabungan antara bisnis dan aktivitas *leisure*, semakin popular sebagai tren yang akan terus tumbuh pasca pandemi. Survei Markets Insider pada tahun 2023 menunjukkan 61% pelaku bisnis mengombinasikan perjalanan bisnis dengan kegiatan wisata. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh survei Expedia yang menyebutkan 76 persen calon pelaku perjalanan akan memperpanjang perjalanan bisnisnya khusus untuk aktivitas wisata (Publikasi Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023-2024 2023).

Poin penting yang utama dari pergeseran tren pariwisata adalah digitalisasi. Digitalisasi telah memengaruhi berbagai aspek seperti akomodasi, transportasi, dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*). Tren pasca-pandemi menunjukkan peningkatan kebutuhan akan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Sehingga otomatisasi menjadi solusi utama, dengan pemanfaatan teknologi seperti robot, *drone*, *artificial intelligence* (AI), *virtual reality* (VR), dan *augmented reality* (AR) untuk meningkatkan pengalaman berwisata. Dalam perjalanan wisata, preferensi terhadap *shared mobility* semakin meningkat berkat teknologi *seamless* yang mendukung efisiensi perjalanan.

Ketenagakerjaan



"Tingkat pengangguran menurun secara konsisten"



"Tenaga kerja Indonesia masih didominasi dengan lulusan SD/sederajat ke bawah"



“

Kesempatan kerja di Indonesia terus meningkat, tetapi pasar tenaga kerja masih didominasi oleh pekerja sektor informal.

”

Sumber daya manusia merupakan input atau motor penggerak utama yang dibutuhkan dalam pembangunan. Sumber daya manusia ini juga sering disebut dengan tenaga kerja yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kualitas tenaga kerja yang tinggi memberikan produktivitas yang tinggi dan pada gilirannya akan memengaruhi dinamika perekonomian. Selain itu, perekonomian yang terus tumbuh juga akan mampu membuka peluang kerja yang lebih banyak.

Di tengah dinamika perubahan ekonomi global, analisis ketenagakerjaan menjadi semakin penting untuk memahami arah dan tantangan dalam pasar tenaga kerja. Kemajuan teknologi hingga perubahan struktur demografi, seperti bonus demografi dan penuaan penduduk, telah mengubah kondisi ketenagakerjaan saat ini. Dinamika yang kompleks ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, mobilitas tenaga kerja.

Sebagai negara berkembang, perekonomian Indonesia terus ditopang salah satunya oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kesempatan kerja yang luas dan tenaga kerja yang produktif akan mendorong Indonesia menuju perekonomian yang lebih baik dan kompetitif. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan juga sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Angkatan Kerja di Indonesia

Angkatan kerja yang diukur dalam analisis ini adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selama tahun 2020-2023, rata-rata tingkat pertumbuhan jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat sebesar 2,24 persen setiap tahunnya. Pada Agustus tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Indonesia tercatat sebesar 138,22 juta orang dan terus meningkat hingga mencapai 147,71 juta orang pada Agustus 2023. Pada Februari 2024, jumlah angkatan kerja juga terus mengalami peningkatan hingga 149,37 juta orang. Sementara itu, bukan angkatan kerja di Indonesia mengalami penurunan selama tahun 2021 hingga 2023. Jumlah bukan angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2023 tercatat sebesar 64,88 juta orang.

Pertumbuhan jumlah angkatan kerja dapat menjadi modal pembangunan Indonesia, mendorong perekonomian, konsumsi, inovasi, dan produktivitas. Namun, peningkatan angkatan kerja harus diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai untuk mencegah pengangguran yang meningkat dan persaingan ketat dalam pasar kerja yang dapat menekan upah. Minimnya kesempatan kerja dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh sektor yang terlibat untuk berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan, dan infrastruktur, serta menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja.

Tabel 9.1 Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 2020–2024

Tahun	Jenis Kelamin	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020 (Agustus)	Laki-laki	77.755.026	6.268.364	84.023.390	17.933.872
	Perempuan	50.699.158	3.499.390	54.198.548	47.816.650
	Total	128.454.184	9.767.754	138.221.938	65.750.522
2021 (Agustus)	Laki-laki	79.263.314	5.731.458	84.994.772	18.313.469
	Perempuan	51.787.209	3.370.594	55.157.803	48.242.255
	Total	131.050.523	9.102.052	140.152.575	66.555.724
2022 (Agustus)	Laki-laki	82.553.960	5.208.623	87.762.583	16.873.668
	Perempuan	52.742.753	3.217.308	55.960.061	48.824.071
	Total	135.296.713	8.425.931	143.722.644	65.697.739
2023 (Agustus)	Laki-laki	85.236.573	4.888.264	90.124.837	16.838.168
	Perempuan	54.615.804	2.966.811	57.582.615	48.041.821
	Total	139.852.377	7.855.075	147.707.452	64.879.989
2024 (Februari)	Laki-laki	85.966.422	4.484.848	90.451.270	17.202.160
	Perempuan	56.212.624	2.710.014	58.922.638	47.421.777
	Total	142.179.046	7.194.862	149.373.908	64.623.937

Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia

Mencapai pekerjaan layak bagi semua perempuan dan laki-laki pada tahun 2030 tercantum dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-8. Kesetaraan gender di pasar tenaga kerja ini menyangkut akses perempuan ke pasar kerja. Perempuan juga harus diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kesetaraan gender dalam angkatan kerja sangat krusial karena pasar tenaga kerja adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Masalah ketidaksetaraan gender di lapangan kerja kemungkinan besar akan menghambat kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, kesenjangan pekerjaan gender menjadi salah satu penghalang utama bagi pembangunan berkelanjutan.

Pada Tabel 9.1 terlihat bahwa dari tahun ke tahun angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan angkatan kerja laki-laki. Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja berjenis kelamin perempuan tercatat sebesar 57,58 juta orang atau sekitar 38,98 persen dari total angkatan kerja. Perbandingan angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan sekitar 3:2 pada tahun 2023. Lebih rendahnya kaum perempuan masuk ke dalam angkatan kerja

dibandingkan dengan laki-laki dapat disebabkan oleh beberapa hal, termasuk peran tradisional gender. Perempuan lebih dibebankan pada tanggung jawab domestik, sehingga kondisi ini membatasi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Perlu diperhatikan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan gender di pasar kerja, seperti pemberian akses yang lebih luas bagi perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kewirausahaan, terutama bagi perempuan yang mengurus rumah tangga.

Pemerintah telah memberikan sejumlah dukungan dalam pengarusutamaan gender sebagai pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu dukungan yang diberikan pemerintah bagi kaum perempuan adalah pelatihan dalam Program Kartu Prakerja. Data yang tercatat hingga Mei 2024, persentase jumlah perempuan atau ibu rumah tangga yang memanfaatkan program kartu prakerja sebesar 51 persen (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2024). Program ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan produktivitas, serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri.

Peningkatan angkatan kerja diiringi oleh peningkatan jumlah orang yang bekerja. Pada tahun 2020, terdapat 128,45 juta penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja. Angka ini naik secara konsisten setiap tahun hingga 139,85 juta orang pada tahun 2023. Jika dilihat pertumbuhannya, rata-rata kenaikan jumlah pekerja sebesar 2,87 persen setiap tahunnya.

Penduduk yang bekerja sebagian besar adalah laki-laki. Pada tahun 2023, terdapat 85,24 juta penduduk laki-laki yang bekerja, atau sebesar 60,95 persen dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu, jumlah perempuan yang bekerja pada tahun yang sama mencapai 54,62 juta orang. Dominasi laki-laki dalam sektor ekonomi ini sejalan dengan potensi mereka yang lebih besar untuk aktif dalam kegiatan ekonomi atau menjadi bagian dari angkatan kerja.

Jumlah pengangguran menurun selama periode 2020-2023. Pada tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 9,77 juta orang dan berkurang menjadi 7,86 juta orang pada tahun 2023. Rata-rata penurunan jumlah pengangguran sebesar 7,01 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, terutama pemulihan ekonomi yang cepat pasca pandemi Covid-19 telah mampu menciptakan lebih banyak peluang kerja. Jumlah pengangguran pada Februari 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 7,19 juta orang.

Pengangguran di Indonesia juga didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2023, jumlah pengangguran yang berjenis kelamin laki-laki 1,6 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan yang berjenis kelamin perempuan. Meski demikian, tren jumlah pengangguran laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan selama tahun 2020-2023.

Keberhasilan kebijakan pemerintah di sektor ketenagakerjaan dapat dilihat dari beberapa indikator ketenagakerjaan, seperti Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Indikator-indikator ini disajikan berdasarkan beberapa disagregasi, yaitu jenis kelamin dan klasifikasi daerah tempat tinggal. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi ketenagakerjaan secara lebih mendalam sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Tabel 9.2 Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Indonesia, 2020–2024

Jenis Kelamin	2020 (Agustus)	2021 (Agustus)	2022 (Agustus)	2023 (Agustus)	2024 (Februari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TPAK					
Jenis Kelamin	Laki-laki	82,41	82,27	83,87	84,26
	Perempuan	53,13	53,34	53,41	54,52
Daerah Tempat Tinggal	Perkotaan	65,91	66,15	66,65	67,73
	Perdesaan	70,20	70,03	71,38	71,96
Total		67,77	67,80	68,63	69,48
TPT					
Jenis Kelamin	Laki-laki	7,46	6,74	5,93	5,42
	Perempuan	6,46	6,11	5,75	5,15
Daerah Tempat Tinggal	Perkotaan	8,98	8,32	7,74	6,40
	Perdesaan	4,71	4,17	3,43	3,88
Total		7,07	6,49	5,86	5,32
TKK					
Jenis Kelamin	Laki-laki	92,54	93,26	94,07	94,58
	Perempuan	93,54	93,89	94,25	94,85
Daerah Tempat Tinggal	Perkotaan	91,02	91,68	92,26	93,60
	Perdesaan	95,29	95,83	96,57	96,12
Total		92,93	93,51	94,14	94,68
69,80					

Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia

Tabel 9.2 menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang berpotensi atau aktif secara ekonomi di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 67,77 persen dan konsisten meningkat hingga mencapai 69,48 persen pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 10 penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas, terdapat 6 hingga 7 orang yang berpotensi aktif secara ekonomi atau mampu memproduksi barang/jasa dalam kegiatan ekonomi. Kenaikan TPAK ini mengindikasikan peningkatan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Peningkatan ini berlanjut hingga Februari 2024, mencapai 69,80 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, partisipasi angkatan kerja laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan partisipasi angkatan kerja perempuan. Akan tetapi, TPAK laki-laki sempat mengalami penurunan dari 82,41 persen (2020) menjadi 82,27 persen (2021), lalu kembali meningkat hingga 84,26 persen pada tahun 2023. Sementara itu, TPAK perempuan terus mengalami peningkatan dari 53,13 persen pada tahun 2020 menjadi 54,52 persen pada tahun 2023.

Kondisi ketenagakerjaan juga dapat dianalisis berdasarkan klasifikasi tempat tinggal. Dari tahun ke tahun, persentase penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan selalu lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Pada tahun 2023, TPAK perkotaan sebesar 67,73 persen, sedangkan TPAK perdesaan sebesar 71,96 persen. Semakin besarnya TPAK perdesaan merupakan peluang untuk meningkatkan perekonomian pedesaan. Namun, peluang tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia.

Selama lima tahun terakhir, TPAK mengalami peningkatan baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada tahun 2020, TPAK di perkotaan tercatat sebesar 65,91 persen, meningkat menjadi 66,15 persen pada tahun 2021, 66,65 persen pada tahun 2022, dan 67,73 persen pada tahun 2023. Sementara itu, TPAK di perdesaan sedikit menurun pada tahun 2021 (70,03 pesen) dari 2020 (70,20 persen). Namun TPAK di perdesaan meningkat kembali menjadi 71,96 persen pada tahun 2023.

Kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap sumber daya manusia yang tersedia dapat tergambar melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selama tahun 2020-2023, TPT di Indonesia terus mengalami penurunan, dari 7,07 persen pada tahun 2020 menjadi 5,32 persen pada tahun 2023. Penurunan tingkat pengangguran ini menunjukkan penciptaan lapangan kerja yang massif dan dapat mengimbangi peningkatan angkatan kerja yang ada. Dengan demikian, tenaga kerja yang tersedia mampu diserap secara optimal sehingga tingkat pengangguran mampu dikontrol dan ditekan.

Tingkat pengangguran antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara signifikan. Pada tahun 2023, TPT laki-laki di Indonesia sebesar 5,42 persen dan TPT perempuan sebesar 5,15 persen. Tidak adanya kesenjangan yang signifikan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan kerja yang setara. Fakta ini sangat bermanfaat dalam mendorong kesetaraan gender di tempat kerja.

Selanjutnya, perbedaan tingkat pengangguran antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga penting untuk dianalisis. Dari tahun ke tahun, tingkat pengangguran di perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan. TPT di perkotaan masih di atas 6 persen pada tahun 2020 hingga 2023, sedangkan di perdesaan sudah kurang dari 5 persen. Bahkan di perdesaan, TPT pada tahun 2022 sudah kurang dari 4 persen. Tingginya pengangguran

di perkotaan merupakan salah satu dampak sosial urbanisasi, terutama di kota besar (Hidayati 2021, 211–219). Pengangguran tersebut terjadi karena sebagian besar migran tidak memiliki keterampilan yang memadai. Sementara itu, kebutuhan tenaga kerja kasar atau buruh di perkotaan sudah terpenuhi.

Tren atau perkembangan tingkat pengangguran di daerah perkotaan berbeda dengan perdesaan. Selama tahun 2020-2023, TPT di perkotaan cenderung menurun, yaitu dari 8,98 persen (2020) menjadi 6,40 persen (2023). Sementara itu, TPT di perdesaan terus menurun selama tahun 2020-2022, yaitu dari 4,71 persen menjadi 3,43 persen. Akan tetapi, pada tahun 2023, TPT di perdesaan mengalami sedikit peningkatan, yaitu menjadi 3,88 persen. Meski demikian, TPT perdesaan kembali menurun menjadi 3,37 persen pada Februari 2024.

Pemulihan dan aktivitas ekonomi kuat memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja. Presiden Joko Widodo terus mendorong investasi agar terbuka luas dan berfokus pada sektor padat karya, sehingga akan tercipta banyak lapangan kerja (CNBC Indonesia 2023). Penciptaan lapangan kerja juga dilakukan pemerintah bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga dilakukan melalui peningkatan infrastruktur dasar di berbagai wilayah melalui program padat karya, terutama pada sektor-sektor dengan efek pengganda besar (Metrotvnews.com 2023).

Penyerapan tenaga kerja juga dapat dijelaskan dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Di Indonesia, TKK terus meningkat antara tahun 2020 dan 2023. TKK di Indonesia tercatat mencapai 94,68 persen pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja, terdapat 94-95 penduduk telah atau sedang bekerja. Perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat tentu akan mendapat manfaat dari penyerapan tenaga kerja yang besar.

Peluang kerja bagi perempuan pada umumnya hampir sama dengan peluang kerja bagi laki-laki. TKK di Indonesia tercatat sebesar 94,85 persen untuk perempuan dan 94,58 persen untuk laki-laki pada tahun 2023. Namun, tren TKK berdasarkan gender menunjukkan bahwa TKK laki-laki meningkat lebih cepat dibandingkan TKK perempuan. TKK laki-laki meningkat sebesar 2,04 poin persentase dan TKK perempuan meningkat sebesar 1,31 poin persentase antara tahun 2020 dan 2023.

Penurunan tingkat pengangguran mengindikasikan tingkat kesempatan kerja yang meluas. Pada tahun 2023, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di daerah perkotaan terus meningkat hingga 93,60 persen. Tidak hanya di wilayah perkotaan, TKK di wilayah perdesaan juga meningkat hingga 96,12 persen pada periode yang sama. Angka tersebut menunjukkan bahwa 100 angkatan kerja yang tersedia, terdapat 93-94 penduduk perkotaan dan 96-97 penduduk perdesaan yang sudah memiliki pekerjaan atau aktif dalam kegiatan ekonomi.

Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi

Keadaan geografis dan keterjangkauan wilayah memengaruhi kondisi sosial ekonomi dan juga ketenagakerjaan. Dengan demikian, kebijakan ketenagakerjaan sebaiknya bersifat regional untuk menyesuaikan dengan tantangan dan potensi lokal. Kebijakan ini penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendukung pembangunan inklusif dan merata, serta membantu mengatasi kemiskinan yang timbul akibat perbedaan karakteristik ketenagakerjaan di berbagai wilayah.

Selama kurun waktu 2020 hingga 2023, jumlah provinsi yang memiliki TPAK di bawah angka nasional mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, terdapat 14 provinsi yang memiliki TPAK di bawah angka nasional. Jumlah provinsi dengan TPAK di bawah angka nasional tersebut terus meningkat hingga menjadi 16 provinsi pada tahun 2023. Provinsi-provinsi dengan TPAK rendah perlu mendapat perhatian, khususnya yang jauh dari angka nasional. Hal ini diperlukan untuk menutup kesenjangan pasokan tenaga kerja antarprovinsi.

Pada tahun 2023, TPAK di 34 provinsi diperkirakan berkisar antara 63 hingga 78 persen. Papua memiliki potensi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi tertinggi sejak 2021 hingga 2023, dengan persentase mencapai 77,20 persen pada 2023. Tingginya TPAK di Papua menunjukkan bahwa Papua memiliki pasokan tenaga kerja yang cukup besar. Modal sumber daya manusia yang melimpah menjadi peluang untuk mendorong perekonomian Papua. Kebijakan strategis dengan pendekatan kultur wilayah akan membantu pengembangan potensi tenaga kerja yang tersedia.

Sementara itu, provinsi yang menduduki posisi dengan TPAK terendah mengalami pergeseran. Pada tahun 2020, Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan TPAK terendah, yaitu sebesar 63,40 persen. Selanjutnya, TPAK terendah pada tahun bergeser ke Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai TPAK sebesar 62,14 persen (2021) dan 63,08 persen (2022). Kemudian pada tahun 2023, TPAK terendah bergeser ke Provinsi Maluku, yaitu sebesar 63,60 persen.

Selama tahun 2020 sampai dengan 2023, provinsi dengan peluang kesempatan kerja (TKK) tertinggi di Indonesia tercatat di Sulawesi Barat, kecuali pada tahun 2021. TKK Provinsi Sulawesi Barat pun terus mengalami peningkatan hingga mencapai 97,73 persen pada tahun 2023. Angka TKK tersebut menunjukkan bahwa dari 100 angkatan kerja di Sulawesi Barat, 97 atau 98 orang diantaranya telah memiliki pekerjaan. Dengan TKK yang berada di atas angka nasional, Sulawesi Barat mampu menyerap tenaga kerja dengan baik. Kondisi ini menunjukkan pemerintah daerah mampu melakukan kebijakan yang tepat dan efektif mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja di Sulawesi Barat.

Tabel 9.3 Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi di Indonesia, 2020–2024

Provinsi	TPAK					TKK					TPT				
	2020 (Agt)	2021 (Agt)	2022 (Agt)	2023 (Agt)	2024 (Feb)	2020 (Agt)	2021 (Agt)	2022 (Agt)	2023 (Agt)	2024 (Feb)	2020 (Agt)	2021 (Agt)	2022 (Agt)	2023 (Agt)	2024 (Feb)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	65,10	63,78	63,50	64,77	64,15	93,41	93,70	93,83	93,97	94,44	6,59	6,30	6,17	6,03	5,56
Sumatera Utara	68,67	69,10	69,53	71,06	70,30	93,09	93,67	93,84	94,11	94,90	6,91	6,33	6,16	5,89	5,10
Sumatera Barat	69,01	67,72	69,30	69,61	70,44	93,12	93,48	93,72	94,06	94,21	6,88	6,52	6,28	5,94	5,79
Riau	65,24	65,03	63,86	64,45	65,75	93,68	95,58	95,63	95,77	96,15	6,32	4,42	4,37	4,23	3,85
Jambi	67,79	67,17	67,84	68,75	67,09	94,87	94,91	95,41	95,47	95,55	5,13	5,09	4,59	4,53	4,45
Sumatera Selatan	68,65	68,77	69,31	70,72	69,75	94,49	95,02	95,37	95,89	96,03	5,51	4,98	4,63	4,11	3,97
Bengkulu	71,73	69,75	69,81	70,91	70,92	95,93	96,35	96,41	96,58	96,83	4,07	3,65	3,59	3,42	3,17
Lampung	70,16	69,35	70,06	70,04	71,51	95,33	95,31	95,48	95,77	95,88	4,67	4,69	4,52	4,23	4,12
Kep. Bangka Belitung	66,89	65,88	67,38	68,34	70,66	94,75	94,97	95,23	95,44	96,15	5,25	5,03	4,77	4,56	3,85
Kepulauan Riau	66,28	68,27	68,94	68,68	67,14	89,66	90,09	91,77	93,20	93,06	10,34	9,91	8,23	6,80	6,94
DKI Jakarta	63,81	62,63	63,08	65,21	65,17	89,05	91,50	92,82	93,47	93,97	10,95	8,50	7,18	6,53	6,03
Jawa Barat	64,53	64,95	66,15	66,49	67,34	89,54	90,18	91,69	92,56	93,09	10,46	9,82	8,31	7,44	6,91
Jawa Tengah	69,43	69,58	70,84	71,72	72,22	93,52	94,05	94,43	94,87	95,61	6,48	5,95	5,57	5,13	4,39
D.I. Yogyakarta	71,12	73,52	72,60	74,08	73,18	95,43	95,44	95,94	96,31	96,76	4,57	4,56	4,06	3,69	3,24
Jawa Timur	70,33	70,00	71,23	72,56	73,02	94,16	94,26	94,51	95,12	96,26	5,84	5,74	5,49	4,88	3,74
Banten	64,48	63,79	64,72	64,44	64,95	89,36	91,02	91,91	92,48	92,98	10,64	8,98	8,09	7,52	7,02
Bali	74,32	73,54	76,86	77,08	77,37	94,37	94,63	95,20	97,31	98,13	5,63	5,37	4,80	2,69	1,87
Nusa Tenggara Barat	70,45	70,57	70,93	73,31	73,97	95,78	96,99	97,11	97,20	96,70	4,22	3,01	2,89	2,80	3,30
Nusa Tenggara Timur	73,11	73,78	75,23	75,72	76,77	95,72	96,23	96,46	96,86	96,83	4,28	3,77	3,54	3,14	3,17
Kalimantan Barat	68,83	68,45	68,97	69,42	67,82	94,19	94,18	94,89	94,95	95,80	5,81	5,82	5,11	5,05	4,20
Kalimantan Tengah	68,40	68,67	67,23	67,18	67,83	95,42	95,47	95,74	95,90	96,33	4,58	4,53	4,26	4,10	3,67
Kalimantan Selatan	69,33	69,26	67,55	69,76	69,55	95,26	95,05	95,26	95,69	96,11	4,74	4,95	4,74	4,31	3,89
Kalimantan Timur	65,50	65,49	64,73	65,57	66,31	93,13	93,17	94,29	94,69	94,25	6,87	6,83	5,71	5,31	5,75
Kalimantan Utara	66,51	66,24	67,62	70,35	64,52	95,03	95,42	95,67	95,99	95,99	4,97	4,58	4,33	4,01	4,01
Sulawesi Utara	63,42	62,15	63,08	64,09	63,98	92,63	92,94	93,39	93,90	94,02	7,37	7,06	6,61	6,10	5,98

Lanjutan Tabel 9.3

Provinsi	TPAK					TKK					TPT				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Feb)	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Feb)	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Agt)	(Feb)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sulawesi Tengah	69,44	68,73	69,99	69,85	68,53	96,23	96,25	97,00	97,05	96,85	3,77	3,75	3,00	2,95	3,15
Sulawesi Selatan	63,40	64,73	66,18	65,66	65,41	93,69	94,28	95,49	95,67	95,10	6,31	5,72	4,51	4,33	4,90
Sulawesi Tenggara	69,83	70,09	68,82	70,07	69,64	95,42	96,08	96,64	96,85	96,78	4,58	3,92	3,36	3,15	3,22
Gorontalo	66,46	65,94	68,91	70,79	70,48	95,72	96,99	97,42	96,94	96,95	4,28	3,01	2,58	3,06	3,05
Sulawesi Barat	70,19	70,27	73,00	71,05	71,63	96,68	96,87	97,66	97,73	96,98	3,32	3,13	2,34	2,27	3,02
Maluku	65,07	65,75	65,46	63,60	65,75	92,43	93,07	93,12	93,69	94,04	7,57	6,93	6,88	6,31	5,96
Maluku Utara	64,28	64,70	64,88	67,77	67,88	94,85	95,29	96,02	95,69	95,84	5,15	4,71	3,98	4,31	4,16
Papua Barat	69,55	70,34	68,55	67,24	75,10	93,20	94,16	94,63	94,62	95,69	6,80	5,84	5,37	5,38	4,31
Papua Barat Daya	—	—	—	...	67,45	—	—	—	...	93,98	—	—	—	...	6,02
Papua	72,16	78,29	77,75	77,20	71,50	95,72	96,67	97,17	97,33	94,19	4,28	3,33	2,83	2,67	5,81
Papua Selatan	—	—	—	...	67,32	—	—	—	...	95,25	—	—	—	...	4,75
Papua Tengah	—	—	—	...	76,99	—	—	—	...	97,51	—	—	—	...	2,49
Papua Pegunungan	—	—	—	...	87,53	—	—	—	...	98,82	—	—	—	...	1,18
Indonesia	67,77	67,80	68,63	69,48	69,80	92,93	93,51	94,14	94,68	95,18	7,07	6,49	5,86	5,32	4,82

Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia

Tingginya kesempatan kerja di Sulawesi Barat tidak terlepas dari keberhasilan berbagai program yang dilakukan pemerintah setempat. Selama tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pelatihan dan uji kompetensi kejuruan, dimana sebagian lulusan program tersebut telah bekerja dan berwirausaha (berita.sulbarprov.go.id/2024). Selain itu Disnaker Provinsi Sulawesi Barat juga telah melakukan kegiatan pemagangan Tenaga Kerja Dalam Negeri, penerimaan bursa tenaga kerja melalui kegiatan Job Fair, dan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja.

Sebaliknya, provinsi dengan TKK terendah mengalami pergeseran dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, DKI Jakarta memiliki TKK terendah, yaitu sebesar 89,05 persen. Kemudian, TKK terendah di 2021 terjadi di Kepulauan Riau, yakni sebesar 90,09 persen dan kembali bergeser ke pulau Jawa pada tahun 2022 yaitu Provinsi Jawa Barat (91,69 persen). Akan tetapi, pada tahun 2023, Banten merupakan provinsi dengan TKK terendah yaitu sebesar 92,48 persen.

Rendahnya tingkat kesempatan kerja di Provinsi Banten dejalan dengan tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di provinsi ini dibandingkan provinsi

lainnya. Pada tahun 2023, TPT di provinsi Banten tercatat sebesar 7,52 persen. Penyebab tingginya pengangguran di provinsi Banten adalah ketidaksesuaian antara pasokan dan kebutuhan. Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar pada angka pengangguran di Banten. Hal ini disebabkan karena keahlian lulusan SMK yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (*Kompas.com* 2023). Oleh karena itu, pemerintah setiap berupaya untuk memetakan SMK dalam bentuk vokasi-vokasi yang sesuai. Selain itu, pemerintah juga berupaya melakukan pelatihan agar pencari kerja memiliki keahlian tersertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar industri.

Rendahnya Pendidikan Penduduk yang Bekerja

Pertumbuhan ekonomi yang pesat memerlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas sebagai faktor utama penggeraknya. Tenaga kerja Indonesia yang terampil dapat menjadi aset signifikan dalam meningkatkan daya saing ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Kualitas tenaga kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar, terutama di era revolusi industri 4.0 atau era digital. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kualitas tenaga kerja terus-menerus dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dan menghadapi tantangan industri digital.

Namun, kualitas tenaga kerja di Indonesia masih menjadi tantangan utama. Meskipun jumlah tenaga kerja cukup besar, kualitasnya masih rendah karena mayoritas tenaga kerja hanya lulusan sekolah dasar atau lebih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini mengakibatkan produktivitas kerja yang rendah, padahal perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi untuk mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang rendah, sehingga tingkat pengangguran terus meningkat. Masih adanya pengangguran perlu diatasi agar SDM Indonesia dapat berperan aktif mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 9.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Indonesia, 2020–2024

Tingkat Pendidikan (1)	2020 (Agustus) (2)	2021 (Agustus) (3)	2022 (Agustus) (4)	2023 (Agustus) (5)	2024 (Februari) (6)
SD ke bawah	38,89	37,69	38,80	36,82	36,54
SMP	18,27	17,76	17,54	17,76	18,15
SMA	30,51	31,73	31,34	32,65	32,64
Diploma I/II/III	2,70	2,64	2,45	2,44	2,39
Universitas	9,63	10,18	9,87	10,32	10,28

Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (diolah)

Pada tahun 2020, lebih dari 38 persen penduduk Indonesia yang bekerja hanya menamatkan sekolah dasar atau bahkan lebih rendah. Akan tetapi, persentase tersebut perlahan menurun menjadi 36,82 persen pada 2023. Selanjutnya, penduduk bekerja berpendidikan SMA atau sederajat merupakan persentase tertinggi kedua, yaitu 32,65 persen pada tahun 2023. Penduduk yang bekerja dengan lulusan SMP atau sederajat merupakan distribusi terbesar ketiga, yaitu sebesar 17,76 persen. Di sisi lain, persentase penduduk bekerja untuk lulusan Diploma I/II/III masih cukup rendah, hanya hanya mencakup 2,44 persen dan untuk lulusan Universitas/Perguruan Tinggi ada sebesar 10,32 persen. Meski demikian, proporsi penduduk bekerja berpendidikan universitas/perguruan tinggi mengalami peningkatan dibanding tahun 2020.

Pemerintah pun memfokuskan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, seperti langkah strategis yang tecantum dalam Rencana Tenaga Kerja Jangka Panjang (RTKJP): Menuju Indonesia Emas 2045. RTKJP menekankan prioritas utama, salah satunya pada peningkatan kualitas tenaga kerja (Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional 2023). Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan secara bertahap selama kurun waktu menuju menuju Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2023-2024 ini merupakan tahapan fondasi transformasi kebijakan. Adapun program yang akan dilaksanakan antara lain pelatihan tenaga kerja, pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja, kolaborasi dan koordinasi dalam link and match antara pelatihan dan pendidikan, peningkatan kualitas infrastruktur lembaga pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kecukupan dan kualitas sarana-prasarana pendidikan dan pelatihan.

Lapangan Usaha Penyerap Tenaga Kerja Terbesar

Struktur ketenagakerjaan di Indonesia dapat dikaji berdasarkan jenis dan lapangan pekerjaan yang terdaftar dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI 2015 menggolongkan seluruh aktivitas ekonomi menjadi 21 kategori dari A hingga U, dengan beberapa kategori digabung seperti M, N, serta R, S, U. Pengklasifikasian ini didasarkan pada jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau output tertentu. Keberagaman lapangan pekerjaan ini memerlukan analisis mendalam untuk menilai kemampuan daya serap tenaga kerja di berbagai sektor usaha.

Analisis ketenagakerjaan menurut lapangan pekerjaan membantu mengidentifikasi sektor usaha yang dominan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pengkategorian ini memudahkan pemerintah dan pembuat kebijakan dalam memantau pertumbuhan produktivitas setiap sektor. Dengan memahami distribusi tenaga kerja, dapat diketahui sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, memiliki eksistensi tinggi, dan memainkan peran penting dalam pasar kerja Indonesia.

Tabel 9.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Indonesia, 2020–2024

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun				
	2020 (Agt)	2021 (Agt)	2022 (Agt)	2023 (Agt)	2024 (Feb)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,76	28,33	28,61	28,21	28,64
B.Pertambangan dan Penggalian	1,05	1,10	1,13	1,19	1,20
C.Industri Pengolahan	13,61	14,27	14,17	13,83	13,28
D.Pengadaan Listrik dan Gas	0,24	0,22	0,23	0,23	0,25
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,38	0,43	0,38	0,35	0,40
F.Konstruksi	6,28	6,33	6,27	6,62	6,08
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,23	19,64	19,36	18,99	19,05
H.Transportasi dan Pergudangan	4,35	4,15	4,29	4,40	4,15
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,65	7,01	7,10	7,71	7,81
J.Informasi dan Komunikasi	0,73	0,76	0,75	0,71	0,87
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	1,21	1,22	1,20	1,17	1,15
L.Real Estate	0,31	0,27	0,33	0,34	0,34
M,N.Jasa Perusahaan	1,40	1,54	1,65	1,67	1,56
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,56	3,70	3,60	3,49	3,84
P.Jasa Pendidikan	4,69	4,95	4,81	4,95	5,11
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,56	1,68	1,65	1,58	1,76
R,S,T,U.Jasa lainnya	4,99	4,41	4,46	4,57	4,51

Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia

Menurut lapangan usaha, kategori A (pertanian, kehutanan, dan perikanan) mendominasi struktur tenaga kerja, diikuti oleh kategori G (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor) dan kategori C(industri pengolahan). Di Indonesia, pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja utama. Pada tahun 2023, lapangan usaha ini mampu menyerap 28,21 persen tenaga kerja. Dengan kata lain, dari 100 penduduk yang bekerja, 28 atau 29 orang diantaranya bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian, tenaga kerja yang terserap pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,99 persen dan pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 13,83 persen.

Meskipun pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah lapangan usaha penyerap tenaga kerja tertinggi, kontribusi terhadap perekonomian dari sektor ini bukanlah yang terbesar. Pada tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan hanya menyumbang 12,53 persen dari PDB Indonesia (www.bps.go.id). Lapangan usaha ini merupakan penyumbang ketiga terbesar, setelah sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak diikuti dengan capaian produktivitas yang tinggi pula.

Berdasarkan trennya, penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan. Tenaga kerja yang terserap pada lapangan usaha ini sebesar 29,76 persen pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 28,33 persen pada tahun 2021, kemudian sedikit meningkat menjadi 28,61 persen pada tahun 2022, dan kemudian menurun kembali menjadi 28,21 persen pada tahun 2023. Turunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ini kerap dikaitkan dengan adanya alih fungsi lahan ke nonpertanian. Selain itu, penurunan ini didorong oleh adanya transformasi ekonomi, termasuk peralihan dari pertanian, kehutanan, dan perikanan ke sektor lainnya. Namun, daya serap sektor usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami sedikit peningkatan pada Februari 2024, dengan persentase tenaga kerja yang terserap pada sektor ini sebesar 28,64 persen.

Selama tahun 2020-2023, penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat ada pada lapangan pekerjaan penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada tahun 2020, penduduk yang bekerja pada lapangan pekerjaan tersebut tercatat sebesar 6,65 persen. Kemudian, pada tahun 2023, penyerapan tenaga kerja pada penyediaan akomodasi dan makan minum naik sebesar 1,06 persen poin, menjadi 7,71 persen. Produk domestik bruto (PDB) lapangan usaha ini juga menguat, yaitu dengan laju pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 10,01 persen. Sementara itu, pengadaan listrik dan gas merupakan lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terendah. Selama tahun 2020-2023, tenaga kerja yang terserap pada lapangan usaha ini cukup stabil, yaitu berada antara 0,22-0,24 persen.

Upah Pekerja

Upah adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan, dan dapat berupa uang atau barang. Penentuan besaran upah penting dalam pasar tenaga kerja dan dipertimbangkan dari dua sisi, yaitu perusahaan dan tenaga kerja. Perusahaan mempertimbangkan produktivitas, penawaran, dan permintaan tenaga kerja, karena upah harus seimbang dengan kegiatan produksi. Dari sisi pekerja, upah harus mencukupi kebutuhan hidup dan kesejahteraan mereka. Kesesuaian upah mendorong pekerja bekerja lebih giat demi menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan, meski perusahaan harus mempertimbangkan upah sebagai komponen biaya produksi yang tinggi.

Tabel 9.6 Rata-rata UMP (ribu rupiah) dan Pertumbuhan Rata-Rata UMP (persen) di Indonesia, 2010–2024

Tahun (1)	Rata-rata UMP (ribu rupiah) (2)	Pertumbuhan Rata-rata UMP (%) (3)
2010	908,82	8,00
2011	988,83	8,80
2012	1088,90	10,12
2013	1296,91	19,10
2014	1584,39	22,17
2015	1790,34	13,00
2016	1967,57	9,90
2017	2074,15	5,42
2018	2268,87	9,39
2019	2455,66	8,23
2020	2672,37	8,82
2021	2687,72	0,57
2022	2725,50	1,41
2023	2923,31	7,26
2024	3113,36	6,50

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI, statdata.kemnaker.go.id (diolah)

Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Aturan ini juga mencakup upah minimum untuk provinsi-provinsi baru di Indonesia. Penetapan upah minimum ini didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Penyesuaian nilai upah minimum dihitung dengan menggunakan formula khusus yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu ini merujuk pada variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

Rata-rata UMP 2024 untuk 34 provinsi diperoleh sebesar 3,11 juta rupiah. Rata-rata UMP 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,50 persen. Pertumbuhan rata-rata UMP 2024 ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata UMP 2023 yang sebesar 7,26 persen. Akan tetapi, pertumbuhan rata-rata ini masih lebih tinggi dibandingkan masa pandemi Covid-19, yaitu sebesar 0,57 persen pada tahun 2021 dan 1,41 persen pada tahun 2022.

Dampak kebijakan pengupahan dapat terlihat dari rata-rata upah yang diterima oleh pekerja. Berdasarkan data Sakernas, rata-rata upah yang diterima pekerja di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, meski

sempat menurun pada tahun 2021. Pada tahun 2020, rata-rata upah pekerja tercatat sebesar Rp 2,45 juta dan meningkat menjadi Rp 2,89 juta pada tahun 2023. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2023, upah pekerja meningkat sebesar 17,71 persen dibandingkan tahun 2020. Kenaikan upah pekerja terjadi baik di perdesaan dan perkotaan. Kenaikan ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja jika sebanding dengan peningkatan biaya kebutuhan hidup yang pekerja harus penuhi. Kemudian pada Februari 2024, upah pekerja tercatat mengalami penurunan, menjadi Rp 2,76 juta.

Tabel 9.7 Distribusi Pekerja¹ Menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal (persen) di Indonesia, 2020–2024

Daerah Tempat Tinggal	Upah (Rp)				Rata-rata upah (Rp)
	<1.000.000	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 1.999.999	2.000.000 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tahun 2020 (Agt)					
Perkotaan	16,52	11,74	13,73	58,01	2.797.912
Perdesaan	30,78	15,21	15,95	38,06	1.841.889
Total	21,66	13,00	14,53	50,80	2.452.818
Tahun 2021 (Agt)					
Perkotaan	16,12	11,98	13,72	58,19	2.763.749
Perdesaan	29,32	15,44	15,83	39,40	1.860.717
Total	20,80	13,21	14,46	51,53	2.443.727
Tahun 2022 (Agt)					
Perkotaan	11,82	9,47	12,24	66,47	3.174.642
Perdesaan	24,20	14,94	15,85	45,01	1.978.012
Total	15,96	11,30	13,45	59,29	2.774.057
Tahun 2023 (Agt)					
Perkotaan	11,41	9,47	11,73	67,40	3.262.060
Perdesaan	21,68	13,44	14,43	50,45	2.135.312
Total	14,82	10,79	12,63	61,76	2.887.270
Tahun 2024 (Feb)					
Perkotaan	12,90	10,87	12,12	64,10	3.086.482
Perdesaan	22,32	14,60	14,57	48,51	2.095.777
Total	16,00	12,10	12,93	58,98	2.760.672

Catatan: ¹Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian

Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia (diolah)

Meski demikian, rata-rata upah yang diterima pekerja perdesaan selalu lebih rendah dari yang diterima pekerja perkotaan dari tahun ke tahun. Pada

tahun 2023, upah yang diterima pekerja di perdesaan hanya sebesar Rp 2,14 juta, sedangkan upah yang diterima pekerja di perkotaan mencapai Rp 3,26 juta. Kesenjangan upah antara pekerja di perdesaan dan perkotaan perlu diperhatikan karena dapat mendorong perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan demi upah yang lebih tinggi. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran di perkotaan serta mengurangi sumber daya manusia di perdesaan yang penting untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Di samping itu, kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan ini dapat menghasilkan pertumbuhan tidak seimbang dalam sektor ketenagakerjaan, memunculkan pekerjaan informal, dan meningkatkan jumlah pengangguran.

Kemudian, indikator distribusi pekerja menurut upah dapat menunjukkan persebaran pekerja berdasarkan upah yang diterimanya. Distribusi pekerja yang menerima upah rendah terus menurun, sedangkan distribusi pekerja yang menerima upah cukup tinggi terus meningkat. Sebagian pekerja telah menerima upah sebesar dua juta rupiah atau lebih. Persentasenya juga terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 50,80 persen (2020) menjadi 51,53 persen (2021), 59,29 persen (2022) dan terus meningkat hingga 61,76 persen (2023). Sementara itu, persentase pekerja dengan upah kurang dari satu juta rupiah menurun dari 21,66 persen (2020) menjadi 14,82 persen (2023). Hal ini mengindikasikan kesejahteraan pekerja yang mulai meningkat.

Peningkatan kesejahteraan juga terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan, dimana distribusi pekerja yang menerima upah dua juta rupiah atau lebih juga meningkat setiap tahunnya di kedua daerah tempat tinggal tersebut. Untuk daerah perkotaan, distribusi pekerja yang menerima upah dua juta rupiah atau lebih ada sebesar 57,12 persen (2017) menjadi 62,03 persen (2019). Untuk daerah perdesaan, distribusi pekerja yang menerima upah dua juta rupiah atau lebih ada sebesar 33,00 persen (2017) menjadi 40,82 persen (2019).

Peningkatan kesejahteraan pekerja juga terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan, dimana distribusi pekerja yang menerima upah dua juta rupiah atau lebih juga meningkat setiap tahunnya di kedua daerah tempat tinggal tersebut. Pekerja di perkotaan yang menerima upah Rp 2 Juta atau lebih meningkat dari 58,01 persen (2020) menjadi 67,40 persen (2023), sedangkan pekerja di perdesaan yang menerima upah dua juta rupiah atau lebih meningkat dari 38,06 persen (2020) menjadi 50,45 persen (2023). Akan tetapi, masih terdapat 21,68 persen pekerja yang menerima upah kurang dari satu juta rupiah setiap bulannya.

Selain berdasarkan daerah tempat tinggal, analisis upah juga dapat dilakukan berdasarkan jenis kelamin. Besaran rata-rata upah yang diterima pekerja baik laki-laki maupun perempuan juga cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2020-2023. Rata-rata upah pekerja laki-laki sebesar 2,62 juta rupiah (2020) dan meningkat menjadi 3,12 juta rupiah (2023). Di sisi lain, rata-rata upah pekerja perempuan meningkat dari 2,11 juta rupiah (2020)

menjadi 2,41 juta rupiah (2023). Dengan kata lain, rata-rata laju pertumbuhan upah setiap tahunnya adalah sebesar 5,99 persen untuk pekerja laki-laki dan 4,49 persen untuk pekerja perempuan.

Tabel 9.8 Distribusi Pekerja¹ Menurut Upah dan Jenis Kelamin (persen) di Indonesia, 2020–2024

Daerah Tempat Tinggal	Upah (Rp)				Rata-rata upah (Rp)
	<1.000.000	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 1.999.999	2.000.000 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tahun 2020 (Agt)					
Laki-laki	15,62	12,73	15,65	56,00	2.620.832
Perempuan	33,93	13,54	12,26	40,26	2.111.992
Total	21,66	13,00	14,53	50,80	2.452.818
Tahun 2021 (Agt)					
Laki-laki	14,84	12,94	15,66	56,56	2.599.801
Perempuan	32,75	13,74	12,07	41,44	2.130.899
Total	20,80	13,21	14,46	51,53	2.443.727
Tahun 2022 (Agt)					
Laki-laki	9,89	10,14	14,07	65,89	2.979.139
Perempuan	28,50	13,69	12,16	45,65	2.350.551
Total	15,96	11,30	13,45	59,29	2.774.057
Tahun 2023 (Agt)					
Laki-laki	8,85	9,30	12,94	68,91	3.120.511
Perempuan	27,05	13,84	11,98	47,12	2.409.526
Total	14,82	10,79	12,63	61,76	2.887.270
Tahun 2024 (Feb)					
Laki-laki	10,20	10,35	13,11	66,34	2.974.063
Perempuan	27,49	15,56	12,57	44,38	2.337.467
Total	16,00	12,10	12,93	58,98	2.760.672

Catatan: ¹Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian

Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia (diolah)

Lambatnya pertumbuhan upah pekerja perempuan menyebabkan kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan cenderung semakin melebar. Kondisi ini ditunjukkan dari peningkatan rasio upah pekerja laki-laki terhadap upah pekerja perempuan dari 1,24 (2020) menjadi 1,30 (2023). Pada tahun 2023, rata-rata upah pekerja laki-laki sebesar Rp 3,12 juta, sedangkan rata-rata upah pekerja perempuan sebesar Rp 2,41 juta.

Berdasarkan distribusinya, sebagian besar pekerja baik laki-laki maupun perempuan menerima upah dua juta rupiah atau lebih. Persentase pekerja laki-laki yang menerima upah dua juta rupiah atau lebih ada sebesar 56,00 persen (2020) meningkat cukup signifikan menjadi 68,91 persen (2023). Sementara itu, persentase pekerja perempuan yang menerima upah dua juta rupiah atau lebih mengalami peningkatan dari 40,26 persen (2020) menjadi 47,12 persen (2023).

Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci penting dalam pembangunan nasional dan peningkatan daya saing, terutama di era industri 4.0. Fokus pemerintah adalah meningkatkan kualitas SDM untuk menjawab tantangan ini, sehingga mutu barang dan pertumbuhan industri dapat meningkat sesuai target. Kualitas SDM yang baik juga berhubungan dengan produktivitas tinggi mencerminkan efisiensi serta kontribusi tenaga kerja terhadap ekonomi. Oleh karena itu, produktivitas menjadi agenda prioritas pemerintah Indonesia.

Produktivitas tenaga kerja adalah jumlah output yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja per tahun. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia terus meningkat selama tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021, produktivitas tenaga kerja di Indonesia sebesar Rp129,54 juta per penduduk yang bekerjadan meningkat menjadi Rp149,39 juta per penduduk yang bekerja pada tahun 2023. Dengan kata lain, produktivitas tenaga kerja di Indonesia meningkat dengan laju tahunan sebesar 7,39 persen selama tahun 2021–2023. Peningkatan produktivitas ini menandakan semakin efisienya dalam menghasilkan output berupa barang atau jasa. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas, kompetensi, dan daya saing tenaga kerja Indonesia semakin membaik dan dapat mendukung pembangunan Indonesia.

Tabel 9.9 Produktivitas Menurut Provinsi (juta rupiah per pekerja) di Indonesia, 2021–2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	78,34	87,86	92,80
Sumatera Utara	122,22	132,71	139,21
Sumatera Barat	98,05	106,16	109,94
Riau	266,44	312,92	341,89
Jambi	132,98	153,92	162,98
Sumatera Selatan	118,10	137,55	142,99
Bengkulu	77,91	86,86	90,27
Lampung	86,64	94,38	95,55

Lanjutan Tabel 9.9

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Kep. Bangka Belitung	122,55	130,37	136,88
Kepulauan Riau	253,47	267,17	325,59
DKI Jakarta	614,87	654,05	678,72
Jawa Barat	98,80	103,31	111,69
Jawa Tengah	79,60	84,80	84,89
DI Yogyakarta	67,05	73,94	84,45
Jawa Timur	116,69	126,37	130,09
Banten	116,85	125,78	147,58
Bali	90,29	94,11	104,80
Nusa Tenggara Barat	52,73	57,73	57,52
Nusa Tenggara Timur	39,48	40,72	44,37
Kalimantan Barat	93,18	100,02	98,90
Kalimantan Tengah	126,00	148,60	154,72
Kalimantan Selatan	93,81	120,08	129,49
Kalimantan Timur	404,93	527,47	456,65
Kalimantan Utara	329,82	391,75	395,62
Sulawesi Utara	126,57	135,38	137,47
Sulawesi Tengah	162,18	204,01	224,37
Sulawesi Selatan	130,96	139,00	145,31
Sulawesi Tenggara	105,10	118,87	130,35
Gorontalo	75,81	77,44	81,35
Sulawesi Barat	73,65	73,89	78,80
Maluku	61,06	66,83	68,55
Maluku Utara	92,28	121,21	134,15
Papua Barat	175,90	187,19	174,15
Papua	124,74	135,69	117,56
Indonesia	129,54	144,78	149,39

Catatan: 1. Data 2022 merupakan angka sementara

2. Data 2023 merupakan angka sangat sementara

3. Data Papua Barat tahun 2023 merupakan gabungan dari provinsi papua barat dan papua barat daya

4. Data Papua tahun 2023 merupakan gabungan dari provinsi papua, papua selatan, papua tengah, dan papua pegunungan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (diolah)

Jika dianalisis menurut provinsi, hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan produktivitas dari tahun 2021 ke tahun 2023. Namun, terdapat dua provinsi yang mengalami penurunan produktivitas yaitu Provinsi Papua Barat dengan produktivitas tenaga kerja dari Rp175,90 juta per penduduk yang bekerja (2021) menjadi Rp174,15 juta per penduduk yang bekerja (2023). Selama tahun 2021-2023, produktivitas tenaga kerja di Papua Barat memiliki laju pertumbuhan menurun sebesar 0,50 persen setiap tahunnya. Kemudian, penurunan produktivitas tenaga kerja juga terjadi di Provinsi Papua, yaitu dari Rp124,74 juta per penduduk yang bekerja (2021) menjadi Rp117,56 juta per penduduk yang bekerja (2023). Dengan kata lain, produktivitas tenaga kerja di Papua Barat memiliki laju pertumbuhan menurun sebesar 2,92 persen per tahun selama 2021-2023.

Tantangan permasalahan produktivitas yang berkaitan dengan kualitas tenaga kerja ini dihadapi dengan berbagai kebijakan oleh Provinsi Papua Barat Daya, sebagai provinsi baru, pemekaran dari Papua Barat. Pemerintah Papua Barat Daya membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV), yang merupakan wadah bagi dunia pendidikan, dunia pelatihan, dunia usaha, dan dunia ketenagakerjaan (*tribunsorong.com* 2023). TKDV ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan, termasuk kesesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, rendahnya keterampilan calon tenaga kerja, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan *supply and demand* tenaga kerja, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja guna meningkatkan daya saing.

Selanjutnya, provinsi dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi tahun 2023 adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 678,72 juta per tenaga kerja. Provinsi DKI Jakarta selalu menempati posisi dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi dari tahun ke tahun. Produktivitas tenaga kerja di DKI Jakarta juga terus meningkat selama tahun 2021-2023, yaitu sebesar 5,06 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan sebagai ibukota negara, tenaga kerja di DKI Jakarta memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi, sehingga mereka mampu memproduksi barang dan jasa dengan efektif dan optimal.

Sementara itu, nilai produktivitas tenaga kerja terendah selalu ditempati oleh Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, produktivitas tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur hanya sebesar Rp 44,37 juta per penduduk yang bekerja. Meski demikian, angka produktivitas tersebut telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 produktivitas tenaga kerja di NTT hanya mencapai Rp 39,48 juta per penduduk yang bekerja. Selama tahun 2021-2023, laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di NTT sebesar 8,95 persen setiap tahunnya.

Selain berdasarkan provinsi, produktivitas tenaga kerja juga dapat dilihat berdasarkan lapangan usaha. Pada tahun 2021, lapangan usaha real estate menempati posisi sebagai lapangan usaha dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi, yaitu sebesar Rp 1,32 miliar per tenaga kerja. Akan tetapi,

selama tahun 2021-2023, laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pada lapangan ini bernilai negatif dan mencapai dua digit, yaitu sebesar 10,69 persen per tahun. Hal ini berarti produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha tersebut menurun sebesar 10,69 persen setiap tahunnya.

Tabel 9.10 Produktivitas Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah per pekerja) di Indonesia, 2021–2023

Lapangan Usaha (1)	2021 (2)	2022 (3)	2023 (4)
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	60,72	62,76	66,35
B.Pertambangan dan Penggalian	1.055,58	1.564,15	1.322,13
C.Industri Pengolahan	174,75	187,34	201,62
D.Pengadaan Listrik dan Gas	667,96	657,85	676,48
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,37	24,53	26,94
F.Konstruksi	213,62	225,55	224,00
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	85,48	96,08	101,78
H.Transportasi dan Pergudangan	132,19	169,42	200,28
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	44,90	49,12	48,79
J. Informasi dan Komunikasi	750,15	805,42	892,68
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	460,75	497,63	530,90
L.Real Estate	1.315,40	1.085,12	1.049,21
M,N.Jasa Perusahaan	149,27	152,58	164,32
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	121,01	124,06	126,31
P.Jasa Pendidikan	85,91	87,00	84,32
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,41	105,71	113,99
R,S,T,U.Jasa lainnya	54,07	58,70	63,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (diolah)

Kemudian, lapangan usaha pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi pada tahun 2022 dan 2023. Pertumbuhan produktivitas pada lapangan usaha tersebut juga sangat cepat selama 2021-2023, yaitu 11,92 persen per tahun. Pada tahun 2021, produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian tercatat sebesar Rp 1,06 miliar rupiah per tenaga kerja dan meningkat mencapai Rp 1,32 miliar rupiah per tenaga kerja.

Sementara itu, selama tiga tahun terakhir, lapangan usaha dengan produktivitas tenaga kerja terendah tercatat pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Akan tetapi, pertumbuhan

produktivitas pada lapangan usaha ini cukup cepat dibandingkan dengan lapangan usaha yang lain, yaitu mencapai 12,28 persen per tahun selama 2021-2023. Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang meningkat dari Rp 21,37 juta per tenaga kerja (2021) menjadi Rp 26,94 juta per tenaga kerja (2023).

Dominasi Pekerja Informal di Pasar Tenaga Kerja

Pertumbuhan penduduk Indonesia meningkatkan pasokan tenaga kerja yang memerlukan penciptaan lapangan kerja baru. Ketidakseimbangan kesempatan kerja dapat meningkatkan pengangguran dan pekerjaan informal. Jika lapangan kerja formal tumbuh lambat, pekerjaan sektor informal akan meningkat. Tenaga kerja informal yang digunakan dalam analisis ini mencakup mereka yang berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar.

Tabel 9.11 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin di Indonesia, 2020–2024

Jenis Kelamin (1)	Formal (2)	Informal (3)
Tahun 2020 (Agt)		
Laki-Laki	33.206.582	44.548.444
Perempuan	17.565.267	33.133.891
Laki-Laki+Perempuan	50.771.849	77.682.335
Tahun 2021 (Agt)		
Laki-Laki	34.395.107	44.868.207
Perempuan	18.746.971	33.040.238
Laki-Laki+Perempuan	53.142.078	77.908.445
Tahun 2022 (Agt)		
Laki-Laki	36.297.376	46.256.584
Perempuan	18.759.206	33.983.547
Laki-Laki+Perempuan	55.056.582	80.240.131
Tahun 2023 (Agt)		
Laki-Laki	37.662.678	47.573.895
Perempuan	19.522.837	35.092.967
Laki-Laki+Perempuan	57.185.515	82.666.862
Tahun 2024 (Feb)		
Laki-Laki	38.123.630	47.842.792
Perempuan	19.927.074	36.285.550
Laki-Laki+Perempuan	58.050.704	84.128.342

Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (diolah)

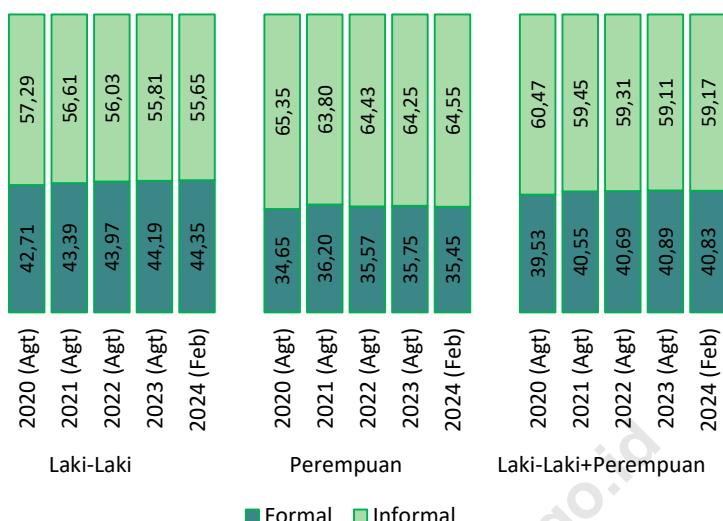
Di Indonesia, sektor informal masih mendominasi dalam menyerap angkatan kerja dibandingkan sektor formal. Selama tahun 2020-2023, jumlah tenaga kerja informal ini juga terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal meningkat dari 77,68 juta orang (2020) menjadi 82,67 juta orang (2023). Peningkatan juga terus terjadi hingga Februari 2024 yaitu sebesar 84,13 juta orang.

Meski demikian, jumlah tenaga kerja pada sektor formal juga terus meningkat dari 50,77 juta orang (2020) menjadi 57,19 juta orang (2023). Pertumbuhan lapangan kerja sektor formal yang cukup cepat menekan pertumbuhan lapangan kerja sektor informal. Hal ini ditunjukkan dengan persentase tenaga kerja informal terhadap total tenaga kerja yang mengalami penurunan secara perlahan. Pada tahun 2020, persentase tenaga kerja informal ada sebesar 60,47 persen kemudian menurun menjadi 59,11 persen pada tahun 2023. Penurunan distribusi tenaga kerja informal menandakan adanya perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja formal. Dengan adanya peningkatan jumlah lapangan kerja formal yang tersedia, pekerja di sektor informal memiliki kesempatan untuk beralih dan mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan ekonomi yang positif dan penurunan ketergantungan pada sektor informal, yang umumnya kurang stabil dan menawarkan jaminan kerja yang lebih rendah.

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor informal terjadi baik pada tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan. Jumlah tenaga kerja informal laki-laki meningkat dari 44,55 juta orang (2020) menjadi 47,57 juta orang (2023). Kemudian jumlah tenaga kerja informal perempuan meningkat dari 33,13 juta orang (2020) menjadi 35,09 juta orang (2023). Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah tenaga kerja formal ada sebanyak 37,66 juta orang untuk laki-laki dan 19,52 juta orang untuk perempuan.

Meski jumlah tenaga kerja informal terus meningkat, Gambar 9.1 menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja di sektor informal ini perlahan menurun, dari 60,47 persen (2020) menjadi 59,11 persen (2023). Penurunan persentase tenaga kerja informal juga terjadi pada kedua jenis kelamin. Persentase tenaga kerja laki-laki pada sektor informal menurun dari 57,29 persen (2020) menjadi 55,81 persen (2023). Untuk perempuan, tenaga kerja di sektor informal mengalami penurunan dari 65,35 persen (2020) menjadi 64,25 persen (2023).

Kemudian, persentase tenaga kerja perempuan yang berada pada sektor informal cukup tinggi. Hal ini menandakan perempuan lebih cenderung untuk terjun ke dalam lapangan pekerjaan informal. Pada tahun 2023, persentase tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor informal ada sebesar 64,25 persen, sedangkan persentase tenaga kerja laki-laki yang bekerja di sektor informal ada sebesar 55,81 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (diolah)

Gambar 9.1 Perbandingan Pekerja Sektor Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 2020–2024

Kecenderungan perempuan bekerja di sektor informal ini dapat dikaitkan dengan tanggung jawab ganda yang harus dihadapi. Selain bekerja, perempuan juga harus mengurus rumah tangga, sehingga perempuan cenderung memilih jam kerja yang fleksibel. Pengembangan ekonomi digital menjadi sangat penting untuk membuka akses dan peluang bagi pekerja di sektor informal, terutama perempuan, agar dapat lebih mengembangkan potensinya terutama di dunia usaha (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024). Menurut KemenPPPA, perempuan memiliki dan mengelola 64,5 persen dari total usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024). Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, partisipasi, dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, dunia usaha, lembaga masyarakat, mitra pembangunan, dan pihak terkait lainnya. Hal ini penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam bidang tenaga kerja, khususnya dengan mendorong pekerja perempuan di sektor informal untuk terlibat dalam era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. "IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi China pada 2024 Jadi 5 Persen". Pembaruan terakhir 17 Juli 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4202505/imf-naikkan-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-china- pada-2024-jadi-5-persen>.
- Arestis, Philip, Michelle Baddeley, dan John S.L McCombie. 2007. *Economic Growth: New Directions in Theory and Policy*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
- Asian Development Bank. April 2024. *Asian Development Outlook*. Metro Manila: Asian Development Bank.
- Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. n.d. "Statistik QRIS". Pembaruan terakhir 2021. <https://www.aspi-indonesia.or.id/statistik-qris/>
- Badan Kebijakan Fiskal. "Neraca Perdagangan Indonesia Sepanjang 2023 Tetap Surplus di Tengah Peningkatan Risiko Ekonomi Global". Pembaruan terakhir 16 Januari 2024. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/554>.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2024. *Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal Edisi II 2024*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Badan Pangan Nasional. "Soal Importasi Beras 2023, Begini Penjelasan Badan Pangan Nasional". Pembaruan terakhir 16 Januari 2024. <https://badanpangan.go.id/blog/post/soal-importasi-beras-2023-begini-penjelasan- badan-pangan-nasional>.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2024. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2023." Berita Resmi Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/1998/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2023-tumbuh-5-03-persen--y-on-y-.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Eksport Indonesia Menurut Kode SITC, 2022- 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2023 Buku III*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. 2024. *Laporan Perekonomian Indonesia 2023: Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2024. "Prompt Manufacturing Index (PMI) Triwulan I 2024." Pembaruan terakhir 22 April 2024. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/PMI-Triwulan-I-2024.aspx>.

Bank Indonesia. "Siaran Pers: BI-Rate Tetap 6,25%: Memperkuat Stabilitas Dan Menjaga Pertumbuhan Dari Dampak Rambatan Global." Pembaruan Terakhir 31 Juli. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2614424.aspx#:~:text=2%3A00%20PM-,BI%2DRate%20Tetap%206%2C25%25%3A%20Memperkuat%20Stabilitas%20dan%20Menjaga,Pertumbuhan%20dari%20Dampak%20Rambatan%20Global&text=Rapat%20Dewan%20Gubernur%20\(RDG\)%20Bank, Facility%20sebesar%207%2C00%25](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2614424.aspx#:~:text=2%3A00%20PM-,BI%2DRate%20Tetap%206%2C25%25%3A%20Memperkuat%20Stabilitas%20dan%20Menjaga,Pertumbuhan%20dari%20Dampak%20Rambatan%20Global&text=Rapat%20Dewan%20Gubernur%20(RDG)%20Bank, Facility%20sebesar%207%2C00%25).

Berita.gorontaloprov.go.id. 2024. "Menparekraf; Pengembangan KEK Pariwisata Strategi Gaet Investor Masuk Gorontalo." Pembaruan terakhir 28 Februari 2024. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/02/28/menparekraf-pengembangan-kek-pariwisata-strategi-gaet-investor-masuk-gorontalo/>

berita.sulbarprov.go.id. 2024. "Disnaker Paparkan Capaian Kinerja Selama Tahun 2023 Komitmen Tekan Angka Pengangguran dan Kemiskinan Ekstrem." Pembaruan Terakhir 5 Januari 2024. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/4946-disnaker-paparkan-capaian-kinerja-selama-tahun-2023-komitmen-tekan-angka-pengangguran-dan-kemiskinan-ekstrem>.

BPS. 2024. *Indikator Ekonomi Desember 2023*. Jakarta: BPS.

BPS. 2024. *Indikator Ekonomi Februari 2024*. Jakarta: BPS.

BPS. 2024. *Indikator Ekonomi Januari 2024*. Jakarta: BPS.

BPS. 2024. *Indikator Ekonomi Maret 2024*. Jakarta: BPS.

BPS. 2024. *Indikator Ekonomi Juni 2024*. Jakarta: BPS.

CNBC Indonesia. "Ekspor Minyak Sawit Turun Terus, Ternyata Ini Penyebabnya". Pembaruan terakhir 2 Februari 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240202131343-4-511161/ekspor-minyak-sawit- turun-terus-ternyata-ini-penyebabnya>.

CNBC Indonesia. "Nasib Kopi Indonesia: Primadona Dunia yang Tengah Terancam". Pembaruan terakhir 25 Agustus 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240822113220-128-565458/nasib-kopi-indonesia-primadona-dunia-yang-tengah-terancam#:~:text=Pada%202023%2C%20volume%20ekspor%20kopi,sekitar%20Ep%2014%2C19%20triliun>.

CNBC Indonesia. "Raksasa Ekonomi Bertumbangan, RI Aman?" Pembaruan terakhir 19 Februari 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240219065050-128-515495/raksasa-ekonomi-bertumbangan-ri- aman>.

CNBC Indonesia. 2023. "Jokowi Pamer Industri Hijau 30.000 Ha RI di Depan Para Bos AS". Pembaruan terakhir 17 November 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231117111940-4-489814/jokowi-pamer-industri-hijau-30000-ha-ri-di-depan-para-bos-as>.

CNBC Indonesia. 2023. "Masih Ada Jutaan Pengangguran di RI, Begini Solusi Jokowi." Pembaruan terakhir 11 Juli 2023. <https://www.cnbcindonesia.com>.

com/news/20230710221708-4-453025/masih-ada-jutaan-pengangguran-di-ri-begini-solusi-jokowi.

CNBC Indonesia. 2024. "Riset Terbaru Ungkap 8,5 Juta Kelas Menengah RI Turun 'Kasta'." Pembaruan terakhir 8 Agustus 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240808101429-4-561322/riset-terbaru-ungkap-85-juta-kelas-menengah-ri-turun-kasta>.

CNN Indonesia. 2022. "Menengok Jejak Harga Batu Bara yang Berkilau Sepanjang 2022." Pembaruan terakhir 28 Desember 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221227143646-85-892674/menengok-jejak-harga-batu-bara-yang-berkilau-sepanjang-2022>.

Dian Cahya Ningrum. 2024. *Capaian Investasi 2023 Dan Tantangan 2024*. Jakarta: DPR RI

Ekonomi Bisnis. "Iimpor Barang Modal 2023 Naik 7,78%, Produsen Logam Tunggu Berkah". Pembaruan terakhir 22 Januari 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240122/257/1734266/impor-barang-modal-2023-naik-778-produsen-logam-tunggu-berkah>.

Ekonomi Bisnis. "Surplus Neraca Dagang Susut, Target Kinerja 2024 Sulit Dicapai?". Pembaruan terakhir 18 Juli 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240718/12/1783258/surplus-neraca-dagang-susut-target-kinerja-2024-sulit-dicapai>.

FIKI. "Pemerintah Siapkan Solusi Selamatkan Industri Kimia Dasar". Pembaruan terakhir 1 Agustus 2023. <https://fiki.id/2023/08/01/pemerintah-siapkan-solusi-selamatkan-industri-kimia-dasar/>.

Finance.detik.com. 2024. "Potensi Energi Terbarukan RI Gede, tapi Baru 1% yang Dimanfaatkan." Pembaruan terakhir 5 Maret 2024. <https://finance.detik.com/energi/d-7225851/potensi-energi-terbarukan-ri-geude-tapi-baru-1-yang-dimanfaatkan>.

Hidayati, Inayah. 2021. *Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 7 (2): 212-221. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40517>.

IDX. 2024. *IDX Yearly Statistics 2024*. Jakarta: IDX

IDX. 2024. "Tambah Alternatif Acuan Investasi Sub-Sektor Bank, BEI dan PEFINDO Luncurkan Indeks IDX-PEFINDO Prime Bank." Pembaruan terakhir 4 Oktober 2023. <https://www.idx.co.id/berita/siaran-pers/2028>.

IDXIslamic 2023. *Kinerja Pasar Modal Syariah 2023*. Jakarta: IDXSyariah

IDXIslamic 2024. *Kinerja Pasar Modal Syariah 2024*. Jakarta: IDXSyariah

Imamatul Silfia. 2024. "Menkeu: Anggaran kesehatan terealisasi Rp183,2 triliun pada 2023." Pembaruan Terakhir 31 Juli. <https://www.antaranews.com/berita/3897318/menkeu-anggaran-kesehatan-terrealisasi-rp1832-triliun-pada-2023>.

International Monetary Fund. April 2024. *World Economic Outlook "Steady but Slow: Resilience amid Divergence"*. Washington DC: IMF.

- Kemendag.go.id. 2023. "Pertemuan Bilateral Indonesia-India". Pembaruan terakhir 14 Maret 2023. <https://www.kemendag.go.id/index.php/berita/foto/pertemuan-bilateral-indonesia-india-1678856351>.
- Kemenko Perekonomian. "Menko Airlangga Pimpin Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi". Pembaruan terakhir 27 September 2023. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5398/menko-airlangga-pimpin-satuan-tugas-peningkatan-ekspor-nasional-guna-mendorong-pertumbuhan-ekonomi>.
- Kemenko Perekonomian. "Neraca Perdagangan Indonesia Teruskan Tren Positif, Raih Surplus 49 Bulan Berturut-Turut". Pembaruan terakhir 19 Juni 2024. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5828/neraca-perdagangan-indonesia-teruskan-tren-positif-raih-surplus-49-bulan-berturut-turut>.
- Kemenko Perekonomian. "Realisasikan Peningkatan Investasi, Produk Inovatif Industri Pengolahan Mampu Tembus Pasar Ekspor". Pembaruan terakhir 12 Januari 2023. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4853/realisasikan-peningkatan-investasi-produk-inovatif-industri-pengolahan-mampu-tembus-pasar-ekspor>.
- Kementerian ESDM. "DMO Terpenuhi, Produksi Batubara Lampaui Target 2023". Pembaruan terakhir 15 Januari 2024. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/dmo-terpenuhi-produksi-batubara-lampaui-target-2023->.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2023. *Rencana Tenaga Kerja Jangka Panjang: Menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Kementerian Keuangan RI. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024*. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 870. <https://jdih-new.kemenkeu.go.id/api/download/2dc6875d-f590-4372-906cd28ba1dd7dc1/101~PMK.010~2021Per.pdf>.
- Kementerian Keuangan. 2022. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (Audited)*. Jakarta: Kemenkeu. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/lkpp/LKPP_audited_2021_.pdf
- Kementerian Keuangan. 2023a. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited)*. Jakarta: Kemenkeu. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/LKPP_2022.pdf
- Kementerian Keuangan. 2023b. *Laporan Tahunan 2022 Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kemenkeu. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202022%20-%20Bahasa.pdf>
- Kementerian Keuangan. 2023c. *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal*. Jakarta: Kementerian Keuangan. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/d8cecd11-302f-4717-bd9f-d62e47d94485>

- Kementerian Keuangan. 2024a. *APBN Kita Edisi Agustus 2024*. Jakarta: Kemenkeu. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/4193ab38-8cf8-496e-8e63-a1e0e45ce8ad/APBN-KiTa-Agustus-2024-V4.pdf?ext=.pdf>
- Kementerian Keuangan. 2024b. *Informasi APBN 2024*. Jakarta: Kemenkeu. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf?ext=.pdf>
- Kementerian Keuangan. 2024c. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 (Audited)*. Jakarta: Kemenkeu. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/LKPP/LKPP_Tahun_2023_audited_plus_opini.pdf.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2024. “*Perluas Aksesibilitas dan Kesempatan bagi Perempuan, Menko Airlangga Dukung Kesetaraan Gender di Berbagai Sektor.*” Pembaruan terakhir 30 Mei 2024. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5800/perluas-aksesibilitas-dan-kesempatan-bagi-perempuan-menko-airlangga-dukung-kesetaraan-gender-di-berbagai-sektor>.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “*5 Destinasi Super Prioritas*”. Pembaruan terakhir 21 Agustus 2024. <https://info5dsp.kemenparekraf.go.id/index.html#ecosystem> .
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2023. *Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023-2024*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “*Kemen PPPA dan MicroSave Consulting (MSC) Luncurkan Hasil Studi Pekerja Informal Perempuan dalam Ekonomi Digital.*” Pembaruan terakhir 31 Mei 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTlYOA==>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “*Kemen PPPA Dorong Kebijakan Inklusif Gender dalam Perdagangan di Forum PPWE APEC 2024.*” Pembaruan terakhir 15 Mei 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE4Mw==>.
- Kementerian Perdagangan RI. “*Eksport Nonmigas 2024 Ditarget Rp4.700 T, CPO Masih Jadi Tumpuan*”. Pembaruan terakhir 4 Januari 2024. [https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/ekspor-nonmigas- 2024-ditarget-rp4700-t-cpo-masih-jadi-tumpuan#:~:text=527%2FUS%24\).-%E2%80%9CPemerintah%20menargetkan%20pertumbuhan%20ekspor%20n- onmigas%202%2C5%25%E2%80%94,4%2C5%25%20pada%202024.](https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/ekspor-nonmigas- 2024-ditarget-rp4700-t-cpo-masih-jadi-tumpuan#:~:text=527%2FUS%24).-%E2%80%9CPemerintah%20menargetkan%20pertumbuhan%20ekspor%20n- onmigas%202%2C5%25%E2%80%94,4%2C5%25%20pada%202024.)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024*. Jakarta: Bappenas. [https://www.disnakkeswan.lampungprov.go.id/uploads/ringkasan_eksekutif_narasi_rpjmn_2020-2024_sidkab_\(preview\)_05jan2020.pdf](https://www.disnakkeswan.lampungprov.go.id/uploads/ringkasan_eksekutif_narasi_rpjmn_2020-2024_sidkab_(preview)_05jan2020.pdf).
- Kompas. “*China Melambat Lagi, Indonesia Bisa Terimbasi*”. Pembaruan terakhir 2 Mei 2023. <https://www.kompas.id/baca/english/2024/02/15/en>

deflasi-china-turut-picu-penurunan-kinerja-ekspor-ri.

Kompas. "Permintaan Global Surut, Ekspor Manufaktur Triwulan I-2024 Diprediksi Turun". Pembaruan terakhir 17 Maret 2024. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/03/17/kinerja-ekspor-industri-pengolahan-diprediksi-turun-lesu>

Kompas. "Sinyal Pelemahan Industri di Balik Turunnya Kinerja Impor". Pembaruan terakhir 19 September 2023. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/09/18/sinyal-pelemahan-industri-di-balik-turunnya-kinerja-impor>.

Kompas. n.d. "Destinasi Prioritas, Proyek Ambisius dengan Ragam Tantangan". Pembaruan terakhir 21 Agustus 2024. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/08/20/destinasi-prioritas-proyek-ambisius-dengan-ragam-tantangan?open_from=Section_Berita_Utama

Kompas. n.d. "Konfigurasi Baru Pertumbuhan Inflasi Dunia dan Nilai Tukar". Pembaruan terakhir 25 Juni 2024. https://www.kompas.id/baca/opini/2024/06/24/konfigurasi-baru-pertumbuhan-inflasi-dunia-dan-nilai-tukar?open_from=Analisis_Ekonomi_Page

Kompas. n.d. "Pembangunan Destinasi Super Perlu Dipercepat untuk Gapai Target". Pembaruan terakhir 1 Februari 2023. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/31/pembangunan-destinasi-super-perlu-dipercepat-untuk-gapai-target>

Kompas. n.d. "Pembangunan Destinasi Superprioritas Fokus pada Infrastruktur Dasar". Pembaruan terakhir 4 Mei 2023. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/03/pembangunan-destinasi-superprioritas-fokus-pada-infrastruktur-dasar>

Kompas. n.d. "Resesi Selektif AS dan Nilai Tukar". Pembaruan terakhir 23 Juli 2024. https://www.kompas.id/baca/opini/2024/07/23/resesi-selektif-as-dan-nilai-tukar?open_from=Analisis_Ekonomi_Page

Kompas. n.d. "Rupiah dan Arah Kebijakan Fiskal". Pembaruan terakhir 2 Juli 2024. https://www.kompas.id/baca/opini/2024/07/01/rupiah-dan-arah-kebijakan-fiskal?open_from=Analisis_Ekonomi_Page

Kompas. n.d. "Trilema Kenaikan Suku Bunga". Pembaruan terakhir 7 Mei 2024. https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/06/trilema-kenaikan-suku-bunga?open_from=Analisis_Ekonomi_Page

Kompas.com. 2023. "Banten Jadi Provinsi dengan Pengangguran Tertinggi, Lulusan SMK Penyumbang Terbanyak". Pembaruan terakhir 15 November 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/15/095416878/banten-jadi-provinsi-dengan-pengangguran-tertinggi-lulusan-smk-penyumbang>.

KSEI. 2024. *Data Statistik KSEI April 2024*. Jakarta: KSEI.

KSEI. 2024. *Data Statistik KSEI Juli 2024*. Jakarta: KSEI.

KSEI. 2024. *Data Statistik KSEI Juni 2024*. Jakarta: KSEI.

- KSEI. 2024. *Data Statistik KSEI Mei 2024*. Jakarta: KSEI.
- Malukuprov.go.id. 2023. "Maluku Raih Peringkat Terbaik Ketiga Anugerah Layanan Investasi 2023 Kategori Provinsi". Pembaruan terakhir 8 November 2023. <https://mediacenter.malukuprov.go.id/maluku-raih-peringkat-terbaik-ketiga-anugerah-layanan-investasi-2023-kategori-provinsi/>.
- Manurung, Monika Stevany, dan Aisyah Fitri Yuniasih. 2022. *Estimation of Inflation Threshold of Indonesia and Its Effect on Economic Growth Period 1981-2019*. In Proceedings of The International Conference on Data Science and Official Statistics, 2021:683–90. <https://doi.org/10.34123/icdsos.v2021i1.230>.
- Medcom.id. 2021. "Survei: Indonesia Masih Jadi Tujuan Investasi Favorit". Pembaruan terakhir 21 Maret 2021. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/5b2eB6dN-survei-indonesia-masih-jadi-tujuan-investasi-favorit>.
- Media Indonesia. "Dampak Resesi Jepang Tidak Hanya ke Ekspor Indonesia, Tapi juga Investasi". Pembaruan terakhir 16 Februari 2024. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/652085/dampak-resesi-jepang-tidak-hanya-ke-ekspor-indonesia-tapi-juga-investasi>.
- Metreau, Eric, dan Shwetha Grace Young, Kathryn Elizabeth Eapen. 2024. "World Bank country classifications by income level for 2024-2025". Pembaruan terakhir 1 Juli 2024. <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/world-bank-country-classifications-by-income-level-for-2024-2025#:~:text=The%20World%20Bank%20Group%20assigns,of%20the%20previous%20calendar%20year>.
- Metrotvnews.com. 2023. "Begini Jurus Sri Mulyani Pangkas Jumlah Pengangguran di Indonesia". Pembaruan terakhir 30 Mei 2023. <https://www.metrotvnews.com/read/NxGC5BOO-begini-jurus-sri-mulyani-pangkas-jumlah-pengangguran-di-indonesia>.
- Murjani, Ahmadi. 2019. *Short-Run and Long-Run Impact of Inflation, Unemployment, and Economic Growth Towards Poverty in Indonesia: ARDL Approach*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan 2 (1): 15–29. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.15-29>.
- Pemerintah Pusat Indonesia. 2023. *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*. Jakarta.
- Pemerintah Pusat Indonesia. 2023. *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024*. Jakarta.
- Pemerintah Pusat Indonesia. 2023. *Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Poppy Camenia Jamil. 2020. *Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Ekonomi KIAT. [https://doi.org/10.25299/kiat.2020.vol31\(2\).2769](https://doi.org/10.25299/kiat.2020.vol31(2).2769).

Ryansyah, Reni Ria Armayani Hasibuan, dan Naser Aqwa Daulay. 2023. *Pendekatan Index Williamson Dan Tipologi Klassen Dalam Menganalisis Ketimpangan Ekonomi Daerah Dala*. Management Studies and Entrepreneurship Journal 4 (5): 1285–95. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.3245>.

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. "Kawasan Ekonomi Khusus". Pembaruan terakhir 21 Agustus 2024. <https://kek.go.id/>

Siswanto, Dendi. 2024. "Tahun 2023, Rasio Kepatuhan SPT Tahunan Meningkat Menjadi 88%". Pembaharuan Terakhir 31 Juli. <https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-2023-rasio-kepatuhan-spt-tahunan-meningkat-menjadi-88>.

tribunsorong.com. 2023. "Tingkatkan Kualitas SDM Masyarakat, BPVP Sorong Wacanakan Sertifikasi Tenaga Perhotelan". Pembaruan terakhir 14 November 2023. <https://sorong.tribunnews.com/amp/2023/11/14/tingkatkan-kualitas-sdm-masyarakat-bpvp-sorong-wacanakan-sertifikasi-tenaga-perhotelan>.

Widianti, Meida, Ade Budi Setiawan, dan Didi. 2024. *Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bogor Dengan Pendekatan Tipologi Klassen*. Jurnal Akuntansi Kompetif 7 (2). <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v7i2.1676>.

Lampiran 1 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2021–2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	7.904,7	4.424,2	8.883,3
Sumatera Utara	18.484,5	22.789,2	21.574,0
Sumatera Barat	4.183,7	2.559,8	4.488,2
Riau	24.997,8	43.062,0	48.243,3
Jambi	6.204,2	8.882,7	8.939,0
Sumatera Selatan	16.266,9	23.526,0	25.602,4
Bengkulu	4.923,5	6.957,3	7.218,7
Lampung	10.513,2	5.809,2	7.625,8
Kep. Bangka Belitung	3.677,4	6.309,0	7.961,4
Kep. Riau	9.768,7	4.817,4	8.856,6
Dki Jakarta	54.708,2	89.223,6	95.202,1
Jawa Barat	59.948,5	80.808,3	88.012,9
Jawa Tengah	31.311,2	24.992,3	32.987,2
Di Yogyakarta	2.761,3	2.275,0	5.015,5
Jawa Timur	52.552,2	65.355,9	74.937,4
Banten	25.989,5	31.283,9	37.971,7
Bali	6.355,2	6.002,1	6.950,8
Nusa Tenggara Barat	9.090,5	11.031,5	30.766,2
Nusa Tenggara Timur	3.742,6	3.459,3	3.407,2
Kalimantan Barat	10.773,4	9.382,9	14.892,0
Kalimantan Tengah	6.359,8	6.556,8	8.779,5
Kalimantan Selatan	11.003,9	12.310,4	14.909,4
Kalimantan Timur	30.297,4	39.595,6	52.171,7
Kalimantan Utara	3.792,5	7.526,4	8.199,1
Sulawesi Utara	3.480,0	5.042,1	7.698,2
Sulawesi Tengah	3.012,3	3.758,6	4.772,5
Sulawesi Selatan	12.075,4	7.528,0	11.468,3
Sulawesi Tenggara	4.334,2	7.596,0	7.734,6
Gorontalo	1.004,3	1.113,5	3.960,1
Sulawesi Barat	395,3	1.313,3	2.011,1
Maluku	2.939,7	611,0	1.904,5
Maluku Utara	2.665,3	3.414,9	6.901,0

Lanjutan Lampiran 1

Provinsi	2021 (1)	2022 (2)	2023 (3)
Papua Barat	635,6	2.139,1	1.261,9
Papua Barat Daya	–	–	1.708,7
Papua	910,8	1.311,8	1.174,1
Papua Selatan	–	–	152,5
Papua Tengah	–	–	458,8
Papua Pegunungan	–	–	121,8
Indonesia	447.063,6	552.769,0	674.923,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Lampiran 2 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Provinsi (miliar rupiah), Triwulan I–Triwulan II 2024

Provinsi	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024
(1)	(2)	(3)
Aceh	2.123,4	2.277,8
Sumatera Utara	6.368,8	4.197,8
Sumatera Barat	1.535,1	1.175,6
Riau	18.553,8	21.792,1
Jambi	1.754,1	2.136,7
Sumatera Selatan	10.310,6	7.818,5
Bengkulu	1.124,1	1.629,4
Lampung	1.992,0	2.397,5
Kep. Bangka Belitung	3.059,2	4.162,6
Kep. Riau	2.054,8	2.200,3
Dki Jakarta	35.280,8	34.053,8
Jawa Barat	23.569,0	25.612,9
Jawa Tengah	9.313,5	8.811,0
Di Yogyakarta	753,3	822,2
Jawa Timur	20.069,0	24.062,9
Banten	10.216,9	12.745,9
Bali	4.985,2	2.359,4
Nusa Tenggara Barat	6.349,0	15.248,5
Nusa Tenggara Timur	529,5	516,9
Kalimantan Barat	3.651,4	3.397,7
Kalimantan Tengah	2.880,6	2.867,8
Kalimantan Selatan	5.401,9	3.921,3
Kalimantan Timur	11.926,6	12.475,3
Kalimantan Utara	3.008,5	3.721,7
Sulawesi Utara	1.195,9	1.766,3
Sulawesi Tengah	887,1	1.069,9
Sulawesi Selatan	1.757,2	1.954,0
Sulawesi Tenggara	1.125,2	933,7
Gorontalo	614,9	1.261,5
Sulawesi Barat	1.121,9	639,9
Maluku	707,3	276,2
Maluku Utara	1.774,3	1.939,3

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi (1)	Triwulan I 2024 (2)	Triwulan II 2024 (3)
Papua Barat	266,4	276,1
Papua Barat Daya	471,2	253,7
Papua	155,8	152,4
Papua Selatan	34,7	50,5
Papua Tengah	171,1	77,8
Papua Pegunungan	15,6	31,2
Indonesia	197.109,4	211.088,2

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Lampiran 3 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2021–2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	203,3	127,6	248,6
Sumatera Utara	580,4	1.316,1	1.181,3
Sumatera Barat	67,0	95,6	120,7
Riau	1.921,4	2.748,7	2.042,3
Jambi	50,9	39,2	45,1
Sumatera Selatan	1.259,7	1.226,3	1.478,6
Bengkulu	23,7	52,2	76,1
Lampung	173,8	247,8	220,6
Kep. Bangka Belitung	44,7	129,7	72,5
Kep. Riau	1.043,7	934,0	764,1
Dki Jakarta	3.330,6	3.744,1	4.830,0
Jawa Barat	5.217,7	6.534,5	8.283,7
Jawa Tengah	1.465,9	2.362,0	1.563,7
Di Yogyakarta	21,8	113,9	46,0
Jawa Timur	1.849,2	3.134,0	4.741,0
Banten	2.190,0	3.410,7	4.451,6
Bali	452,0	449,5	808,5
Nusa Tenggara Barat	244,2	704,6	468,4
Nusa Tenggara Timur	79,0	73,3	124,3
Kalimantan Barat	463,4	745,5	490,5
Kalimantan Tengah	162,5	548,3	697,6
Kalimantan Selatan	117,2	208,1	327,9
Kalimantan Timur	745,2	1.266,2	1.332,7
Kalimantan Utara	133,5	430,5	1.272,1
Sulawesi Utara	169,1	105,1	203,7
Sulawesi Tengah	2.718,1	7.486,0	7.244,1
Sulawesi Selatan	310,0	469,0	336,7
Sulawesi Tenggara	1.616,5	877,9	448,3
Gorontalo	78,0	102,9	33,8
Sulawesi Barat	5,9	28,3	24,3
Maluku	13,3	73,4	106,3
Maluku Utara	2.819,9	4.487,5	4.998,2

Lanjutan Lampiran 3

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Papua Barat	32,5	71,8	28,8
Papua Barat Daya	–	–	93,0
Papua	1.489,1	1.260,5	8,3
Papua Selatan	–	–	86,3
Papua Tengah	–	–	968,0
Papua Pegunungan	–	–	~0
Indonesia	31.093,1	45.605,0	50.267,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Lampiran 4 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Provinsi (miliar rupiah), Triwulan I-Triwulan II 2024

Provinsi	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024
(1)	(2)	(3)
Aceh	15,0	8,6
Sumatera Utara	251,0	375,6
Sumatera Barat	20,2	16,6
Riau	449,1	403,0
Jambi	45,8	10,1
Sumatera Selatan	255,5	350,0
Bengkulu	5,6	9,6
Lampung	49,4	27,7
Kep. Bangka Belitung	12,6	13,2
Kep. Riau	548,6	253,4
Dki Jakarta	1.540,1	1.865,9
Jawa Barat	2.738,9	2.537,1
Jawa Tengah	390,3	612,7
Di Yogyakarta	6,8	9,1
Jawa Timur	1.075,1	765,9
Banten	1.005,2	1.347,4
Bali	499,6	210,6
Nusa Tenggara Barat	163,9	11,2
Nusa Tenggara Timur	29,8	19,9
Kalimantan Barat	127,3	139,7
Kalimantan Tengah	85,3	130,8
Kalimantan Selatan	109,2	81,3
Kalimantan Timur	320,5	268,5
Kalimantan Utara	316,6	470,9
Sulawesi Utara	41,3	22,4
Sulawesi Tengah	1.742,1	2.114,8
Sulawesi Selatan	50,0	102,0
Sulawesi Tenggara	103,3	91,5
Gorontalo	7,2	3,0
Sulawesi Barat	0,6	0,3
Maluku	63,8	1,2
Maluku Utara	1.025,4	1.792,9

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi (1)	Triwulan I 2024 (2)	Triwulan II 2024 (3)
Papua Barat	77,6	137,6
Papua Barat Daya	13,3	27,8
Papua	5,2	0,5
Papua Selatan	26,5	30,7
Papua Tengah	411,3	224,5
Papua Pegunungan	—	—
Indonesia	13.629,1	14.488,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

ST2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax: (021) 3857046

Email: bpsq@bps.go.id Homepage: <http://www.bps.go.id>

ISSN 1858-0963

